



**PEMERINTAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

# LAPORAN AKHIR

**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**

# KLHS RPJPD KOTA BALIKPAPAN

**TAHUN 2025 - 2045**

**TAHUN ANGGARAN 2023**





# KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir KLHS RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2045 dengan baik.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 (ayat 1) Undang – Undang RI nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dalam proses penyusunannya, seluruh konten muatan telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Akhir kata, kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta didalam Penyusunan Laporan Akhir KLHS RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2045 dari awal hingga akhir, semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan. Aamiin

Oktober 2023

Tim Penyusun





# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 LATAR BELAKANG.....	1-2
1.2 DASAR HUKUM .....	1-3
1.3 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN.....	1-4
1.4 RUANG LINGKUP .....	1-5
1.5 TAHAPAN PENYUSUNAN KLHS.....	1-5
1.6 SISTEMATIKA PELAPORAN.....	1-8
<b>BAB 2 DASAR TEORI</b>	
2.1 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) .....	2-2
2.1.1 Dasar Hukum KLHS .....	2-2
2.1.2 Pelaksanaan KLHS.....	2-3
2.1.3 Prinsip Penyelenggaraan KLHS .....	2-3
2.1.4 Mekanisme Penyelenggaraan KLHS.....	2-3
2.1.5 Muatan Analisis dalam KLHS RPJMD .....	2-5
2.2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) .....	2-6
2.2.1 Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	2-7





2.2.2	Tata Cara Penyusunan RPJPD.....	2-7
2.2.3	Keterhubungan Antar Dokumen.....	2-8
2.3	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB).....	2-8
2.4	EKOREGION DAN JASA LINGKUNGAN .....	2-11
2.4.1	Ekoregion .....	2-11
2.4.2	Jasa Lingkungan .....	2-12
2.5	SEJARAH KOTA BALIKPAPAN .....	2-14

### **BAB 3 KONDISI UMUM KOTA BALIKPAPAN**

3.1	GEOGRAFIS KOTA BALIKPAPAN.....	3-2
3.1.1	Administrasi Kota Balikpapan.....	3-2
3.1.2	Kondisi Fisik Lingkungan Kota Balikpapan .....	3-4
3.1.2.1	Topografi dan Kemiringan Lereng.....	3-4
3.1.2.2	Jenis Tanah .....	3-9
3.1.2.3	Geomorfologi.....	3-13
3.1.2.4	Geologi.....	3-13
3.1.2.5	Kondisi Hidrologi dan Sumber Air Baku.....	3-17
3.1.2.6	Klimatologi .....	3-27
3.1.2.7	Rawan Bencana .....	3-28
3.1.2.8	Kondisi Fisik Pantai.....	3-30
3.1.2.9	Penggunaan Lahan / Tutupan Lahan .....	3-32
3.1.2.10	Kondisi Sosial dan Kependudukan .....	3-37
3.2	KONDISI LINGKUNGAN HIDUP.....	3-39
3.2.1	Wilayah Fungsional (Batas Ekologis) .....	3-39
3.2.2	Kondisi Ekoregion di Kota Balikpapan.....	3-42
3.2.3	Kapasitas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup .....	3-45
3.2.4	Kinerja Layanan Jasa Lingkungan.....	3-50
3.2.5	Perkiraan Mengenai Dampak Resiko Lingkungan Hidup.....	3-54
3.2.6	Kerentanan Adaptasi Perubahan Iklim.....	3-69
3.2.7	Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam .....	3-70
3.2.8	Keanekaragaman Hayati .....	3-73
3.3	GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH .....	3-73
3.3.1	Kinerja Keuangan Kota Balikpapan .....	3-73
3.3.2	Kinerja Keuangan Kota Balikpapan dalam Pencapaian Indikator TPB.....	3-77
3.4	ASPEK DAYA SAING DAERAH.....	3-81
3.4.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	3-81





3.4.2	Infrastruktur Wilayah.....	3-84
-------	----------------------------	------

#### **BAB 4 ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

4.1	KONDISI UMUM CAPAIAN TARGET TPB.....	4-3
4.2	CAPAIAN TARGET INDIKATOR TPB BERDASARKAN PILAR .....	4-6
4.2.1	Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Sosial.....	4-6
4.2.2	Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Ekonomi .....	4-7
4.2.3	Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup .....	4-8
4.2.4	Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola .....	4-8
4.3	RUMUSAN ISU PRIORITAS DI KOTA BALIKPAPAN.....	4-9
4.3.1	Proses Identifikasi dan Perumusan Isu Prioritas.....	4-9
4.3.2	Longlist Isu dan Daftar Isu Pendek .....	4-10
4.3.3	Gap Capaian TPB.....	4-14
4.3.4	Telaahan Dokumen Strategis.....	4-15
4.3.5	Isu Muatan Kondisi Lingkungan Hidup.....	4-15
4.3.6	Analisis Gap Terhadap Pencapaian TPB.....	4-17

#### **BAB 5 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**

5.1	SEKRETARIAT DAERAH .....	5-6
5.2	DINAS PEKERJAAN UMUM.....	5-7
5.3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.....	5-9
5.4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP .....	5-10
5.5	DINAS SOSIAL.....	5-12
5.6	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA .....	5-13
5.7	DINAS KESEHATAN .....	5-16
5.8	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN .....	5-20
5.9	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA .....	5-21
5.10	DINAS PENDIDIKAN .....	5-23
5.11	DINAS KETENAGAKERJAAN.....	5-25
5.12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .....	5-26
5.13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL.....	5-28
5.14	DINAS PERHUBUNGAN.....	5-30
5.15	DINAS KOPERASI UMKM DAN PERINDUSTRIAN .....	5-31
5.16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN .....	5-32



5.17	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.....	5-33
5.18	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.....	5-35
5.19	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH .....	5-36
5.20	INSPEKTORAT.....	5-38
5.21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.....	5-39
5.22	BADAN PUSAT STATISTIK.....	5-40
5.23	BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI-HUTAN LINDUNG.....	5-41
5.24	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA .....	5-42

## **BAB 6 ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI**

6.1	SKENARIO PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN PRIORITAS DI KOTA BALIKPAPAN .....	6-3
6.1.1	Skenario Pencapaian Target TPB 1 Menghapus Kemiskinan.....	6-3
6.1.2	Skenario Pencapaian Target TPB 2 Tanpa Kelaparan .....	6-10
6.1.3	Skenario Pencapaian Target TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera .....	6-13
6.1.4	Skenario Pencapaian Target TPB 4 Pendidikan Berkualitas.....	6-19
6.1.5	Skenario Pencapaian Target TPB 5 Kesetaraan Gender .....	6-21
6.1.6	Skenario Pencapaian Target TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.....	6-26
6.1.7	Skenario Pencapaian Target TPB 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur .....	6-32
6.1.8	Skenario Pencapaian Target TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan .....	6-33
6.1.9	Skenario Pencapaian Target TPB 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan .....	6-34
6.1.10	Skenario Pencapaian Target TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak .....	6-38
6.1.11	Skenario Pencapaian Target TPB 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan .....	6-43
6.1.12	Skenario Pencapaian Target TPB 15 Ekosistem Darat.....	6-46
6.1.13	Skenario Pencapaian Target TPB 16 Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan Tangguh.....	6-48
6.2	REKOMENDASI TUJUAN PEMBANGUNAN PRIORITAS DI KOTA BALIKPAPAN .....	6-51
6.3	ARAH KEBIJAKAN RPJPD KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 - 2045.....	6-64

## **BAB 7 KESIMPULAN**

7.1	KESIMPULAN.....	7-2
7.2	REKOMENDASI .....	7-6





# DAFTAR TABEL

## BAB 2

Tabel II.1	Klasifikasi Jasa Lingkungan .....	2-13
------------	-----------------------------------	------

## BAB 3

Tabel III.1	Luas Wilayah Kota Balikpapan .....	3-2
Tabel III.2	Ketinggian Wilayah Kota Balikpapan Per Kecamatan .....	3-5
Tabel III.3	Luas Wilayah Kota Balikpapan Menurut Ketinggian (Mdpl).....	3-5
Tabel III.4	Luas Wilayah Berdasarkan Kelerengannya Dirinci Per Kelurahan di Kota Balikpapan .....	3-6
Tabel III.5	Luas Wilayah Berdasarkan Morfologi Per Kelurahan di Kota Balikpapan .....	3-7
Tabel III.6	Jenis Tanah di Wilayah Kota Balikpapan .....	3-10
Tabel III.7	Klasifikasi Jenis Tanah di Wilayah Kota Balikpapan .....	3-12
Tabel III.8	Luas Wilayah Kota Balikpapan Menurut Jenis Batuan .....	3-16
Tabel III.9	Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Batuan Dirinci Per Kelurahan Di Kota Balikpapan .....	3-16
Tabel III.10	DAS WS Mahakam .....	3-22
Tabel III.11	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Balikpapan.....	3-22
Tabel III.12	Nama Sungai di WS Mahakam .....	3-24
Tabel III.13	Kualitas Air Sungai Berdasarkan Hasil Indeks Pencemaran di 19 Sungai di Kota Balikpapan Tahun 2022 .....	3-25
Tabel III.14	Daerah Irigasi (D.I) di Kota Balikpapan.....	3-26
Tabel III.15	Waduk dan Embung di Kota Balikpapan Yang Termasuk WS Mahakam .....	3-26





Tabel III.16	Kualitas Udara Berdasarkan Parameter Pengukuran di Ujung, Kota Balikpapan Tahun 2018-2022.....	3-27
Tabel III.17	Jumlah Bencana yang Terjadi di Kota Balikpapan Menurut Jenis Bencana Tahun 2016-2019 .....	3-29
Tabel III.18	Jumlah Bencana Yang Terjadi di Kota Balikpapan Menurut Jenis Bencana Tahun 2022 .....	3-29
Tabel III.19	Tutupan Lahan Kota Balikpapan Tahun 2020.....	3-33
Tabel III.20	Tutupan Lahan Berdasarkan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Balikpapan Tahun 2020 .....	3-35
Tabel III.21	Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2011 - 2022.	3-37
Tabel III.22	Jumlah Berdasarkan Kelamin di Kota Balikpapan Tahun 2020 - 2022.....	3-37
Tabel III.23	Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2020-2022.....	3-38
Tabel III.24	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Balikpapan .....	3-39
Tabel III.25	Kemiskinan di Kota Balikpapan.....	3-39
Tabel III.26	Wilayah Kabupaten/Kota Yang Berada di dalam Wilayah Fungsional KLHS RPJPD Kota Balikpapan.....	3-40
Tabel III.27	DAS Yang Berada di dalam Wilayah Fungsional KLHS RPJPD Kota Balikpapan .....	3-41
Tabel III.28	Bentang Alam Kota Balikpapan .....	3-42
Tabel III.29	Vegetasi Alami Kota Balikpapan.....	3-44
Tabel III.30	Ekoregion Kota Balikpapan .....	3-45
Tabel III.31	Luasan DDDLH Pangan Berdasarkan Kecamatan di Kota Balikpapan .....	3-46
Tabel III.32	Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan di Kota Balikpapan .....	3-47
Tabel III.33	Luasan DDDLH Air Bersih Berdasarkan Kecamatan di Kota Balikpapan.....	3-48
Tabel III.34	Ketersediaan dan Kebutuhan Air Bersih di Kota Balikpapan .....	3-49
Tabel III.35	Luasan Jasa Penyedia Pangan di Kota Balikpapan .....	3-50
Tabel III.36	Luasan Jasa Penyedia Air Bersih di Kota Balikpapan.....	3-51
Tabel III.37	Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Balikpapan .....	3-52
Tabel III.38	Luasan Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam di Kota Balikpapan.....	3-53
Tabel III.39	Timbulan Sampah di Kota Balikpapan .....	3-55
Tabel III.40	Timbulan Tinja di Kota Balikpapan .....	3-56
Tabel III.41	Beban Pencemar BOD di Kota Balikpapan .....	3-57
Tabel III.42	Beban Pencemar COD di Kota Balikpapan .....	3-58



Tabel III.43	Beban Pencemar TSS di Kota Balikpapan.....	3-59
Tabel III.44	Luasan Bahaya Karhutla di Kota Balikpapan.....	3-60
Tabel III.45	Luasan Bahaya Cuaca Ekstrim di Kota Balikpapan.....	3-61
Tabel III.46	Luasan Bahaya Gempa Bumi di Kota Balikpapan .....	3-62
Tabel III.47	Luasan Bahaya Tsunami di Kota Balikpapan .....	3-63
Tabel III.48	Luasan Bahaya Longsor di Kota Balikpapan .....	3-64
Tabel III.49	Luasan Bahaya Banjir di Kota Balikpapan.....	3-65
Tabel III.50	Luasan Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kota Balikpapan .....	3-66
Tabel III.51	Luasan Bahaya Kekeringan di Kota Balikpapan .....	3-67
Tabel III.52	Luasan Bahaya Multi Bencana di Kota Balikpapan .....	3-68
Tabel III.53	Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kota Balikpapan.....	3-69
Tabel III.54	Luasan SIDIK di Kota Balikpapan .....	3-70
Tabel III.55	Luasan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Pangan, Air dan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Balikpapan .....	3-71
Tabel III.56	Luasan Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas di Kota Balikpapan .....	3-73
Tabel III.57	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2019-2022.....	3-74
Tabel III.58	Prosentase Realiasi Pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2019 - 2022 .....	3-75
Tabel III.59	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan Menurut Jenis Jenisnya (ribu rupiah), 2019-2022 .....	3-75
Tabel III.60	Realisasi Belanja Pemerintah Kota Balikpapan Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2019-2022.....	3-76
Tabel III.61	Kinerja Keuangan Daerah Kota Balikpapan dalam Pencapaian Indikator TPB Dirinci Per OPD.....	3-77
Tabel III.62	Laju Pertumbuhan PDR Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (%) di Kota Balikpapan Tahun 2017 - 2022.....	3-82
Tabel III.63	PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kota Balikpapan Tahun 2017 - 2022 Menurut Lapangan Usaha (Rupiah).....	3-82
Tabel III.64	Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kota Balikpapan Tahun 2022.....	3-84
Tabel III.65	Jumlah dan Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kota Balikpapan Tahun 2022 .....	3-85
Tabel III.66	Jumlah dan Sebaran Fasilitas Peribadatan di Kota Balikpapan Tahun 2022 ..	3-86
Tabel III.67	Daftar Pusat Perbelanjaan di Kota Balikpapan, 2022 .....	3-86
Tabel III.68	Daftar Nama Pasar Modern dan Tradisional Menurut Kecamatan, Tahun 2022 .....	3-86
Tabel III.69	Terminal Khusus di Kota Balikpapan .....	3-92



Tabel III.70	Titik Banjir Kota Balikpapan.....	3-96
Tabel III.71	Jumlah Sampah Yang Masuk ke TPA Manggar Per Bulan di Kota Balikpapan Tahun 2022 .....	3-98

#### **BAB 4**

Tabel IV.1	Capaian TPB di Kota Balikpapan.....	4-4
Tabel IV.2	Longlist Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Pemusatan Isu.....	4-10
Tabel IV.3	Analisis Gap Capaian TPB di Kota Balikpapan.....	4-14
Tabel IV.4	Analisis Crosscutting TPB dengan Isu Menurut Dokumen Strategis di Kota Balikpapan.....	4-15
Tabel IV.5	Analisis Crosscutting TPB dengan Isu Kondisi Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan .....	4-16
Tabel IV.6	Pemeringkatan ISU TPB di Kota Balikpapan.....	4-17
Tabel IV.7	Analisis Gap Kebijakan dan Strategi Pada RPJPD Terhadap TPB di Kota Balikpapan .....	4-18

#### **BAB 5**

Tabel V.1	Pelaksanaan Indikator TPB pada Setiap OPD dirinci Per Pilar .....	5-2
Tabel V.2	Pelaksanaan Indikator TPB pada Setiap OPD .....	5-3
Tabel V.3	Capaian Indikator TPB pada Setiap OPD.....	5-4
Tabel V.4	Capaian Indikator TPB pada Sekretariat Daerah Kota Balikpapan .....	5-6
Tabel V.5	Capaian Indikator TPB pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan .....	5-8
Tabel V.6	Capaian Indikator TPB pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan .....	5-10
Tabel V.7	Capaian Indikator TPB pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.....	5-11
Tabel V.8	Capaian Indikator TPB pada Dinas Sosial Kota Balikpapan.....	5-12
Tabel V.9	Capaian Indikator TPB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan .....	5-14
Tabel V.10	Capaian Indikator TPB pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.....	5-17
Tabel V.11	Capaian Indikator TPB pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan .....	5-21
Tabel V.12	Capaian Indikator TPB pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan .....	5-22
Tabel V.13	Capaian Indikator TPB pada Dinas Pendidikan Kota Balikpapan .....	5-23
Tabel V.14	Capaian Indikator TPB pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan .....	5-26
Tabel V.15	Capaian Indikator TPB pada Dinas Komunikasi dan Informatika	





	Kota Balikpapan .....	5-27
Tabel V.16	Capaian Indikator TPB pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.....	5-29
Tabel V.17	Capaian Indikator TPB pada Dinas Perhubungan Kota Balikpapan .....	5-30
Tabel V.18	Capaian Indikator TPB pada Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian Kota Balikpapan.....	5-31
Tabel V.19	Capaian Indikator TPB pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	5-33
Tabel V.20	Capaian Indikator TPB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan.....	5-34
Tabel V.21	Capaian Indikator TPB pada Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.....	5-36
Tabel V.22	Capaian Indikator TPB pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan .....	5-37
Tabel V.23	Capaian Indikator TPB pada Inspektorat Kota Balikpapan .....	5-38
Tabel V.24	Capaian Indikator TPB pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan .....	5-39
Tabel V.25	Capaian Indikator TPB pada Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan .....	5-41
Tabel V.26	Capaian Indikator TPB pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai- Hutan Lindung .....	5-42
Tabel V.27	Capaian Indikator TPB pada Perusahaan Listrik Negara (PLN) .....	5-43

## BAB 6

Tabel VI.1	Gap/Masalah TPB 1 Menghapus Kemiskinan di Kota Balikpapan .....	6-4
Tabel VI.2	Rekomendasi Arah Kebijakan TPB 1.....	6-9
Tabel VI.3	Gap/Masalah TPB 2 Tanpa Kelaparan di Kota Balikpapan .....	6-10
Tabel VI.4	Rekomendasi Arah Kebijakan TPB 2.....	6-12
Tabel VI.5	Gap/Masalah TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera di Kota Balikpapan .....	6-13
Tabel VI.6	Rekomendasi Arah Kebijakan TPB 3.....	6-19
Tabel VI.7	Gap/Masalah TPB 4 Pendidikan Berkualitas di Kota Balikpapan.....	6-20
Tabel VI.8	Rekomendasi Arah Kebijakan TPB 4.....	6-21
Tabel VI.9	Gap/Masalah TPB 5 Kesetaraan Gender di Kota Balikpapan.....	6-22
Tabel VI.10	Rekomendasi Arah Kebijakan TPB 5.....	6-25
Tabel VI.11	Gap/Masalah TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Balikpapan.....	6-26
Tabel VI.12	Rekomendasi Arah Kebijakan TPB 8.....	6-31
Tabel VI.13	Gap/Masalah TPB 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur di Kota Balikpapan .	6-32
Tabel VI.14	Rekomendasi Arah Kebijakan TPB 9.....	6-33



Tabel VI.15	Gap/Masalah TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan di Kota Balikpapan .....	6-34
Tabel VI.16	Rekomendasi Arah Kebijakan TPB 10.....	6-34
Tabel VI.17	Gap/Masalah TPB 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan di Kota Balikpapan .....	6-35
Tabel VI.18	Rekomendasi Arah Kebijakan TPB 17 .....	6-38
Tabel VI.19	Gap/Masalah TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak di Kota Balikpapan .....	6-39
Tabel VI.20	Rekomendasi Arah Kebijakan TPB 6.....	6-43
Tabel VI.21	Gap/Masalah TPB 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan di Kota Balikpapan .....	6-44
Tabel VI.22	Rekomendasi Arah Kebijakan TPB 11 .....	6-45
Tabel VI.23	Gap/Masalah TPB 15 Ekosistem Darat di Kota Balikpapan.....	6-46
Tabel VI.24	Rekomendasi Arah Kebijakan TPB 15 .....	6-48
Tabel VI.25	Gap/Masalah TPB 16 Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan Tangguh di Kota Balikpapan.....	6-48
Tabel VI.26	Rekomendasi Arah Kebijakan TPB 16.....	6-50
Tabel VI.27	Rekomendasi Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2045 .....	6-51





# DAFTAR GAMBAR

## BAB 2

Gambar 2.1	Mekanisme Penyusunan KLHS RPJPD.....	2-4
Gambar 2.2	Keterhubungan Antar Dokumen.....	2-8

## BAB 3

Gambar 3.1	Peta Administrasi Kota Balikpapan.....	3-4
Gambar 3.2	Peta Kemiringan Lereng Kota Balikpapan.....	3-8
Gambar 3.3	Peta Jenis Tanah Kota Balikpapan.....	3-12
Gambar 3.4	Peta Geologi Kota Balikpapan.....	3-17
Gambar 3.5	Peta DAS Kota Balikpapan.....	3-23
Gambar 3.6	Peta Tutupan Lahan Kota Balikpapan Tahun 2020 .....	3-34
Gambar 3.7	Peta Wilayah Ekologis Kota Balikpapan.....	3-41
Gambar 3.8	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Balikpapan.....	3-42
Gambar 3.9	Peta Bentang Alam Kota Balikpapan.....	3-43
Gambar 3.10	Peta Vegetasi Alami Kota Balikpapan.....	3-44
Gambar 3.11	Peta Ekoregion Kota Balikpapan.....	3-45
Gambar 3.12	Peta Status Daya Dukung Pangan di Kota Balikpapan.....	3-47
Gambar 3.13	Peta Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan di Kota Balikpapan.....	3-48
Gambar 3.14	Peta Status Daya Dukung Air Bersih di Kota Balikpapan.....	3-49
Gambar 3.15	Peta Ketersediaan dan Kebutuhan Air Bersih di Kota Balikpapan.....	3-50
Gambar 3.16	Peta Jasa Lingkungan Penyedia Pangan di Kota Balikpapan.....	3-51
Gambar 3.17	Peta Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih di Kota Balikpapan.....	3-52





Gambar 3.18	Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Balikpapan .....	3-53
Gambar 3.19	Peta Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam di Kota Balikpapan.....	3-54
Gambar 3.20	Peta Timbulan Sampah di Kota Balikpapan.....	3-55
Gambar 3.21	Peta Timbulan Tinja di Kota Balikpapan.....	3-56
Gambar 3.22	Peta Beban Pencemar BOD di Kota Balikpapan.....	3-57
Gambar 3.23	Peta Beban Pencemar COD di Kota Balikpapan.....	3-58
Gambar 3.24	Peta Beban Pencemar TSS di Kota Balikpapan .....	3-59
Gambar 3.25	Peta Bahaya Karhutla di Kota Balikpapan.....	3-60
Gambar 3.26	Peta Bahaya Cuaca Ekstrim di Kota Balikpapan.....	3-61
Gambar 3.27	Peta Bahaya Gempa Bumi di Kota Balikpapan .....	3-62
Gambar 3.28	Peta Bahaya Tsunami di Kota Balikpapan.....	3-63
Gambar 3.29	Peta Bahaya Longsor di Kota Balikpapan.....	3-64
Gambar 3.30	Peta Bahaya Banjir di Kota Balikpapan.....	3-65
Gambar 3.31	Peta Bahaya Cuaca Ekstrim dan Abrasi di Kota Balikpapan.....	3-66
Gambar 3.32	Peta Bahaya Kekeringan di Kota Balikpapan .....	3-67
Gambar 3.33	Peta Bahaya Multi Bencana di Kota Balikpapan .....	3-68
Gambar 3.34	Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kota Balikpapan .....	3-69
Gambar 3.35	Peta SIDIK di Kota Balikpapan .....	3-70
Gambar 3.36	Peta EF Penyedia Pangan di Kota Balikpapan .....	3-71
Gambar 3.37	Peta EF Penyedia Air di Kota Balikpapan .....	3-72
Gambar 3.38	Peta EF Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Balikpapan .....	3-72
Gambar 3.39	Peta Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas di Kota Balikpapan.....	3-73
Gambar 3.40	Peta Jaringan Transportasi .....	3-88

#### **BAB 4**

Gambar 4.1	Kaitan Antara Aspek Ekonomi, Sosial, Lingkungan dengan Pencapaian TPB ....	4-2
Gambar 4.2	Target dan Indikator TPB sesuai Perpres 59/2017.....	4-3
Gambar 4.3	Grafik Pencapaian TPB di Kota Balikpapan Tahun 2022 .....	4-4
Gambar 4.4	Grafik Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Sosial.....	4-7
Gambar 4.5	Grafik Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Ekonomi .....	4-7
Gambar 4.6	Grafik Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup.....	4-8
Gambar 4.7	Grafik Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola .....	4-9
Gambar 4.8	Kerangka Analisis dan Pemingkatan Isu TPB di Kota Balikpapan .....	4-10



## BAB 5

Gambar 5.1	Grafik Pelaksanaan Indikator TPB Pada Setiap OPD dirinci Per Pilar .....	5-3
Gambar 5.2	Grafik Capaian Indikator TPB Pada Setiap OPD .....	5-5
Gambar 5.3	Persentase Capaian Indikator TPB pada Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	5-6
Gambar 5.4	Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan .....	5-8
Gambar 5.5	Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan .....	5-9
Gambar 5.6	Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan .....	5-10
Gambar 5.7	Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Sosial Kota Balikpapan .....	5-12
Gambar 5.8	Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan ..	5-14
Gambar 5.9	Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan ..	5-17
Gambar 5.10	Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan .....	5-20
Gambar 5.11	Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan .....	5-22
Gambar 5.12	Persentase Capaian Indikator TPB Dinas Pendidikan Kota Balikpapan .....	5-23
Gambar 5.13	Persentase Capaian Indikator TPB Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan .....	5-25
Gambar 5.14	Persentase Capaian Indikator TPB Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan .....	5-27
Gambar 5.15	Persentase Capaian Indikator TPB Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan .....	5-29
Gambar 5.16	Persentase Capaian Indikator TPB Dinas Perhubungan Kota Balikpapan .....	5-30
Gambar 5.17	Persentase Capaian Indikator TPB Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian Kota Balikpapan .....	5-31
Gambar 5.18	Persentase Capaian Indikator TPB Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan .....	5-32
Gambar 5.19	Persentase Capaian Indikator TPB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan .....	5-34
Gambar 5.20	Persentase Capaian Indikator TPB Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan .....	5-36
Gambar 5.21	Persentase Capaian Indikator TPB Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan .....	5-37



Gambar 5.22	Persentase Capaian Indikator TPB Inspektorat Kota Balikpapan .....	5-38
Gambar 5.23	Persentase Capaian Indikator TPB Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan .....	5-39
Gambar 5.24	Persentase Capaian Indikator TPB Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan ....	5-40
Gambar 5.25	Persentase Capaian Indikator TPB Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Hutan Lindung .....	5-42
Gambar 5.26	Persentase Capaian Indikator TPB Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Balikpapan .....	5-43

## BAB 6

Gambar 6.1	Rumusan Alternatif Skenario.....	6-3
Gambar 6.1	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.....	6-5
Gambar 6.2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.....	6-6
Gambar 6.3	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan .....	6-7
Gambar 6.4	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Dan Berkelanjutan.....	6-7
Gambar 6.5	Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan risiko bencana alam .....	6-8
Gambar 6.6	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.....	6-9
Gambar 6.7	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita .....	6-11
Gambar 6.8	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.....	6-12
Gambar 6.9	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi.....	6-15
Gambar 6.10	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Puskesmas Yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa.....	6-16
Gambar 6.11	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.....	6-16
Gambar 6.12	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).....	6-17
Gambar 6.13	Unmet Need Pelayanan Kesehatan .....	6-18
Gambar 6.14	Persentase merokok pada penduduk umur $\geq 15$ tahun .....	6-18
Gambar 6.15	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....	6-21
Gambar 6.16	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan	





atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.....	6-23
Gambar 6.17 Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) .....	6-24
Gambar 6.18 Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.....	6-25
Gambar 6.19 PDB Per Kapita.....	6-27
Gambar 6.20 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun .....	6-28
Gambar 6.21 Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian.....	6-29
Gambar 6.22 Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).....	6-29
Gambar 6.23 Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB .....	6-30
Gambar 6.24 Jumlah Wisatawan Mancanegara.....	6-31
Gambar 6.25 Proporsi individu yang menggunakan internet.....	6-33
Gambar 6.26 Rasio penerimaan pajak terhadap PDB .....	6-36
Gambar 6.27 Proporsi penduduk terlayani mobile broadband .....	6-37
Gambar 6.28 Proporsi individu yang menggunakan internet.....	6-37
Gambar 6.29 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.....	6-40
Gambar 6.30 Proporsi Populasi Yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman Dan Berkelanjutan.....	6-41
Gambar 6.31 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak.....	6-42
Gambar 6.32 Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) .....	6-42
Gambar 6.33 Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana .....	6-45
Gambar 6.34 Proporsi Tutupan Hutan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan.....	6-47
Gambar 6.35 Persentase Penggunaan E-Procurement Terhadap Belanja Pengadaan.....	6-49





# BAB 1

## PENDAHULUAN



## 1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan wilayah pada dasarnya memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pada saat ini, permasalahan lingkungan yang terjadi semakin kompleks mengiringi semakin meningkatnya berbagai tuntutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat baik pada tingkat lokal, nasional, bahkan global. Salah satunya terkait dengan terjadinya perubahan iklim (*climate change*) yang menyebabkan banjir, kekeringan, pencemaran udara dan air, serta bencana lainnya serta pemindahan Ibukota Nusantara (IKN).

Pada akhirnya, kondisi ini mendorong munculnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebijakan-kebijakan pembangunan yang mengutamakan kelestarian lingkungan yang berprinsip pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Bentuk analisis pembangunan berkelanjutan ini diimplementasikan salah satunya dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dalam penyusunan RPJPD diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan /atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Pelaksanaan KLHS bersifat wajib dalam penyusunan atau evaluasi :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
- b. **Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)**, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan
- c. Kebijakan, Rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan.

Analisis KLHS memberikan arahan bahwa dalam pembangunan daerah perlu memperhatikan kondisi lingkungan hidup, sehingga tercipta keselarasan antara pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan penggunaannya. Selain itu, dalam peraturan tersebut juga mengamanatkan adanya kajian daya dukung dan daya tampung wilayah agar pembangunan berkelanjutan dari aspek lingkungan hidup dapat direalisasikan dengan baik oleh masing-masing daerah.

Aspek dalam pembangunan berkelanjutan tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan hidup namun juga aspek sosial, ekonomi, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Aspek tersebut dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dapat diukur dalam indikator-indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Pencapaian TPB diimplementasikan berupa kebijakan, rencana, dan/atau program dalam RPJPD agar rencana aksi TPB menjadi terukur dan jelas dalam periode waktu tertentu.



Pada Perpres No. 59 tahun 2017 disebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Oleh karena itu, perlu dilakukan penyelarasan RPJPD untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian TPB. Dalam penerapan TPB di Indonesia, Pemerintah menyusun indikator pencapaian TPB sebanyak 319 indikator yang mengacu pada 241 indikator TPB yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dari pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, indikator TPB yang merupakan kewenangan pemerintah kota adalah sejumlah 222 indikator.

Seiring berjalannya waktu dan makin pesatnya pembangunan khususnya di Kota Balikpapan, mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan, terlebih dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Kota Balikpapan sendiri disiapkan sebagai *Buffer Zone* (Zona Penyangga) bagi IKN baru yaitu di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara karena berbatasan secara langsung. Efek dari degradasi lingkungan ini berpengaruh terhadap keberlanjutan sumber daya alam serta lingkungan hidup di masa mendatang.

Sejalan dengan itu, maka terdapat instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang salah satunya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (selanjutnya disebut KLHS). Undang - undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan teritegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (selanjutnya disebut KRP).

Pada tanggal 5 juli 2022, melalui surat Dirjen Bina Bangda Kemendagri No. 550/5113/Bangda perihal Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD dan KLHS RPJM, Pemerintah Pusat menginstruksikan agar Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah.

Dokumen KLHS RPJPD berisikan Substansi rencana pembangunan Kota Balikpapan Periode 2025 - 2045 berbasis analisi Daya dukung dan Daya Tampung (DDDT) serta berorientasi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sehingga pemetaan berbasis jasa ekosistem memberikan dukungan guna tercapainya percepatan pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Balikpapan.

## 1.2 DASAR HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2045 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.





- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- 9) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- 11) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 1.3 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2045, sebagai pelaksanaan amanat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tujuan dari pelaksanaan KLHS adalah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam KRP RPJPD Kota Balikpapan 2025 – 2045 atas dasar prinsip keterkaitan, keseimbangan dan keadilan agar menjadi KRP yang berwawasan lingkungan.

Sasaran Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kota Balikpapan 2025 – 2045 yaitu:



- 1) Terinventarisasinya data pencapaian indikator dari 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Balikpapan;
- 2) Teridentifikasinya isu – isu dan permasalahan pembangunan berkelanjutan serta analisa pengaruhnya terhadap 6 (enam) muatan KLHS untuk menghasilkan isu strategis pembangunan berkelanjutan yang di prioritaskan;
- 3) Terumuskannya alternatif-alternatif skenario/proyeksi pencapaian TPB di Kota Balikpapan terhadap target TPN Nasional;
- 4) Terselaraskannya rekomendasi kebijakan, rencana dan program pembangunan berkelanjutan dalam penggunaan sumber daya dan kebijakan pengembangan wilayah di Kota Balikpapan sebagai dasar perumusan KRP RPJPD 2025 – 2045;
- 5) Terintegrasinya data dan informasi yang dianalisis sebagai bahan materi dan rekomendasi KRP RPJPD Kota Balikpapan

## 1.4 RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi beberapa tahap. Tahapan – tahapan studi yang dilaksanakan secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

### I. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

1. Melakukan identifikasi dan Pengumpulan Data  
(Kondisi umum daerah, kondisi geografis, kondisi demografis, isu – isu strategis daerah, survei data capaian TPB dari OPD terkait)
2. Melakukan Updating analisis kondisi Daya Dukung Daya Tampung Daerah (DDDT) metode pendekatan jasa ekosistem
3. Perumusan isu – isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan indikator – indikator pencapaian TPB serta kajian Pembangunan Wilayah Kota Balikpapan (Konsultasi Publik 1)
4. Pengkajian 6 muatan KLHS terhadap isu – isu pembangunan berkelanjutan.

### II. Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan

Perumusan alternatif skenario pencapaian TPB dengan/tanpa upaya tambahan (Konsultasi Publik 2)

### III. Penyusunan Rekomendasi sebagai acuan dan dasar dalam penyusunan KRP yang telah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan

### IV. Penyiapan Dokumen untuk **Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian** hingga proses **Valiasi** oleh Gubernur Cq. DLH Provinsi Kalimantan Timur.

## 1.5 TAHAPAN PENYUSUNAN KLHS

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaksanaan dalam



penyusunan KLHS RPJPD, KLHS ini disusun dan dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

### 1) Pembentukan Tim Pembuat KLHS

Pembentukan tim ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi bersama dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan lingkungan hidup, beranggotakan perangkat daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan KLHS RPJPD, serta melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Pembuat KLHS yang dibentuk wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang memenuhi standar kompetensi berupa:

- a. Kriteria ketepatan keahlian pada isu yang dikaji;
- b. Pengalaman di bidang pembuatan dan pelaksanaan KLHS atau kajian Lingkungan Hidup yang sejenis.

Adapun tugas Tim Pembuat KLHS adalah :

- a. Menyusun kerangka acuan kerja;
- b. Melaksanakan konsultasi publik;
- c. Membuat dan melaksanakan KLHS;
- d. Melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
- e. Melaksanakan penjaminan kualitas KLHS; dan
- f. Melaksanakan pendokumentasian KLHS.

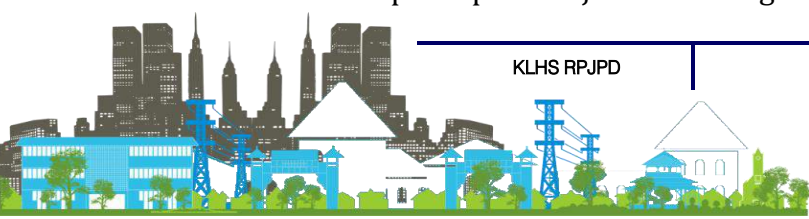
### 2) Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

Pengkajian pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup:

- a. Kondisi umum daerah, paling sedikit memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografis, dan keuangan daerah;
- b. Capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan, berupa analisis kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menghasilkan gambaran kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi dasar untuk merumuskan skenario Pembangunan Berkelanjutan; dan
- c. Pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pembangunan Daerah.

### 3) Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan

Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan adalah alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan berupa target pencapaian



tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan yang disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJPD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis daerah. Hasil perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan dimuat dalam laporan KLHS RPJPD.

#### 4) Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian, dan Validasi KLHS

Kepala daerah melakukan penjaminan kualitas KLHS RPJPD secara mandiri untuk memastikan proses pembuatan KLHS RPJPD dan kualitas substansi KLHS RPJPD. Penjaminan kualitas terhadap proses pembuatan KLHS RPJPD dibuktikan dengan:

- a. Ketersediaan surat keputusan pembentukan tim pembuat KLHS RPJPD;
- b. Jadwal kegiatan pembuatan KLHS RPJPD;
- c. Berita acara kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
- d. Laporan KLHS RPJPD.

Penjaminan kualitas substansi KLHS RPJPD dilakukan pada isu Strategis, permasalahan, dan sasaranstrategis daerah yang dirumuskan telah mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Hasil penjaminan kualitas KLHS RPJPD ditanda tangani oleh kepala daerah.

Hasil pembuatan dan pelaksanaan KLHS, serta penjaminan kualitas KLHS didokumentasikan ke dalam laporan KLHS. Laporan KLHS memuat informasi tentang:

- a. Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian;
- b. Pertimbangan, muatan, dan konsekuensi rekomendasi;
- c. Gambaran pengintegrasian hasil KLHS;
- d. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS;
- e. Hasil penjaminan kualitas KLHS; dan
- f. Ringkasan eksekutif.

Terhadap KLHS yang dibuat dan dilaksanakan, wajib dilakukan validasi oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Untuk dapat dilakukan validasi, penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program mengajukan permohonan kepada:

- a. Menteri melalui Direktur Jenderal, untuk KLHS Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat nasional dan provinsi yang telah dilakukan penjaminan kualitas; atau
- b. Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah provinsi di bidang Lingkungan Hidup, untuk KLHS Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat kabupaten/kota yang telah dilakukan penjaminan kualitas.





Permohonan validasi KLHS dilengkapi dengan:

- a. Surat permohonan;
- b. Rancangan kebijakan, rencana, dan/atau program yang dilaksanakan KLHS;
- c. Laporan KLHS yang mencakup bukti penjaminan kualitasnya; dan
- d. Bukti pemenuhan standar kompetensi tenaga ahli.

## 1.6 SISTEMATIKA PELAPORAN

Adapun sistematika pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2045 adalah sebagai berikut :

**BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan KLHS, dasar hukum maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta sistematika pelaporan.

**BAB 2 : DASAR TEORI**

Bab ini menguraikan tentang dasar teori penyusunan KLHS RPJPD serta Sejarah Kota Balikpapan.

**BAB 3 : KONDISI UMUM KOTA BALIKPAPAN**

Bab ini menguraikan terkait dengan letak geografis, kondisi fisik, kondisi lingkungan hidup, sampai dengan kondisi keuangan daerah Kota Balikpapan.

**BAB 4 : ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Bab ini menguraikan terkait dengan kondisi umum capaian TPB, Capaian target indikator TPB berdasarkan Pilar, sampai dengan Rumusan isu prioritas di Kota Balikpapan.

**BAB 5 : ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**

Bab ini menguraikan capaian indikator TPB pada organisasi perangkat daerah di Kota Balikpapan.

**BAB 6 : SKENARIO DAN REKOMENDASI**

Berisi mengenai skenario pencapaian target TPB, Rekomendasi TPB Prioritas serta arah kebijakan RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2045

**BAB 7 : KESIMPULAN**

Berisi mengenai kesimpulan





# BAB 2

## DASAR TEORI



## 2.1 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP. KLHS merupakan amanat yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS wajib dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP. Kunci dalam penyelenggaraan KLHS adalah analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif.

KLHS memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia dengan mempertimbangkan lingkungan hidup sebagai bagian dari pertimbangan dalam menyusun KRP. Beberapa kemanfaatan yang diharapkan dari KLHS, antara lain:

- 1) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat;
- 2) Memperkuat implementasi pada perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 3) Membantu proses penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan meliputi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; serta
- 4) Membantu pencegahan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat KRP, sehingga membantu efektivitas pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, dan perizinan.

Pelaksanaan KLHS melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah individu dan perwakilan kelompok masyarakat, institusi atau lembaga yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh KRP yang sedang disusun. Masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilibatkan meliputi: yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari KRP dan yang memiliki informasi dan/atau keahlian yang relevan dengan substansi KRP.

### 2.1.1 Dasar Hukum KLHS

Dasar hukum penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Indonesia adalah:

- 1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.



- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

### 2.1.2 Pelaksanaan KLHS

KLHS dapat dilaksanakan sebelum, bersamaan, atau setelah penyusunan draft KRP. KLHS untuk rencana pembangunan (RPJPN, RPJPD, RPJMN, dan RPJMD) dilakukan sebelum dokumen tersebut disusun, atau diistilahkan sebagai *ex-ante*.

### 2.1.3 Prinsip Penyelenggaraan KLHS

KLHS bertujuan untuk menjamin bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam melakukan pembangunan. Terdapat tiga nilai penting dalam penyelenggaraan KLHS yang dapat mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu keterkaitan (*interdependency*), keseimbangan (*equilibrium*), dan keadilan (*justice*) di antara pilar dan isu.

#### 1) Keterkaitan (*interdependency*)

Bertujuan supaya penyelenggaraan KLHS dapat menghasilkan kebijakan, rencana, atau program yang mempertimbangkan keterkaitan antar sektor, wilayah, global-lokal. Nilai ini juga mengandung makna dihasilkannya KLHS yang bersifat holistik berkat adanya keterkaitan analisis antar komponen fisik-kimia, biologi, dan sosial-ekonomi.

#### 2) Keseimbangan (*equilibrium*)

Bertujuan supaya penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai keseimbangan antara kepentingan sosial-ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, antara kepentingan pembangunan pusat dan daerah, dan keseimbangan-keseimbangan lainnya. Implikasinya, usaha pemetaan ragam dan bentuk kepentingan para pihak menjadi salah satu proses dan metode yang penting digunakan dalam KLHS.

#### 3) Keadilan (*justice*)

Bertujuan supaya penyelenggaraan KLHS dapat menghasilkan kebijakan, rencana, dan program yang tidak mengakibatkan marjinalisasi sekelompok atau golongan tertentu dalam masyarakat karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam atau modal atau pengetahuan.

### 2.1.4 Mekanisme Penyelenggaraan KLHS

Mekanisme penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

#### 1) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS

Dilakukan oleh penyusun KRP dengan membuat kelompok kerja (Pokja) yang terdiri atas unsur-unsur pemerintah (biasanya perwakilan organisasi perangkat daerah) dan melibatkan masyarakat dan para pihak lainnya. Para pihak lainnya dapat berasal dari tokoh masyarakat, organisasi nonpemerintah, perguruan tinggi,





atau dunia usaha yang dianggap kompeten dalam KRP yang sedang disusun. Dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS, kelompok kerja dapat didampingi oleh tenaga ahli dalam penyusunan KLHS.

2) Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS

Dilakukan oleh kelompok kerja (Pokja), penyusun KRP, dan pimpinan daerah. Penjaminan kualitas terdiri atas proses penilaian mandiri dan integrasi KLHS terhadap KRP. Proses penilaian mandiri adalah proses penilaian terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS yang telah dilakukan oleh Pokja, apakah proses yang dilakukan sesuai prosedur dan sudah sesuai dengan maksud dan tujuan dari KLHS. Proses integrasi KLHS terhadap KRP adalah proses penilaian mandiri yang dilakukan oleh penyusun KRP terhadap rekomendasi dari KLHS dan mengintegrasikannya dalam KRP, apakah rekomendasi KLHS sudah diakomodasi atau diintegrasikan dalam KRP. Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS kemudian akan dijamin kualitasnya oleh penyusun KRP dan pimpinan daerah.

3) Validasi KLHS

Dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk tingkat nasional dan Gubernur untuk tingkat daerah. Untuk KLHS pada tingkat nasional dan provinsi, dilakukan validasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk KLHS pada tingkat kabupaten dan kota, dilakukan validasi oleh Gubernur. Proses validasi adalah proses untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dibawah ini merupakan gambar mekanisme penyusunan KLHS RPJPD.



Gambar 2.1 Mekanisme Penyusunan KLHS RPJPD



### 2.1.5 Muatan Analisis dalam KLHS RPJPD

Analisis dalam KLHS bertujuan untuk merumuskan isu pada wilayah kajian KRP. Analisis dilakukan terhadap kondisi umum dan kondisi khusus dari wilayah tersebut, atau disebut dengan baseline kondisi. Data baseline kondisi yang dimaksud antara lain berupa:

1) Kondisi umum wilayah kajian

Muatan ini antara lain menjelaskan tentang kondisi geografis dan administratif dari wilayah yang dikaji, kondisi kependudukan, kondisi fisik wilayah, dan sebagainya.

2) Karakteristik ekoregion

Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Ekoregion dipahami sebagai konsep unit karakter lahan: berperan sebagai penciri sifat dan potensi lahan serta sebagai pembatas (*constraint*) dalam pengelolaan lahan. Karakteristik ekoregion di setiap pulau/kepulauan telah dideskripsikan dalam Buku Deskripsi Ekoregion Pulau/Kepulauan.

3) Enam (6) muatan wajib kondisi lingkungan hidup

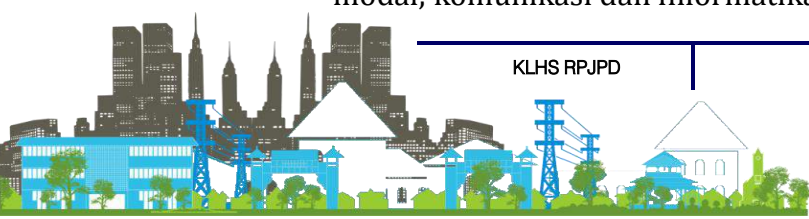
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, analisis materi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program paling sedikit memuat kajian:

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.
- b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup.
- c. Kinerja layanan/jasa ekosistem.
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

4) Muatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Kondisi baseline indikator TPB meliputi kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan.

- a. Kondisi sosial meliputi berbagai urusan yang berkenaan dengan masyarakat atau kepentingan umum. Jenis urusan yang dikelompokkan pada tema sosial, antara lain pendidikan; kesehatan; pangan; ketenagakerjaan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; administrasi kependudukan dan catatan sipil; komunikasi dan informatika; serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Kondisi ekonomi mencakup energi dan sumber daya mineral; keuangan; perindustrian; koperasi, usaha kecil dan menengah; pariwisata; penanaman modal; komunikasi dan informatika; statistik; dan sosial (terkait rasio gini).



- c. Kondisi lingkungan mencakup jenis urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta kehutanan.
- d. Hukum dan tata kelola kelembagaan mencakup jenis urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, terutama dalam memberikan keadilan dan penguatan masyarakat yang inklusif; statistik; administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan komunikasi dan informatika.

Pembahasan lebih detail terkait TPB terdapat pada subbab 2.3.

## 2.2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Suatu perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan atau pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Perencanaan Pembangunan daerah dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membenentuknya, sebagaimana diketahui perencanaan pembangunan suatu sistem yang dibentuk dari unsur-unsur perencanaan, pembangunan, dan daerah. Dengan melihat secara divergensi dari setiap unsur tersebut, kemudian diambil sebuah uraian secara konvergensi, akan memebentuk suatu pengertian yang utuh.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (dalam Randy R. Whiratnolo, Riant Nugroho D, 2006 : 41), mengatakan bahwa unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut :

- 1) Kebijakan dasar atau strategi dasar perencanaan pembangunan yang sering pula disebut tujuan, arah dan proritas pembangunan, pada unsur ini perlu ditetapkan ujuan-tujuan rencana.
- 2) Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabelvariabel pembangunan dan implikasinya.
- 3) Perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan.
- 4) Adanya kebijaksanaan yang konsisiten dan serasi, seperti kebijakan fisikal, moneter, anggaran, harga, sektoral dan pembangunan daerah
- 5) Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, industry, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
- 6) Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Jadi dari beberapa unsur pokok perencanaan pembangunan diatas memang harus benar-benar diperhatikan dalam sebuah perencanaan pembangunan kerana hal tersebut merupakan dasar dari perencanaan pembangunan maka sebelum merumuskan perencanaan pembangunan unsurunsur tersebut harus diperhatikan terlebih dahulu.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan.



### 2.2.1 Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah memiliki dua orientasi, yaitu orientasi proses dan substansi. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses yang menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah serta bawah atas. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

### 2.2.2 Tata Cara Penyusunan RPJPD

Terdapat empat tahap penyusunan RPJPD, yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal RPJPD, perumusan rancangan RPJPD, dan penetapan RPJPD.

#### 1) Persiapan RPJPD

Tahap persiapan RPJPD, meliputi: penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD; orientasi mengenai RPJPD; penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan penyusunan rancangan teknokratik RPJPD.

#### 2) Penyusunan rancangan awal RPJPD

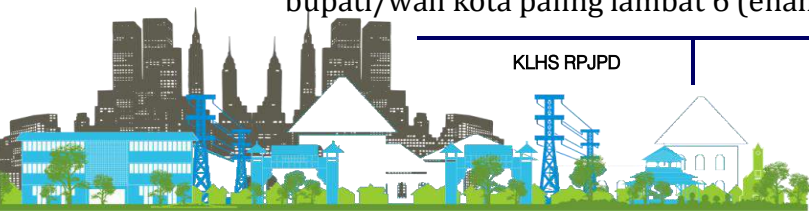
Merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RPJPD dan berdasarkan rancangan Renstra Peragkat Daerah.

#### 3) Perumusan rancangan RPJPD

Perumusan rancangan akhir RPJPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD.

#### 4) Penetapan RPJPD.

RPJPD provinsi ditetapkan oleh gubernur paling lambat 6 (enam) bulan setelah gubernur dan wakil gubernur dilantik. RPJPD kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil





bupati/wali kota dilantik. RPJPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

### 2.2.3 Keterhubungan Antar Dokumen

Menurut Permendagri No 86 Tahun 2017 pada pasal 160 dijelaskan bahwa mempedomani RPJPD penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi arah kebijakan, dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Selain itu pada pasal 168 permendagri No 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.



Gambar 2.2 Keterhubungan Antar Dokumen

## 2.3 TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Menurut Brundtland dari PBB, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Agenda pembangunan berkelanjutan dibuat untuk menjawab tuntutan dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan lahir pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB, Rio+20, pada 2012 dengan menetapkan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals (MDGs)*. *SDGs* disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, *civil society*, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Agenda 2030 telah dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015, bertepatan dengan berlangsungnya *United Nations General Assembly (UNGA)* di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, *New York, Amerika Serikat*. TPB/ *SDGs* yang cakupan dan substansinya selaras dengan Nawacita, terdiri atas 17 Tujuan dan 169 Target. Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini terdiri atas 17 tujuan, yaitu:

- TPB 1 : Tanpa Kemiskinan  
Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
- TPB 2 : Tanpa Kelaparan  
Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
- TPB 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera  
Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
- TPB 4 : Pendidikan Berkualitas  
Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
- TPB 5 : Kesetaraan Gender  
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
- TPB 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak  
Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
- TPB 7 : Energi Bersih dan Terjangkau  
Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- TPB 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi  
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
- TPB 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur



Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;

TPB 10 : Berkurangnya Kesenjangan

Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;

TPB 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;

TPB 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;

TPB 13 : Penanggulangan Perubahan Iklim

Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;

TPB 14 : Ekosistem Laut

Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;

TPB 15 : Ekosistem Darat

Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;

TPB 16 : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;

TPB 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Metadata Indikator SDGs Global tersebut, telah dikembangkan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia yang meliputi 17 Tujuan, 169 Target dan 319 Indikator. Komitmen pemerintah Indonesia terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana pencapaian TPB/SDGs sekaligus menjadi tolok ukur tercapainya agenda pembangunan nasional dan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana dalam pencapaian TPB/SDGs sebagai bagian dari prioritas nasional dan komitmen internasional sehingga harus terintegrasi ke dalam pembangunan daerah. Tahapan dan proses pencapaian TPB/SDGs di daerah merupakan bagian dari tahapan dan proses pembangunan daerah itu sendiri, karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.



## 2.4 EKOREGION DAN JASA LINGKUNGAN

### 2.4.1 Ekoregion

Ekoregion merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Secara sederhana ekoregion adalah geografis ekosistem, yaitu pola susunan berbagai ekosistem dan proses di antara ekosistem tersebut yang terikat dalam suatu satuan wilayah geografis.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Indonesia telah menetapkan ekoregion sebagai acuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Penetapan ekoregion menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat keterkaitan, interaksi, interdependensi, dan dinamika pemanfaatan berbagai sumber daya alam antar ekosistem dalam satu wilayah ekoregion. Suatu ekoregion dapat terletak di dalam beberapa wilayah administrasi, sehingga salah satu tujuan pendekatan ekoregion adalah untuk memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi antar wilayah administrasi yang saling bergantung dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mencakup persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun permasalahan lingkungan hidup. Selain itu, tujuan lainnya dari penetapan ekoregion adalah agar secara fungsional dapat menghasilkan perencanaan perlindungan-pengelolaan lingkungan hidup, pemantauan, dan evaluasinya secara bersama antar daerah yang saling bergantung, meskipun dalam kegiatan operasional pembangunan tetap dijalankan masing-masing oleh dinas wilayah administrasi sesuai kewenangannya masing-masing. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penetapan wilayah ekoregion dilakukan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora, fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. Penentuan wilayah dan pemetaan ekoregion dimaksudkan untuk dapat digunakan dalam berbagai tujuan, yaitu<sup>1</sup> :

- Sebagai unit analisis dalam penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- Sebagai dasar dalam memberikan arahan untuk penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan untuk perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan karakter wilayah.
- Memperkuat kerjasama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun persoalan lingkungan hidup.
- Sebagai acuan untuk pengendalian dan pelestarian jasa ekosistem/lingkungan yang mempertimbangkan keterkaitan antar ekosistem yang satu dengan ekosistem yang lain dalam satu ekoregion, sehingga dapat dicapai produktivitas optimal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

<sup>1</sup>Sumber utama deskripsi ekoregion pada bagian ini adalah buku *Deskripsi Peta Ekoregion Pulau/Kepulauan (KLH, 2013)* dan buku *Deskripsi Peta Ekoregion Laut Indonesia (KLH, 2013)*, kecuali terdapat sitasi tersendiri

Penetapan ekoregion dilakukan dengan pendekatan konsep bentang lahan. Menggunakan konsep tersebut, ekoregion dapat dipetakan berdasarkan kesamaan ciri morfologi dan





morfogenesis bentuk lahan yang ada pada sistem lahan. Aspek morfologi mencirikan bentuk permukaan lahan yang dicerminkan oleh ketinggian relief lokal dan kelerengan. Sedangkan aspek morfogenesis mencirikan proses asal usul terbentuknya bentuklahan. Klasifikasi lahan dengan konsep sistem lahan dilakukan berdasarkan prinsip ekologi yang mengasumsikan adanya hubungan erat yang saling mempengaruhi antara agroklimat, tipe batuan, bentuk lahan, tanah, kondisi hidrologi, dan organisme. Dengan diintegrasikan dengan peta iklim dan tipe vegetasi, peta ekoregion dengan pendekatan bentang lahan dapat mencerminkan sebaran spasial batas ekosistem yang mendekati definisi ekosistem sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pembentukan suatu peta ekoregion dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber data, yaitu peta sistem lahan, peta rupa bumi, peta geomorfologi, citra SRTM, peta curah hujan, dan data sumber daya hayati. Berbagai data tersebut kemudian digunakan dalam proses pembuatan peta ekoregion yang terbagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan dari pembuatan peta ekoregion yaitu pengkajian data sistem lahan, klasifikasi lahan, kompilasi data, pengisian/pelengkapan data atribut, dan yang terakhir penyajian peta.

Proses pengkajian data sistem lahan dimaksudkan untuk memperoleh klasifikasi lahan berdasarkan aspek morfologi dan morfogenesis dengan menggunakan berbagai data pendukung, yaitu definisi ekoregion berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 sebagai acuan utama pendefinisian ekoregion, peta rupa bumi sebagai peta dasar untuk penyajian ekoregion, citra SRTM dan DTM, serta peta geomorfologi yang digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi morfogenesis bentuk lahan. Pada tahapan ini, karakteristik sistem lahan yang dicermati adalah geometri batas sistem lahan, tipe bentuk lahan, litologi, jenis tanah, pola drainase, dan morfologi lahan. Karakteristik sistem lahan tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi morfologi dan morfogenesis bentuklahan yang digunakan sebagai satuan pemetaan ekoregion.

Proses klasifikasi bentuk lahan dilakukan dengan berdasarkan morfologi dan morfogenesis sistem lahan. Morfologi bentuk lahan diidentifikasi dengan data atribut sistem lahan ketinggian relief lokal dan kelerengan, sedangkan morfogenesis dengan data atribut tipe lahan, litologi (jenis batuan), jenis tanah, dan pola drainase. Hasil identifikasi morfogenesis tersebut kemudian diverifikasi dengan peta geomorfologi. Morfologi bentuklahan diklasifikasikan menjadi tiga kelas, yaitu 1) dataran, 2) perbukitan, dan 3) pegunungan. Sedangkan morfogenesis bentuk lahan diklasifikasikan menjadi delapan kelas, yaitu 1) marin/pantai, 2) fluvial yaitu bentuklahan yang terbentuk dari proses sedimentasi karena aliran air sungai, 3) fluviovulkanik, 4) karst yaitu bentuk lahan yang terbentuk dari hasil pelarutan batu gamping, 5) organik/koral, 6) struktural yaitu bentuk lahan yang terbentuk dari proses tektonik, 7) vulkanik yaitu bentuklahan yang terbentuk dari hasil letusan gunung berapi, 8) denudasional yaitu bentuklahan yang terbentuk dari proses gradasi dan degradasi yang umumnya pada lahan berbatuan sedimen.

#### 2.4.2 Jasa Lingkungan

Jasa lingkungan adalah produk sumber daya alam hayati yang ekosistemnya berupa manfaat baik langsung (*tangible*) dan/atau tidak langsung (*intangible*). Jasa lingkungan dapat merepresentasikan kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Hal ini berarti bahwa DDDTLH merupakan kapasitas jasa ekosistem dalam





mendukung perikehidupan makhluk hidup di suatu wilayah ekoregion. Semakin tinggi atau baik DDDTLH suatu ekoregion, maka ekosistem semakin baik kualitas dan fungsi ekoregion tersebut menyediakan jasa ekosistemnya (Riqqi, et al., 2019). Setiap wilayah ekoregion dapat memiliki lebih dari satu tipe ekosistem penghasil jasa lingkungan.

Menurut MEA, jasa lingkungan terdiri dari empat kelompok, yaitu layanan penyediaan, pengaturan, kultural, dan pendukung (*Millennium Ecosystem Assessment, 2005*). Layanan penyedia (*provisioning services*) berupa jasa/produk yang didapat dari ekosistem, seperti misalnya sumber daya genetika, makanan, air, dll. Layanan pengaturan (*regulating services*) berupa manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem, seperti misalnya aturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengendalian dampak perubahan iklim, dll. Layanan kultural (*cultural services*) berupa manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari ekosistem, seperti misalnya pengkayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan. Layanan pendukung (*supporting services*) berupa jasa ekosistem yang diperlukan manusia, seperti produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi, air, dll. Penjelasan klasifikasi dari keempat kelompok jasa lingkungan ini ditunjukkan pada Tabel II.1 dibawah ini.

**Tabel II.1 Klasifikasi Jasa Lingkungan**

Klasifikasi Jasa Lingkungan		Definisi Operasional
<b>Fungsi Penyediaan (<i>Provisioning</i>)</b>		
1	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan, hasil peternakan
2	Air bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan
3	Serat ( <i>fiber</i> )	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan untuk material
4	Bahan bakar ( <i>fuel</i> )	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar yang berasal dari fosil
<b>Fungsi Pengaturan (<i>Regulating</i>)</b>		
1	Iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca dan karbon
2	Tata aliran air dan banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air
3	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami
4	Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar
5	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralkan, mengurai dan menyerap limbah dan sampah
6	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara
7	Penyerbukan alami ( <i>pollination</i> )	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami
8	Pengendalian hama dan penyakit	Distribusi habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit
<b>Fungsi Budaya (<i>Cultural</i>)</b>		
1	Spiritual dan warisan leluhur	Ruang dan tempat suci, peninggalan sejarah dan leluhur



Klasifikasi Jasa Lingkungan		Definisi Operasional
2	Tempat tinggal dan ruang hidup ( <i>sense of place</i> )	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar "kampung halaman" yang memiliki nilai sentimental
3	Rekreasi dan ekoturisme	Fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata
4	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual
5	Pendidikan dan pengetahuan	Memiliki potensi untuk pengembangan pendidikan dan pengetahuan
Fungsi Pendukung ( <i>Supporting</i> )		
1	Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah
2	Siklus hara ( <i>nutrient</i> )	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
3	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies

Sumber: *Millenium Ecosystem Assessment, 2005; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2011*

## 2.5 SEJARAH KOTA BALIKPAPAN

Sejarah Kota Balikpapan tidak bisa dipisahkan dengan Minyak yaitu lebih tepatnya dengan sumur minyak Mathilda, sumur pengeboran perdana pada tanggal 10 Februari 1897 di kaki gunung Komendur di sisi timur Teluk Balikpapan. Penamaan sumur minyak ini berasal dari nama anak JH Menten dari JH Menten dan Firma Samuel & Co sebagai pemenang hak konsesi pengeboran di yang ditunjuk pemerintah Hindia Belanda yang telah mengontrak Balikpapan dari Kesultanan Kutai.

Di awal tahun 1900-an bertambahnya jumlah penemuan dan pengeboran minyak di Balikpapan telah membawa pendatang dalam jumlah besar ke Balikpapan. Pendatang ini kebanyakan adalah orang Cina dan para pekerja pengeboran yang rata-rata berasal dari Jawa dan berbagai daerah lainnya seperti India. Pekerja dari Cina dan India inilah yang menjadi cikal bakal penghuni desa di Tukung (Klandasan) dan Jumpi (Kampung Baru) yang merupakan asal usul sebagian besar warga Balikpapan. Selain itu keberadaan minyak, yaitu minyak tanah atau "lantung", juga mengundang semakin besarnya jumlah pedagang yang datang dari daerah Kerajaan Banjar di Banjarmasin dan Bone di Sulawesi Selatan untuk berdagang dan singgah di Balikpapan.

Seiring dengan berkembangnya waktu Balikpapan telah berkembang menjadi "Kota Minyak" dengan besarnya produksi minyak yang dihasilkan yang mencapai 86 juta barrel per tahun. Perkembangan industri minyak inilah yang telah membangun Balikpapan menjadi kota industri. Namun Saat ini Balikpapan tidak lagi menjadi Kota Minyak yang berorientasi pada pengeboran melainkan pada jasa pengolahan minyak yang telah mengolah minyak mentah dari sekitar Balikpapan, yaitu Sepinggian, Handil, Bekapai, Sanga-sanga, Tarakan, Bunyu dan Tanjung serta minyak mentah yang diimpor dari negara lain.

Menilik dari susunannya, kata "Balikpapan" dapat dimasukkan ke dalam asal kata bahasa Melayu. Menurut buku karya F. Valenijn pada tahun 1724, menyebut suatu daerah di hulu sebuah sungai yang berada di Teluk sekitar tiga mil dari pantai, desa itu bernama BILIPAPAN, dan nama tersebut dikaitkan dengan sebuah komunitas pedesaan di teluk yang sekarang dikenal dengan nama Teluk Balikpapan.

Ada beberapa versi mengenai asal usul nama Balikpapan, antara lain:



- 1) Versi Pertama (Sumber : Buku 90 Tahun Kota Balikpapan yang mengutip buku karya F. Valenijn tahun 1724 )

Menurut legenda, asal nama Balikpapan adalah karena sebuah kejadian yang terjadi pada tahun 1739, sewaktu dibawah Pemerintahan Sultan Muhammad Idris dari Kerajaan Kutai, yang memerintahkan kepada pemukim-pemukim di sepanjang Teluk Balikpapan untuk menyumbang bahan bangunan guna pembangunan istana baru di Kutai lama. Sumbangan tersebut ditentukan berupa penyerahan sebanyak 1000 lembar papan yang diikat menjadi sebuah rakit yang dibawa ke Kutai Lama melalui sepanjang pantai. Setibanya di Kutai lama, ternyata ada 10 keping papan yang kurang (terlepas selama dalam perjalanan) dan hasil dari pencarian menemukan bahwa 10 keping papan tersebut terhanyut dan timbul disuatu tempat yang sekarang bernama "Jenebora". Dari peristiwa inilah nama Balikpapan itu diberikan (dalam istilah bahasa Kutai "Baliklah - papan itu" atau papan yang kembali yang tidak mau ikut disumbangkan).

- 2) Versi Kedua (Sumber : Legenda rakyat yang dimuat dalam buku 90 Tahun Kota Balikpapan )

Menurut legenda dari orang-orang suku Pasir Balik atau lazim disebut Suku Pasir Kuleng, maka secara turun menurun telah dikhayatkan tentang asal mula nama "Negeri Balikpapan". Orang-orang suku Pasir Balik yang bermukim di sepanjang pantai teluk Balikpapan adalah berasal dari keturunan kakek dan nenek yang bernama " KAYUN KULENG dan PAPAN AYUN ". Oleh keturunannya kampung nelayan yang terletak di Teluk Balikpapan itu diberi nama "KULENG - PAPAN" atau artinya "BALIK - PAPAN" (Dalam bahasa Pasir, Kuleng artinya Balik dan Papan artinya Papan) dan diperkirakan nama negeri Balikpapan itu adalah sekitar tahun 1527.







# BAB 3

## KONDISI UMUM KOTA BALIKPAPAN

### 3.1 GEOGRAFIS KOTA BALIKPAPAN

#### 3.1.1 Administrasi Kota Balikpapan

Letak geografis Kota Balikpapan berada pada posisi 116,5° Bujur Timur dan 117,0° Bujur Timur serta diantara 1,0° Lintang Selatan dan 1,5° Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

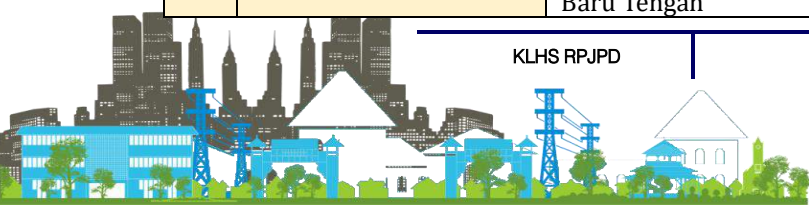
Secara administrasi wilayah Kota Balikpapan adalah salah satu kota besar yang berada di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah secara administratif menurut RTRW Tahun 2012-2032 adalah 81.495 Ha, terdiri dari luas wilayah daratan 50.330,57 Ha dan luas lautan 31.164,03 Ha. Wilayah administrasi Kota Balikpapan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara pada Bagian Utara, Selat Makassar pada bagian Selatan dan Timur, serta Penajam Paser Utara pada Bagian Barat. Berdasarkan hasil analisis Peta Citra Tahun 2020, luas wilayah daratan Kota Balikpapan 51.121,517 Ha. Kecamatan Balikpapan Barat merupakan kecamatan terluas 19.300,114 Ha atau 37,75% dari luas total wilayah daratan. Kecamatan Balikpapan Utara 13.831,134 Ha atau 27,05% dari luas total wilayah daratan dan Kecamatan Balikpapan Timur 11.916,712 Ha atau 23,31% dari luas total wilayah daratan. Dengan luas wilayah kelurahan terluas adalah Kelurahan Kariangau 18.761,814 Ha atau 36,70% dan Kelurahan Karang Joang 10.233,046 Ha atau 20,02% dari luas wilayah Kota Balikpapan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Dati II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Timur, Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tujuh Kelurahan dalam wilayah Kota Balikpapan dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan, secara administratif wilayah Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan.

Batas wilayah administrasi Kota Balikpapan dengan wilayah berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara diatur dalam Permendagri Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kota Balikpapan Dengan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah batas antara Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara diatur dalam Permendagri No: 48 Thn 2012. Pembagian wilayah administrasi Kota Balikpapan terlihat dalam Tabel III.1 dan Gambar 3.1 dibawah ini.

**Tabel III.1 Luas Wilayah Kota Balikpapan**

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Daratan		Luas Perairan (Ha)
			(Ha)	%	
1	Balikpapan Barat		19.300,11	37,77	3.517,00
		Baru Ilir	71,33	0,14	
		Baru Tengah	91,26	0,18	

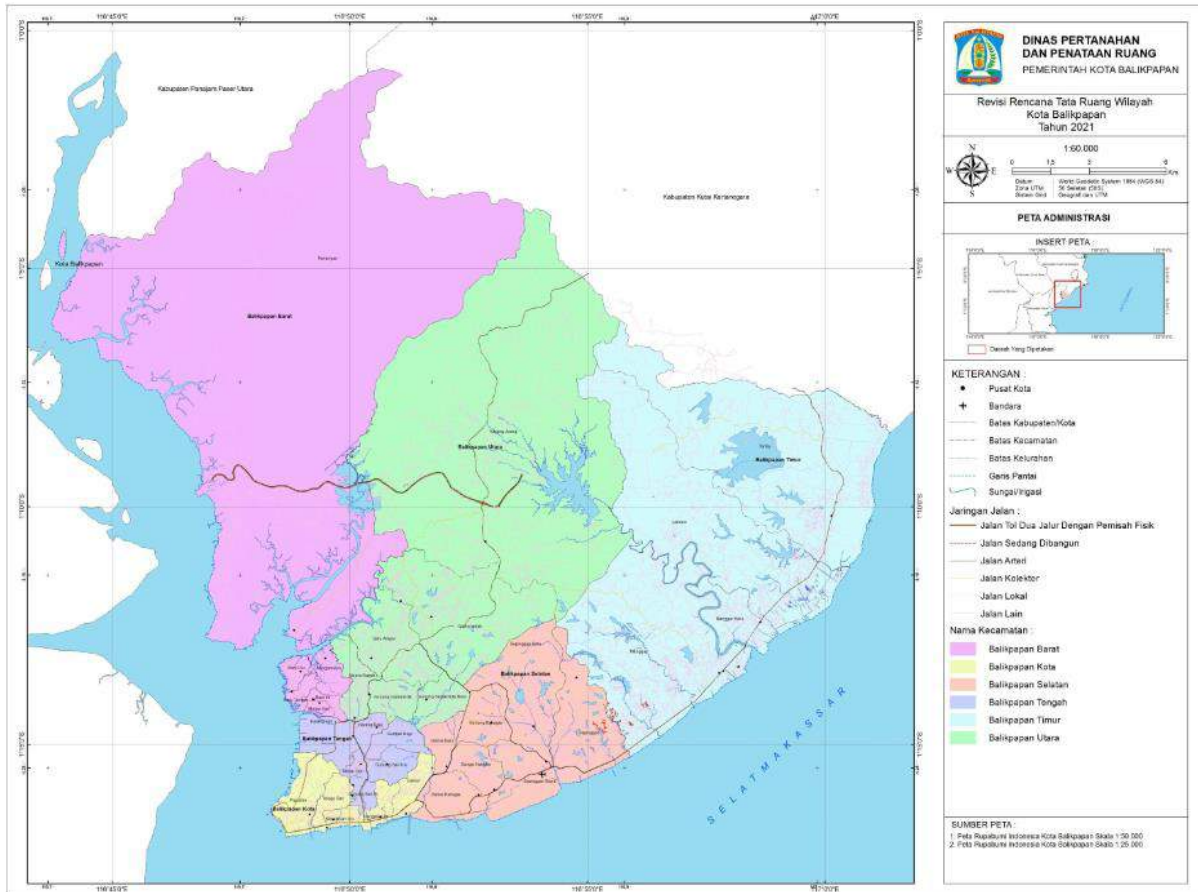




No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Daratan		Luas Perairan (Ha)
			(Ha)	%	
		Baru Ulu	121,21	0,24	
		Kariangau	18.761,81	36,71	
		Marga Sari	56,94	0,11	
		Margomulyo	197,57	0,39	
			<b>1.109,83</b>	<b>2,17</b>	<b>6.051,38</b>
2	Balikpapan Kota	Damai	222,31	0,44	
		Klandasan Ilir	161,67	0,32	
		Klandasan Ulu	106,97	0,21	
		Prapatan	442,49	0,87	
		Telaga Sari	176,39	0,35	
				<b>3.881,15</b>	<b>7,60</b>
3	Balikpapan Selatan	Damai Bahagia	375,63	0,74	
		Damai Baru	215,53	0,42	
		Gunung Bahagia	373,86	0,73	
		Sepinggian	869,74	1,70	
		Sepinggian Baru	1.063,72	2,08	
		Sepinggian Raya	662,72	1,30	
		Sungai Nangka	319,95	0,63	
				<b>1.082,57</b>	<b>2,12</b>
4	Balikpapan Tengah	Gunung Sari Ilir	108,51	0,21	
		Gunung Sari Ulu	205,61	0,40	
		Karang Jati	358,09	0,70	
		Karang Rejo	121,90	0,24	
		Mekar Sari	72,37	0,14	
		Sumber Rejo	216,10	0,42	
				<b>11.916,71</b>	<b>23,32</b>
5	Balikpapan Timur	Lamaru	3.607,02	7,06	
		Manggar	3.304,23	6,47	
		Manggar Baru	521,36	1,02	
		Teritip	4.484,11	8,77	
				<b>13.831,13</b>	<b>27,07</b>
6	Balikpapan Utara	Batu Ampar	780,10	1,53	
		Graha Indah	1.929,02	3,77	
		Gunung Samarinda	267,59	0,52	
		Gunung Samarinda Baru	304,65	0,60	
		Karang Joang	10.233,05	20,03	
		Muara Rapak	316,73	0,62	
				<b>TOTAL LUAS KOTA BALIKPAPAN</b>	<b>51.121,52</b>
		<b>TOTAL LUAS DARATAN DAN PERAIRAN</b>		<b>82.285,55</b>	

Sumber : Luas Daratan Hasil Analisis GIS Tahun 2021, Luas Perairan RTRW Tahun 2012-2032





**Gambar 3.1** Peta Administrasi Kota Balikpapan

### 3.1.2 Kondisi Fisik Lingkungan Kota Balikpapan

#### 3.1.2.1 Topografi dan Kemiringan Lereng

Secara umum Kota Balikpapan berada pada ketinggian 0-100(mdpl) meter di atas permukaan laut. Klasifikasi terbesar yaitu berada pada ketinggian 30-50 Mdpl atau 47,14% dari luas total wilayah, berikutnya secara berurut 0-10 Mdpl dengan luas 9.704,21 Ha atau 18,99% dari luas total wilayah kota; 100-140 Mdpl 9.251,38 Ha atau 18,10% dari total luas wilayah kota. Wilayah Kecamatan Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara mempunyai wilayah terbesar dengan ketinggian 30-50 Mdpl, sedangkan wilayah kecamatan terluas yang mempunyai ketinggian 0-10 Mdpl berada di Kecamatan Balikpapan Timur. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.2 dibawah ini.

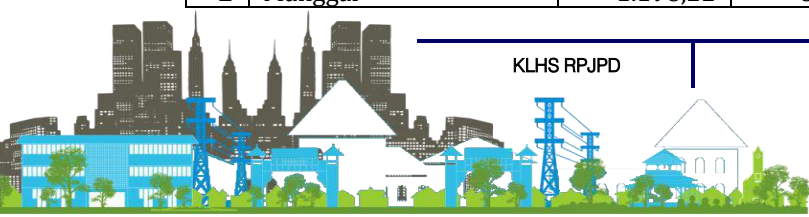
**Tabel III.2 Ketinggian Wilayah Kota Balikpapan Per Kecamatan**

No	Kecamatan	KETINGGIAN					Total
		-4,16 - 10 mdpl	10 - 30 mdpl	30 - 50 mdpl	50 - 100 mdpl	100 - 140,36 mdpl	
1	Balikpapan Barat	3.438,39	1.850,41	6.673,80	7.046,51	278,90	19.288,02
2	Balikpapan Kota	258,25	229,03	402,40	220,14		1.109,82
3	Balikpapan Selatan	515,17	940,42	2.087,76	337,61		3.880,97
4	Balikpapan Tengah	218,71	188,53	576,72	98,62		1.082,58
5	Balikpapan Timur	4.169,61	2.368,36	5.206,85	170,71		11.915,52
6	Balikpapan Utara	1.104,07	2.203,00	9.139,46	1.377,81		13.824,34
<b>Grand Total</b>		<b>9.704,21</b>	<b>7.779,76</b>	<b>24.087,00</b>	<b>9.251,38</b>	<b>278,90</b>	<b>51.101,24</b>
<b>Prosentase (%)</b>		<b>18,99</b>	<b>15,22</b>	<b>47,14</b>	<b>18,10</b>	<b>0,55</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Analisis Peta ArGIS, Tahun 2021

**Tabel III.3 Luas Wilayah Kota Balikpapan Menurut Ketinggian (Mdpl)**

No	Kecamatan/Kelurahan	KETINGGIAN				
		-4,16 - 10 mdpl	10 - 30 mdpl	30 - 50 mdpl	50 - 100 mdpl	100 - 140,36 mdpl
<b>I</b>	<b>Balikpapan Barat</b>	<b>3.438,39</b>	<b>1.850,41</b>	<b>6.673,80</b>	<b>7.046,51</b>	<b>278,90</b>
1	Baru Ilir	19,87	24,73	26,71		
2	Baru Tengah	48,68	15,06	27,51		
3	Baru Ulu	69,82	19,57	31,82		
4	Kariangau	3.150,52	1.756,70	6.518,11	7.046,02	278,90
5	Marga Sari	56,94				
6	Margomulyo	92,57	34,36	69,66	0,49	
<b>II</b>	<b>Balikpapan Kota</b>	<b>258,25</b>	<b>229,03</b>	<b>402,40</b>	<b>220,14</b>	
1	Damai	58,57	80,85	82,90		
2	Klandasan Ilir	33,49	51,25	76,93		
3	Klandasan Ulu	40,83	37,17	28,97		
4	Prapatan	118,96	48,35	144,11	131,05	
5	Telaga Sari	6,39	11,42	69,49	89,09	
<b>III</b>	<b>Balikpapan Selatan</b>	<b>515,17</b>	<b>940,42</b>	<b>2.087,76</b>	<b>337,61</b>	
1	Damai Bahagia	135,96	126,46	113,21		
2	Damai Baru	14,11	122,00	79,42		
3	Gunung Bahagia		40,91	308,65	24,29	
4	Sepinggan	64,90	195,76	543,61	65,46	
5	Sepinggan Baru	15,20	173,82	633,41	241,26	
6	Sepinggan Raya	279,20	167,95	208,85	6,59	
7	Sungai Nangka	5,81	113,52	200,62		
<b>IV</b>	<b>Balikpapan Tengah</b>	<b>218,71</b>	<b>188,53</b>	<b>576,72</b>	<b>98,62</b>	
1	Gunung Sari Ilir		46,55	61,95		
2	Gunung Sari Ulu		15,87	148,53	41,21	
3	Karang Jati	205,43	40,81	103,27	8,58	
4	Karang Rejo		15,20	98,98	7,73	
5	Mekar Sari		10,26	50,76	11,35	
6	Sumber Rejo	13,28	59,85	113,23	29,74	
<b>V</b>	<b>Balikpapan Timur</b>	<b>4.169,61</b>	<b>2.368,36</b>	<b>5.206,85</b>	<b>170,71</b>	
1	Lamaru	978,14	641,35	1.937,72	49,82	
2	Manggar	1.198,22	808,05	1.297,16	0,29	



No	Kecamatan/Kelurahan	KETINGGIAN				
		-4,16 - 10 mdpl	10 - 30 mdpl	30 - 50 mdpl	50 - 100 mdpl	100 - 140,36 mdpl
3	Manggar Baru	440,10	56,96	24,29		
4	Teritip	1.553,15	862,00	1.947,67	120,60	
<b>VI</b>	<b>Balikpapan Utara</b>	<b>1.104,07</b>	<b>2.203,00</b>	<b>9.139,46</b>	<b>1.377,81</b>	
1	Batu Ampar	188,89	162,79	377,30	51,06	
2	Graha Indah	179,94	201,79	1.236,36	306,51	
3	Gunung Samarinda	13,56	106,73	132,68	13,44	
4	Gunung Samarinda Baru	21,41	158,55	124,24		
5	Karang Joang	646,85	1.522,85	7.076,02	986,66	
6	Muara Rapak	53,42	50,29	192,86	20,15	
	<b>Grand Total</b>	<b>9.704,21</b>	<b>7.779,76</b>	<b>24.087,00</b>	<b>9.251,38</b>	<b>278,90</b>
	<b>Prosentase (%)</b>	<b>18,99</b>	<b>15,22</b>	<b>47,14</b>	<b>18,10</b>	<b>0,55</b>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

Dilihat berdasarkan kelerengan wilayah Kota Balikpapan secara umum kurang lebih mencapai 39.306,80 Ha atau 76,92% dari luas total wilayah mempunyai kelerengan antara 5-15%. Sedangkan luas dengan kelerengan 15-40% mencapai luas 9.272,97 Ha atau 18,14% dari total luas wilayah. Prosentasi kelerengan > 40% cukup kecil hanya mencapai 0,01% dari total luas wilayah dengan luas 5,49 Ha. Hampir semua wilayah kecamatan didominasi dengan kelerengan antara 5-15% dan 15-40%, dengan demikian hampir sebagian besar daerah di Kota Balikpapan adalah berupa bukit dan lembah. Kondisi kelerengan Kota Balikpapan dapat dilihat pada Tabel III.4 dibawah ini.

**Tabel III.4 Luas Wilayah Berdasarkan Kelerengan Dirinci Per Kelurahan di Kota Balikpapan**

No	Kecamatan/Kelurahan	Persen Lereng					Total
		0 - 2 %	2 - 5 %	5 - 15 %	15 - 40 %	> 40 %	
<b>I</b>	<b>Balikpapan Barat</b>	<b>108,24</b>	<b>261,62</b>	<b>13.732,44</b>	<b>5.185,72</b>		<b>19.288,02</b>
1	Baru Ilir			48,53	22,78		71,31
2	Baru Tengah	1,00		70,99	19,26		91,25
3	Baru Ulu	3,67		75,89	41,65		121,21
4	Kariangau	97,95	261,62	13.358,56	5.032,11		18.750,25
5	Marga Sari	5,07		51,86			56,94
6	Margomulyo	0,54		126,60	69,93		197,07
<b>II</b>	<b>Balikpapan Kota</b>	<b>7,15</b>		<b>731,45</b>	<b>365,73</b>	<b>5,49</b>	<b>1.109,82</b>
1	Damai	0,72		162,67	58,92		222,31
2	Klandasan Ilir	4,87		131,84	24,96		161,67
3	Klandasan Ulu	0,29		106,64	0,04		106,97
4	Prapatan	1,26		233,25	202,47	5,49	442,47
5	Telaga Sari			97,05	79,34		176,39
<b>III</b>	<b>Balikpapan Selatan</b>	<b>15,65</b>	<b>95,16</b>	<b>3.131,14</b>	<b>639,02</b>		<b>3.880,97</b>
1	Damai Bahagia	6,15	11,39	332,94	25,15		375,63
2	Damai Baru			197,81	17,72		215,53
3	Gunung Bahagia			304,12	69,74		373,86
4	Sepinggian		32,70	664,57	172,45		869,72
5	Sepinggian Baru		0,05	853,66	209,99		1.063,70
6	Sepinggian Raya	9,50	51,01	497,01	105,06		662,58
7	Sungai Nangka		0,02	281,03	38,91		319,95
<b>IV</b>	<b>Balikpapan Tengah</b>	<b>3,11</b>		<b>718,91</b>	<b>360,56</b>		<b>1.082,58</b>
1	Gunung Sari Ilir			70,32	38,18		108,51





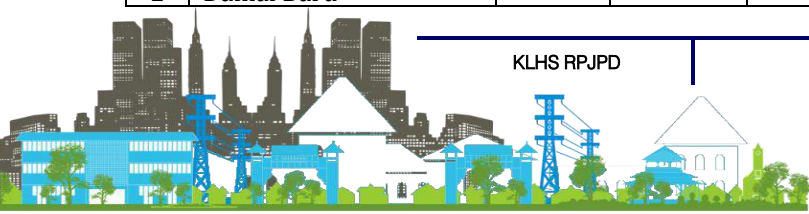
No	Kecamatan/Kelurahan	Persen Lereng					Total
		0 - 2 %	2 - 5 %	5 - 15 %	15 - 40 %	> 40 %	
2	Gunung Sari Ulu			66,97	138,64		205,61
3	Karang Jati	3,11		301,49	53,50		358,10
4	Karang Rejo			95,30	26,60		121,90
5	Mekar Sari			46,02	26,35		72,37
6	Sumber Rejo			138,81	77,29		216,10
<b>V</b>	<b>Balikpapan Timur</b>	<b>337,78</b>	<b>1.394,80</b>	<b>9.452,17</b>	<b>730,77</b>		<b>11.915,52</b>
1	Lamaru	31,72	222,06	3.165,10	188,15		3.607,02
2	Manggar	46,88	479,85	2.484,82	292,18		3.303,73
3	Manggar Baru	49,19	241,37	224,58	6,22		521,35
4	Teritip	209,99	451,53	3.577,68	244,22		4.483,42
<b>VI</b>	<b>Balikpapan Utara</b>	<b>203,78</b>	<b>88,69</b>	<b>11.540,70</b>	<b>1.991,17</b>		<b>13.824,34</b>
1	Batu Ampar	6,98	6,44	566,27	200,36		780,04
2	Graha Indah		22,63	1.481,43	420,53		1.924,59
3	Gunung Samarinda			224,14	42,28		266,42
4	Gunung Samarinda Baru			285,19	19,01		304,20
5	Karang Joang	194,53	59,62	8.748,83	1.229,39		10.232,37
6	Muara Rapak	2,27		234,84	79,60		316,71
	<b>Grand Total</b>	<b>675,71</b>	<b>1.840,27</b>	<b>39.306,80</b>	<b>9.272,97</b>	<b>5,49</b>	<b>51.101,24</b>
	<b>Prosentase (%)</b>	<b>1,32</b>	<b>3,60</b>	<b>76,92</b>	<b>18,15</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Luas Analisis GIS Tahun 2021,

Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari 76,92% kawasan bergelombang dengan luas 39.306,80 Ha, berbukit dan bergelombang mencapai 18,15% dengan luas 9.272,97 Ha. Wilayah dengan morfologis datar hanya 1,32% dengan luas 675,71 Ha, berada di wilayah pesisir Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara. Wilayah dengan perbukitan dengan jenis tanah podsolik merah kuning yang memiliki karakter topsoil tipis, struktur tanah mudah tererosi, sedangkan lainnya merupakan daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai timur dan selatan dengan jenis tanah umumnya adalah alluvial. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.5 dibawah ini.

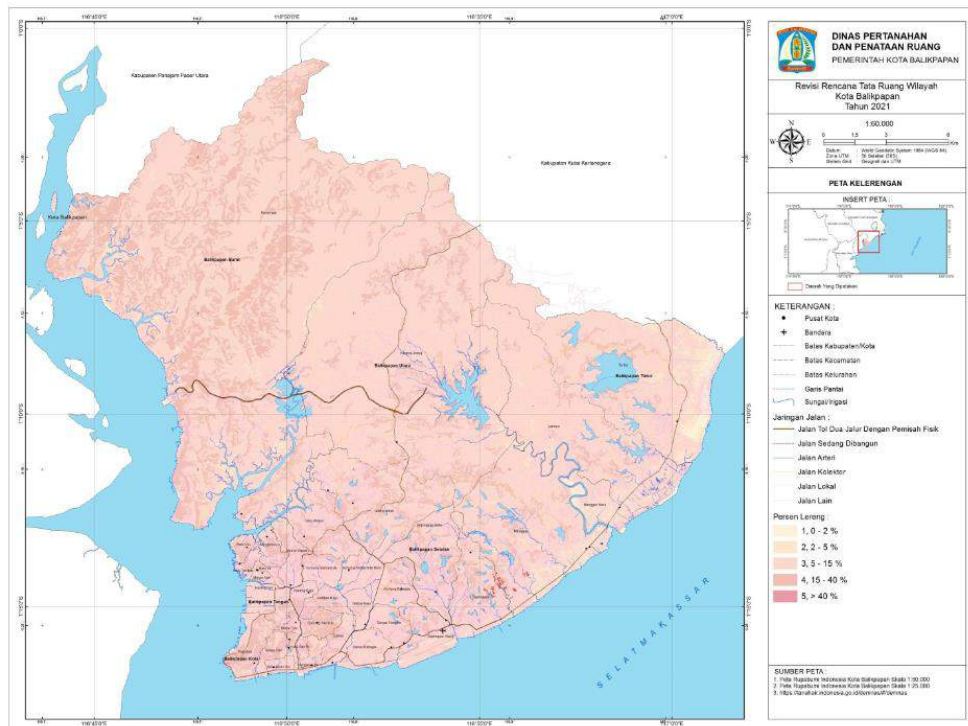
**Tabel III.5 Luas Wilayah Berdasarkan Morfologi Per Kelurahan di Kota Balikpapan**

No	Kecamatan/Kelurahan	Keterangan Morfologi					Total
		Datar	Landai	Bergelombang	Berbukit, Bergelombang	Berbukit-bukit	
<b>I</b>	<b>Balikpapan Barat</b>	<b>108,24</b>	<b>261,62</b>	<b>13.732,44</b>	<b>5.185,72</b>		<b>19.288,02</b>
1	Baru Ilir			48,53	22,78		71,31
2	Baru Tengah	1,00		70,99	19,26		91,25
3	Baru Ulu	3,67		75,89	41,65		121,21
4	Kariangau	97,95	261,62	13.358,56	5.032,11		18.750,25
5	Marga Sari	5,07		51,86			56,94
6	Margomulyo	0,54		126,60	69,93		197,07
<b>II</b>	<b>Balikpapan Kota</b>	<b>7,15</b>		<b>731,45</b>	<b>365,73</b>	<b>5,49</b>	<b>1.109,82</b>
1	Damai	0,72		162,67	58,92		222,31
2	Klandasan Ilir	4,87		131,84	24,96		161,67
3	Klandasan Ulu	0,29		106,64	0,04		106,97
4	Prapatan	1,26		233,25	202,47	5,49	442,47
5	Telaga Sari			97,05	79,34		176,39
<b>III</b>	<b>Balikpapan Selatan</b>	<b>15,65</b>	<b>95,16</b>	<b>3.131,14</b>	<b>639,02</b>		<b>3.880,97</b>
1	Damai Bahagia	6,15	11,39	332,94	25,15		375,63
2	Damai Baru			197,81	17,72		215,53



No	Kecamatan/Kelurahan	Keterangan Morfologi					Total
		Datar	Landai	Bergelombang	Berbukit, Bergelombang	Berbukit- bukit	
3	Gunung Bahagia			304,12	69,74		373,86
4	Sepinggán		32,70	664,57	172,45		869,72
5	Sepinggán Baru		0,05	853,66	209,99		1.063,70
6	Sepinggán Raya	9,50	51,01	497,01	105,06		662,58
7	Sungai Nangka		0,02	281,03	38,91		319,95
<b>IV</b>	<b>Balikpapan Tengah</b>	<b>3,11</b>		<b>718,91</b>	<b>360,56</b>		<b>1.082,58</b>
1	Gunung Sari Ilir			70,32	38,18		108,51
2	Gunung Sari Ulu			66,97	138,64		205,61
3	Karang Jati	3,11		301,49	53,50		358,10
4	Karang Rejo			95,30	26,60		121,90
5	Mekar Sari			46,02	26,35		72,37
6	Sumber Rejo			138,81	77,29		216,10
<b>V</b>	<b>Balikpapan Timur</b>	<b>337,78</b>	<b>1.394,80</b>	<b>9.452,17</b>	<b>730,77</b>		<b>11.915,52</b>
1	Lamaru	31,72	222,06	3.165,10	188,15		3.607,02
2	Manggar	46,88	479,85	2.484,82	292,18		3.303,73
3	Manggar Baru	49,19	241,37	224,58	6,22		521,35
4	Teritip	209,99	451,53	3.577,68	244,22		4.483,42
<b>VI</b>	<b>Balikpapan Utara</b>	<b>203,78</b>	<b>88,69</b>	<b>11.540,70</b>	<b>1.991,17</b>		<b>13.824,34</b>
1	Batu Ampar	6,98	6,44	566,27	200,36		780,04
2	Graha Indah		22,63	1.481,43	420,53		1.924,59
3	Gunung Samarinda			224,14	42,28		266,42
4	Gunung Samarinda Baru			285,19	19,01		304,20
5	Karang Joang	194,53	59,62	8.748,83	1.229,39		10.232,37
6	Muara Rapak	2,27		234,84	79,60		316,71
	<b>Grand Total</b>	<b>675,71</b>	<b>1.840,27</b>	<b>39.306,80</b>	<b>9.272,97</b>	<b>5,49</b>	<b>51.101,24</b>
	<b>Prosentase (%)</b>	<b>1,32</b>	<b>3,60</b>	<b>76,92</b>	<b>18,15</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Analisis Peta ArGIS Tahun 2021



Gambar 3.2 Peta Kemiringan Lereng Kota Balikpapan

### 3.1.2.2 Jenis Tanah

Jenis tanah yang ada di Kota Balikpapan terbagi menjadi 5 (lima) jenis yang diantaranya adalah aluvial, marin, fluvio marin, volkan, tektonik/ struktural. Adapun di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai masing-masing jenis tanah yang ada di Kota Balikpapan.

a. Tanah pada Group Aluvial

Berdasarkan pembentukan tanahnya, satuan tanah ini merupakan dataran aluvial yang dominan (50-75%), terjadi pada kelerengan 1-3% dengan bahan induk –aluvium”. Sifat corak tanah ini yaitu berwarna kelabu tanpa solum, memiliki tekstur liat ataupun pasir, strukturnya pejal, serta konsistensinya terdiri dari beberapa tipe yaitu teguh (lembab), plastik (basah), keras (kering) di atas lapisan keras. Bahan induk tanah ini adalah aluvium.

Sifat tanah ini beraneka macam tingkat kemasamannya, kandungan zat organik rendah, daya adsorpsi yang tinggi, permeabilitas rendah, serta kepekaan erosinya besar. Biasanya tanah aluvial ini digunakan untuk kegiatan pertanian seperti padi sawah, palawija dan juga perikanan.

b. Tanah pada Group Marin

Bentukan lahannya berupa dataran pasang surut lumpur, mempunyai kelerengan < 1% dengan bahan induk aluvium. Jenis tanah ini umumnya terdapat disekitar Sungai Wain Besar dan Sumber.

c. Tanah pada Group Fluvio Marin

Ada 2 (jenis tanah) pada group ini yaitu:

- 1) Bentuk lahannya berupa dataran estuarin sepanjang muara sungai/pantai dengan kelerengan < 1% dan bahan induk aluvium. Tanah ini umumnya terdapat di kanan kiri sepanjang Sungai Manggar Besar.
- 2) Bentuk lahannya berupa dataran fluvio marin dengan kelerengan < 1% dan bahan induknya adalah aluvium. Jenis tanah ini terdapat di sepanjang pantai yang menghadap Selat Makassar.

d. Tanah pada Group Volkan

Bentukan lahannya berupa bahan induk volkan. Tanah pada group volkan setara dengan regosol. Tanah ini berada di pantai di Balikpapan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara.

e. Tanah pada Group Tektonik/Struktural

Pada tanah group tektonik, jenis tanah di bagi menjadi menjadi 5 jenis, yaitu:

- 1) Bentuk lahannya berupa dataran tektonik berombak agak tertoreh dengan bentuk relief berombak berkisar antara 3-8% dan bahan induknya batu liat dan batu pasir. Lokasi penyebarannya adalah di pusat kota tepatnya Kecamatan Balikpapan Selatan, Tengah dan Barat yang berbatasan langsung dengan Teluk Balikpapan.
- 2) Bentuk lahannya berupa dataran tektonik bergelombang, agak tertoreh dan relief bergelombang berkisar antara 8-15%. Bahan induk batu liat dan batu gamping. Penyebarannya meliputi Kecamatan Balikpapan Utara seperti di



Kelurahan Muara Rapak Kelurahan Gunung Samarinda, Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Karang Joang.

- 3) Bentukannya berupa dataran bergelombang cukup tertoreh dengan relief bergelombang 15-30% dan bahan induknya berupa batuliat dan batupasir. Penyebarannya disekitar Bangun Reksa, Karang Joang dan Manggar.
- 4) Bentukannya berupa dataran tektonik bergelombang cukup tertoreh dengan relief berbukit kecil (15-30%) dengan bahan induk batuliat dan batupasir. Penyebarannya terutama di Kecamatan Balikpapan Barat dan sebagian kecil di Balikpapan Utara.
- 5) Bentukannya berupa perbukitan paralel lipatan, sangat tertoreh dengan relief berbukit 15-30% dan bahan induknya berupa batu liat, batu pasir dan batu gamping. Penyebarannya di Karang Joang Km 15.

Karena bahan induknya, adalah batu liat dan batu gamping maupun batupasir yang dominan, maka jenis tanah ini setara dengan jenis tanah Podsolik Merah Kuning. Faktor pembentuk tanah tektonik ini yaitu dengan iklim curah hujan 2.500-3.500 mm/tahun, berbatu induk tuf asam, batuan pasir dan sedimen kwarsa, memiliki topografi bergelombang sampai berbukit 50-3.500 meter di atas permukaan laut, dan vegetasinya berupa hutan tropika, alang-alang, pinus dan pakis.

Tanah tektonik memiliki corak berwarna merah hingga kuning dengan solum agak tebal 1-2 meter, memiliki tekstur yang beraneka macam, struktur tanahnya menggumpal dibawah dan makin keatas makin pejal, konsistensi tanah teguh sampai gembur.

Adapun sifat tanah memiliki tingkat kemasaman yang sedang hingga tinggi, kejenuhan basa yang rendah (< 20%), memiliki daya adsorpsi rendah hingga tinggi tergantung tekstur dan mineral liatnya, memiliki unsur hara yang rendah, permeabilitas tergantung dari tekstur bahan induk dari lambat hingga ke sedang, serta memiliki kepekaan erosi yang besar. Biasanya tanah jenis ini digunakan untuk perkebunan seperti ladang, karet, dan alang-alang.

Jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.6 dibawah ini.

**Tabel III.6 Jenis Tanah di Wilayah Kota Balikpapan**

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1.	Tanah pada Grup Aluvial SPT-2	6.025,71	11,93
	Satuan tanah	<i>Asosiasi Endoaquepts, Dystrudepts, humaquepts</i>	
	Landform	Dataran Aluvial	
	Relief	Agak datar (1-3%)	
	Bahan Induk	<i>Aluvium</i>	
2.	Tanah pada Grup Marin SPT-7	3.125,73	6,19
	- Satuan tanah	<i>Asosiasi sulfaquepts, endoaquepts (sulfic), hydraquepts</i>	
	- Landform	Dataran pasang surut	
	- Relief	datar (<1%)	
	- Bahan Induk	<i>Aluvium</i>	
3.	Tanah pada Grup Vulkan SPT 23	267	0,53
	- Satuan tanah	<i>Hapludalfs, hapludolis, eutrudepts</i>	





No.	Jenis Tanah		Luas (Ha)	Prosentase (%)
	- Landform	perbukitan vulkan, sangat tertoreh		
	- Relief	berbukit (15-30%)		
	- Bahan Induk	volkan		
4.	Tanah pada Grup Tektonik SPT 24		3.307,82	6,55
	- Satuan tanah	<i>Hapludalfs, Plintudult, Dystrudepts</i>		
	- Landform	Dataran tektonik berombak, agak tertoreh		
	- Relief	berombak (3-8%)		
	- Bahan Induk	Batu liat & batu pasir		
5.	SPT 26		8.975,63	17,77
	- Satuan tanah	<i>Hapludalfs, Eutrudepts</i>		
	- Landform	bergelombang, cukup tertoreh		
	- Relief	bergelombang (8-15%)		
	- Bahan Induk	Batu liat & batu gamping		
6.	GPT-27		13.485,83	26,7
	- Satuan tanah	<i>Hapludalfs, Dystrudepts, plinthudults</i>		
	- Landform	dataran tektonik bergelombang, cukup tertoreh		
	- Relief	bergelombang (8-15%)		
	- Bahan Induk	batuliat & batupasir		
7.	Tanah pada Grup Tektonik SPT 29		11.976,01	23,71
	- Satuan tanah	<i>Hapludalfs, paleudults, dystrudepts</i>		
	- Landform	dataran tektonik, bergelombang, cukup tertoreh		
	- Relief	berbukit (15-30%)		
	- Bahan Induk	<i>Batu liat &amp; batu pasir</i>		
8.	SPT 36		532,03	1,05
	- Satuan tanah	<i>Hapludalfs, paleudults, dystrudepts</i>		
	- Landform	Perbukitan paralel lipatan, cukup tertoreh		
	- Relief	berbukit kecil (15-30%)		
	- Bahan Induk	Batu liat & batu pasir		
9.	SPT-38		233,57	0,46
	- Satuan tanah	<i>Hapludox, dystrudepts, hapludalfs</i>		
	- Landform	perbukitan <i>paralel</i> lipatan, sangat tertoreh		
	- Relief	berbukit (15-30%)		
	- Bahan Induk	Batu liat, batu pasir dan batu gamping		
10	TANAH PADA GROUP FLUVIO-MARIN SPT-9		776,88	1,54
	- Satuan tanah	<i>Sulfaquents, endoaquents, hydraquents (sulfic)</i>		
	- Landform	dataran <i>estuarine</i> , sepanjang muara sungai / pantai		
	- Relief	datar (<1%)		
	- Bahan Induk	<i>Aluvium</i>		



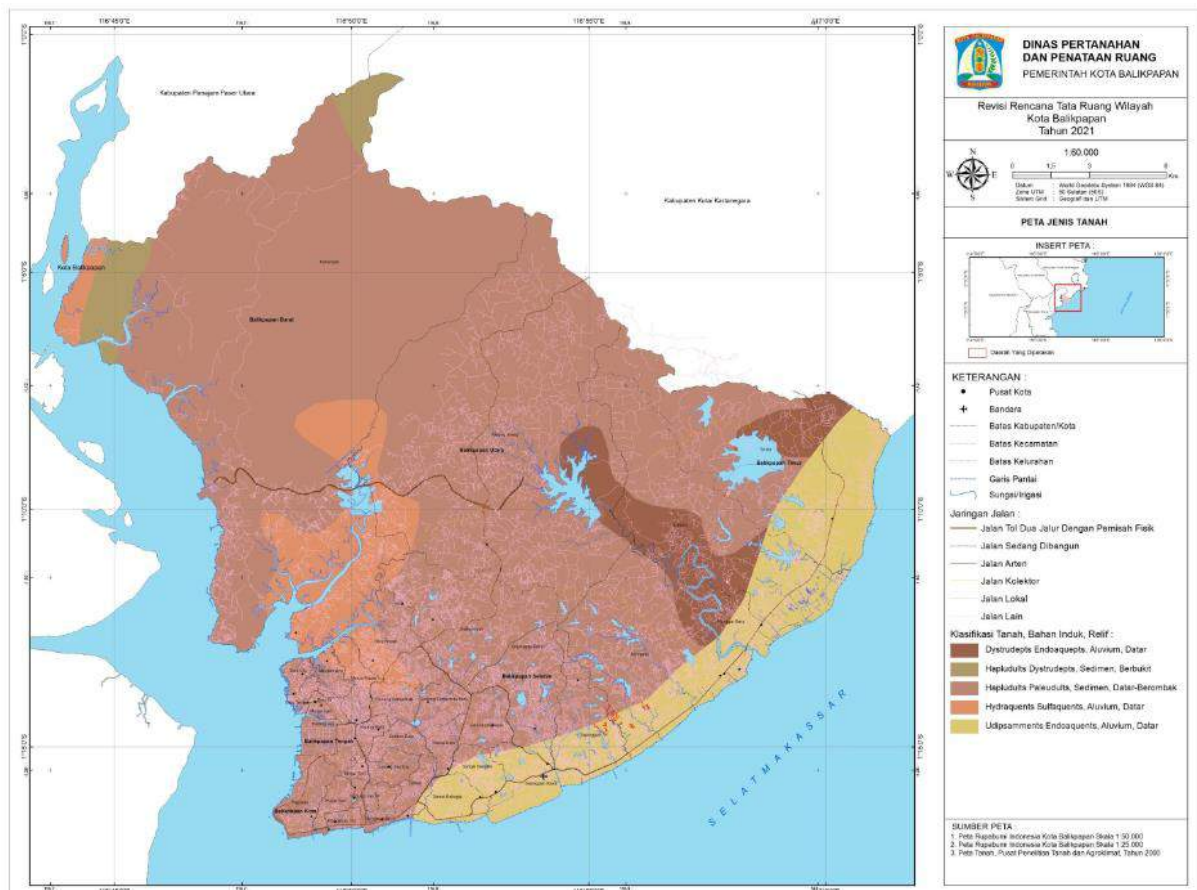
No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Prosentase (%)
11	SPT 12	1.624,36	15,1
	- Satuan tanah	<i>Sulfaquents, endoaquents, hydraquents (sulfic)</i>	
	- Landform	dataran <i>estuarine</i> , sepanjang muara sungai / pantai	
	- Relief	datar (<1%)	
	- Bahan Induk	Aluvium	
	<b>Total</b>	<b>50.330,57</b>	<b>100</b>

Sumber : Dokumen RTRW Kota Balikpapan

Tabel III.7 Klasifikasi Jenis Tanah di Wilayah Kota Balikpapan

Klasifikasi Tanah	Bahan Induk	Sub_Landform	Relief	Luas (Ha)
Udipsammets Endoaquents	Aluvium	Pesisir Pantai	Datar	5.664,85
Dystrudepts Endoaquents	Aluvium	Dataran Antar Perbukitan	Datar	2.856,48
Hydraquents Sulfaquents	Aluvium	Dataran Pasang Surut	Datar	4.156,67
Hapludults Dystrudepts	Sedimen	Perbukitan Tektonik	Berbukit	1.117,44
Hapludults Paleudults	Sedimen	Dataran Tektonik	Datar-Berombak	37.305,80
<b>Total</b>				<b>51.101,24</b>

*Peta Tanah, Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, Tahun 2000  
Analisis Peta ARGIS Tahun 2021*



Gambar 3.3 Peta Jenis Tanah Kota Balikpapan

### 3.1.2.3 Geomorfologi

Berdasarkan kemiringan lereng dan kontrol struktur geologi yang berkembang, wilayah Kota Balikpapan dapat dibagi menjadi tiga satuan geomorfik, yaitu satuan perbukitan bergelombang sedang, satuan perbukitan bergelombang lemah, dan satuan dataran alluvial. Sebaran dari ketiga satuan ini secara umum relatif sejajar dengan sebaran struktur lipatan yang berkembang, yaitu relatif timurlaut-barat daya.

#### a. Satuan Geomorfik Perbukitan Bergelombang Sedang

Satuan geomorfik ini menempati area dengan luas kurang lebih 55%, mempunyai kemiringan lereng rata-rata 15-40% dengan beda tinggi kurang lebih 10-30 meter.

Satuan geomorfik ini menempati sebagian besar Kota Balikpapan terutama di bagian Utara - Barat Laut yang merupakan daerah hutan lindung, sebagian di timur laut meliputi sebagian dari Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Timur.

#### b. Satuan Geomorfik Perbukitan Bergelombang Lemah

Satuan geomorfik ini membentuk pola selingan dengan perbukitan bergelombang sedang yang membujur barat daya-timur laut dengan luas kurang lebih 30%, umumnya mempunyai kemiringan lereng 5-15 % dengan beda tinggi kurang lebih 3-15 meter.

Satuan geomorfik ini menempati bagian tengah Kota Balikpapan tepatnya di lembah Sungai Wain, daerah Gunung Bahagia sampai Gunung Binjai yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Timur dengan litologi penyusunan batupasir kuarsa, batupasir dengan konkresi/nodul besi, serpih, batu lanau, sisipan batubara dan dikontrol struktur geologi berupa homoklin yang merupakan sayap antiklin atau siklin dengan kemiringan landai sehingga membentuk suatu lembah homoklin.

#### c. Satuan Dataran Alluvial

Satuan ini tersebar sebagian besar di pinggir pantai dan lembah-lembah sungai dengan luas kurang lebih 15%, material penyusunnya merupakan endapan kerakal – lempung yang belum terkonsolidasi atau bersifat lepas-lepas yang merupakan hasil pengendapan aktivitas sungai dan air laut. Kemiringan lereng umumnya 0-5% dengan beda tinggi kurang lebih 0-2 meter. Menempati pantai sebelah timur dari Sepinggian hingga Teritip, lembah-lembah disekitar Sungai Wain, Sungai Sumber dan Sungai Manggar Besar dan sebagian pantai di Teluk Balikpapan.

### 3.1.2.4 Geologi

Dibawah ini merupakan penjabaran kondisi geologi di Kota Balikpapan.

#### A. Stratigrafi

Menurut Hidayat dan Umar (1994), wilayah Kota Balikpapan tersusun atas empat satuan batuan, berurut-turut dari yang paling muda ke tua adalah Satuan Endapan Pasir (Endapan Aluvial), Formasi Kampungbaru, Formasi Balikpapan, dan Formasi



Pulaubalang. Pengamatan yang dilakukan selama penelitian, batuan yang terdapat di Kota Balikpapan menunjukkan variasi yang relative sama dengan apa yang telah ditemukan para peneliti terdahulu, umumnya terdiri dari batupasir kuarsa, batupasir dengan sisipan nodul-nodul besi, serpih, batulempung, dan sisipan batubara. Oleh karena penamaan satuan batuan dalam pembahasan tentang batuan dan stratigrafi secara detil akan mengacu pada penelitian yang telah ada.

### **1. Satuan Endapan Pasir (Endapan Aluvial)**

Satuan ini berupa material lepas berukuran lempung sampai kerakal sebagai hasil endapan sungai, rawa, pantai dan delta. Satuan ini diendapkan secara tidak selaras diatas bidang erosi terhadap satuan batuan dibawahnya. Satuan ini sebagian besar tersebar di sepanjang pantai timur dari wilayah Kota Balikpapan, terutama di daerah Manggar, Lamaru, dan Teritip, demikian juga di kiri-kanan Sungai Wien dan Sungai Sumber.

### **2. Formasi Kampung Baru**

#### ***Sebaran***

Satuan ini mempunyai sebaran yang paling luas di wilayah Kota Balikpapan, terutama di bagian utara dan tengah, meliputi wilayah Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, sebagian Kecamatan Balikpapan Tengah, dan Kecamatan Balikpapan Timur.

#### ***Batuan penyusun***

Satuan ini terdiri dari perselingan batulempung, batulanau, batupasir kuarsa, serpih dengan sisipan batubara, lignit, dan napal. Pada beberapa lapisan mengandung nodul atau konkresi besi oksida dan batugamping. Satuan ini diendapkan secara selaras dan sebagian menjeri dengan satuan di bawahnya. Singkapan batubara yang cukup tebal (> 3 m) dapat dijumpai di Dusun Gunung Binjai.

#### ***Umur dan Lingkungan Pengendapan***

Formasi ini mempunyai umur Miosen Akhir dan diendapkan pada lingkungan pengendapan darat – laut dangkal dengan fasies delta dan fasies laut dangkal (Moss dan Chambers, 1998). Formasi Kampung Baru diendapkan secara selaras diatas Formasi Balikpapan.

### **3. Formasi Balikpapan**

#### ***Sebaran***

Formasi Balikpapan sebagian besar tersebar di bagian barat laut dan barat daya wilayah Kota Balikpapan, meliputi daerah Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Tengah dan sebagian Kecamatan Balikpapan Barat.

#### ***Batuan penyusun***

Bagian atas satuan ini tersusun didominasi oleh batupasir kuarsa, dengan sisipan-sisipan batulempung, batulanau, dan serpih. Sedangkan pada bagian bawah disusun oleh perselingan batulanau, batupasir, dan batulempung dengan sisipan napal, batupasir gampingan, batubara. Pada beberapa lapisan batupasir mengandung fragmen-fragmen batubara. Batubara pada satuan ini umumnya





relatif lebih tipis dibanding pada Formasi Kampung Baru. Kenampakan yang paling umum pada satuan ini adalah batupasir kuarsa yang sebagian besar memperlihatkan struktur silang siur (cross bedding).

#### ***Umur dan Lingkungan Pengendapan***

Formasi ini mempunyai umur Miosen Tengah – Miosen Akhir bagian bawah dan diendapkan pada lingkungan pengendapan darat – transisi – laut dangkal dengan fasies delta (Moss dan Chambers, 1998). Formasi ini mempunyai hubungan selaras dengan formasi dibawahnya yaitu Formasi Pulau Balang.

### **4. Formasi Pulau Balang**

#### ***Sebaran***

Satuan ini tersingkap di Pulau Balang serta bagian ujung barat laut wilayah Kota Balikpapan, yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### ***Batuan penyusun***

Satuan ini secara regional terdiri dari batupasir kuarsa, batupasir gampingan, batulanau dengan sisipan batubara. Di lapangan sebagian besar batuan penyusun satuan ini lapuk dan tertutup vegetasi yang lebat. Oleh karena itu data-data batuan yang di dapatkan di lapangan sangat terbatas.

#### ***Umur dan Lingkungan Pengendapan***

Formasi ini mempunyai umur Miosen Awal dan merupakan formasi tertua yang terdapat di Kota Balikpapan, diendapkan pada lingkungan laut dangkal dengan fasies delta (Moss dan Chambers, 1998), dan memiliki hubungan terhadap formasi dibawahnya yakni Formasi Pamaluan.

## **B. Struktur Geologi**

Dari kenampakan di lapangan menunjukkan bahwa perlapisan batuan di daerah telian telah mengalami perlipatan secara lemah, membentuk struktur antiklin dan sinklin. Di beberapa tempat terlihat adanya kekar-kekar dan patahan (sesar) kecil.

### **1. Lipatan**

Berdasarkan pengamatan langsung dilapangan serta dengan studi referensi yang telah ada, geologi Kota Balikpapan dikontrol oleh dua sumbu antiklin dan dua sumbu sinklin. Sumbusumbu lipatan tersebut secara umum berarah timur laut-baratdaya, oleh karena itu lapisanlapisan batuan yang ada umumnya miring ke tenggara dan barat laut.

### **2. Kekar**

Daerah ditemukannya kekar sering berasosiasi dengan terdapatnya zona patahan atau longsoran. Daerah yang banyak terkekarkan kemungkinan besar memang akan berkembang menjadi patahan atau bahkan mempengaruhi terjadinya patahan atau longsoran. Lokasi yang banyak didapatkan kekar antara lain di Tanjungbatu, P. Babi dan sekitarnya, depan SPBU J. Mayjen Soetoyo, Telaga Sari dan di Perum Daksa. Berdasarkan data-data yang diambil langsung di lapangann, penafsiran kelurusan-kelurusan sungai serta data-data survey pendahuluan, pada umumnya kekar-kekar dan patahan-patahan berarah timurlaut-baratdaya dan tenggara barat laut.



### 3. Sesar

Data sesar naik ditemukan beberapa tempat, diantaranya di depan SPBU Jl. Mayjen Soetoyo. Data yang nampak adalah patahan-patahan, kekar-kekar, serta sesar naik mikro dengan kedudukan bidang sesar N2350E/680. Juga ditemukan data sesar di Kampung Damai 3 dengan kedudukan bidang sesar N2400E/700.

Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah berdasarkan jenis batuan dapat dilihat pada Tabel III.8 dan Tabel III.9 dibawah ini.

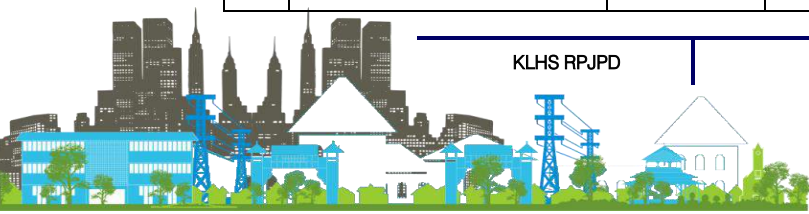
**Tabel III.8 Luas Wilayah Kota Balikpapan Menurut Jenis Batuan**

No	Jenis Batuan	Luas (Ha)	(%)
1	Satuan Endapan Pasir (Aluvium)	11.006,46	21,54
2	Formasi Kampung Baru	30.340,12	59,37
3	Formasi Balikpapan	9.754,66	19,09
<b>Jumlah</b>		<b>51.101,24</b>	<b>100</b>

Sumber: Analisis ArGIS Tahun 2021

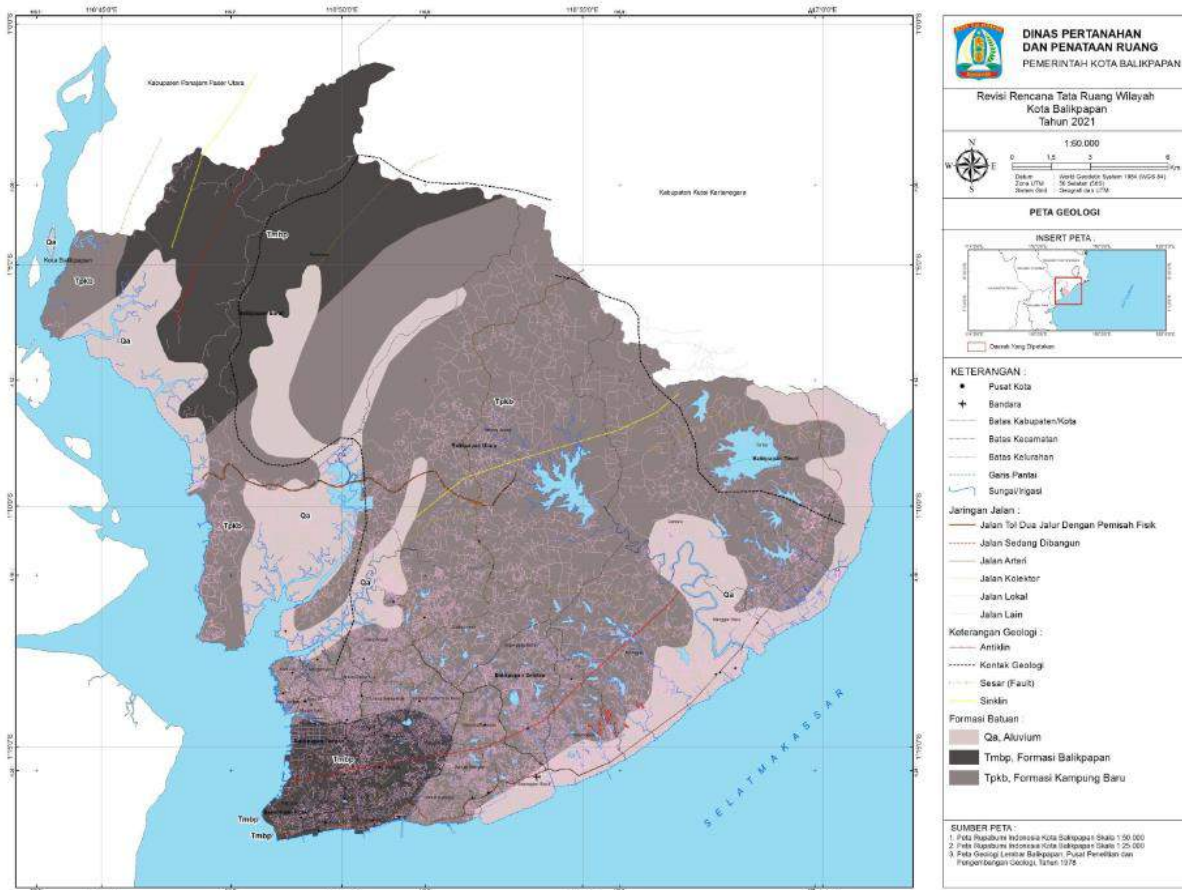
**Tabel III.9 Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Batuan Dirinci Per Kelurahan Di Kota Balikpapan**

No	Kecamatan/Kelurahan	Formasi Batuan			Grand Total
		Aluvium	Formasi Balikpapan	Formasi Kampung Baru	
<b>I</b>	<b>Balikpapan Barat</b>	<b>5.580,56</b>	<b>7.264,14</b>	<b>6.443,31</b>	<b>19.288,02</b>
1	Baru Ilir		0,96	70,35	71,31
2	Baru Tengah			91,25	91,25
3	Baru Ulu	1,82		119,39	121,21
4	Kariangau	5.555,98	7.263,19	5.931,09	18.750,25
5	Marga Sari			56,94	56,94
6	Margomulyo	22,76		174,30	197,07
<b>II</b>	<b>Balikpapan Kota</b>		<b>1.106,45</b>	<b>3,37</b>	<b>1.109,82</b>
1	Damai		218,94	3,37	222,31
2	Klandasan Ilir		161,67		161,67
3	Klandasan Ulu		106,97		106,97
4	Prapatan		442,47		442,47
5	Telaga Sari		176,39		176,39
<b>III</b>	<b>Balikpapan Selatan</b>	<b>657,37</b>	<b>210,27</b>	<b>3.013,33</b>	<b>3.880,97</b>
1	Damai Bahagia	2,81	24,61	348,21	375,63
2	Damai Baru		178,82	36,71	215,53
3	Gunung Bahagia		3,42	370,44	373,86
4	Sepinggan	244,75		624,96	869,72
5	Sepinggan Baru	2,60		1.061,10	1.063,70
6	Sepinggan Raya	401,82		260,76	662,58
7	Sungai Nangka	5,40	3,41	311,14	319,95
<b>IV</b>	<b>Balikpapan Tengah</b>		<b>1.056,14</b>	<b>26,43</b>	<b>1.082,58</b>
1	Gunung Sari Ilir		108,51		108,51
2	Gunung Sari Ulu		205,61		205,61
3	Karang Jati		335,93	22,17	358,10
4	Karang Rejo		117,64	4,26	121,90
5	Mekar Sari		72,37		72,37
6	Sumber Rejo		216,10		216,10



No	Kecamatan/Kelurahan	Formasi Batuan			Grand Total
		Aluvium	Formasi Balikpapan	Formasi Kampung Baru	
<b>V</b>	<b>Balikpapan Timur</b>	<b>3.904,31</b>		<b>8.011,21</b>	<b>11.915,52</b>
1	Lamaru	953,88		2.653,14	3.607,02
2	Manggar	1.200,25		2.103,47	3.303,73
3	Manggar Baru	499,33		22,03	521,35
4	Teritip	1.250,85		3.232,57	4.483,42
<b>VI</b>	<b>Balikpapan Utara</b>	<b>864,21</b>	<b>117,66</b>	<b>12.842,47</b>	<b>13.824,34</b>
1	Batu Ampar	208,33		571,71	780,04
2	Graha Indah	166,23		1.758,36	1.924,59
3	Gunung Samarinda		50,33	216,09	266,42
4	Gunung Samarinda Baru		64,56	239,64	304,20
5	Karang Joang	465,05		9.767,32	10.232,37
6	Muara Rapak	24,59	2,77	289,35	316,71
	<b>Grand Total</b>	<b>11.006,46</b>	<b>9.754,66</b>	<b>30.340,12</b>	<b>51.101,24</b>
	<b>Prosentase (%)</b>	<b>21,54</b>	<b>19,09</b>	<b>59,37</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Analisis ArGIS tahun 2021, Peta Geologi Lembar Balikpapan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Tahun 1978



Gambar 3.4 Peta Geologi Kota Balikpapan

### 3.1.2.5 Kondisi Hidrologi dan Sumber Air Baku

Dibawah ini akan dijabarkan mengenai kondisi Hidrologi dan sumber air baku di Kota Balikpapan.

#### A. Hidrogeologi

Hidrogeologi Kota Balikpapan secara umum dapat dilihat dari komposisi litologi batuan dan kelulusannya serta keterdapatan air tanah dan produktivitas akuifer. Kondisi hidrogeologi di Kota Balikpapan akan dijelaskan berikut.

##### a. Komposisi Litologi Batuan dan Kelulusannya

a. Berdasarkan komposisi litologi dan kelulusannya Kota Balikpapan seluruhnya masuk dalam kategori batu pasir, batu lempung pasiran, serpih dan konglomerat dengan sisipan napsi, batubara dan batu gamping.

##### b. Keterdapatan Air Tanah dan Produktivitas akuifer

Berdasarkan keterdapatan air tanah dan produktivitas akuifer, Kota Balikpapan dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori besar, yaitu:

- Akuifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir, yaitu:

- ✓ Akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas

Akuifer dengan keterusan beragam, muka air tanah umumnya kurang dari 3 meter di bawah muka tanah setempat, debit air umumnya kurang dari 10 liter/detik. Akuifer ini umumnya tersebar di Kecamatan Balikpapan Utara, sebagian kecil dari Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Tengah dan di bagian selatan dari, Kecamatan Balikpapan Selatan

- ✓ Setempat, Akuifer produktif

Akuifer dengan keterusan sangat beragam, umumnya muka airtanahnya dalam, di beberapa ngan debit kurang dari 2 liter/ detik. Akuifer ini pada umumnya terdapat di Kecamatan Balikpapan Timur, sebagian Kecamatan Balikpapan Selatan dan Tengah

- Akuifer bercelah atau jarang, produktif kecil dan daerah air tanah langka, yaitu :  
Akuifer produktif kecil, setempat berarti Akuifer ini umumnya keterusan rendah, setempat airtanah dangkal dalam jumlah terbatas dapat diperoleh di lembah-lembah dan zona pelapukan batuan padu. Akuifer ini pada umumnya terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat, sebagian kecil di Kecamatan Balikpapan Utara, Barat dan Timur.

#### B. Sumber Air Baku

##### Potensi Air Permukaan (Sungai/Embung/Rawa)

Air permukaan merupakan salah satu alternatif sumber air baku PDAM dalam penyediaan air untuk pelanggan. Air permukaan yang digunakan dapat berupa sungai, danau, rawa. Sumber-sumber air permukaan potensial yang terdapat disekitar Kota Balikpapan adalah Sungai Wain Bugis dan Sungai Teritip dan telah ada rencana pembuatan Waduk Teritip dengan kapasitas 75 l/detik dan Waduk Wain Bugis dengan kapasitas 1.65l/detik





Sungai-sungai lain seperti Sungai Somber; Sungai Klandasan Besar dan Kecil; Sungai Sepinggan; Sungai Batakan dan Sungai Manggar Kecil tidak dimanfaatkan karena selain alirannya tidak terus menerus sungai tersebut dipengaruhi oleh pasang urut air laut.

Sumber-sumber air permukaan yang dianggap potensial sebagai sumber air baku untuk rencana pengembangan Sistem air bersih Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

### **1. Waduk Manggar**

Waduk Manggar merupakan sumber air baku, utama Kota Balikpapan, setelah dilaksanakan peningkatan kapasitas Waduk dari 3,27 juta M<sup>3</sup> dengan elevasi permukaan 5,8 MMP menjadi 16,3 juta M<sup>3</sup> dengan elevasi permukaan 10,30 MMP. Dengan meningkatnya kapasitas waduk tersebut maka tercapailah manfaat utama peningkatan waduk Manggar yaitu tercukupinya kebutuhan air bersih untuk Kota Balikpapan hingga tahun 2011. Waduk Manggar dengan kapasitas 16 juta m<sup>3</sup> diperkirakan tidak akan bisa memenuhi kebutuhan air bersih kota Balikpapan yang kian bertambah, tidak bisa lagi hanya mengandalkan Waduk Manggar sebagai air baku utama sumber air bersih PDAM. Waduk yang berkapasitas 9.00 l/dtk merupakan penyumbang terbesar air baku air bersih PDAM Kota Balikpapan dengan 75% dengan kapasitas produksi 1.100 lt/detik.

Waduk manggar bersumber dari Sungai Manggar. Sungai Manggar merupakan salah satu sungai terbesar yang ada di kota Balikpapan yang melintas dari Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara menuju Kel. Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur. Sungai Manggar yang dimanfaatkan oleh PDAM Kota Balikpapan sebagai sumber air baku adalah Sungai Manggar bagian hulu. Pada bagian hulu, kualitas air lebih baik dari pada bagian tengah dan bagian hilir.

### **2. Waduk Wain Bugis**

Waduk ini merupakan wilayah administrasi Kecamatan Balikpapan Barat. Waduk ini merupakan pertemuan antara S. Wain dan S. Bugis. Luas DPS (daerah pengaruh sungai) adalah 86,93 km<sup>2</sup> dengan panjang sungai utama 9,12 km. Lokasi waduk pada posisi 116°48'00" BT-1°09'14" LS menempati morfologi perbukitan bergelombang dengan elevasi antara 20-100 m di atas permukaan laut. Kemiringan lereng 10°-30°, pola aliran S. Wain adalah sub terellis yang mengindikasikan daerah tersebut telah mengalami perlipatan. Sungai Bugis mengalir ke arah S. Wain Besar hingga ke muara Teluk Balikpapan, merupakan sungai permanen berair mengalir sepanjang tahun dengan lebar sungai berkisar antara 30-40 m. Pemanfaatan S. Wain telah dilakukan oleh Pertamina UP V Balikpapan untuk memenuhi berbagai keperluan di lingkungan Kompleks Pertamina, yaitu dengan cara membuat bendungan dengan kapasitas pemanfaatan mencapai 200 lt/det.

### **3. Sungai Manggar Bagian Hulu**

Pada bagian hulu Sungai Manggar merupakan sumber air baku warga Kota Balikpapan yang dikelola PDAM Kota Balikpapan. Oleh Pemerintah Kota Balikpapan, bagian hulu ditetapkan sebagai kawasan lindung untuk melindungi sumber air dari pencemaran. Sumber pencemar yang mungkin berpotensi masuk ke area hulu Sungai Manggar didominasi dari kegiatan domestik.



#### 4. Sungai Manggar Bagian Tengah

Kegiatan yang mendominasi di bagian tengah Sungai Manggar adalah tambak dan permukiman. Vegetasi di segmen ini adalah hutan mangrove dengan jenis Nipah (*Nypa fruticans*). Kehadiran tanaman nipah mengindikasikan wilayah perairan payau yang cenderung tawar. Kondisi sungai masih alami belum ada betonisasi.

#### 5. Sungai Manggar Bagian Hilir

Sungai Manggar pada bagian hilir didominasi oleh vegetasi berupa *Rhizophora apiculata* dan *Rhizophora mucronata* kemudian semakin menuju hilir berangsur dengan keberadaan permukiman di atas air (kampong nelayan).

#### 6. Sungai Wain

Sungai Wain adalah salah satu sungai yang terletak di kecamatan Balikpapan Barat sepanjang 11.200 m. Oleh Pemerintah Kota Balikpapan Daerah Aliran Sungai (DAS) Wain dijadikan sebagai kawasan Hutan Lindung. Di sekitar wilayah sungai yang tidak terkena sebagai kawasan Hutan Lindung terdapat permukiman. Sehingga Sungai Wain dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi warga sekitar dan oleh PT. Pertamina RU V.

Sungai Wain ini dapat mencapai lebih dari 200 l/dtk, hal ini dapat diketahui bahwa penggunaan PT. Pertamina mencapai 200 l/dtk dan diketahui masih terdapat limpasan dari waduk tersebut ke Sungai Wain bagian hilir.

##### a) *Sungai Wain Bagian Hulu*

Debit aliran Sungai Wain ini dapat mencapai lebih dari 200 L/detik, hal ini dapat diketahui bahwa penggunaan PT. Pertamina mencapai 200 L/detik dan masih terdapat limpasan dari waduk tersebut ke Sungai Wain bagian hilir.

##### b) *Sungai Wain Bagian Tengah*

Sungai Wain bagian tengah memiliki panjang 4,23 Km terletak di Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan. Secara fisik, masih alami dengan warna air kecoklatan. Di sekitar sungai ini terdapat permukiman penduduk yang tidak padat. Umumnya aktivitas penduduk di sekitar sungai adalah berkebun. Namun di daerah ini juga sudah terbangun jalan menuju peti kemas Km. 13.

##### c) *Sungai Wain Bagian Hilir.*

Sungai Wain bagian Hilir memiliki panjang 3,63 km berada di kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan.

#### 7. Sungai Somber

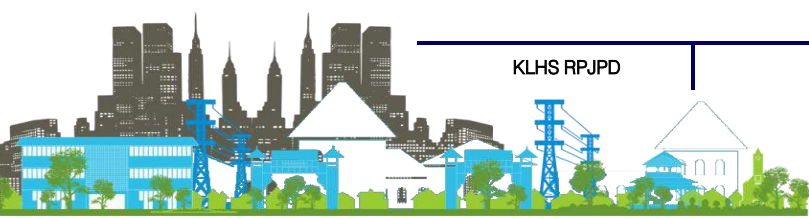
Sungai Somber terdapat di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat sepanjang 7.100 m, di sekitar Sungai Somber terdapat usaha perkapalan, permukiman penduduk dan hutan mangrove. Sungai ini cukup terpengaruh oleh keberadaan pasang surut air laut.

#### 8. Sungai Sepingga

Sungai Sepingga memiliki panjang 1.710 m. Sungai ini mengalir di Kecamatan Balikpapan Selatan.

#### 9. Sungai Batakan Besar.

Sungai Batakan Besar memiliki panjang 9.530 m. Sumber pencemar di segmen ini adalah aktivitas domestik dan pembukaan lahan.



## 10. Sungai Klandasan Besar

Sungai Klandasan Besar memiliki panjang 4.900 m. Sumber pencemar di segmen ini adalah aktivitas domestik dan pembukaan lahan. fungsi Sungai Klandasan Besar lebih mengarah sebagai drainase utama yang merupakan daerah tumpahan air dari drainase sekunder dan tersier sebelum ke laut.

## 11. Sungai Brenga

Sungai Brenga memiliki panjang 6.000 m. Terletak di Kecamatan Balikpapan Barat dan bermuara di Teluk Balikpapan. Sepanjang sungai ini terdapat banyak hutan mangrove. Sungai ini juga terpengaruh oleh pasang surut air laut. Sungai Brenga bagian hulu memiliki banyak cabang atau sub kecil. Lebar sungai diperkirakan 7–10 m. Di sepanjang sungai hanya terdapat vegetasi mangrove.

## 12. Sungai Lamaru

Sungai Lamaru memiliki panjang 6.700 m. Sumber pencemar di segmen ini adalah aktivitas domestik dan pembukaan lahan.

## 13. Waduk Teritip

Lokasi bendungan Sungai Teritip terletak pada posisi 1°9'27"BT-1°10'35" LS, menempati morfologi perbukitan bergelombang dengan bukit-bukit kecil, elevasi berkisar antara 10-100 m di atas permukaan laut. Kelerengan daerahnya bervariasi 10°-30°. Pada Sungai Teritip telah dibuat bendung Teritip yang berfungsi sebagai bendung irigasi untuk mengairi areal sawah seluas ±200 ha. Rencana bendungan berada di hulu bendungan eksisting, dengan jarak sekitar 5 km dari IPA Teritip.

## 14. Sungai Mahakam

Intake Rempanga terletak di tepi S. Mahakam, sekitar 2 km dari Kota Tenggara ke arah Samarinda dan termasuk kedalam wilayah administratif Kabupaten Kutai Kartanegara. Posisi intake terletak pada 117°01'00" BT-00°29'46" LS. Daerah aliran S. Mahakam, terutama daerah Loa Janan, menempati morfologi perbukitan bergelombang dengan elevasi antara 20-100 m di atas permukaan laut dan lebar sungai berkisar antara 500-100 m yang menyusuri Kota Tenggara. Luas DPS Mahakam adalah ±63.463 km<sup>2</sup> dan berdasarkan Studi Potensi Air Baku Kota Balikpapan, waduk ini memiliki kapasitas aman diperkirakan sebesar ±2.000 lt/det. Jarak antara intake Rempanga menuju Kota Balikpapan (IPA Batu Ampar) diperkirakan sepanjang ±109 km

## Wilayah Sungai dan Daerah Aliran Sungai

Secara umum wilayah sungai yang ada di Balikpapan termasuk kedalam Wilayah Sungai (yang selanjutnya disebut WS) Mahakam terletak antara 114°53'49" Bujur Barat dan 117°57'53" Bujur Timur serta diantara 0°31'30" Lintang Utara dan 1°31'33" Lintang Selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, WS Mahakam merupakan wilayah sungai Lintas Provinsi dengan luas 85.236 km<sup>2</sup>.

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang termasuk dalam wilayah Kota Balikpapan yaitu: DAS Semboja, DAS Ajiraden, DAS Manggar, DAS Somber, DAS Wain, DAS Sanggai, DAS Maridan, jelasna dapat dilihat pada Tabel III.10 dibawah ini.



**Tabel III.10 DAS WS Mahakam**

No	Nama DAS	Luas (km2)	Kabupaten Kota/ Yang Masuk
1	DAS Mahakam	77,423	Kota Samarinda Kabupaten Mahakam Ulu Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Penajam Paser Utara Kabupaten Paser Kabupaten Malinau
2	DAS Donang	563	Kabupaten Kutai Kartanegara
3	DAS Semboja	568	Kota Balikpapan Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Penajam Paser Utara
4	DAS Ajiraden	39	Kota Balikpapan Kabupaten Kutai Kartanegara
5	DAS Manggar	135	Kota Balikpapan
6	DAS Sumber	114	Kota Balikpapan
7	DAS WAIN	163	Kota Balikpapan Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Penajam Paser Utara
8	DAS Sanggai	961	Kota Balikpapan Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Penajam Paser Utara
9	DAS Maridan	38	Kota Balikpapan
10	DAS Riko	588	Kabupaten Penajam Paser Utara
11	DAS Tunan	751	Kabupaten Penajam Paser Utara
12	DAS Telakai	3.893	Kabupaten Penajam Paser Utara Kabupaten Paser Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai Kartanegara
<b>Total Luas :</b>		<b>85.236</b>	

Sumber : Hasil Analisis berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri PUPR 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai

**Tabel III.11 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Balikpapan**

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Selokapi	3.196,01	6,25
2	Riko Manggar	26.217,68	51,31
3	Batakan	753,66	1,47
4	Senipah DS	1.495,46	2,93
5	Damai	2.922,16	5,72
6	Samboja Kuala	249,04	0,49
7	Manggar	9.957,88	19,49
8	Lamaru	1.833,02	3,59
9	Sepinggan DS	456,99	0,89
10	Klandasan Ulu	709,11	1,39
11	Teritip	706,68	1,38
12	Batakan DS	538,36	1,05
13	Manggar DS	2.065,19	4,04
<b>Total Luas Balikpapan</b>		<b>51.101,24</b>	<b>100,00</b>

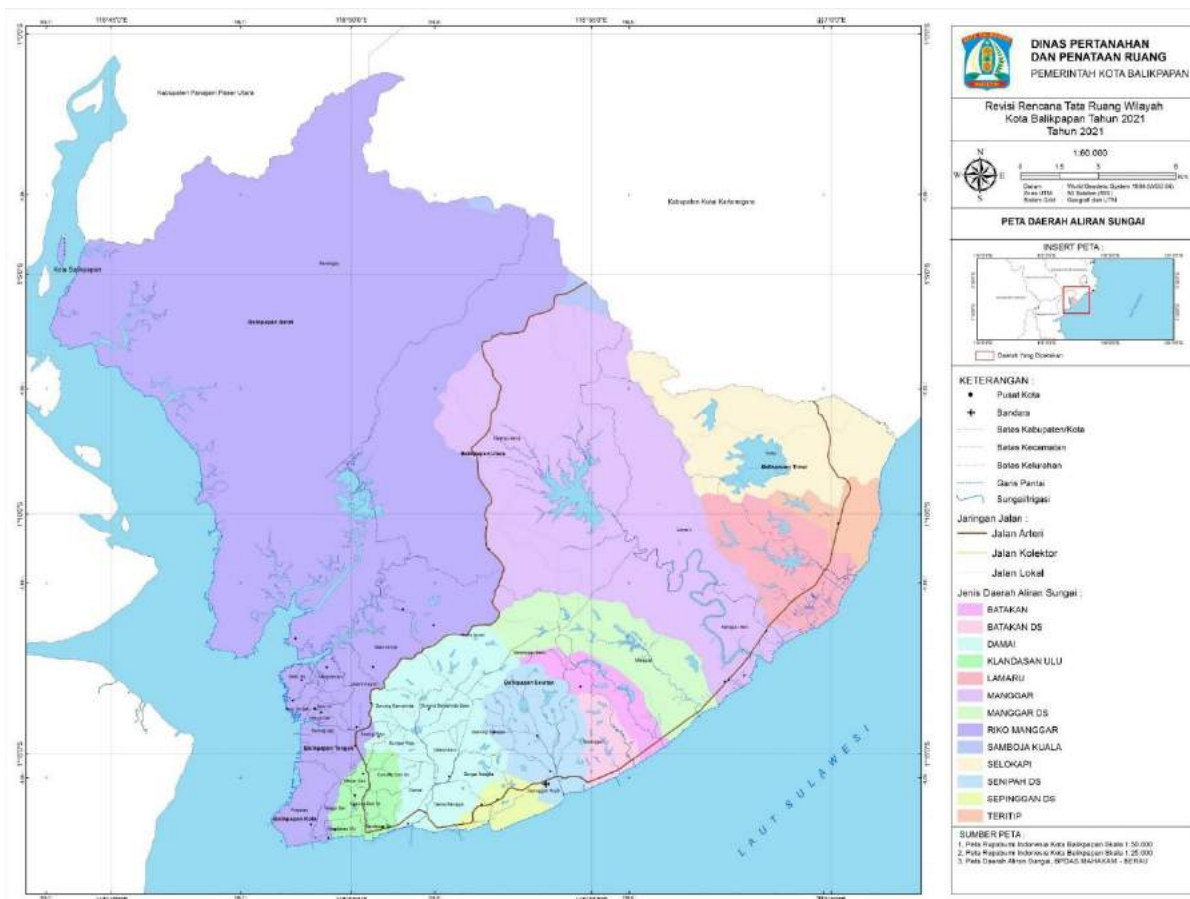
Sumber : BPDAS Mahakam Berau, Analisis Peta ARGIS Tahun 2021





Berdasarkan data Peta batas DAS KLHK Tahun 2021 dan Analisis ArGIS Tahun 2021, batas DAS yang ada di Kota Balikpapan terdiri dari 13 DAS. Berdasarkan batas luas, DAS Riko Manggar mempunyai luas 26.217,68 Ha atau 51,31% dari luas total wilayah Kota Balikpapan, berada di Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Kota, Balikpapan Tengah dan Balikpapan Utara. Luas DAS Riko Manggar ditandai dengan mengalirnya beberapa sungai yang melintasi, diantaranya Sungai Wain Besar, Sungai Sumber, Sungai Beruang, Sungai Baru, Sungai Beranga, Sungai Tempadung yang bermuara ke Teluk Balikpapan.

DAS Manggar luas kurang lebih 9.957,88 Ha atau 19,49% dari total luas wilayah, meliputi Kecamatan Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara. Dilitasi Sungai Manggar Besar dan terdapat Waduk Manggar. Keberadaan DAS Manggar menjadi bagian dalam kawasan hutan lindung. Prosentase batas DAS yang lainnya hanya dibawah 5% terkecuali DAS Selokopi mencapai luas 3.196,01 Ha atau 6,25% dari total luasa wilayah, berada di Kelurahan Lamaru dan Teritip Balikpapan Timur. Untuk DAS Batakan dan DAS Batakan DS, berada di Balikpapan Selatan dan Balikpapan Timur.



Gambar 3.5 Peta DAS Kota Balikpapan

**Sungai :**

WS Mahakam memiliki 12 (dua belas) DAS, dan di DAS tersebut memiliki sungai utama dan beberapa anak sungai yang mengalir di dalamnya. Nama sungai dan dimensi morfologi sungai di WS Mahakam dapat dilihat pada Tabel III.12 berikut.



Tabel III.12 Nama Sungai di WS Mahakam

No	Nama Sungai	ORDE	No	Nama Sungai	ORDE
1	D. Lempatung	3	44	S. Neribungan	3
2	S. Ajiraden	1	45	S. Ngayau	2
3	S. Babarung	2	46	S. Nijan	2
4	S. Batangbanyumati	1	47	S. Nyawatan	3
5	S. Belayan	2	48	S. Nyaribungan	2
6	S. Belanuang	2	49	S. Oga	3
7	S. Bengen	3	50	S. Ohang	3
8	S. Boh	2	51	S. Pakkoe	3
9	S. Bongan	2	52	S. Palah	3
10	S. Bongan Kanan	2	53	S. Pamaluan	3
11	S. Bongankiua	3	54	S. Pampangan Kanan	2
12	S. Bulu	1	55	S. Pari	2
13	S. Dason	3	56	S. Pedahan	3
14	S. Dondang	1	57	S. Perak	2
15	S. Ioadurian	2	58	S. Poh	3
16	S. Jarumai	2	59	S. Prian	3
17	S. Jelau`	3	60	S. Ratah	2
18	S. Jembayan	2	61	S. Riko	1
19	S. Jembayan Kiri	2	62	S. Ritan	3
20	S. Jintan	2	63	S. Sabinlutung	3
21	S. Kedang Kepala	2	64	S. Sanga-Sanga	2
22	S. Kedang Pahu	3	65	S. Sanggai	1
23	S. Kedang Pantau	2	66	S. Semboja	1
24	S. Kedang Semelis	2	67	S. Semetic	2
25	S. Kembong	2	68	S. Semoi	2
26	S. Kinjau	2	69	S. Senteken	3
27	S. Kumpa	3	70	S. Senyuir	3
28	S. Kutailama	2	71	S. Siram	3
29	S. Langsa	2	72	S. Sombir	1
30	S. Lawa	3	73	S. Tabang	3
31	S. Leletoh	3	74	S. Tambora	2
32	S. Len	2	75	S. Tamuayam	2
33	S. Loahaur	2	76	S. Telakai	1
34	S.1 Loahur	2	77	S. Telen	2
35	S. Mahakam	1	78	S. Tenggarong	2
36	S. Manggar	1	79	S. Tipan	2
37	S. Marah	1	80	S. Topai	2
38	S. Maridan	1	81	S. Trengu	3
39	S. Medang	3	82	S. Tuang	3
40	S. Menawangking	3	83	S. Tunan	1
41	S. Menyangau	2	84	S. Wahau	3
42	S. Muyuo	2	85	S. Wain	1
43	S. Nangan	3			

Sumber : BPDAS, Tahun 2014



Dibawah ini merupakan kualitas berdasarkan hasil analisis indeks pencemaran di 19 sungai di Kota Balikpapan Tahun 2022.

**Tabel III.13 Kualitas Air Sungai Berdasarkan Hasil Indeks Pencemaran di 19 Sungai di Kota Balikpapan Tahun 2022**

No	Nama Sungai	Bagian Sungai	Hasil Analisis Indeks Pencemaran		
			Kelas	Pollution Index	Status
1	Sungai Wain	Hulu	II	0,51	Baik
		Tengah	II	0,54	Baik
		Hilir	II	1,61	Cemar Ringan
2	Sungai Manggar	Hulu	II	0,49	Baik
		Tengah	II	4,42	Cemar Ringan
		Hilir	II	0,96	Baik
3	Sungai Sumber	Hulu	II	1,60	Cemar Ringan
		Tengah	II	0,77	Baik
		Hilir	II	3,74	Cemar Ringan
4	Sungai Sepinggan	Hulu	II	0,54	Baik
		Tengah	II	1,50	Cemar Ringan
		Hilir	II	5,06	Cemar Sedang
5	Sungai Batakan Besar	Tengah	II	4,19	Cemar Ringan
		Hilir	II	5,07	Cemar Sedang
6	Sungai Klandasan Besar	Hulu	II	4,19	Cemar Ringan
		Tengah	II	5,67	Cemar Sedang
		Hilir	II	6,93	Cemar Sedang
7	Sungai Klandasan Kecil	Hulu	II	0,66	Baik
		Tengah	II	2,13	Cemar Ringan
		Hilir	II	5,69	Cemar Sedang
8	Sungai Brenga	Hulu	II	0,70	Baik
		Tengah	II	0,76	Baik
		Hilir	II	0,82	Baik
9	Sungai Lamaru	Hulu	II	5,05	Cemar Sedang
		Hilir	II	5,69	Cemar Sedang
10	Sungai Tempadung	Hulu	II	0,67	Baik
		Tengah	II	0,74	Baik
		Hilir	II	2,15	Cemar Ringan
11	Sungai Teritip	Hulu	II	0,72	Baik
		Tengah	II	1,59	Cemar Ringan
		Hilir	II	2,71	Cemar Ringan
12	Sungai Kemantis	Hulu	II	2,13	Cemar Ringan
		Hilir	II	2,15	Cemar Ringan
13	Sungai Pandan Sri	Hulu	II	7,97	Cemar Sedang
		Hilir	II	9,67	Cemar Sedang
14	Sungai Solok Api	Hulu	II	0,69	Baik
		Hilir	II	0,76	Baik
15	Sungai Batakan Kecil	Hulu	II	7,32	Cemar Sedang
		Hilir	II	8,00	Cemar Sedang
16	Sungai Manggar Kecil	Hulu	II	6,19	Cemar Sedang
		Hilir	II	8,83	Cemar Sedang



No	Nama Sungai	Bagian Sungai	Hasil Analisis Indeks Pencemaran		
			Kelas	Pollution Index	Status
17	Sungai Perapatan	Hulu	II	4,21	Cemar Ringan
		Tengah	II	7,77	Cemar Sedang
		Hilir	II	9,84	Cemar Sedang
18	Sungai Kelandasan II	Hulu	II	5,69	Cemar Sedang
		Tengah	II	5,68	Cemar Sedang
		Hilir	II	7,77	Cemar Sedang
19	Sungai Perum PDAM	Tengah	II	8,80	Cemar Sedang
		Hilir	II	9,66	Cemar Sedang

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka, 2023 (BPS)

### Daerah Irigasi :

Daerah irigasi yang ada di Wilayah Kota Balikpapan, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 /PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi meliputi D.I Balikpapan Utara panjang 25 Ha, D.I Gunung Binjai 325 Ha.

**Tabel III.14 Daerah Irigasi (D.I) di Kota Balikpapan**

No D.I	Daerah Irigasi	Luas (Ha)
307	D.I Balikpapan Utara	25
308	D.I Gunung Binjai	325
<b>Total D. I</b>		<b>345</b>

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 / Prt/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi

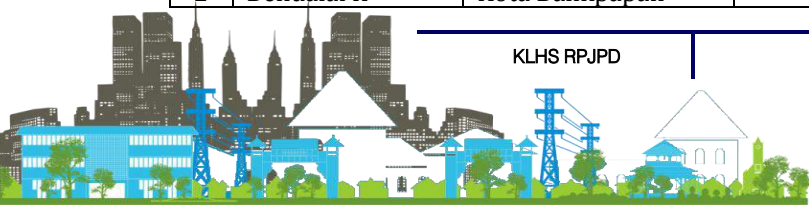
### Waduk dan Embung

Waduk dan embung memiliki fungsi sebagai penampung air (waktu musim hujan), yang nantinya air yang ditampung tersebut digunakan pada waktu yang diperlukan. Yang membedakan yaitu kapasitas tampungan yang dimiliki, untuk waduk memiliki kapasitas tampungan yang lebih besar daripada embung. Hasil inventarisasi waduk dan embung di WS Mahakam yang ada di wilayah Kota Balikpapan yaitu :

1. Bendung Pengendali Banjir : Bendali I, Bendali II, Bendali III, Bendali IV;
2. Bendungan : Bendungan Manggar dengan volume efektif 14.200.000 M3.
3. Waduk : berupa Waduk Teritip dengan volume efektif 2.150.000 M3
4. Embung : Embung Wain dengan volume efektif 500.000 M3

**Tabel III.15 Waduk dan Embung di Kota Balikpapan Yang Termasuk WS Mahakam**

No	Nama	Lokasi	Volume Efektif (M3)	Pemanfaatan
1	Bendali I	Kota Balikpapan	191,491	Pengendalian Banjir Kota Balikpapan
2	Bendalai II	Kota Balikpapan	341.244	Pengendalian Banjir Kota Balikpapan





No	Nama	Lokasi	Volume Efektif (M3)	Pemanfaatan
3	Bendali III	Kota Balikpapan	245.000	Pengendalian Banjir Kota Balikpapan
4	Bendalai IV	Kota Balikpapan	250.000	Pengendalian Banjir Kota Balikpapan
5	Bendungan Manggar	Kota Balikpapan	14.200.000	Penyediaan Air Baku Kota Balikpapan
6	Embung Wain	Kota Balikpapan	500.000	Penyediaan Air Baku Kota Balikpapan
7	Waduk Teritip	Kota Balikpapan	2.150.000	Penyediaan Air Baku Kota Balikpapan

Sumber : Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Tahun 2016

### 3.1.2.6 Klimatologi

Kota Balikpapan, sama seperti daerah lainnya di Indonesia, memiliki iklim tropis dengan hujan sepanjang tahun, Suhu udara tertinggi sepanjang tahun 2022 tercatat pada bulan April sebesar 33,4 derajat celsius dan terendah pada bulan Februari sebesar 22 derajat celsius, Adapun secara rata-rata, suhu udara tertinggi pada tahun 2022 tercatat pada bulan Mei dengan 27,8 derajat celsius dan terendah pada bulan Januari, Februari dan September dengan 26,8 derajat celsius.

Curah hujan tertinggi pada tahun 2022 tercatat pada bulan Agustus dengan 552,0 mm dan terendah pada bulan Mei dengan 109 mm, Adapun hari hujan tertinggi yang tercatat pada tahun 2022 terjadi pada bulan Oktober dengan 22 hari hujan.

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dan pantai. Secara umum Kota Balikpapan beriklim panas dengan suhu udara sepanjang tahun berkisar dari 21,7 – 34,7°C. Selain itu, sebagai daerah beriklim tropis, Kota Balikpapan mempunyai kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar antara 82- 91%.

Untuk kualitas udara di Kota Balikpapan berdasarkan parameter seperti SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, CO, HC dan lain sebagainya dapat dilihat pada Tabel III.16 dibawah ini.

**Tabel III.16 Kualitas Udara Berdasarkan Parameter Pengukuran di Ujung, Kota Balikpapan Tahun 2018-2022**

Parameter	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Area Kampung Baru</b>					
SO <sub>2</sub>	0,0212	0,026	0,029	0,028	0,027
NO <sub>2</sub>	0,0354	0,013	0,026	0,013	0,024
CO	0,668	3,693	3,738	3,700	2,864
HC	0,0065	0,007	0,009	0,009	0,009
PM <sub>10</sub>	0,0174	0,020	0,012	0,010	0,010
Pb	0,00005	<0,0001	0,00002	0,00002	0,00002
<b>Area Simpang Gunung Malang</b>					
SO <sub>2</sub>	0,032	0,037	0,043	0,042	0,041
NO <sub>2</sub>	0,0559	0,014	0,038	0,016	0,033
CO	3,1493	4,441	4,735	4,697	3,735
HC	0,0095	0,017	0,020	0,020	0,017
PM <sub>10</sub>	0,019	0,021	0,016	0,015	0,012
Pb	0,00005	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001

<b>Area Pelabuhan Semayang</b>					
SO2	0,0277	0,038	0,041	0,041	0,042
NO2	0,0542	0,014	0,038	0,034	0,033
CO	1,9087	4,624	4,693	4,613	3,780
HC	0,0102	0,017	0,017	0,020	0,020
PM10	0,0199	0,010	0,017	0,008	0,018
Pb	0,00005	0,0002	0,0001	0,00009	0,1
<b>Area Bundaran Rapak</b>					
SO2	0,0169	0,033	0,042	0,040	0,040
NO2	0,0306	0,015	0,037	0,016	0,034
CO	2,0041	4,331	4,407	4,537	3,605
HC	0,0085	0,013	0,020	0,017	0,017
PM10	0,0157	0,034	0,033	0,012	0,037
Pb	0,00005	0,0001	0,0001	0,00009	0,00001
<b>Simpang Plaza Balikpapan</b>					
SO2	0,0254	0,033	0,036	0,037	0,038
NO2	0,0367	0,014	0,031	0,014	0,035
CO	3,531	4,262	4,407	4,296	3,632
HC	0,0127	0,013	0,015	0,015	0,015
PM10	0,0185	0,023	0,07	0,022	0,009
Pb	0,00005	0,0001	0,0007	0,00008	0,00008

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka, 2023, BPS

### 3.1.2.7 Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana. Berdasarkan jenis bencana yang terjadi, terdiri dari bencana alam, bencana non alam (ulah manusia) dan kejadian lain (BPBD Kota Balikpapan). Kejadian bencana alam yang pernah terjadi, Berdasarkan Kajian Geologi Untuk Evaluasi Penataan Wilayah dan Pengembangan Kota Balikpapan; Proyek Penyusunan Perencanaan Kota dan Penataan Pantai Kota Balikpapan (2002); beberapa lokasi di kota Balikpapan memperlihatkan adanya patahan, amblesan serta tanah longsor.

Kota Balikpapan terdapat 5 jenis tingkat kerawanan bencana, antara lain bencana banjir, bencana longsor, bencana kebakaran, bencana angin topan, dan bencana sosial, dan bencana perubahan iklim.

Berdasarkan data kebencanaan, Tahun 2019 menjadi tahun tertinggi angka bencana di Kota Balikpapan. Bencana yang paling sering terjadi pada tahun 2019 adalah kebakaran hutan yaitu sebanyak 125 kali. Angka ini melonjak drastis jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya terjadi 70 kali. Tingginya angka bencana kebakaran hutan ini tentu saja mengancam produktivitas lahan di Kota Balikpapan. Jenis bencana lainnya yang juga kerap terjadi adalah kebakaran pemukiman/gedung. Dari data BPBD, kejadian kebakaran pemukiman terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. pada tahun 2015 tercatat sebanyak 39 kali terjadi kebakaran pemukiman, lalu meningkat tahun 2016 menjadi 44 kali. Hingga tahun 2019, kebakaran pemukiman di Kota Balikpapan sebanyak 51 kali. Adapun jumlah bencana yang terjadi di Kota Balikpapan dapat dilihat pada Tabel III.16 dan Tabel III.17 dibawah ini.



**Tabel III.17 Jumlah Bencana yang Terjadi di Kota Balikpapan Menurut Jenis Bencana Tahun 2016-2019**

No	Jenis Bencana	TAHUN			
		2016	2017	2018	2019
1	Kebakaran Hutan	98	14	70	125
2	Kebakaran pemukiman/gedung	39	44	45	51
3	Banjir	88	89	13	24
4	Pergerakan tanah longsor	22	70	46	29
5	Angin puting beliung	2	60	0	0
6	Gelombang Pasang	0	0	0	0
7	Abrasi pantai	0	0	0	0
8	Orang Tenggelam	16	25	24	19
9	Pohon Tumbang	49	81	18	28
10	Semburan Lumpur/Gas	3	3	1	7
11	Penanganan gangguan hewan	62	84	72	194
<b>Total</b>		<b>379</b>	<b>416</b>	<b>289</b>	<b>477</b>

Sumber : BPBD, RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2019-2024

**Tabel III.18 Jumlah Bencana Yang Terjadi di Kota Balikpapan Menurut Jenis Bencana Tahun 2022**

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian
<b>A.</b>	<b>Bencana Alam</b>	
1	Genangan Air Pada Jalan Utama	25
2	Abrasi Pantai	3
3	Banjir Permukiman	26
4	Angin Topan/Puting Beliung/Siklon	6
5	Gelombang Pasang	1
6	Tanah Longsor di Permukiman	54
7	Pohon Tumbang	62
8	Wabah Penyakit	0
9	Potensi Tanah longsor	10
<b>B.</b>	<b>Kebakaran (Penggolongan Menurut Kejadian)</b>	
1	Pemukiman	35
2	Rumah Ibadah	0
3	Gudang/Garasi Kendaraan	1
4	Kios/Lapak/Kandang Ayam/Tumpukan ban bekas	6
5	Rumah makan/ Cafe	0
6	Kantor	1
7	Hutan/Lahan/Pohon/Semak belukar	0
8	Kendaraan Roda 2/roda 4/ roda 6/Roda 10	9
9	Toko Swalayan, Mall, Pusat Perbelanjaan	0
10	Instalasi Listrik Milik PLN/Tower	0
<b>C.</b>	<b>Bencana Non Alam/Ulah manusia</b>	
1	Pencemaran Lingkungan/Semburan Lumpur dan Gas	10
2	Kecelakaan Alat Transportasi	0
3	Musibah Orang Tenggelam/Penemuan mayat/Orang hilang	13
4	Baliho/Reklame roboh/Kecelakaan di tempat umum/Kerja	0
<b>D.</b>	<b>Kejadian Lain-lain (Penanganan Gangguan Binatang)</b>	<b>349</b>

Sumber : BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2023



### 3.1.2.8 Kondisi Fisik Pantai

Kota Balikpapan merupakan kota pesisir yang mempunyai garis pantai sepanjang  $\pm 80$  km. Potensi tersebut akan dikembangkan dengan pemanfaatan wisata alam dan air, konservasi alam, kawasan permukiman pelabuhan, perikanan, industri dan bahkan komersial.

Rencana pengembangan Kawasan Pantai Kota Balikpapan tersebar di beberapa Lokasi yaitu:

- Kawasan Pantai Pasir Putih di Kariangau (dekat kawasan KIK) dengan luas 1,46 Ha
- Pantai Melawai di Kelurahan Prapatan dengan luas 23,156 Ha
- Pantai Manggar dan Pantai Lamaru di Kecamatan Balikpapan Timur dengan luas 456,38 Ha

Untuk perkembangan di masa yang akan datang seperti yang diungkap pada RTRW Kota Balikpapan (2012-2032), Kota Balikpapan diarahkan sebagai kota pantai, potensi tersebut dikembangkan dengan konsep Waterfront City dengan pengaturan sebagai berikut;

- Mengidentifikasi potensi pantai Kota Balikpapan
- Pemberian legitimasi kawasan pantai sebagai areal yang dilindungi baik sebagai kawasan wisata maupun untuk kegiatan konservasi alam seperti mangrove atau fauna tertentu
- Pembuatan paket-paket wisata pantai dan ekowisata
- Menampilkan seni budaya masyarakat (pesta laut dan sebagainya)
- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan wisata pantai (transportasi, MCK, TPS, ruang informasi dan gazebo)
- Pengaturan kawasan/ garis sempadan pantai: merupakan kawasan sepanjang tepi pantai yang berfungsi melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai

#### A. Kondisi Geografis Pantai Kota Balikpapan

Secara geografis Pantai Balikpapan terletak diantara Selat Makasar dengan panjang fatch yang cukup besar, hal ini memungkinkan terjadinya gelombang angin yang cukup besar terutama yang ditimbulkan angin dari timur sampai dengan selatan. Berdasarkan data angin yang telah dihimpun dari Badan Meteorologi dan Geofisika Balikpapan, bahwa angin pada umumnya terbesar dan tersering adalah dari arah tenggara.

Sementara posisi pantai Balikpapan membentang kearah Timur Laut-Barat Daya, sehingga berdasarkan kondisi diatas maka pembangkitan gelombang akibat angin akan digunakan hitungan dengan pengertian Fully Developed Sea (FDS) bila terhadap data angin dari arah selatan sampai dengan arah timur.

Arus air laut akan didekati dengan melakukan pengukuran beda fase antara di kedua titik tertentu, kemudian dianalisa matematis. Dari hasil pengukuran pasang surut di kedua titik di wilayah Kota Balikpapan, didapatkan beda fase yang relatif pendek, yakni sekitar 40 menit dan beda tinggi 30 cm di antara jarak pengukuran 30 km.





Pada gambar berikut ini ditunjukkan hasil pengukuran pasang surut di Pelabuhan Semayan dan di Pantai Lamaru.

## B. Kondisi Bathimetri Pantai Kota Balikpapan

Bathimetri pantai Balikpapan secara umum dapat dijelaskan bahwa rata-rata bathimetri pantai Kota Balikpapan dapat digolongkan landai, kelandaianya antara pantai di Kelurahan Prapatan ke arah timur sampai di pantai Kelurahan Lamaru menunjukkan keadaan yang sama yaitu landai sekitar 2% s/d 4%.

Di depan Kelurahan Prapatan yaitu dekat mulut Teluk Balikpapan, menunjukkan adanya delta yang berbentuk oval panjang sampai di depan Bandara Sepinggan. Terbentuknya delta ini diperkirakan terjadi adanya dua kemungkinan, yaitu pertama terjadi akibat endapan sediment yang dihasilkan dari sungai-sungai yang bermuara di Teluk Balikpapan termasuk Sungai Sumber dan Sungai Wain secara komulatif dari tahun ke tahun. Dan yang kedua adalah bekas bagian daratan yang terkena abrasi sehingga terkikis habis dan meninggalkan batuan keras dari bagian daratan yang dimaksud. Kemungkinan ini dapat terjawab jika dilakukan penelitian pada kondisi batuan delta yang dimaksud, jika keadaannya batuan keras, maka terbentuknya delta tersebut adalah pada kondisi yang ke dua, tetapi jika sebaliknya yaitu keadaan tanahnya lunak yang merupakan endapan dari sedimentasi, maka terbentuknya delta tersebut adalah yang pada kondisi yang pertama.

Delta tersebut sementara ini permukaannya terendam diperkirakan pada elevasi antara 1 s/d 2 m dibawah muka air laut surut.

## C. Potensi Alam Teluk Balikpapan dan Penggunaannya

Teluk Balikpapan merupakan bagian penting dari kegiatan perekonomian Kota Balikpapan, karena di Teluk Balikpapan terdapat berbagai kegiatan yang sangat potensial baik dari segi perekonomian, transportasi maupun pendayagunaan sumber daya alam. Hal ini semua dapat terjadi karena kondisi Teluk Balikpapan yang secara alami memiliki potensi alam yang cukup tinggi.

Teluk Balikpapan merupakan ekosistem perairan semi tertutup dimana pengaruh air laut lebih dominan pada saat musim kemarau, dengan demikian salinitas airnya cukup tinggi. Dilihat dari ekosistem yang ada dan posisi geografis serta kekayaan alam yang terkandung di wilayah ini sehingga Teluk Balikpapan menjadi berkembang sebagai kawasan yang sangat kompiek dan tumpang tindih pengelolaannya. Pada saat ini pemanfaatan alam Teluk Balikpapan sebagai pelabuhan internasional, tambang minyak, transportasi air, pelabuhan ikan, budidaya ikan, penangkapan ikan.

Ekosistem yang ada merupakan bagian dari kekayaan alam yang harus dijaga keseimbangannya, Kegiatan perekonomian dan kegiatan pengembangan infrastruktur kota sebagai sebagai kensekuensi logis perkembangan tuntutan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu penataan ruang secara komprehensif di wilayah ini sangat diperlukan agar diperoleh pegelolaan yang terpadu dan memperhatikan pertimbangan penting kelestarian ekosistem lingkungan.



Potensi Hutan Mangrove, Teluk Balikpapan memiliki potensi hutan mangrove yang cukup besar. Jenis komunitas hutan mangrove yang dijumpai adalah *Rhizophora* spp, *Avicennia* spfi, *Sonneratia* spp, *Bruguiera* spp, *Ceriops* spp serta *Nypa fruticans*. Jenis mangrove *Rhizophora* spp adalah komunitas terbesar yang ada di kawasan Teluk Balikpapan. Keberadaan hutan mangrove ini sangat penting artinya dalam pengertian ekologis, yaitu sebagai barrier pantai terhadap gempuran gelombang, juga sebagai habitat tempat berkembang biaknya jenis ikan, udang dan jenis hewan vertebrata. Selain itu sebagai tempat berkembang dan berlindung burung dan fauna lainnya. Dari hasil laporan Proyek Pesisir, di hutan mangrove Teluk Balikpapan dijumpai burung Elang Bondol (*Heliastur Indus*), Elang Hitam (*Ictinaeus Malayensis*), Elang Laut (*Haliaeetus Leucogaster*), Burung Raja Udang (*Halcyon Chloris*) burung Rangkong, Pelatuk dan lain-lain. Jenis mamalia yang dijumpai antara lain Kera (*Macaca Fascicularis*) dan Bekantan (*Nasalis Larvantis*).

Hutan mangrove yang ada, saat ini telah mengalami degradasi yang disebabkan oleh konversi untuk usaha pertambakan, kegiatan industri dan pembangunan sarana fisik lainnya, pengembangan wilayah penduduk, serta aktifitas di daerah hulu/pedalaman. Degradasi ini akan diperkirakan meningkat jika tidak ada upaya pengelolaan secara terkoordinir dan terpadu oleh dinas dan instansi terkait serta masyarakat.

Potensi perikanan Teluk Balikpapan memiliki potensi perikanan yang cukup besar, hal ini terjadi karena ekosistem perairan teluk yang sangat menguntungkan bagi kembang tumbuhnya habitat perikanan. Kondisi hutan mangrove yang cukup subur, salinitas air dan suhu yang stabil dan sesuai, serta kualitas air yang jernih membawa suburnya perikanan di perairan Teluk Balikpapan dan sekitarnya.

Potensi perikanan Teluk Balikpapan dikelompokkan sebagai hasil budidaya dan sebagai hasil penangkapan. Hasil Budidaya terdiri dari budidaya tambak tradisional yaitu tambak ikan bandeng, udang windu dan teripang. Oleh karena potensi alam yang mendukung baik kondisi makanan alami yang terkandung, kualitas air dengan sirkulasinya dan lingkungan hutan mangrove disekitarnya maka budidaya perikanan di kawasan ini sangat memungkinkan dikembangkan. Selain itu bibit berupa benur dan nener dapat diperoleh dengan mudah di kawasan Teluk Balikpapan, karena benur dan nener tersebut tersedia secara alami di kawasan Teluk Balikpapan. Budidaya lain yang dihasilkan adalah hasil pengembangan budidaya apung udang dan ikan bandeng.

### 3.1.2.9 Penggunaan Lahan / Tutupan Lahan

Karakteristik tutupan lahan di Kota Balikpapan berdasarkan analisis peta citra tahun 2020, memperlihatkan komposisi tutupan lahan didominasi oleh luasan hutan yang cukup besar  $\pm 22.767,12$  ha atau 44,55 % dari luas keseluruhan wilayah; sedangkan luasan dengan komposisi 10%-15% terdiri dari Kawasan permukiman/perumahan  $\pm 6.814,76$  ha atau 13,33 %, perkebunan  $\pm 8.025,28$  ha atau 15,70 %; tanah terbuka  $\pm 6.488,16$  ha atau 12,70%. Untuk tutupan lahan lainnya relatif kecil dibawah 3%. Pertanian lahan basah 595,93 ha atau 1,17%; Badan jalan 1.018,54 ha atau 1,99%; badan air 538,94 Ha atau 1,05%, bakau 1.024,35 Ha atau 2,00%.



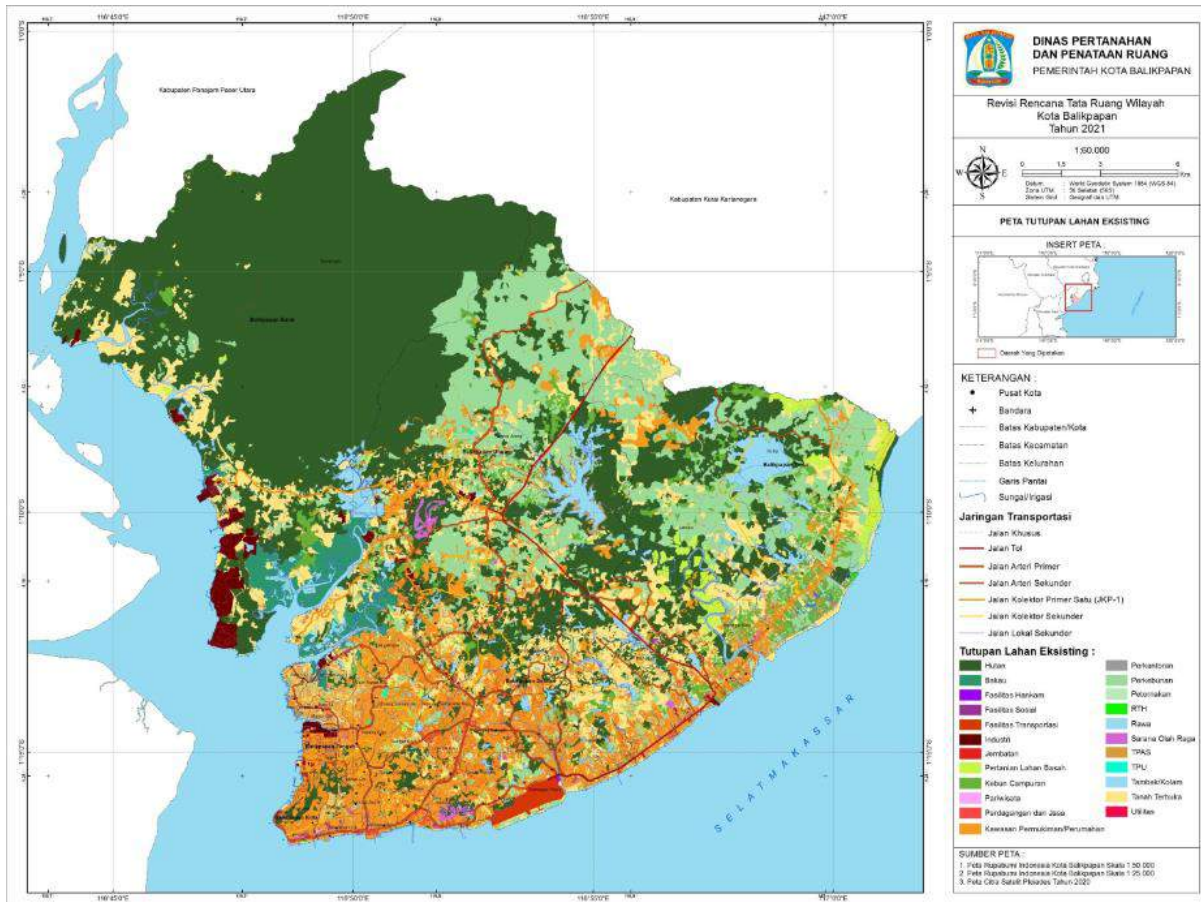
Komposisi tutupan lahan berdasarkan lahan yang tidak terbangun dibandingkan dengan lahan terbangun (*build up area*), memperlihatkan perbandingan lahan terbangun mencapai ± 9.191,98 ha atau 17,99% dan tidak terbangun mencapai ± 41.914,51 ha atau 82,01%. Luas tutupan lahan terbangun didominasi oleh kawasan permukiman/perumahan ± 6.814,76 Ha atau 13,33%. Luas tutupan lahan tidak terbangun didominasi oleh penggunaan lahan hutan ± 22.767,12 ha atau 44,55% kemudian perkebunan sekitar 8.025,28 Ha atau 15,70%. Penjelasan luasan tutupan lahan dapat dilihat pada Tabel III.19 dibawah ini.

**Tabel III.19 Tutupan Lahan Kota Balikpapan Tahun 2020**

No	Jenis Tutupan Lahan Tahun 2020	Luas (Ha)	%
1	Badan Air	538,94	1,05
2	Badan Jalan	1.018,54	1,99
3	Bakau	1.024,35	2,00
4	Fasilitas Hankam	14,32	0,03
5	Fasilitas Sosial	102,57	0,20
6	Fasilitas Transportasi	270,71	0,53
7	Hutan	22.767,12	44,55
8	Industri	663,65	1,30
9	Irigasi	0,01	0,00
10	Jembatan	0,06	0,00
11	Kawasan Permukiman/Perumahan	6.814,76	13,33
12	Kebun Campuran	1.571,34	3,07
13	Pariwisata	15,25	0,03
14	Perdagangan dan Jasa	87,39	0,17
15	Perkantoran	56,94	0,11
16	Perkebunan	8.025,28	15,70
17	Pertanian Lahan Basah	595,93	1,17
18	Peternakan	0,03	0,00
19	Rawa	267,42	0,52
20	RTH	46,67	0,09
21	Sarana Olah Raga	143,53	0,28
22	Sungai	497,89	0,97
23	Tambak/Kolam	61,76	0,12
24	Tanah Terbuka	6.488,16	12,70
25	TPAS	0,09	0,00
26	TPU	29,60	0,06
27	Utilitas	4,15	0,01
<b>Grand Total</b>		<b>51.106,48</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dokumen RTRW Kota Balikpapan





**Gambar 3.6 Peta Tutupan Lahan Kota Balikpapan Tahun 2020**

Dibawah ini merupakan tabel tutupan lahan dirinci per kelurahan yang ada di Kota Balikpapan.





Tabel III.20 Tutupan Lahan Berdasarkan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Balikpapan Tahun 2020

No	Kecamatan/ Kelurahan	JENIS TUTUPAN LAHAN TAHUN 2020												
		Badan Air	Badan Jalan	Bakau	Fasilitas Hankam	Fasilitas Sosial	Fasilitas Transportasi	Hutan	Industri	Irigasi	Jembatan	Kawasan Permukiman/ Perumahan	Kebun Campuran	Pariwisata
<b>I</b>	<b>Balikpapan Barat</b>	<b>62,51</b>	<b>117,59</b>	<b>903,73</b>	<b>0,18</b>	<b>7,92</b>	<b>5,34</b>	<b>14.424,56</b>	<b>488,79</b>	<b>0,01</b>		<b>254,04</b>	<b>186,91</b>	<b>1,52</b>
1	Baru Ilir		5,66		0,04	2,04	0,05		0,34			29,73	0,69	0,94
2	Baru Tengah	3,62	5,90	0,94	0,02	1,56	0,23		0,04			42,82	0,35	
3	Baru Ulu	2,56	5,96	3,44	0,03	1,46	3,21	1,29	1,92			38,30	0,08	
4	Kariangau	54,24	87,02	870,35	0,02	0,26	1,23	14.405,44	473,21	0,01		81,72	184,61	
5	Marga Sari		4,32		0,04	0,96			0,03			22,42		0,58
6	Margomulyo	2,08	8,72	29,01	0,02	1,64	0,63	17,83	13,26			39,05	1,19	
<b>II</b>	<b>Balikpapan Kota</b>	<b>1,78</b>	<b>80,94</b>		<b>3,95</b>	<b>18,66</b>	<b>19,43</b>	<b>162,57</b>	<b>15,46</b>		<b>0,06</b>	<b>643,66</b>	<b>0,15</b>	<b>7,56</b>
1	Damai	0,20	15,88		0,27	1,77	0,70	20,98	0,79			148,15		0,80
2	Klandasan Ilir		12,27		0,11	2,43	2,23	2,44	1,18			112,66	0,15	2,59
3	Klandasan Ulu		9,09		0,83	4,05	3,17				0,06	66,40		3,45
4	Prapatan	0,22	31,79		0,77	6,38	12,26	108,30	13,49			242,49		0,63
5	Telaga Sari	1,36	11,91		1,97	4,03	1,05	30,86				73,96		0,09
<b>III</b>	<b>Balikpapan Selatan</b>	<b>39,56</b>	<b>260,73</b>		<b>5,85</b>	<b>23,54</b>	<b>209,88</b>	<b>473,44</b>	<b>6,10</b>			<b>1.560,39</b>	<b>91,00</b>	<b>3,63</b>
1	Damai Bahagia	2,57	22,84		1,47	4,13	6,26	50,60	1,96			181,08	0,41	1,37
2	Damai Baru	0,03	29,45		0,04	1,92	4,71	9,32	0,60			113,81		0,10
3	Gunung Bahagia	0,85	30,16		0,88	3,50	3,38	45,04	0,07			215,56	0,59	0,54
4	Sepinggan	1,24	45,46		0,06	3,02	2,86	89,05	2,41			316,78	66,78	0,07
5	Sepinggan Baru	22,65	65,36		0,05	4,47	0,76	208,29	0,18			391,30	18,61	0,20
6	Sepinggan Raya	3,02	38,78		3,33	4,68	188,99	48,89	0,08			151,04	4,62	1,06
7	Sungai Nangka	9,20	28,68		0,02	1,82	2,93	22,24	0,80			190,81		0,28
<b>IV</b>	<b>Balikpapan Tengah</b>	<b>0,22</b>	<b>64,23</b>		<b>0,17</b>	<b>10,71</b>	<b>5,63</b>	<b>105,88</b>	<b>59,97</b>			<b>722,11</b>	<b>1,12</b>	<b>0,59</b>
1	Gunung Sari Ilir		6,86		0,02	3,17	0,39					94,57		0,16
2	Gunung Sari Ulu	0,14	7,28		0,08	2,01	1,57	61,42	1,17			125,16		0,18
3	Karang Jati	0,08	26,66		0,02	2,51	2,80	11,91	58,65			232,07	1,12	0,03
4	Karang Rejo		8,10		0,01	1,39	0,01	2,93				106,40		0,12
5	Mekar Sari		4,73		0,04	0,57	0,87	2,02				59,96		0,07
6	Sumber Rejo		10,60		0,01	1,06		27,61	0,15			103,96		0,04
<b>V</b>	<b>Balikpapan Timur</b>	<b>52,90</b>	<b>218,50</b>		<b>2,59</b>	<b>16,65</b>	<b>15,72</b>	<b>3.044,34</b>	<b>29,71</b>			<b>1.363,26</b>	<b>905,47</b>	<b>0,73</b>
1	Lamaru	18,71	46,48		0,07	3,26	0,18	946,03	5,34			296,21	336,72	0,21
2	Manggar	17,16	110,00		0,08	10,45	14,85	821,94	20,14			654,37	112,03	0,52
3	Manggar Baru	5,74	15,99		2,41	1,93	0,67	18,08	2,03			138,02	80,01	
4	Teritip	11,30	46,04		0,03	1,01	0,03	1.258,29	2,20			274,66	376,72	
<b>VI</b>	<b>Balikpapan Utara</b>	<b>381,97</b>	<b>276,55</b>	<b>120,63</b>	<b>1,58</b>	<b>25,09</b>	<b>14,70</b>	<b>4.556,33</b>	<b>63,60</b>			<b>2.271,31</b>	<b>386,69</b>	<b>1,23</b>
1	Batu Ampar	3,25	34,55	77,33		3,36	4,86	48,56	3,00			379,19	18,85	0,24
2	Graha Indah	8,57	63,77	29,98		7,86	4,96	811,16	20,84			441,26	72,12	0,65
3	Gunung Samarinda	0,44	15,40			4,60	0,31		0,94			181,85	2,50	
4	Gunung Samarinda Baru	1,07	29,18			0,84	2,10	21,54	1,03			172,20		0,14
5	Karang Joang	364,99	115,21	2,42	1,05	5,00	1,77	3.668,54	36,13			936,11	282,46	0,20
6	Muara Rapak	3,65	18,44	10,90	0,53	3,42	0,69	6,53	1,67			160,70	10,76	
	<b>TOTAL</b>	<b>538,94</b>	<b>1.018,54</b>	<b>1.024,35</b>	<b>14,32</b>	<b>102,57</b>	<b>270,71</b>	<b>22.767,12</b>	<b>663,65</b>	<b>0,01</b>	<b>0,06</b>	<b>6.814,76</b>	<b>1.571,34</b>	<b>15,25</b>



Tabel III.20 Lanjutan.

No	Kecamatan/ Kelurahan	JENIS TUTUPAN LAHAN TAHUN 2020														Grand Total
		Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Perkebunan	Pertanian Lahan Basah	Peternakan	Rawa	RTH	Sarana Olah Raga	Sungai	Tambak/ Kolam	Tanah Terbuka	TPAS	TPU	Utilitas	
<b>I</b>	<b>Balikpapan Barat</b>	<b>9,34</b>	<b>0,39</b>	<b>411,44</b>	<b>24,06</b>	<b>0,03</b>	<b>180,51</b>	<b>3,18</b>	<b>1,20</b>	<b>281,13</b>	<b>60,94</b>	<b>1.860,87</b>	<b>0,01</b>	<b>3,13</b>	<b>0,39</b>	<b>19.289,71</b>
1	Baru Ilir	2,06	0,17					0,13	0,74	0,18		27,37		1,19	0,00	71,33
2	Baru Tengah	0,80	0,07	4,38			0,54		0,12	0,27		29,60			0,00	91,26
3	Baru Ulu	0,28	0,03	7,05			0,43		0,22	1,50		52,42		1,04	0,01	121,21
4	Kariangau	2,57	0,08	387,23	24,06	0,03	176,29	2,80	0,01	271,20	60,94	1.667,73	0,01		0,35	18.751,41
5	Marga Sari	3,51	0,02					0,13		3,38		21,53			0,02	56,94
6	Margomulyo	0,13	0,02	12,79			3,24	0,13	0,12	4,59		62,22		0,90	0,01	197,57
<b>II</b>	<b>Balikpapan Kota</b>	<b>15,78</b>	<b>8,28</b>	<b>9,84</b>				<b>6,36</b>	<b>10,29</b>	<b>3,16</b>	<b>0,14</b>	<b>99,63</b>		<b>1,42</b>	<b>0,70</b>	<b>1.109,82</b>
1	Damai	2,55	0,87	3,17				0,58	0,13	1,42		23,97			0,07	222,31
2	Klandasan Ilir	8,15	1,59	4,24				0,33	0,12	0,91	0,02	9,45		0,69	0,10	161,67
3	Klandasan Ulu	4,88	2,85	1,54				1,19	2,51	0,36	0,03	6,44			0,12	106,97
4	Prapatan	0,11	2,40	0,88				3,05	6,20	0,21	0,05	13,01			0,25	442,48
5	Telaga Sari	0,10	0,58					1,20	1,34	0,26	0,04	46,77		0,73	0,16	176,39
<b>III</b>	<b>Balikpapan Selatan</b>	<b>32,69</b>	<b>19,34</b>	<b>258,30</b>	<b>9,04</b>			<b>15,77</b>	<b>47,78</b>	<b>16,64</b>	<b>0,42</b>	<b>801,20</b>		<b>5,06</b>	<b>0,74</b>	<b>3.881,12</b>
1	Damai Bahagia	7,74	4,22	6,81	0,68			0,60	40,18	2,93	0,03	37,90		1,78	0,06	375,63
2	Damai Baru	8,27	1,94	6,13				2,45	0,36	1,90		34,35			0,15	215,53
3	Gunung Bahagia	5,03	1,59	18,08				1,26	1,36	0,68		45,17			0,12	373,86
4	Sepinggan	2,65	5,21	48,89				2,50	0,15	2,80		278,35		1,31	0,15	869,73
5	Sepinggan Baru	4,43	2,34	56,16				6,51	2,02	5,20	0,15	274,80			0,22	1.063,70
6	Sepinggan Raya	2,14	2,91	101,66	6,79			1,35	3,33	2,61	0,12	97,28			0,04	662,72
7	Sungai Nangka	2,43	1,14	20,56	1,58			1,10	0,38	0,52	0,12	33,35		1,98		319,95
<b>IV</b>	<b>Balikpapan Tengah</b>	<b>3,36</b>	<b>3,29</b>	<b>22,96</b>	<b>3,43</b>			<b>1,28</b>	<b>2,29</b>	<b>8,86</b>		<b>64,88</b>		<b>1,32</b>	<b>0,26</b>	<b>1.082,57</b>
1	Gunung Sari Ilir	0,97	0,61	0,15				0,24	0,03	0,58		0,36		0,38	0,01	108,51
2	Gunung Sari Ulu	0,85	1,20	0,52				0,17		0,33		2,52		0,95	0,05	205,61
3	Karang Jati	0,47	1,17	2,68				0,27	2,24	6,05		9,30			0,07	358,09
4	Karang Rejo	0,47	0,11	1,18				0,20		0,47		0,45			0,08	121,90
5	Mekar Sari	0,05	0,20					0,13	0,02	0,43		3,26			0,03	72,37
6	Sumber Rejo	0,55		18,42	3,43			0,27		0,99		48,99			0,03	216,10
<b>V</b>	<b>Balikpapan Timur</b>	<b>5,96</b>	<b>22,49</b>	<b>3.269,27</b>	<b>518,55</b>		<b>27,56</b>	<b>8,02</b>	<b>13,64</b>	<b>130,63</b>	<b>0,26</b>	<b>2.265,13</b>	<b>0,08</b>	<b>2,52</b>	<b>1,55</b>	<b>11.915,54</b>
1	Lamaru	1,59	1,53	1.229,95	78,05			7,62	1,59	29,27		603,17	0,01	0,91	0,11	3.607,02
2	Manggar	1,61	19,88	221,93	130,71		27,56	0,28	9,59	62,05	0,24	1.066,17	0,07	0,72	1,40	3.303,74
3	Manggar Baru	2,43	0,45	44,55	32,68			0,09	2,26	34,30	0,01	139,29		0,40	0,03	521,35
4	Teritip	0,33	0,63	1.772,84	277,12			0,02	0,20	5,01		456,50		0,50	0,00	4.483,42
<b>VI</b>	<b>Balikpapan Utara</b>	<b>20,26</b>	<b>3,15</b>	<b>4.053,47</b>	<b>40,84</b>		<b>59,36</b>	<b>12,07</b>	<b>68,32</b>	<b>57,47</b>		<b>1.396,45</b>		<b>16,14</b>	<b>0,52</b>	<b>13.827,72</b>
1	Batu Ampar	5,32	0,74	78,12	1,02		1,16	0,80	0,35	19,27		99,76		0,27	0,11	780,10
2	Graha Indah	5,77	0,39	197,67			4,19	1,81	1,56	4,93		247,41		1,72	0,04	1.926,66
3	Gunung Samarinda	2,13	0,47	32,51	15,93			0,04	0,24	1,42		2,87		4,90	0,00	266,55
4	Gunung Samarinda Baru	4,13	0,50	41,42			1,74	4,67	1,23	3,20		19,61			0,04	304,64
5	Karang Joang	0,89	0,85	3.680,90	23,11		47,77	4,70	64,77	22,85		966,32		6,75	0,26	10.233,03
6	Muara Rapak	2,03	0,20	22,86	0,78		4,49	0,05	0,17	5,80		60,48		2,51	0,06	316,73
	<b>TOTAL</b>	<b>87,39</b>	<b>56,94</b>	<b>8.025,28</b>	<b>595,93</b>	<b>0,03</b>	<b>267,42</b>	<b>46,67</b>	<b>143,53</b>	<b>497,89</b>	<b>61,76</b>	<b>6.488,16</b>	<b>0,09</b>	<b>29,60</b>	<b>4,15</b>	<b>51.106,48</b>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021, Ineterpretasi Peta Citra Tahun 2020



### 3.1.2.10 Kondisi Sosial dan Kependudukan

Perkembangan atau pertumbuhan penduduk merupakan indeks perbandingan jumlah penduduk pada suatu tahun terhadap jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian (pertambahan alami), selain itu juga dipengaruhi adanya faktor migrasi penduduk yaitu perpindahan keluar dan masuk. Pada dasarnya tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dapat digunakan untuk mengasumsikan prediksi atau meramalkan perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang. Prediksi perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang dilakukan dengan pendekatan matematis dengan pertimbangan pertumbuhan jumlah penduduk 5 tahun terakhir.

Data jumlah penduduk Kota Balikpapan 10 Tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan dapat dilihat jumlah penduduk Kota Balikpapan pada Tahun 2013 sebesar 594.322 Jiwa sedangkan jumlah penduduk Kota Balikpapan Pada Tahun 2022 sebesar 703.611 Jiwa.

**Tabel III.21 Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2011 - 2022**

Tahun	Kecamatan (Jiwa)						Kota Balikpapan (Jiwa)
	Balikpapan Selatan	Balikpapan Timur	Balikpapan Utara	Balikpapan Tengah	Balikpapan Barat	Balikpapan Kota	
2011	196.580	62.004	126.005	101.600	85.995	-	572.184
2012	117.272	63.213	128.473	103.545	87.647	83.122	583.272
2013	119.496	64.419	130.936	105.482	89.292	84.697	594.322
2014	121.663	65.595	133.338	107.370	90.895	86.235	605.096
2015	123.772	66.739	135.676	109.204	92.454	87.729	615.574
2016	125.864	67.874	137.997	111.022	93.999	89.212	625.968
2017	127.885	68.971	140.243	112.777	95.491	90.645	636.012
2018	129.841	70.034	142.415	114.473	96.932	92.032	645.727
2019	131.743	71.067	144.532	116.121	98.335	93.380	655.178
2020	145.007	90.243	169.150	106.952	94.123	82.843	688.318
2021	146.689	95.542	172.117	106.960	94.130	82.849	695.287
2022	148.650	95.064	175.440	107.155	94.302	83.000	703.611

Sumber: BPS, Kota Balikpapan dalam Angka, 2023

Untuk jenis penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kota Balikpapan dapat dilihat pada Tahun 2022 jenis penduduk laki-laki sebesar 35.9563 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 34.4048 Jiwa atau penduduk laki-laki lebih besar daripada penduduk perempuan.

**Tabel III.22 Jumlah Berdasarkan Kelamin di Kota Balikpapan Tahun 2020 - 2022**

No	Kecamatan	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (Jiwa)									
		Jumlah	2020		Jumlah	2021		Jumlah	2022		Jumlah
			L	P		L	P		L	P	
1	Balikpapan Selatan	131743	74350	70657	145007	74989	71700	146689	75763	72887	148650
2	Balikpapan Kota	93380	42243	40600	82843	42260	40589	82849	42351	40649	83000
3	Balikpapan Timur	71067	46628	43615	90243	47701	44841	92542	48884	46180	95064



No	Kecamatan	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (Jiwa)									
		Jumlah	2020		Jumlah	2021		Jumlah	2022		Jumlah
			L	P		L	P		L	P	
4	Balikpapan Utara	116121	86550	82600	169150	87834	84283	172117	89290	86150	175440
5	Balikpapan Tengah	98335	54346	52606	106952	54368	52592	106960	54485	52670	107155
6	Balikpapan Barat	144532	48685	45438	94123	48696	45434	94130	48790	45512	94302
<b>Jumlah</b>		<b>655178</b>	<b>352802</b>	<b>335516</b>	<b>688318</b>	<b>355848</b>	<b>339439</b>	<b>695287</b>	<b>359563</b>	<b>344048</b>	<b>703611</b>

Sumber: BPS, Kota Balikpapan dalam Angka, 2023

Laju pertumbuhan penduduk ini dilakukan untuk mengetahui trend pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan. Berdasarkan tabel dibawah ini, laju pertumbuhan penduduk di semua kecamatan Kota Balikpapan bersifat positif (+), yang berarti dari tahun 2020-2022 cenderung Kota Balikpapan mengalami peningkatan jumlah penduduk.

**Tabel III.23 Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2020-2022**

No	Kecamatan	Penduduk Berdasarkan Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk							
		2019		2020		2021		2022	
		Laju Pertumbuhan (%)	Kepadatan	Laju Pertumbuhan (%)	Kepadatan	Laju Pertumbuhan (%)	Kepadatan	Laju Pertumbuhan (%)	Kepadatan
1	Balikpapan Selatan	1,75	3484	2,51	3858	1,55	3902	1,43	3830
2	Balikpapan Kota	1,68	518	0,4	7714	0,01	7714	0,11	7477
3	Balikpapan Timur	1,76	1094	3,92	691	3,41	708	3,02	798
4	Balikpapan Utara	1,77	10468	3,11	1273	2,35	1295	2,11	1269
5	Balikpapan Tengah	1,73	546	0,79	9931	0,01	9931	0,11	9894
6	Balikpapan Barat	1,74	9139	1,18	521	0,01	521	0,11	489

Sumber : BPS, Kota Balikpapan dalam Angka Tahun 2023

Untuk indeks pembangunan manusia di Kota Balikpapan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 mengalami pertumbuhan itu dapat dilihat pada pertumbuhan IPM tahun 2021 ke tahun 2022 yaitu 0,52. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.24 dibawah ini.





**Tabel III.24 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Balikpapan**

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Balikpapan		
Tahun	IPM	Pertumbuhan IPM
2013	77,53	1,27
2014	77,93	0,52
2015	78,18	0,32
2016	78,57	0,5
2017	79,01	0,56
2018	79,81	1,01
2019	80,11	0,38
2020	80,01	-0,12
2021	80,71	0,87
2022	81,31	0,52

Sumber : BPS, Kota Balikpapan dalam Angka Tahun 2023

Kemiskinan di Kota Balikpapan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 2,45% atau sekitar 15.830 jiwa. Namun bila dilihat pada perkembangannya kemiskinan yang terjadi di Kota Balikpapan relatif turun dari tahun ke tahun. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.25 dibawah ini.

**Tabel III.25 Kemiskinan di Kota Balikpapan**

No	Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
1	2015	485665	1789	2,91	0,22	0,03
2	2016	498721	1755	2,81	0,3	0,05
3	2017	530710	1786	2,82	0,23	0,03
4	2018	545971	17008	2,64	0,67	0,26
5	2019	572108	15780	2,42	0,26	0,06
6	2020	613622	17020	2,57	0,38	0,12
7	2021	657521	18530	2,89	0,5	0,15
8	2022	680499	15830	2,45	0,17	0,02

Sumber : BPS, Kota Balikpapan dalam Angka Tahun 2023

## 3.2 KONDISI LINGKUNGAN HIDUP

### 3.2.1 Wilayah Fungsional (Batas Ekologis)

Wilayah sebagai sistem berarti suatu entitas yang terdiri atas komponen-komponen yang memiliki keterkaitan (hubungan fungsional) satu sama lain. Salah satunya system kompleks, yang ditunjukkan dengan banyaknya jumlah dan jenis komponen yang ada serta keragaman bentuk hubungan antara komponen-komponen tersebut, yaitu system ekologi (ekosistem). Konsep wilayah sistem/fungsional ekologi ini diartikan bahwa wilayah yang dibatasi berdasarkan pada sifat-sifat tertentu pada wilayah baik sifat alamiah maupun non alamiah yang sedemikian rupa sehingga perlu direncanakan dalam



kesatuan wilayah perencanaan atau pengelolaan dalam hal ini berupa wilayah ekologis. Ada beberapa contoh konsep wilayah ekologis ini antara lain Daerah Aliran Sungai (DAS), sistem wilayah sungai dan lain-lain. Wilayah ekologis tersebut menggambarkan bahwa wilayah dibatasi oleh kondisi ekologi yang ada di masing-masing wilayah.

Konsep wilayah ekologis ini memberikan landasan dalam pengelolaan kawasan secara berkelanjutan karena dalam sistem ekologi ini pembatasan kawasan didasarkan pada komponen ekologi yang tersusun di dalamnya yang saling berpengaruh atau terkait satu dengan yang lainnya dan berdasarkan adanya kesamaan karakteristik fenomena alami yang menyusunnya. Apabila pengelolaan kawasan dapat menjaga sistem ekologi yang ada di dalamnya maka keberlangsungan kawasan akan tetap terjaga walaupun di dalamnya terjadi perubahan-perubahan. Perencanaan pengembangan wilayah yang terpadu antara bagian hulu dan bagian hilir penting untuk dilakukan karena dalam jangka panjang apabila terjadi kerusakan atau tidak terjadinya keterpaduan dalam perencanaan di daerah hulu akan berdampak juga pada bagian hilir. Dalam konteks KLHS, keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup di Kota Balikpapan sangat dipengaruhi oleh dan mempengaruhi status dan kondisi lingkungan hidup yang berada di sekitar Kota Balikpapan.

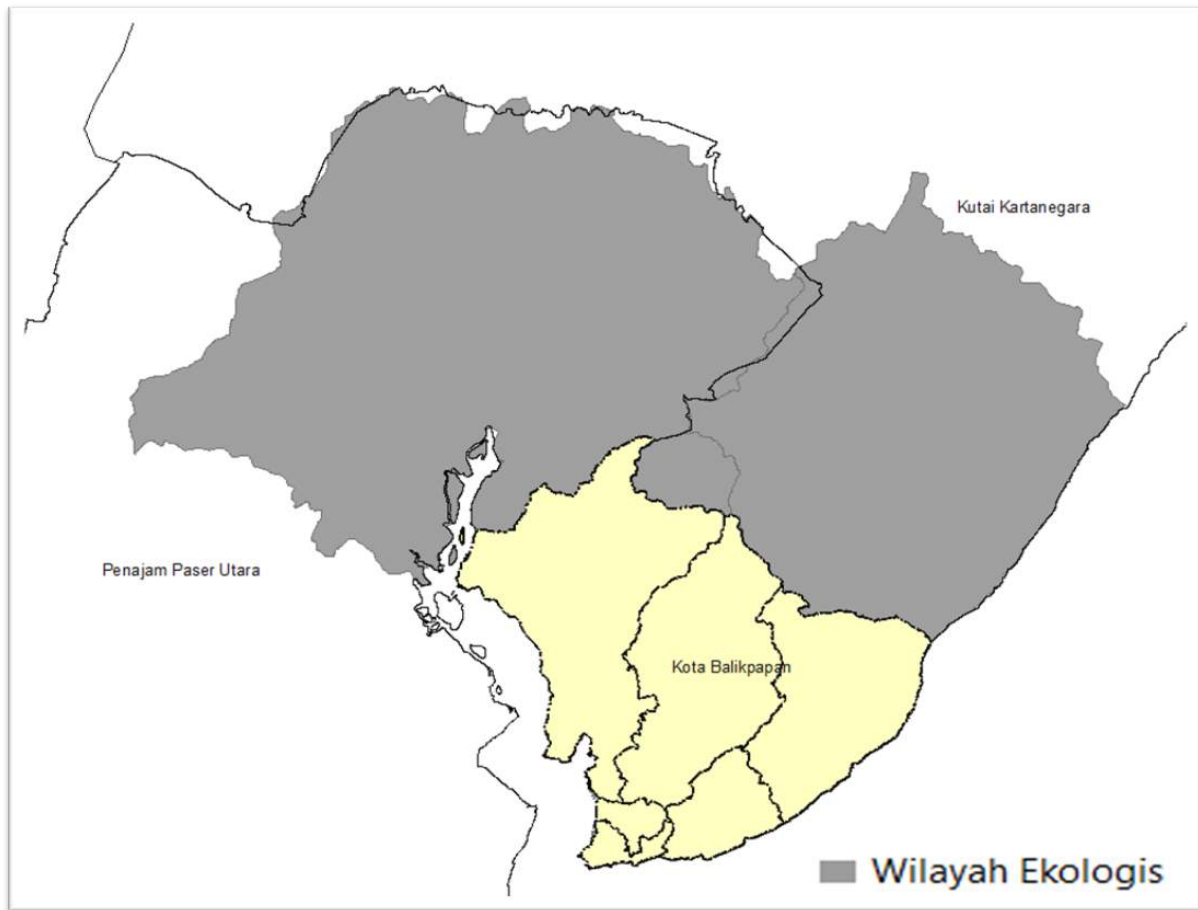
Batas ekologis, yaitu ruang terjadinya sebaran dampak-dampak lingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji, mengikuti media lingkungan masing-masing (seperti air dan udara), dimana proses alami yang berlangsung dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Berdasarkan hal ini dengan mempertimbangkan peta ekoregion, peta batas daerah aliran sungai (DAS) dan batas wilayah di Kota Balikpapan, maka delineasi batas fungsional wilayah yang mempengaruhi Kota Balikpapan. Batas fungsional ini menjadi batas wilayah kajian pelaksanaan dan pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kota Balikpapan secara umum. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.26 dan Gambar 3.7 dibawah ini.

**Tabel III.26 Wilayah Kabupaten/Kota Yang Berada di dalam Wilayah Fungsional KLHS RPJPD Kota Balikpapan**

No	Wilayah Ekologis	Grand Total (Ha)
1	Kota Balikpapan	50853,36
2	Kutai Kartanegara	58351,84
3	Penajam Paser Utara	88771,86
	<b>Grand Total</b>	<b>197977,06</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023





**Gambar 3.7** Peta Wilayah Ekologis Kota Balikpapan

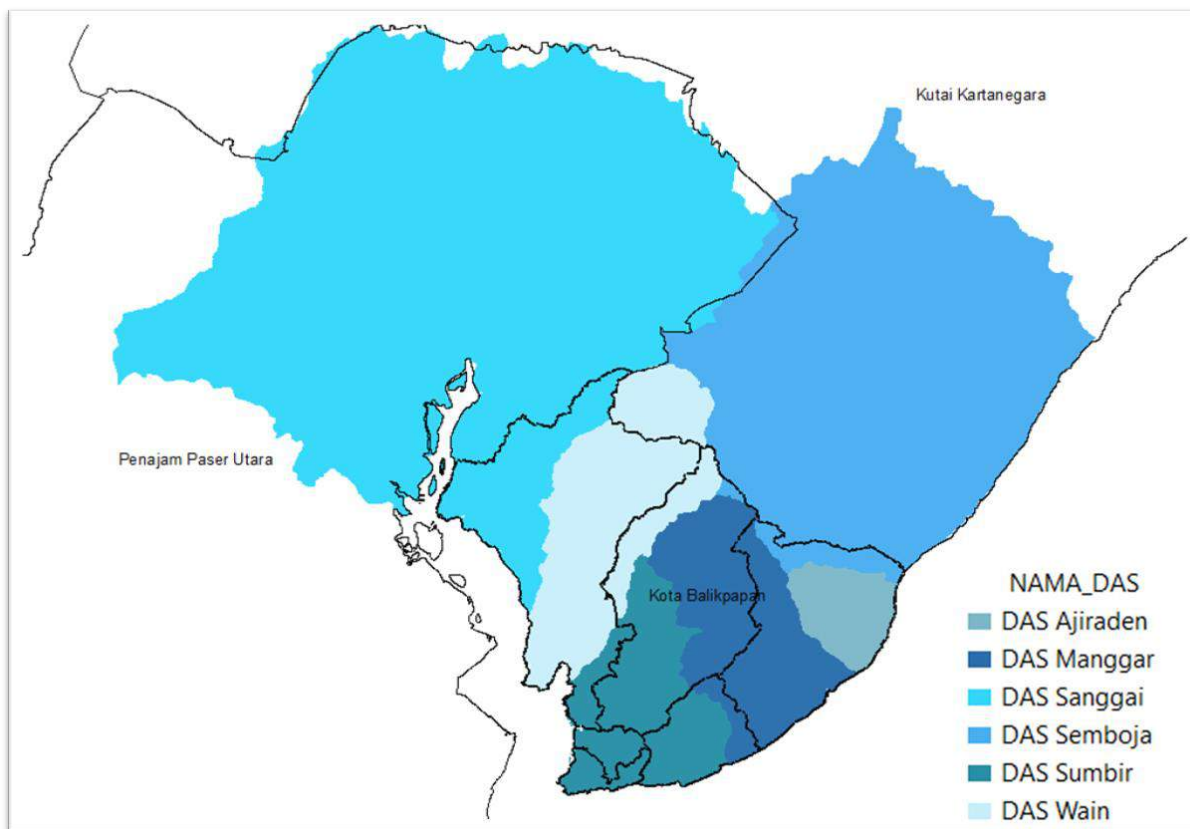
Untuk wilayah ekologis yang berhubungan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Balikpapan terdiri dari 6 DAS yaitu DAS Ajiraden, DAS Manggar, DAS Sanggai, DAS Semboja, DAS Sumbir, dan DAS Wain. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.27 dan Gambar 3.8 dibawah ini.

**Tabel III.27** DAS Yang Berada di dalam Wilayah Fungsional KLHS RPJPD Kota Balikpapan

No	Nama DAS	Grand Total (Ha)
1	DAS Ajiraden	3929,26
2	DAS Manggar	13491,28
3	DAS Sanggai	96050,81
4	DAS Semboja	56836,74
5	DAS Sumbir	11327,72
6	DAS Wain	16341,24
<b>Grand Total</b>		<b>197977,06</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023





**Gambar 3.8** Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Balikpapan

### 3.2.2 Kondisi Ekoregion di Kota Balikpapan

Bentang alam yang ada di Kota Balikpapan terdiri dari 7 jenis bentang alam yaitu Dataran fluvial bermaterial aluvium, Dataran fluviomarin bermaterial aluvium, Dataran marin berpasir bermaterial aluvium, Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat, Lembah sungai bermaterial aluvium, Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat, dan Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.28 dan Gambar 3.9 dibawah ini.

**Tabel III.28** Bentang Alam Kota Balikpapan

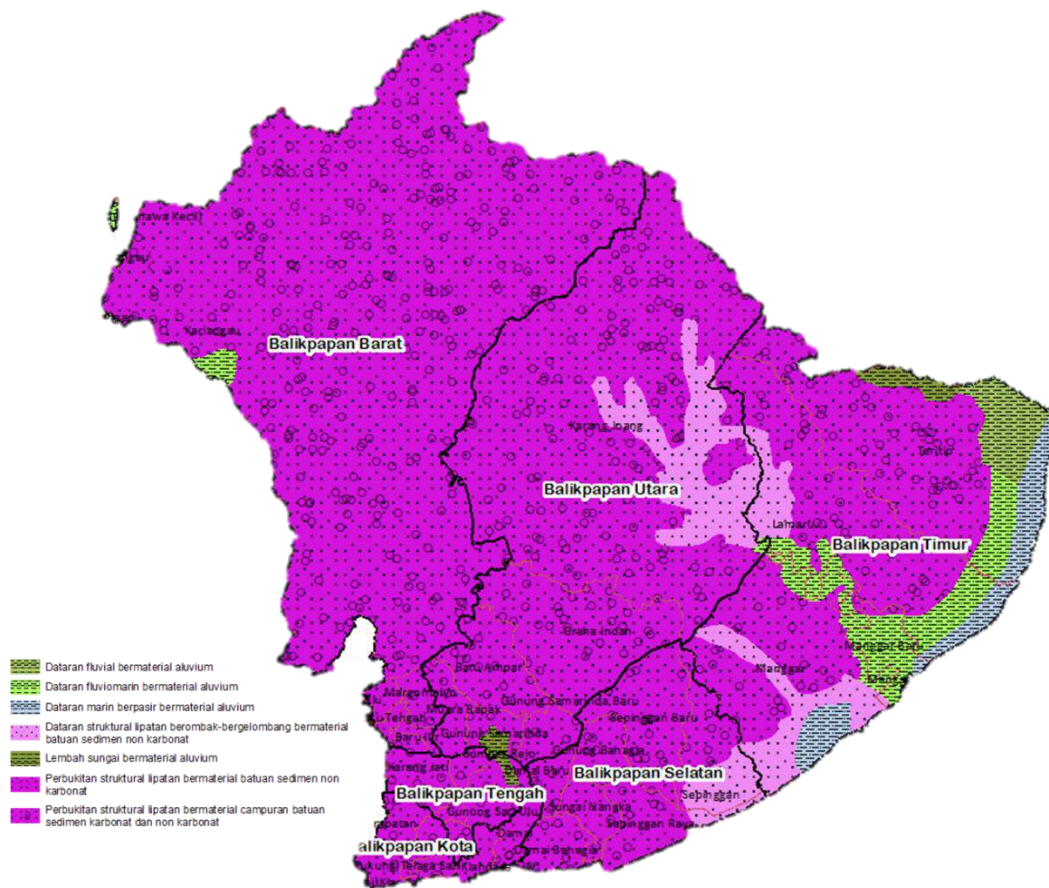
No	Jenis Bentang Alam	Kecamatan (Ha)					Grand Total	
		Balikpapan Barat	Balikpapan Kota	Balikpapan Selatan	Balikpapan Tengah	Balikpapan Timur		Balikpapan Utara
1	Dataran fluvial bermaterial aluvium					585,56	585,56	
2	Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	139,95				1633,33	1790,87	
3	Dataran marin berpasir bermaterial aluvium					979,77	979,77	
4	Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat			456,99		1213,94	1598,28	3269,20





No	Jenis Bentang Alam	Kecamatan (Ha)						Grand Total
		Balikpapan Barat	Balikpapan Kota	Balikpapan Selatan	Balikpapan Tengah	Balikpapan Timur	Balikpapan Utara	
5	Lembah sungai bermaterial aluvium				45,98	186,51	71,87	304,36
6	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	188,86						188,86
7	Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat	18930,16	1087,11	3400,00	1038,28	7153,33	12226,25	43835,14
<b>Grand Total</b>		<b>19258,96</b>	<b>1087,11</b>	<b>3856,99</b>	<b>1084,26</b>	<b>11752,44</b>	<b>13913,99</b>	<b>50953,75</b>

Sumber : SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 Tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000



Gambar 3.9 Peta Bentang Alam Kota Balikpapan

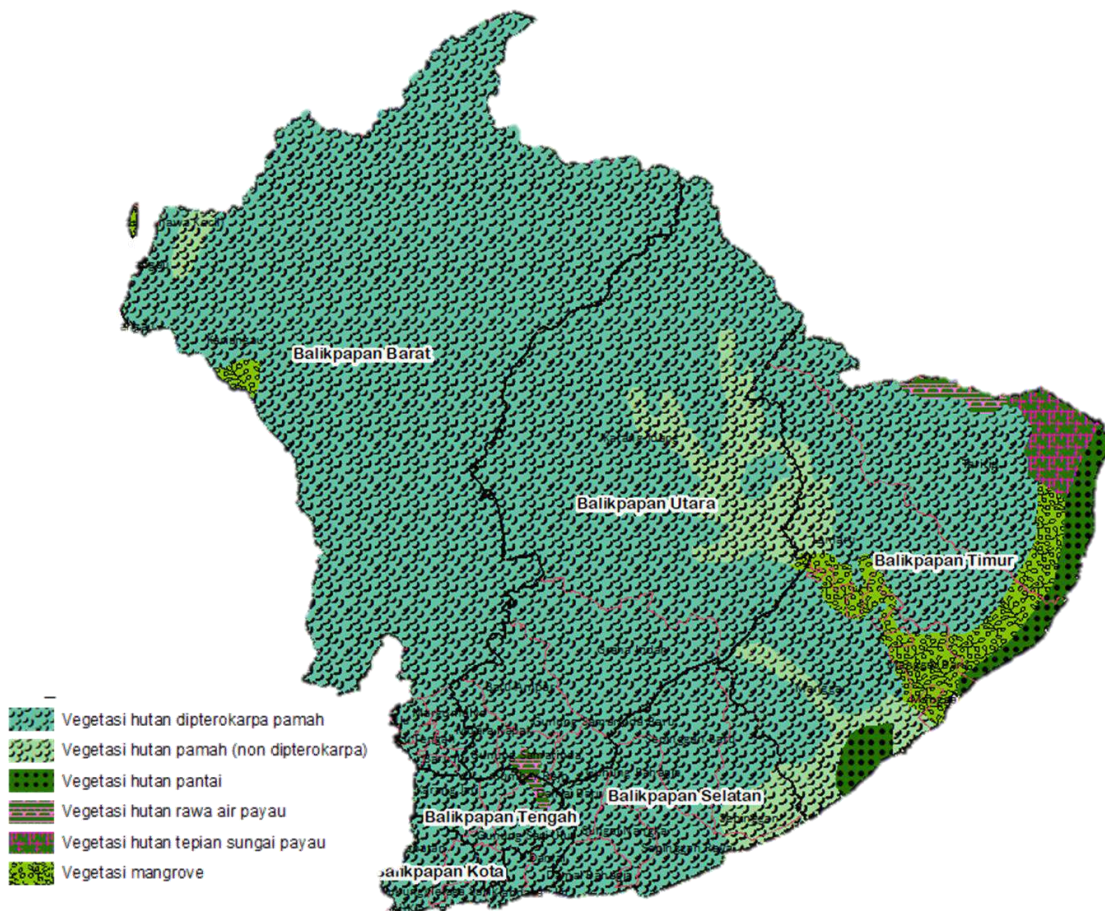
Vegetasi alami yang ada di Kota Balikpapan terdiri dari 6 jenis vegetasi alami yaitu Vegetasi hutan dipterokarpa pamah, Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa), Vegetasi hutan pantai, Vegetasi hutan rawa air payau, Vegetasi hutan tepian sungai payau, dan Vegetasi mangrove. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.29 dan Gambar 3.10 dibawah ini.



**Tabel III.29 Vegetasi Alami Kota Balikpapan**

No	Jenis Bentang Alam	Kecamatan (Ha)						Grand Total
		Balikpapan Barat	Balikpapan Kota	Balikpapan Selatan	Balikpapan Tengah	Balikpapan Timur	Balikpapan Utara	
1	Vegetasi hutan dipterokarpa pamah	18930,16	1087,11	3400,00	1038,28	7153,33	12226,25	43835,14
2	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	188,86		456,99		1213,94	1598,28	3458,06
3	Vegetasi hutan pantai					979,77		979,77
4	Vegetasi hutan rawa air payau				45,98	186,51	71,87	304,36
5	Vegetasi hutan tepian sungai payau					585,56		585,56
6	Vegetasi mangrove	139,95				1633,33	17,59	1790,87
<b>Grand Total</b>		<b>19258,96</b>	<b>1087,11</b>	<b>3856,99</b>	<b>1084,26</b>	<b>11752,44</b>	<b>13913,99</b>	<b>50953,75</b>

Sumber : SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 Tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000



**Gambar 3.10 Peta Vegetasi Alami Kota Balikpapan**

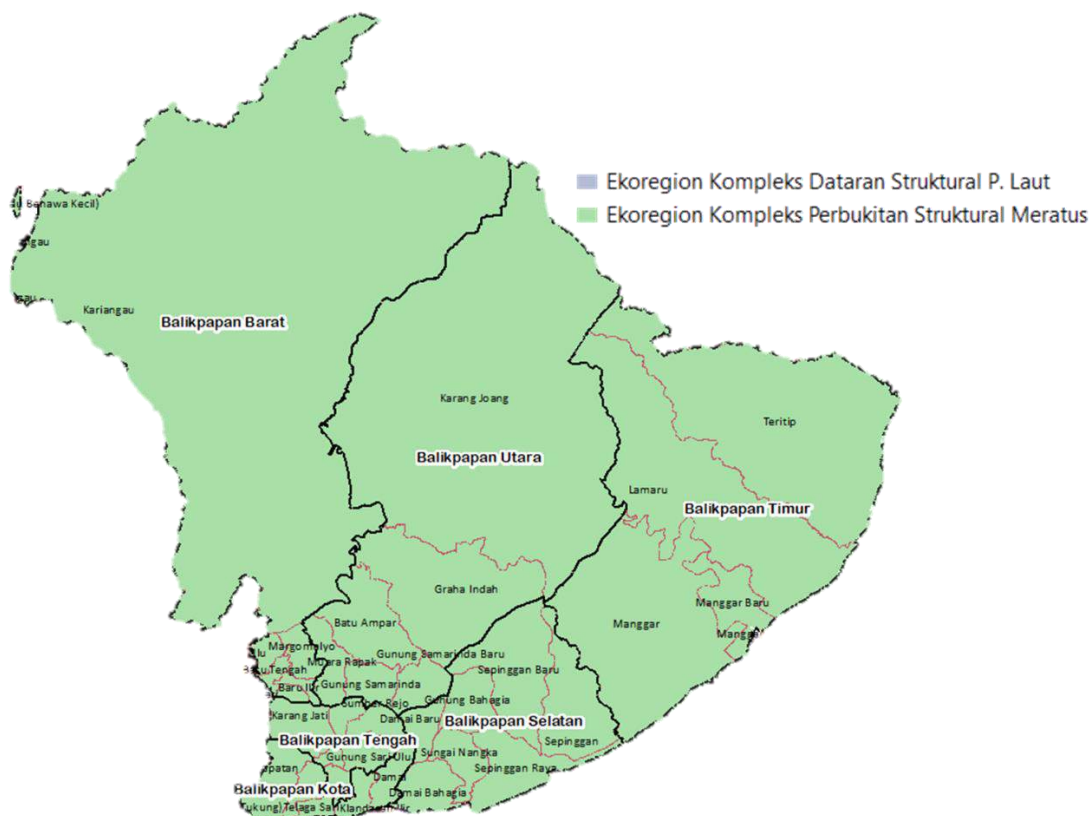
Berdasarkan pemetaan, secara umum Kota Balikpapan memiliki 2 jenis ekoregion yaitu Ekoregion Kompleks Dataran Struktural P. Laut dengan luas sebesar 0,03 Ha dan Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Meratus dengan luas sebesar 50953,72 ha. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.30 dan Gambar 3.11 dibawah ini.



**Tabel III.30 Ekoregion Kota Balikpapan**

No	Jenis Ekoregion	Kecamatan (Ha)						Grand Total
		Balikpapan Barat	Balikpapan Kota	Balikpapan Selatan	Balikpapan Tengah	Balikpapan Timur	Balikpapan Utara	
1	Ekoregion Kompleks Dataran Struktural P. Laut		0,03					0,03
2	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Meratus	19287,71	1076,95	3854,43	1084,18	11736,47	13913,99	50953,72
<b>Grand Total</b>		<b>19287,71</b>	<b>1076,98</b>	<b>3854,43</b>	<b>1084,18</b>	<b>11736,47</b>	<b>13913,99</b>	<b>50953,75</b>

Sumber : Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan skala 1:500.000 tahun 2023



**Gambar 3.11 Peta Ekoregion Kota Balikpapan**

### 3.2.3 Kapasitas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pada kajian ini, ambang batas Jasa Lingkungan penyedia digunakan untuk menganalisis kemampuan lingkungan Kota Balikpapan yang dikuantifikasi sebagai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Pangan dan air dipilih sebagai variabel untuk mengkuantifikasi Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH). Yang dimaksud dengan "Daya Dukung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara "Daya Tampung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (UUPPLH No.32/2009).





Ambang batas secara sederhana didefinisikan sebagai suatu tingkatan yang masih dapat diterima. Dalam hal ini ambang batas yang digunakan adalah ambang batas penduduk, yaitu seberapa banyak penduduk yang dapat didukung suatu wilayah dengan ketersediaan sumber daya yang ada atau tersedia. Status DDLH kemudian ditentukan dengan melihat apakah jumlah penduduk suatu wilayah telah melewati ambang batasnya atau belum (Norvyani, dkk., 2018). Penentuan ambang batas dan status DDLH ini dilakukan melalui pendekatan menggunakan Jasa Lingkungan penyedia bahan pangan dan Jasa Lingkungan penyedia air bersih dengan asumsi tidak terjadi aliran materi/energi (*closed system*).

#### A. Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Bahan Pangan

Penentuan status daya dukung penyedia pangan dilakukan berdasarkan hasil perhitungan ambang batas, yaitu dengan menyelisihkan ambang batas terhadap jumlah penduduk eksisting, nilai selisih yang negatif menunjukkan bahwa status DDLH pangan wilayah tersebut telah melampaui. Hasil analisis untuk status DDLH pangan terlihat bahwa Status daya dukung pangan di Kota Balikpapan Belum Melampaui sebesar 81% dan sudah melampaui sebesar 19%. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.31 dibawah ini.

**Tabel III.31 Luasan DDDLH Pangan Berdasarkan Kecamatan di Kota Balikpapan**

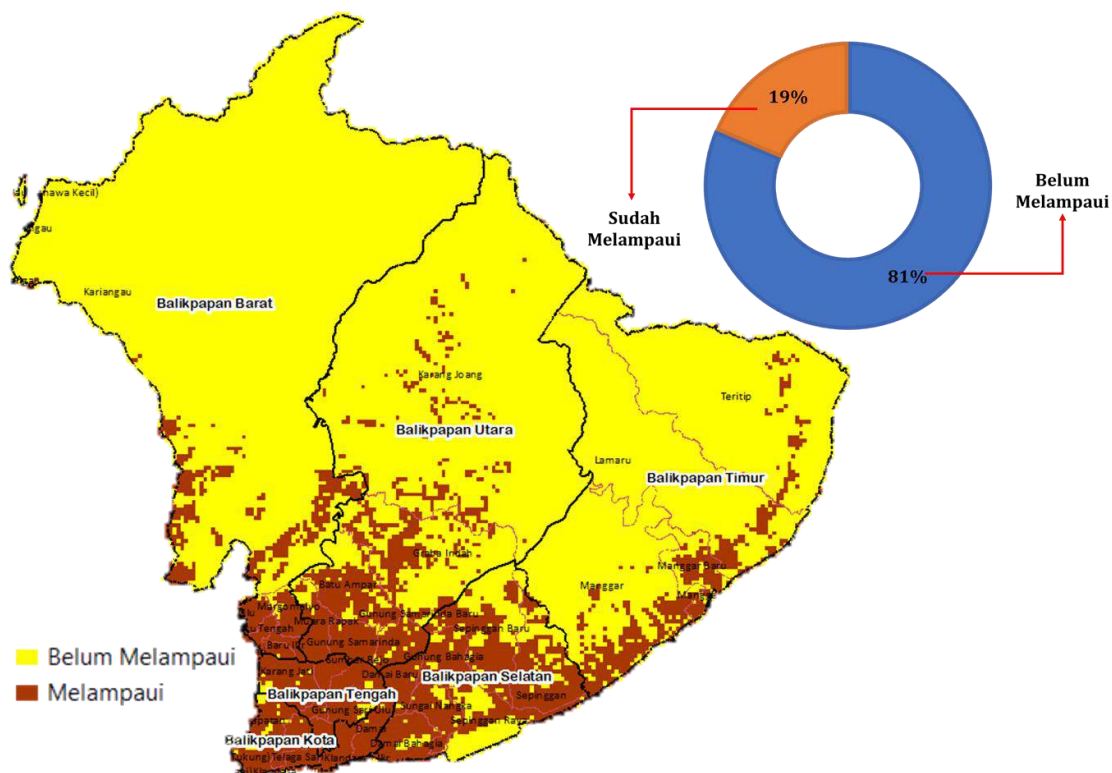
No	Kecamatan	Status (Ha)		Grand Total
		Belum Melampaui	Melampaui	
1	Balikpapan Barat	17941,54	1317,42	19258,96
2	Balikpapan Kota	85,74	1001,37	1087,11
3	Balikpapan Selatan	1298,81	<b>2558,18</b>	3856,99
4	Balikpapan Tengah	66,05	1018,21	1084,26
5	Balikpapan Timur	10481,30	1271,14	11752,44
6	Balikpapan Utara	11570,21	2343,77	13913,99
<b>Grand Total</b>		<b>41443,64</b>	<b>9510,11</b>	<b>50953,75</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Kecamatan yang mempunyai status daya dukung pangan yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Selatan dengan luas 2.558,18 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 17.941,54 Ha. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.12 dibawah ini.







**Gambar 3.12 Peta Status Daya Dukung Pangan di Kota Balikpapan**

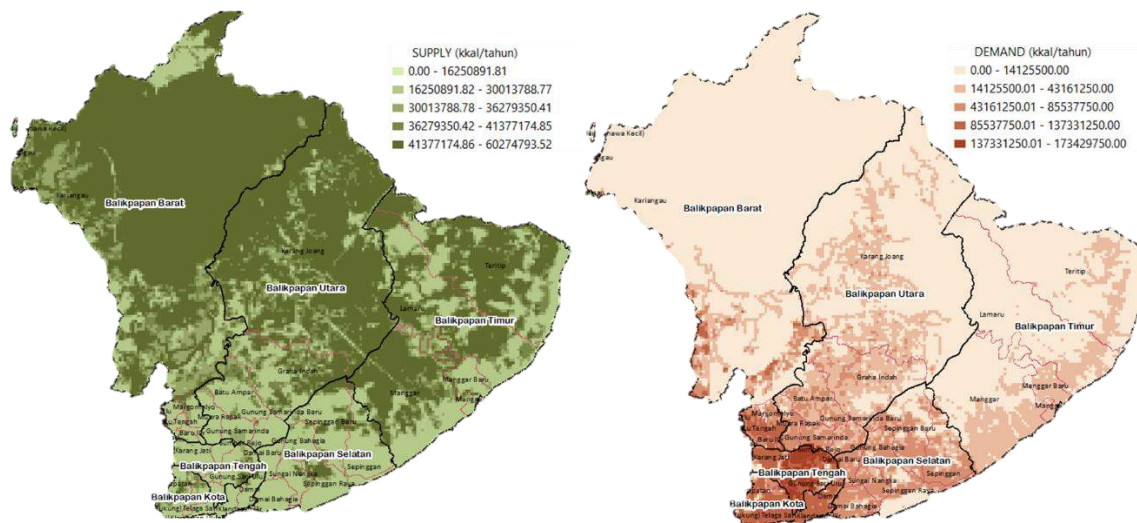
Untuk ketersediaan dan Kebutuhan pangan di Kota Balikpapan dapat dilihat yaitu Luasan Ketersediaan Pangan di Kota Balikpapan yaitu 916.178.290.606,89 Kkal / Tahun, untuk kebutuhan pangan 432.242.654.250,00 Kkal/Tahun. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.32 dan Gambar 3.13 dibawah ini.

**Tabel III.32 Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan di Kota Balikpapan**

No	Kecamatan	Ketersediaan (Kkal/Tahun)	Kebutuhan (Kkal/Tahun)	Selisih (Kkal/Tahun)	Ambang Batas (Jiwa/Tahun)
1	Balikpapan Barat	355851962292,23	61550296750,00	294301665542,23	453459,02
2	Balikpapan Kota	17309636348,82	60537184500,00	-43227548151,21	22057,52
3	Balikpapan Selatan	59839708148,50	84120491500,00	-24280783351,50	76253,21
4	Balikpapan Tengah	17981253627,96	79236992250,00	-61255738622,07	22913,35
5	Balikpapan Timur	205971870671,05	46788364500,00	159183506171,05	262468,14
6	Balikpapan Utara	259223859518,33	100009324750,00	159214534768,33	330326,68
	<b>Grand Total</b>	<b>916178290606,89</b>	<b>432242654250,00</b>	<b>483935636356,83</b>	<b>1167477,91</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023





Gambar 3.13 Peta Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan di Kota Balikpapan

### B. Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Air Bersih

Sama halnya dengan penentuan status daya dukung penyedia pangan, status daya dukung penyedia air bersih juga diperoleh melalui penentuan ambang batas. Status daya dukung penyedia air yang sudah melampaui 37%, Sedangkan untuk daya dukung air yang belum melampaui 63%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.33 dan Gambar 3.14 dibawah ini.

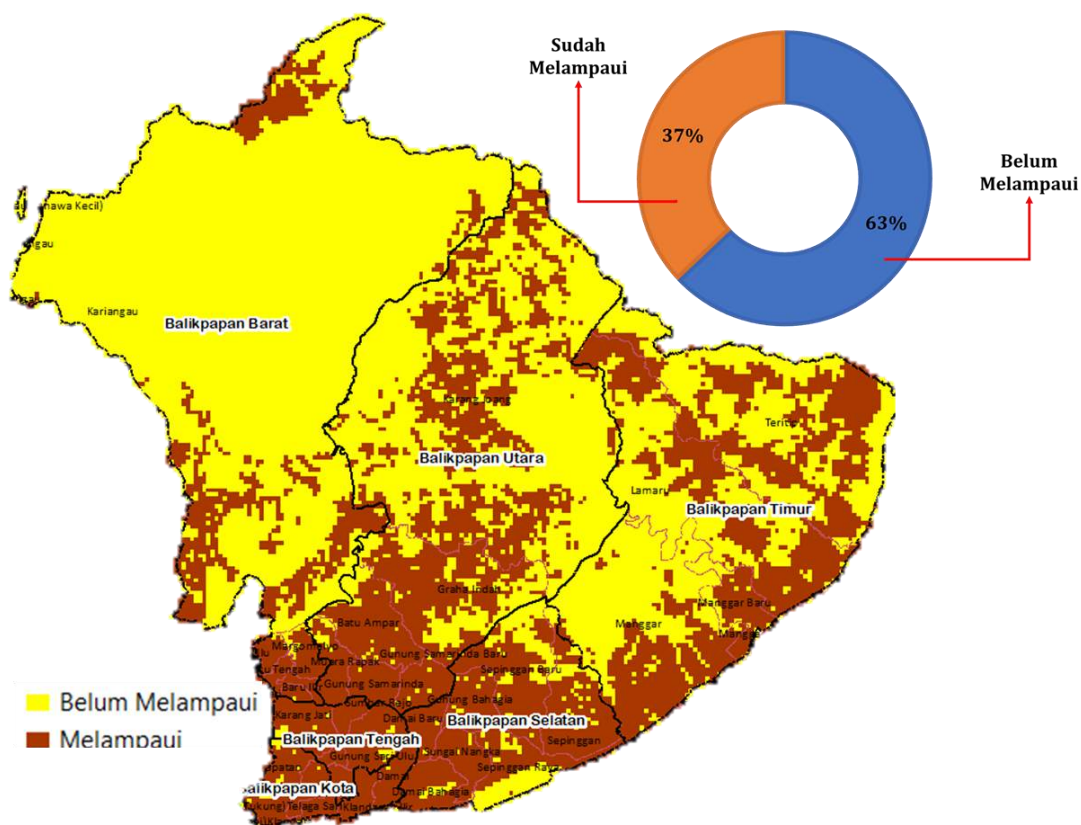
Tabel III.33 Luasan DDDLH Air Bersih Berdasarkan Kecamatan di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Status (Ha)		Grand Total
		Belum Melampaui	Melampaui	
1	Balikpapan Barat	16728,04	2530,92	19258,96
2	Balikpapan Kota	62,26	1024,85	1087,11
3	Balikpapan Selatan	824,58	3032,41	3856,99
4	Balikpapan Tengah	49,51	1034,75	1084,26
5	Balikpapan Timur	6430,76	5321,68	11752,44
6	Balikpapan Utara	7968,07	<b>5945,92</b>	13913,99
	<b>Grand Total</b>	<b>32063,22</b>	<b>18890,53</b>	<b>50953,75</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Kecamatan yang mempunyai status daya dukung Air yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas 5.945,92 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung air belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 16.728,04 Ha





Gambar 3.14 Peta Status Daya Dukung Air Bersih di Kota Balikpapan

Ketersediaan air di Kota Balikpapan yaitu sebesar 524.147.443,99 M<sup>3</sup>/Tahun dan untuk kebutuhan air di Kota Balikpapan yaitu sebesar 525.625.678,16 M<sup>3</sup>/Tahun. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.34 dan Gambar 3.15 dibawah ini.

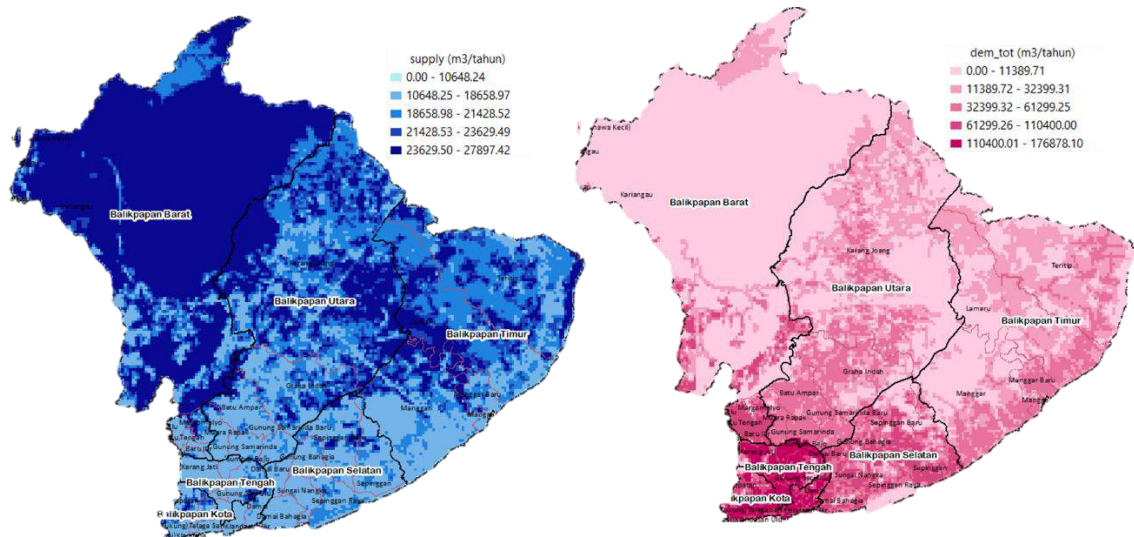
Tabel III.34 Ketersediaan dan Kebutuhan Air Bersih di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Ketersediaan (M <sup>3</sup> /Tahun)	Kebutuhan (M <sup>3</sup> /Tahun)	Selisih (M <sup>3</sup> /Tahun)	Ambang Batas (Jiwa/Tahun)
1	Balikpapan Barat	208478674,78	71655727,90	136822946,89	258209,00
2	Balikpapan Kota	10897248,70	61815593,49	-50918344,78	13695,00
3	Balikpapan Selatan	36595054,51	88885350,79	-52290296,28	45863,00
4	Balikpapan Tengah	11286464,01	81044835,90	-69758371,90	14180,00
5	Balikpapan Timur	116936986,93	92331427,75	24605559,19	145983,00
6	Balikpapan Utara	139953015,05	129892742,34	10060272,72	174504,00
	<b>Grand Total</b>	<b>524147443,99</b>	<b>525625678,16</b>	<b>-1478234,17</b>	<b>652434,00</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023







Gambar 3.15 Peta Ketersediaan dan Kebutuhan Air Bersih di Kota Balikpapan

### 3.2.4 Kinerja Layanan Jasa Lingkungan

Jasa lingkungan merupakan manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem. Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) dapat direpresentasikan oleh Jasa Lingkungan, dengan pemahaman bahwa DDDTLH merupakan kapasitas Jasa Lingkungan dalam mendukung perikehidupan makhluk hidup di suatu ekoregion. Semakin baik atau tinggi DDDTLH suatu lokasi atau ekoregion, maka dapat dikatakan ekosistem di ekoregion tersebut memiliki kualitas yang baik dan dapat berfungsi dengan baik untuk menyediakan Jasa Lingkungannya (Riqqi, dkk. 2018). Setiap ekoregion terdiri dari beberapa tipe ekosistem yang menghasilkan jasa. Jasa Lingkungan dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu jasa penyediaan, pengaturan, kultural, dan pendukung.

Nilai untuk setiap Jasa Lingkungan – selanjutnya disebut sebagai Indeks Jasa Lingkungan (IJE) ditentukan dengan pembobotan setiap ekoregion dan penutup lahan. Hasil perhitungan akan menghasilkan indeks Jasa Lingkungan dengan rentang indeks 0 sampai 5. Indeks ini kemudian diklasifikasikan ke dalam 5 kategori dengan menggunakan skala likert. Nilai interval tiap kategori adalah 1, dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Untuk memudahkan visualisasi pada peta, masing-masing kategori memiliki warna yang berbeda.

Jasa lingkungan penyedia pangan di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa tinggi dengan total luas sebesar 31.739,67 Ha. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.35 dan Gambar 3.16 dibawah ini.

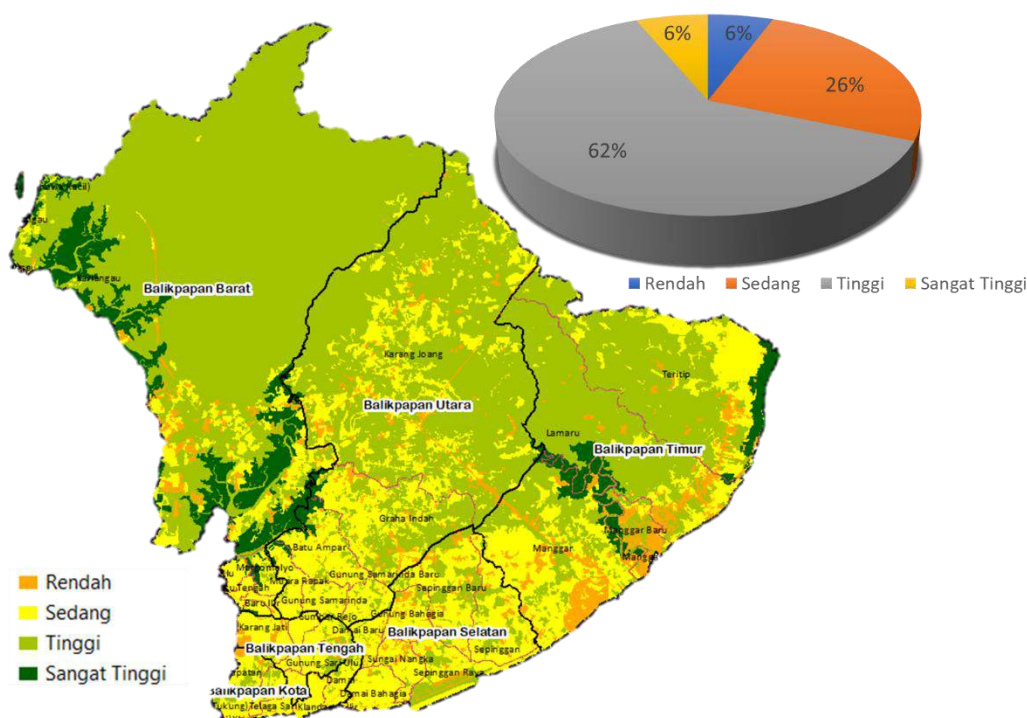
Tabel III.35 Luasan Jasa Penyedia Pangan di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Kelas Jasa (Ha)				Grand Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Balikpapan Barat	477,97	1486,01	15110,42	2179,09	19253,49
2	Balikpapan Kota	69,39	840,56	173,69	3,01	1086,65
3	Balikpapan Selatan	382,96	2678,44	793,71	0,46	3855,58



No	Kecamatan	Kelas Jasa (Ha)				Grand Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
4	Balikpapan Tengah	92,68	874,67	116,83		1084,18
5	Balikpapan Timur	1261,29	2910,19	6747,24	823,87	11742,59
6	Balikpapan Utara	618,53	4288,13	8797,77	209,56	13913,99
<b>Grand Total</b>		<b>2902,82</b>	<b>13078,00</b>	<b>31739,67</b>	<b>3215,99</b>	<b>50936,47</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 3.16 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Pangan di Kota Balikpapan

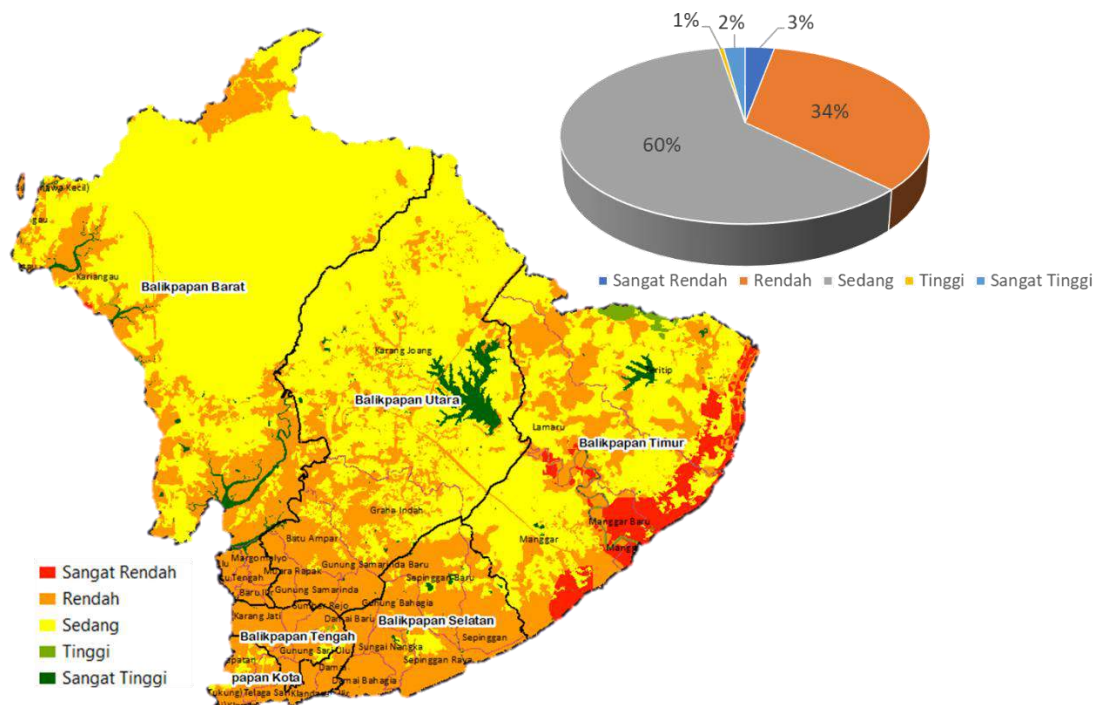
Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih di Kota Balikpapan terbesar masuk kedalam kategori sedang dengan luasan total seluas 30.591,15 Ha yang meliputi 6 (enam) kecamatan. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.36 dan Gambar 3.17 dibawah ini.

Tabel III.36 Luasan Jasa Penyedia Air Bersih di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Kelas Jasa (Ha)					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Balikpapan Barat	5,62	4627,83	14269,54	8,85	341,66	19253,49
2	Balikpapan Kota		931,05	153,36		2,24	1086,65
3	Balikpapan Selatan		3249,75	562,75		43,08	3855,58
4	Balikpapan Tengah		1004,20	71,29	4,02	4,67	1084,18

No	Kecamatan	Kelas Jasa (Ha)					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
5	Balikpapan Timur	1488,56	3542,79	6338,77	236,13	136,34	11742,59
6	Balikpapan Utara	0,08	4150,92	9195,44		567,54	13913,99
	<b>Grand Total</b>	<b>1494,25</b>	<b>17506,54</b>	<b>30591,15</b>	<b>249,01</b>	<b>1095,53</b>	<b>50936,47</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023

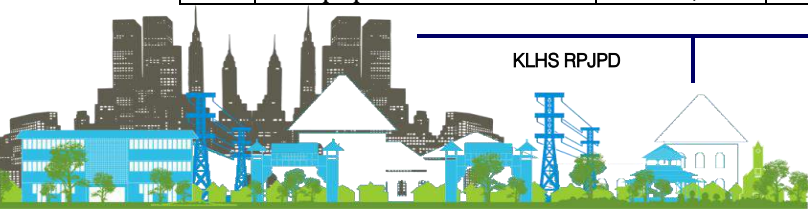


Gambar 3.17 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih di Kota Balikpapan

Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air Dan Banjir di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa lingkungan Rendah dengan total luas sebesar 23.790,89 Ha.

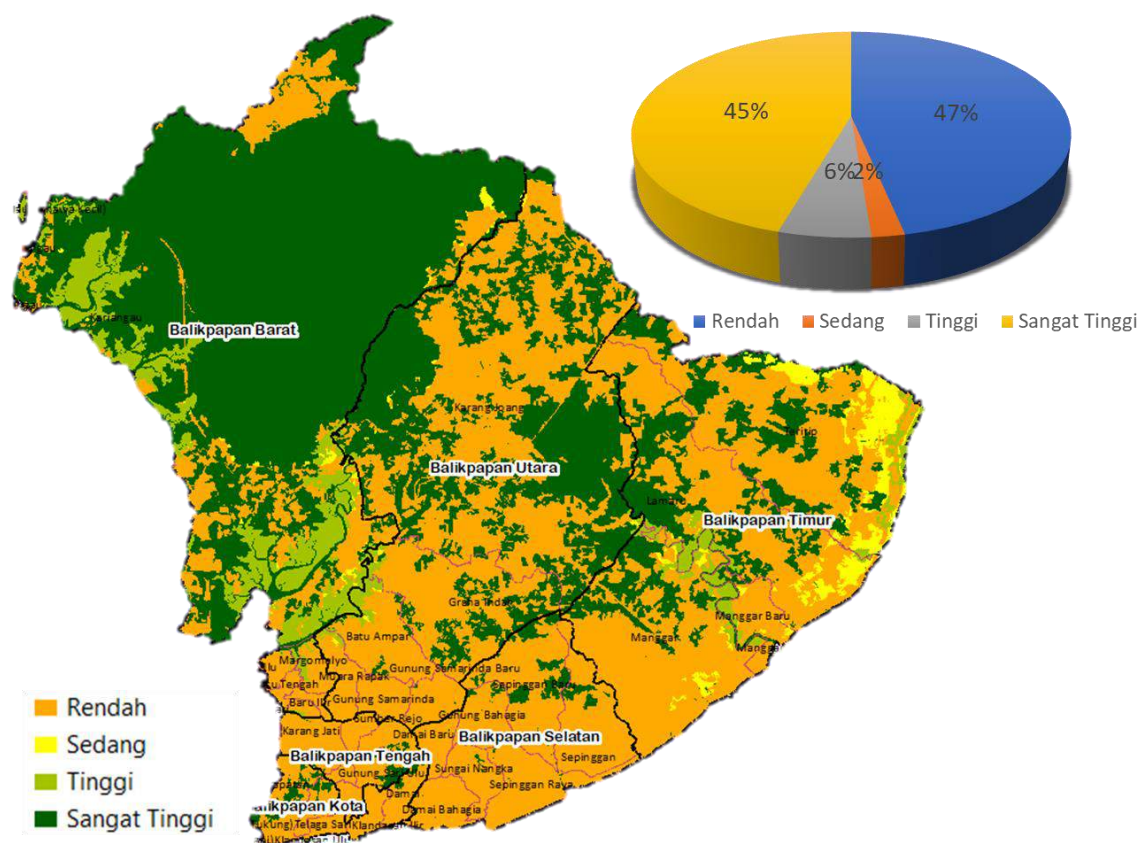
Tabel III.37 Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Kelas Jasa (Ha)				Grand Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Balikpapan Barat	2791,33	110,53	2151,87	14199,76	19253,49
2	Balikpapan Kota	928,03		3,01	155,60	1086,65
3	Balikpapan Selatan	3556,17		0,46	298,95	3855,58
4	Balikpapan Tengah	1004,20			79,98	1084,18
5	Balikpapan Timur	7371,04	901,25	566,42	2903,87	11742,59



No	Kecamatan	Kelas Jasa (Ha)				Grand Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
6	Balikpapan Utara	8140,12	35,71	203,36	5534,80	13913,99
	<b>Grand Total</b>	<b>23790,89</b>	<b>1047,49</b>	<b>2925,13</b>	<b>23172,96</b>	<b>50936,47</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023



**Gambar 3.18 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Balikpapan**

Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Pencegahan Dan Perlindungan Dari Bencana Alam di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa lingkungan Sangat tinggi dengan total luas sebesar 26.110,44 Ha.

**Tabel III.38 Luasan Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam di Kota Balikpapan**

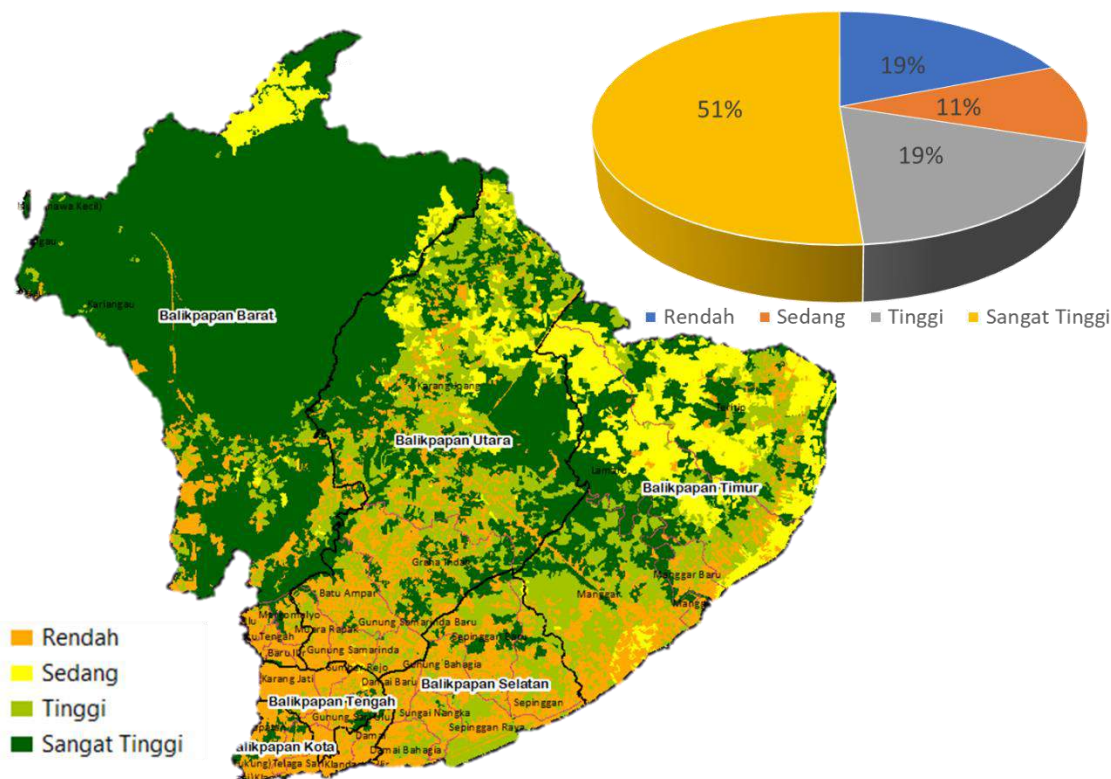
No	Kecamatan	Kelas Jasa (Ha)				Grand Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Balikpapan Barat	1239,30	807,81	802,57	16403,82	19253,49
2	Balikpapan Kota	871,57		56,75	158,32	1086,65
3	Balikpapan Selatan	2143,46	8,08	1407,11	296,93	3855,58
4	Balikpapan Tengah	905,86	11,13	88,39	78,80	1084,18





No	Kecamatan	Kelas Jasa (Ha)				Grand Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
5	Balikpapan Timur	1708,44	3617,63	2968,26	3448,26	11742,59
6	Balikpapan Utara	2803,15	1146,53	4240,01	5724,30	13913,99
	<b>Grand Total</b>	<b>9671,77</b>	<b>5591,17</b>	<b>9563,10</b>	<b>26110,44</b>	<b>50936,47</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 3.19 Peta Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam di Kota Balikpapan

### 3.2.5 Perkiraan Mengenai Dampak Resiko Lingkungan Hidup

Analisis dampak dan resiko lingkungan yang dibahas dalam hal ini disesuaikan dengan dinamika perkotaan seperti sampah, tinja dan beban pencemar. Bertambahnya volume jumlah sampah setiap harinya diiringi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, penambahan jumlah penduduk, meningkatnya daerah permukiman dan tingkat aktifitas kegiatan sosial. Sarana dan prasarana persampahan yang terbatas akan menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks sehingga masyarakat akhirnya membuang sampah di jalan, saluran selokan, sungai dan lahan-lahan terbuka ataupun dibakar.

Rentang terbesar timbulan sampah paling tinggi berada di Kecamatan Balikpapan Utara sebesar 502.607,74 M3/Tahun.

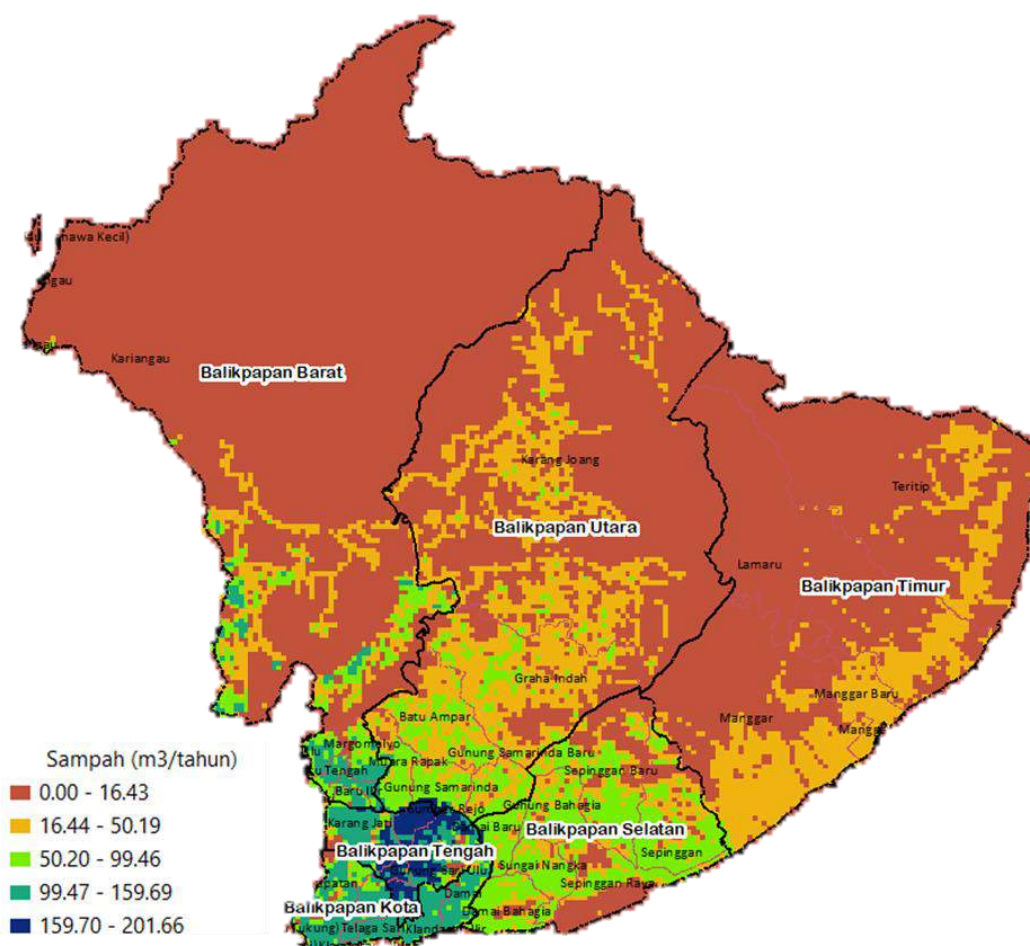




Tabel III.39 Timbulan Sampah di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Sampah M3/Tahun
1	Balikpapan Barat	71570,11
2	Balikpapan Kota	70392,08
3	Balikpapan Selatan	97814,53
4	Balikpapan Tengah	92136,04
5	Balikpapan Timur	54405,08
6	Balikpapan Utara	116289,91
<b>Grand Total</b>		<b>502607,74</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 3.20 Peta Timbulan Sampah di Kota Balikpapan

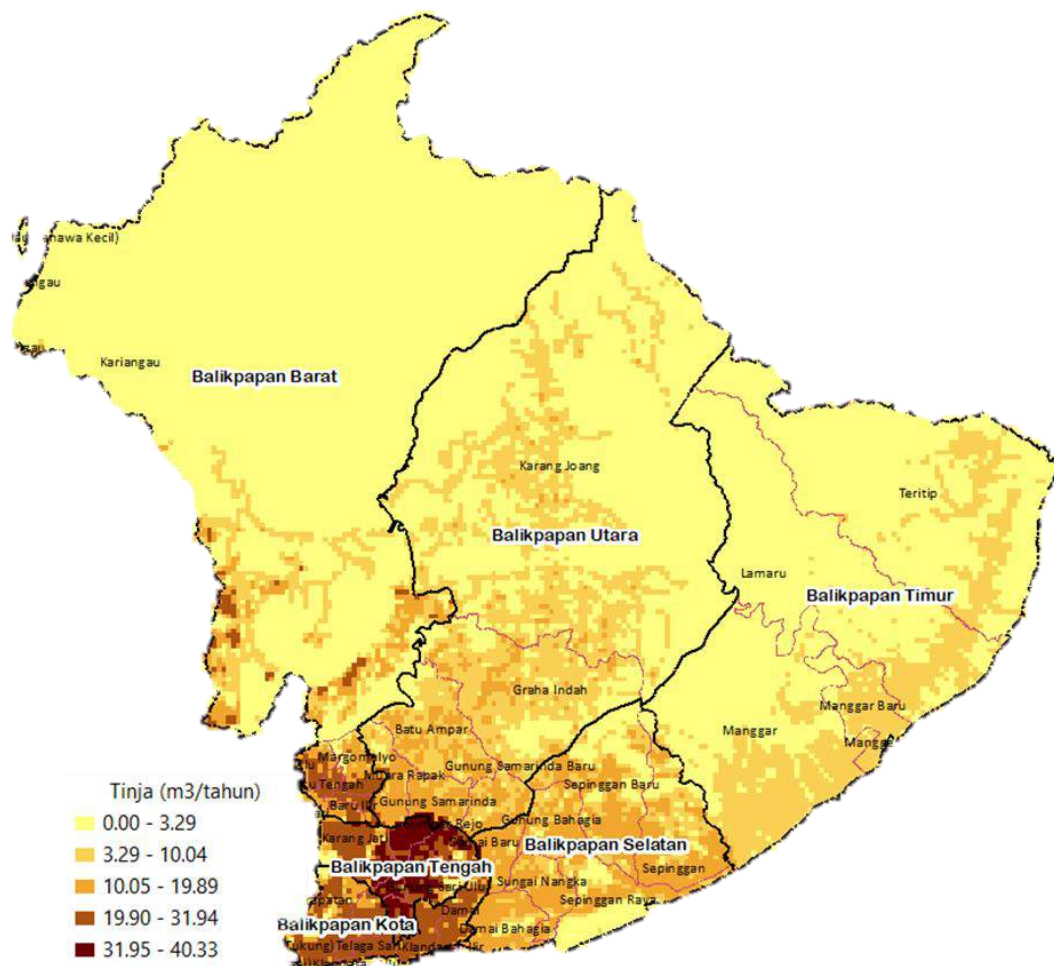
Rentang terbesar timbulan Tinja paling tinggi berada di Kecamatan Balikpapan Utara sebesar 23.257,98 M3/Tahun.



**Tabel III.40 Timbulan Tinja di Kota Balikpapan**

No	Kecamatan	Tinja M3/Tahun
1	Balikpapan Barat	14314,02
2	Balikpapan Kota	14078,42
3	Balikpapan Selatan	19562,91
4	Balikpapan Tengah	18427,21
5	Balikpapan Timur	10881,01
6	Balikpapan Utara	23257,98
<b>Grand Total</b>		<b>100521,55</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023



**Gambar 3.21 Peta Timbulan Tinja di Kota Balikpapan**

BOD merupakan parameter pengukuran jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk mengurai hampir semua zat organik yang terlarut dan tersuspensi dalam air buangan, dinyatakan dengan BOD hari pada suhu 20 °C dalam mg/liter atau ppm. Pemeriksaan BOD diperlukan untuk menentukan beban pencemaran terhadap air buangan domestik atau industri juga untuk mendesain sistem pengolahan limbah biologis

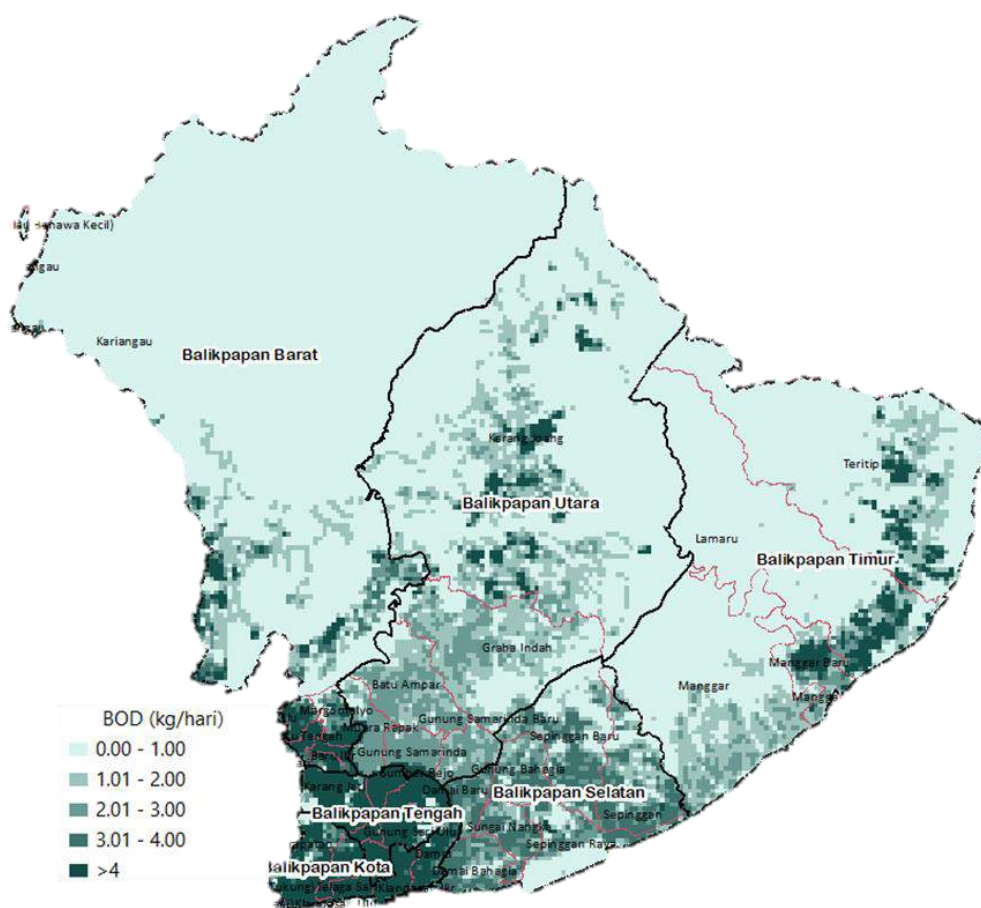
bagi air tercemar. Penguraian zat organik adalah peristiwa alamiah, jika suatu badan air tercemar oleh zat organik maka bakteri akan dapat menghabiskan oksigen terlarut dalam air selama proses biodegradable berlangsung, sehingga dapat mengakibatkan kematian pada biota air dan keadaan pada badan air dapat menjadi anaerobik yang ditandai dengan timbulnya bau busuk.

Beban Pencemar BOD Paling tinggi berada di Kecamatan Balikpapan Utara sebesar 6.851,64 Kg/Hari.

**Tabel III.41 Beban Pencemar BOD di Kota Balikpapan**

No	Kecamatan	BOD (Kg/Hari)
1	Balikpapan Barat	3614,38
2	Balikpapan Kota	3134,49
3	Balikpapan Selatan	4454,55
4	Balikpapan Tengah	4140,13
5	Balikpapan Timur	4563,41
6	Balikpapan Utara	6851,64
<b>Grand Total</b>		<b>26758,59</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023



**Gambar 3.22 Peta Beban Pencemar BOD di Kota Balikpapan**



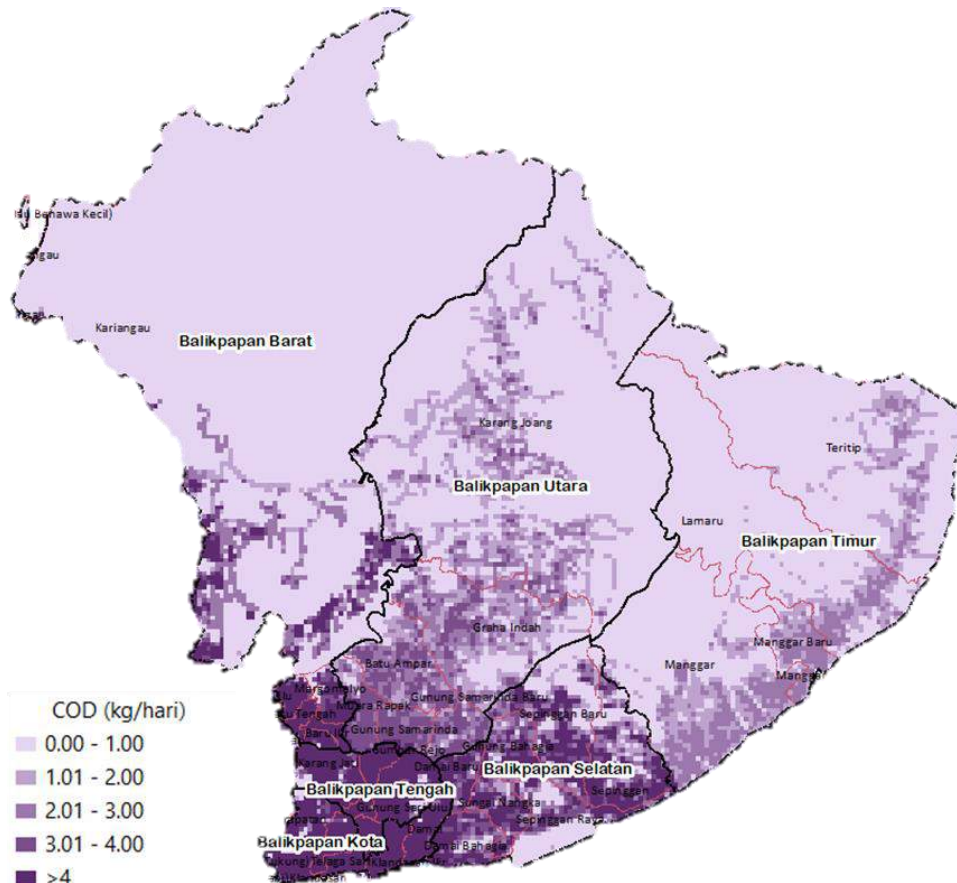
COD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang terdapat dalam limbah cair dengan memanfaatkan oksidator kalium dikromat sebagai sumber oksigen. Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasi melalui proses biologis dan dapat menyebabkan berkurangnya oksigen terlarut dalam air.

Beban Pencemar COD Paling tinggi berada di Kecamatan Balikpapan Utara sebesar 7.042,12 Kg/Hari.

**Tabel III.42 Beban Pencemar COD di Kota Balikpapan**

No	Kecamatan	COD (Kg/Hari)
1	Balikpapan Barat	4317,19
2	Balikpapan Kota	4243,12
3	Balikpapan Selatan	5896,25
4	Balikpapan Tengah	5553,75
5	Balikpapan Timur	3311,04
6	Balikpapan Utara	7042,77
<b>Grand Total</b>		<b>30364,12</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023



**Gambar 3.23 Peta Beban Pencemar COD di Kota Balikpapan**





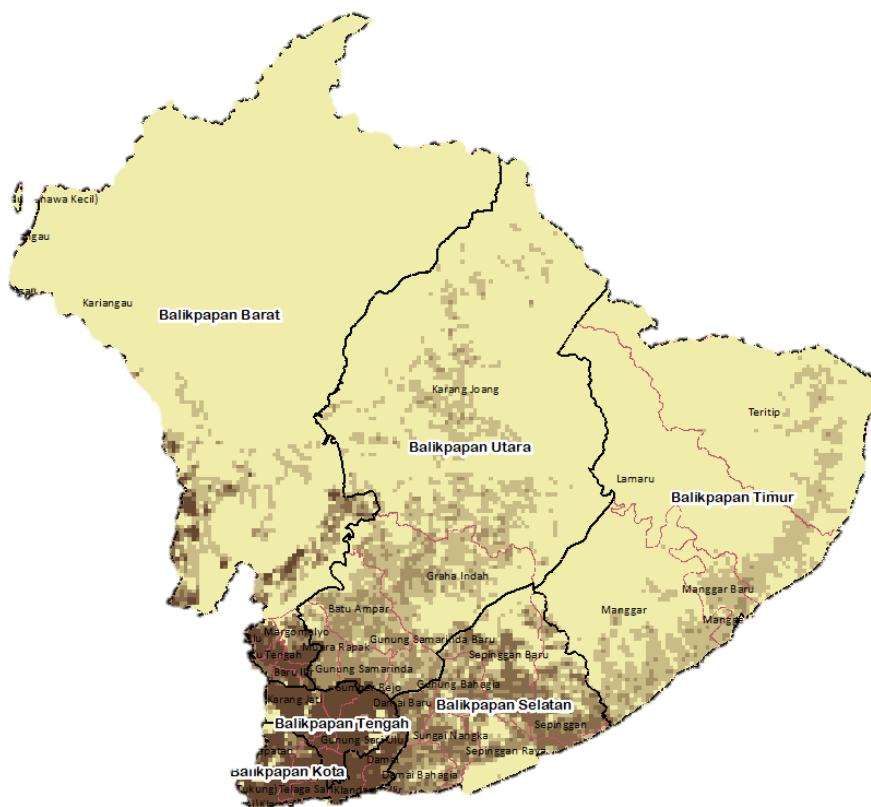
Total Suspended Solid (TSS) yaitu Zat yang tersuspensi biasanya terdiri dari zat organik dan anorganik yang melayang-layang dalam air, secara fisika zat ini sebagai penyebab kekeruhan pada air. Limbah cair yang mempunyai kandungan zat tersuspensi tinggi tidak boleh dibuang langsung ke badan air karena disamping dapat menyebabkan pendangkalan juga dapat menghalangi sinar matahari masuk kedalam dasar air sehingga proses fotosintesa mikroorganisme tidak dapat berlangsung.

Beban Pencemar TSS Paling tinggi berada di Kecamatan Balikpapan Utara sebesar 4.879,85 Kg/Hari.

**Tabel III.43 Beban Pencemar TSS di Kota Balikpapan**

No	Kecamatan	TSS (Kg/Hari)
1	Balikpapan Barat	2984,44
2	Balikpapan Kota	2931,45
3	Balikpapan Selatan	4075,70
4	Balikpapan Tengah	3837,98
5	Balikpapan Timur	2316,74
6	Balikpapan Utara	4879,85
<b>Grand Total</b>		<b>21026,16</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023



**Gambar 3.24 Peta Beban Pencemar TSS di Kota Balikpapan**

Kota Balikpapan masuk kedalam kawasan rawan bencana diantaranya yaitu bahaya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Bahaya Cuaca Ekstrem, Bahaya Gempa Bumi, Bahaya Tsunami, Bahaya Longsor, Bahaya Banjir, Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Bahaya Kekeringan.

1. Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

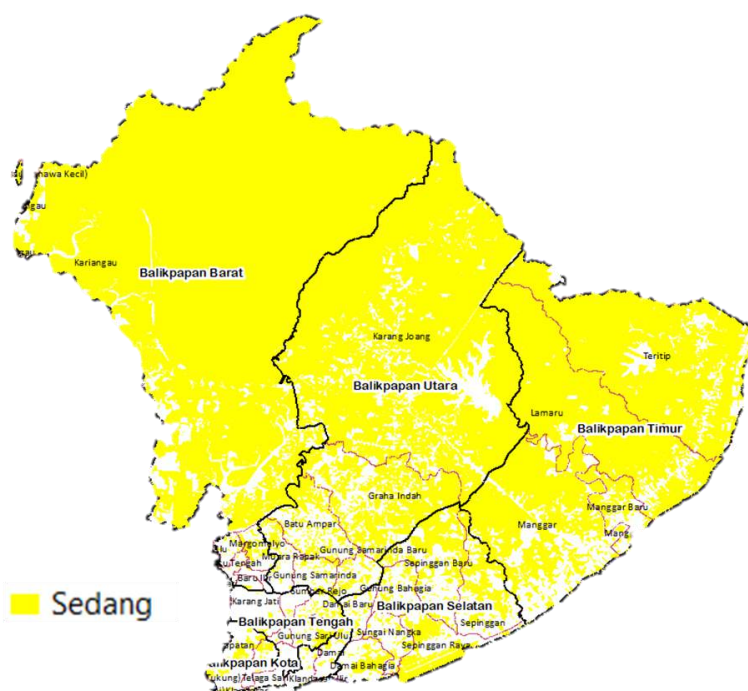
Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja (Hatta, 2008).

Di Kota Balikpapan kebakaran hutan dan lahan masuk kedalam bahaya sedang yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan.

Tabel III.44 Luasan Bahaya Karhutla di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Tingkat Bahaya		Grand Total (Ha)
		Tidak Terjadi	Sedang	
1	Balikpapan Barat	1684,17	17553,37	19237,53
2	Balikpapan Kota	869,30	214,42	1083,72
3	Balikpapan Selatan	2189,71	1665,09	3854,80
4	Balikpapan Tengah	911,28	172,62	1083,89
5	Balikpapan Timur	2197,84	9543,67	11741,51
6	Balikpapan Utara	3213,35	10698,70	13912,05
<b>Grand Total</b>		<b>11065,64</b>	<b>39847,87</b>	<b>50913,51</b>

Sumber : BPBD Kota Balikpapan Skala 1:50.000 Tahun 2023



Gambar 3.25 Peta Bahaya Karhutla di Kota Balikpapan

## 2. Bahaya Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrem adalah kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak lazim dan ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembaban udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta.

Kota Balikpapan bila dilihat mempunyai resiko bahaya cuaca ekstrim sedang yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan.

**Tabel III.45 Luasan Bahaya Cuaca Ekstrim di Kota Balikpapan**

No	Kecamatan	Sedang	Grand Total (Ha)
1	Balikpapan Barat	19175,84	19175,84
2	Balikpapan Kota	1082,78	1082,78
3	Balikpapan Selatan	3855,27	3855,27
4	Balikpapan Tengah	1082,93	1082,93
5	Balikpapan Timur	11740,28	11740,28
6	Balikpapan Utara	13912,14	13912,14
<b>Grand Total</b>		<b>50849,25</b>	<b>50849,25</b>

Sumber : BPBD Kota Balikpapan Skala 1:50.000 Tahun 2023



**Gambar 3.26 Peta Bahaya Cuaca Ekstrim di Kota Balikpapan**

### 3. Bahaya Gempa Bumi

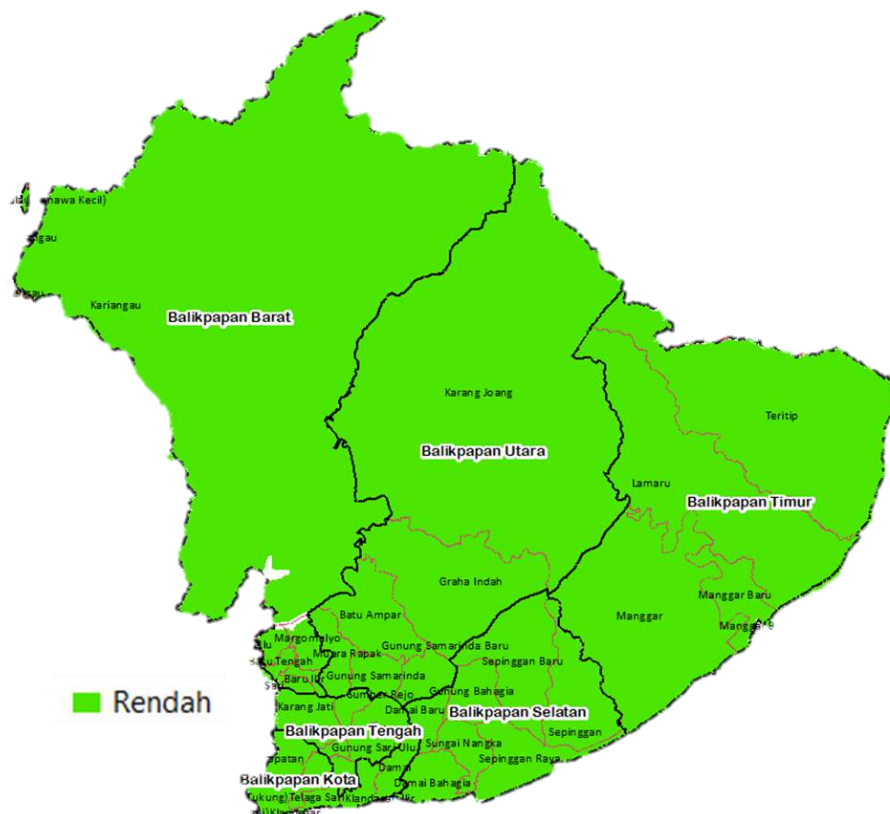
Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api.

Di Kota Balikpapan masuk kedalam rawan bencana gempa bumi dengan tingkat resiko bahaya rendah yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan.

**Tabel III.46 Luasan Bahaya Gempa Bumi di Kota Balikpapan**

No	Kecamatan	Rendah	Grand Total (Ha)
1	Balikpapan Barat	19024,71	19024,71
2	Balikpapan Kota	1069,14	1069,14
3	Balikpapan Selatan	3845,55	3845,55
4	Balikpapan Tengah	1078,47	1078,47
5	Balikpapan Timur	11694,50	11694,50
6	Balikpapan Utara	13893,50	13893,50
	<b>Grand Total</b>	<b>50605,87</b>	<b>50605,87</b>

Sumber : BPBD Kota Balikpapan Skala 1:50.000 Tahun 2023



**Gambar 3.27 Peta Bahaya Gempa Bumi di Kota Balikpapan**



4. Bahaya Tsunami

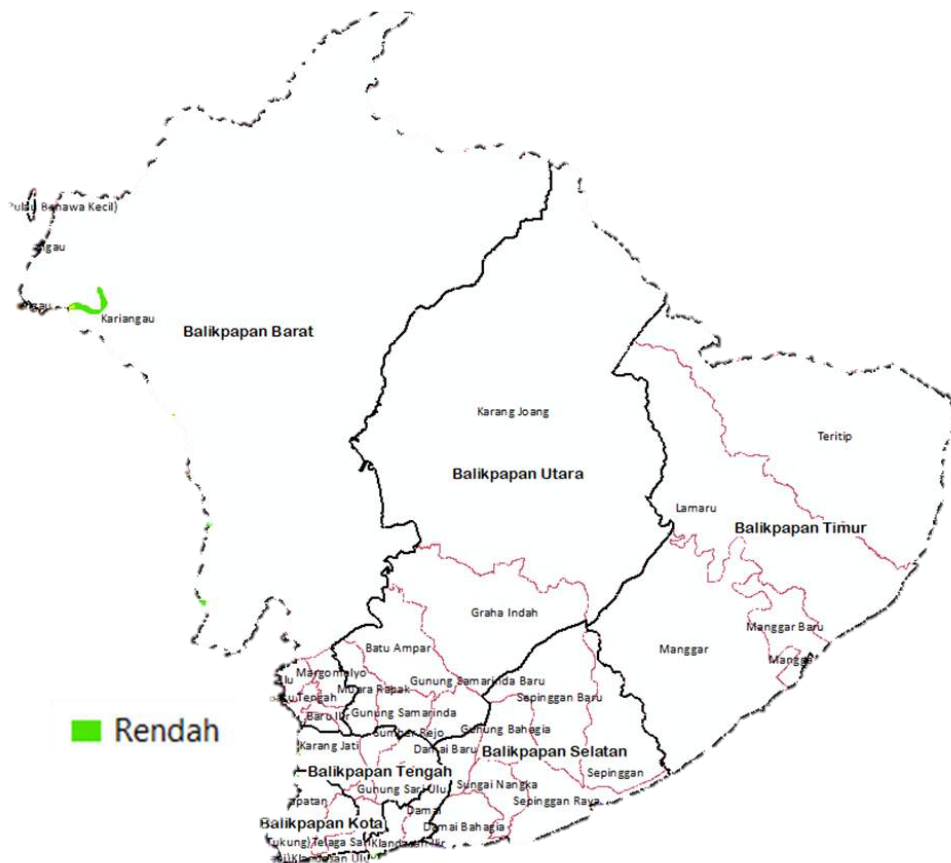
Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunungapi, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter.

Kota Balikpapan masuk kedalam kategori bahaya tsunami dengan tingkat resiko rendah dan sedang yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan.

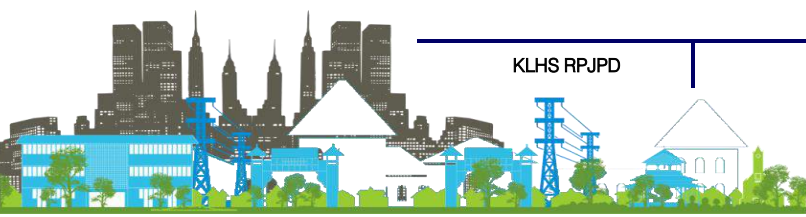
Tabel III.47 Luasan Bahaya Tsunami di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Tingkat Resiko		Grand Total (Ha)
		Rendah	Sedang	
1	Balikpapan Barat	40,30	4,09	44,39
2	Balikpapan Kota	3,58	1,40	4,98
3	Balikpapan Selatan		0,13	0,13
4	Balikpapan Tengah	0,74	0,43	1,17
5	Balikpapan Timur	1,63	0,61	2,24
	<b>Grand Total</b>	<b>46,25</b>	<b>6,67</b>	<b>52,92</b>

Sumber : BPBD Kota Balikpapan Skala 1:50.000 Tahun 2023



Gambar 3.28 Peta Bahaya Tsunami di Kota Balikpapan



## 5. Bahaya Longsor

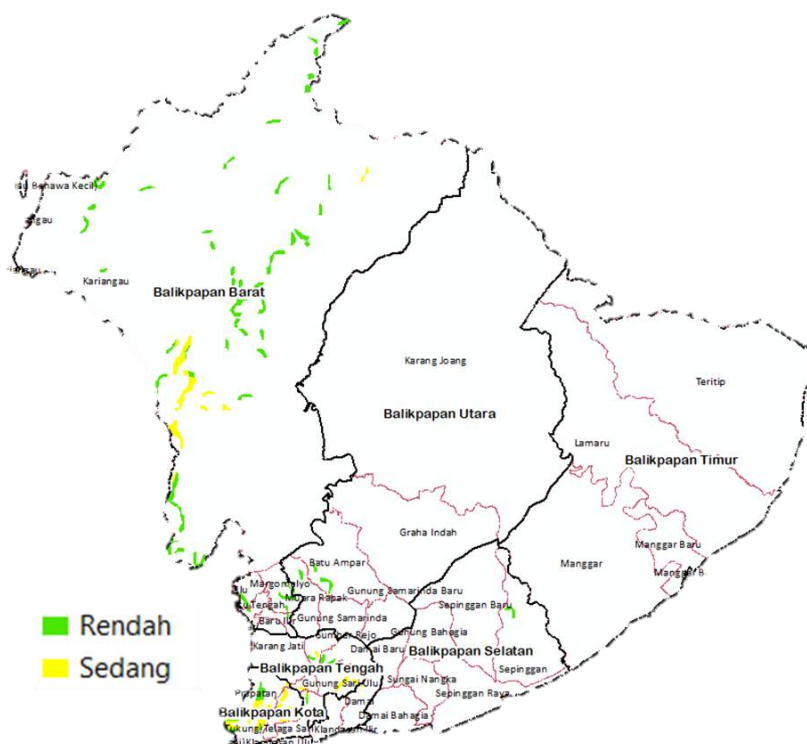
Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut: air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng.

Kota Balikpapan masuk kedalam bahaya tanah longsor dengan tingkat resiko rendah dan sedang yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan.

**Tabel III.48 Luasan Bahaya Longsor di Kota Balikpapan**

No	Kecamatan	Tingkat Resiko		Grand Total (Ha)
		Rendah	Sedang	
1	Balikpapan Barat	375,15	127,92	503,07
2	Balikpapan Kota	42,00	104,78	146,78
3	Balikpapan Selatan	8,50	0,06	8,56
4	Balikpapan Tengah	20,91	25,18	46,09
5	Balikpapan Utara	23,52		23,52
	<b>Grand Total</b>	<b>470,08</b>	<b>257,93</b>	<b>728,01</b>

Sumber : BPBD Kota Balikpapan Skala 1:50.000 Tahun 2023



**Gambar 3.29 Peta Bahaya Longsor di Kota Balikpapan**

## 6. Bahaya Banjir

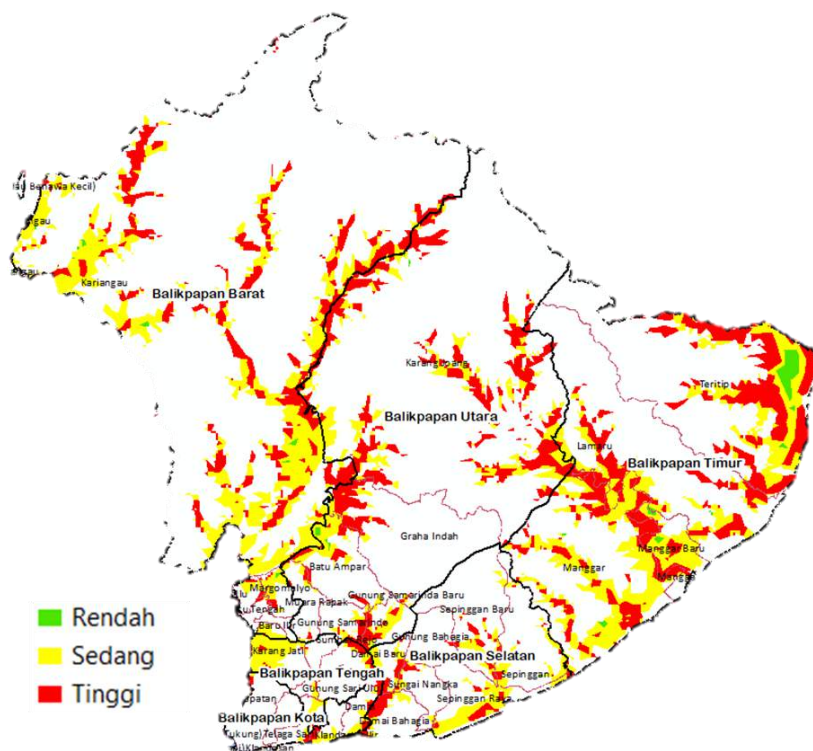
Banjir adalah keadaan dimana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang.

Di Kota Balikpapan bahaya banjir menjadi salah satu bencana yang sering terjadi, dapat dilihat bahwa tingkat resiko bencana banjir yang ada di Kota Balikpapan terdiri dari resiko Rendah dengan total luas 169,68 ha, resiko sedang 6560,92 ha, dan resiko tinggi 5512,65 ha, yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan.

**Tabel III.49 Luasan Bahaya Banjir di Kota Balikpapan**

No	Kecamatan	Tingkat Resiko			Grand Total (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Balikpapan Barat	20,56	2456,99	1524,72	4002,27
2	Balikpapan Kota		91,01	63,36	154,37
3	Balikpapan Selatan	2,00	533,21	265,92	801,14
4	Balikpapan Tengah		268,55	67,58	336,13
5	Balikpapan Timur	134,19	2210,02	2062,57	4406,78
6	Balikpapan Utara	12,93	1001,13	1528,50	2542,56
	<b>Grand Total</b>	<b>169,68</b>	<b>6560,92</b>	<b>5512,65</b>	<b>12243,26</b>

Sumber : BPBD Kota Balikpapan Skala 1:50.000 Tahun 2023



**Gambar 3.30 Peta Bahaya Banjir di Kota Balikpapan**

## 7. Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang pasang ekstrem atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam.

Abrasi adalah proses dimana terjadi pengikisan pantai yang disebabkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi atau kata lain biasa disebut erosi pantai.

Kota Balikpapan masuk kedalam rawan bahaya gelombang ekstrem dan abrasi dengan tingkat resiko bahaya sedang yang tersebar di lima (5) kecamatan di Kota Balikpapan.

**Tabel III.50 Luasan Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kota Balikpapan**

No	Kecamatan	Sedang	Grand Total (Ha)
1	Balikpapan Barat	611,54	611,54
2	Balikpapan Kota	180,05	180,05
3	Balikpapan Selatan	190,43	190,43
4	Balikpapan Tengah	30,97	30,97
5	Balikpapan Timur	300,60	300,60
	<b>Grand Total</b>	<b>1313,60</b>	<b>1313,60</b>

Sumber : BPBD Kota Balikpapan Skala 1:50.000 Tahun 2023



**Gambar 3.31 Peta Bahaya Cuaca Ekstrim dan Abrasi di Kota Balikpapan**



## 8. Bahaya Kekeringan

Kekeringan secara umum adalah kondisi di mana suatu wilayah, lahan, maupun masyarakat mengalami kekurangan air sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Kekeringan dapat disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama atau curah hujan di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada.

Untuk bahaya kekeringan di Kota Balikpapan masuk kedalam resiko bahaya kekeringan sedang yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan.

**Tabel III.51 Luasan Bahaya Kekeringan di Kota Balikpapan**

No	Kecamatan	Sedang	Grand Total (Ha)
1	Balikpapan Barat	19048,76	19048,76
2	Balikpapan Kota	1061,58	1061,58
3	Balikpapan Selatan	3848,00	3848,00
4	Balikpapan Tengah	1074,37	1074,37
5	Balikpapan Timur	11728,76	11728,76
6	Balikpapan Utara	13902,68	13902,68
	<b>Grand Total</b>	<b>50664,14</b>	<b>50664,14</b>

Sumber : BPBD Kota Balikpapan Skala 1:50.000 Tahun 2023



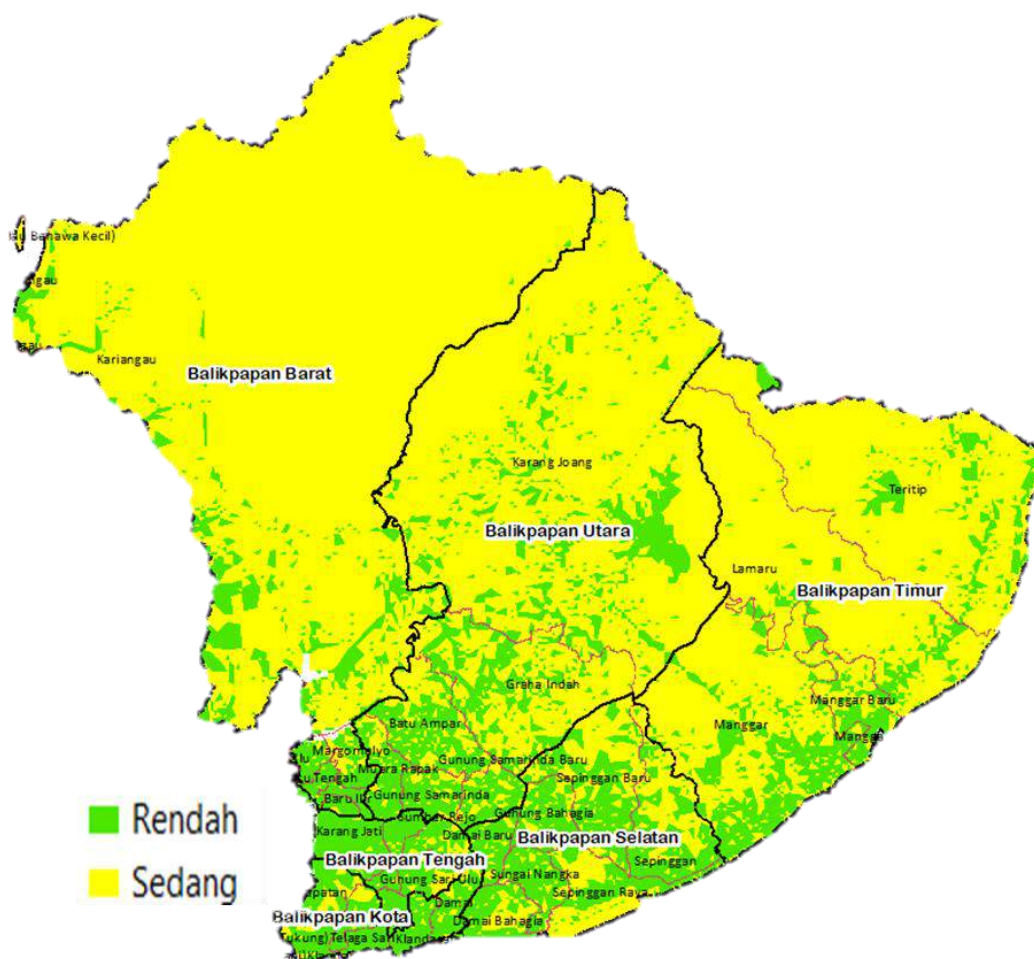
**Gambar 3.32 Peta Bahaya Kekeringan di Kota Balikpapan**

Dari seluruh bahaya bencana yang ada di Kota Balikpapan bila dilihat secara multi bencana masuk kedalam tingkat resiko bahaya rendah dan sedang.

**Tabel III.52 Luasan Bahaya Multi Bencana di Kota Balikpapan**

No	Kecamatan	Sedang	Grand Total (Ha)
1	Balikpapan Barat	19048,76	19048,76
2	Balikpapan Kota	1061,58	1061,58
3	Balikpapan Selatan	3848,00	3848,00
4	Balikpapan Tengah	1074,37	1074,37
5	Balikpapan Timur	11728,76	11728,76
6	Balikpapan Utara	13902,68	13902,68
<b>Grand Total</b>		<b>50664,14</b>	<b>50664,14</b>

Sumber : BPBD Kota Balikpapan Skala 1:50.000 Tahun 2023



**Gambar 3.33 Peta Bahaya Multi Bencana di Kota Balikpapan**



### 3.2.6 Kerentanan Adaptasi Perubahan Iklim

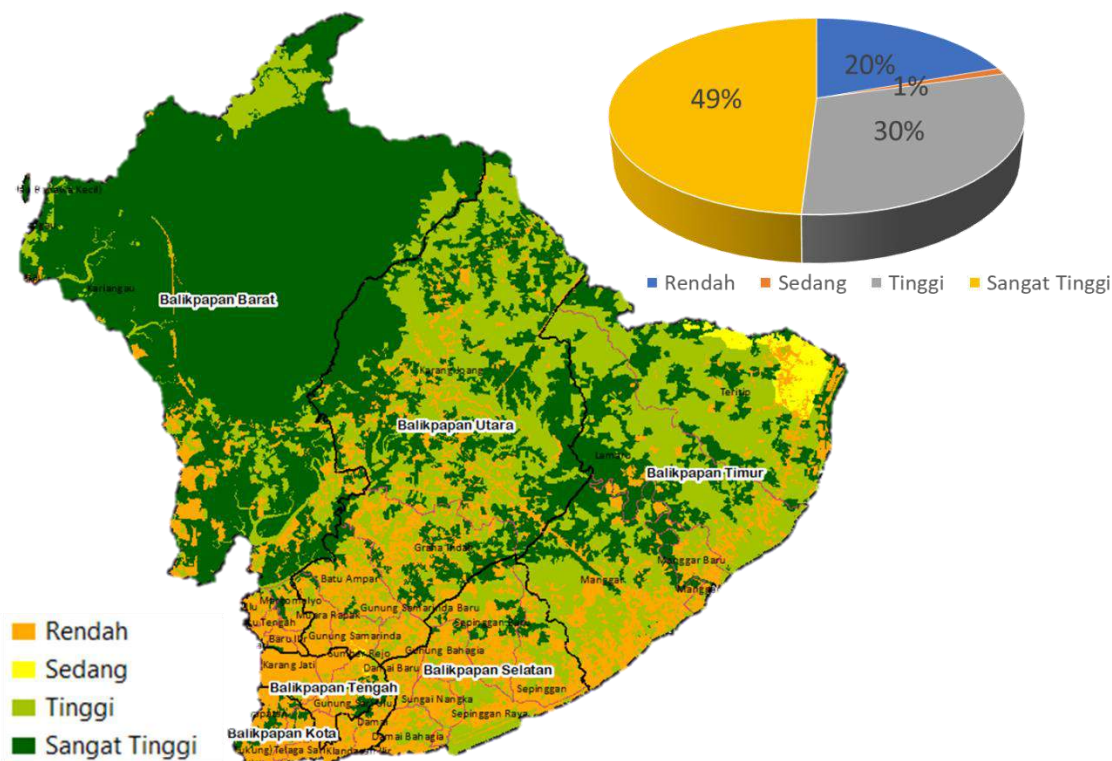
Salah satu cara untuk mengidentifikasi kerentanan kapasitas adaptasi perubahan iklim di Kota Balikpapan dilihat dari Jasa Lingkungan pengaturan iklim dan Sidik.

Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa sangat tinggi dengan total luas sebesar 24.977,03 Ha.

Tabel III.53 Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Kelas Jasa (Ha)				Grand Total (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Balikpapan Barat	1266,51		1990,93	15996,05	19253,49
2	Balikpapan Kota	871,57		58,70	156,37	1086,65
3	Balikpapan Selatan	2143,46		1455,79	256,33	3855,58
4	Balikpapan Tengah	905,86	10,16	92,85	75,31	1084,18
5	Balikpapan Timur	1965,88	531,82	5922,42	3322,48	11742,59
6	Balikpapan Utara	2809,34	11,36	5922,80	5170,48	13913,99
	<b>Grand Total</b>	<b>9962,63</b>	<b>553,34</b>	<b>15443,48</b>	<b>24977,03</b>	<b>50936,47</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023



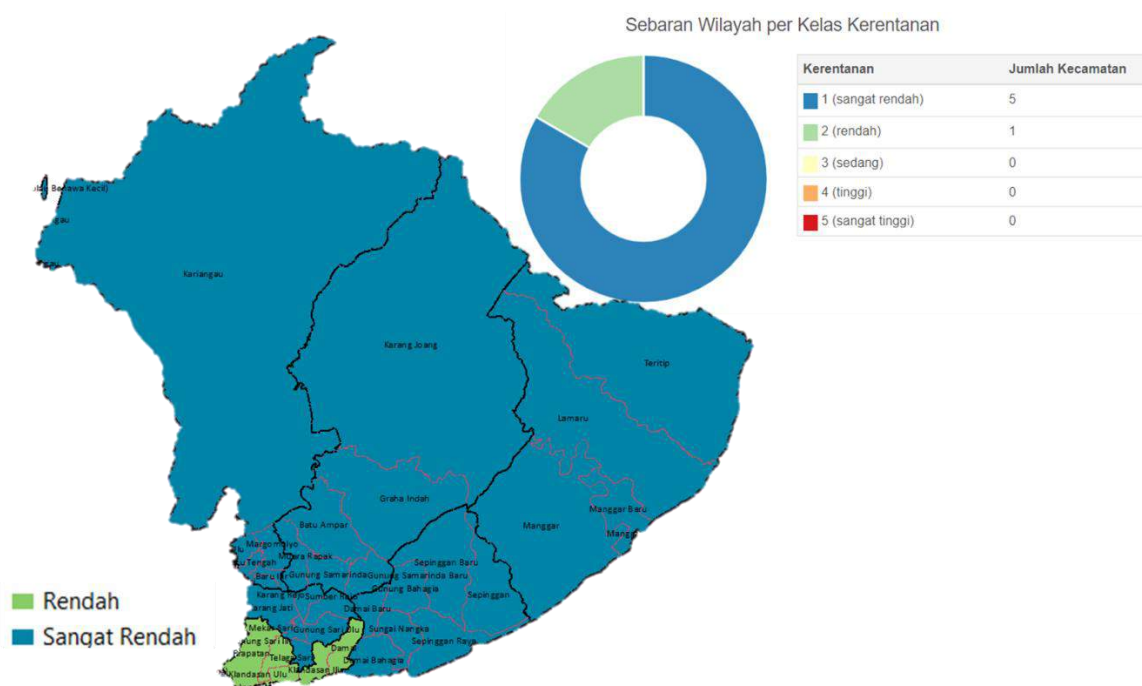
Gambar 3.34 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kota Balikpapan



**Tabel III.54 Luasan SIDIK di Kota Balikpapan**

No	Kecamatan	Kelas Kerentanan	Luas (Ha)
1	Balikpapan Barat	Sangat Rendah	19.258,96
2	Balikpapan Kota	Rendah	1.087,11
3	Balikpapan Selatan	Sangat Rendah	3.856,99
4	Balikpapan Tengah	Sangat Rendah	1.084,26
5	Balikpapan Timur	Sangat Rendah	11.752,44
6	Balikpapan Utara	Sangat Rendah	13.913,99

Sumber : Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022



**Gambar 3.35 Peta SIDIK di Kota Balikpapan**

### 3.2.7 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam digunakan untuk melihat seberapa optimal sumberdaya alam telah dimanfaatkan. Salah satunya, efisisensi pemanfaatan dapat dinilai dari kondisi pola ruang/penutup lahan yang diinginkan dibandingkan terhadap penutup lahan faktual. Efisiensi dihitung dengan menggunakan perbandingan antara hasil kali luas dan nilai Indeks Jasa Lingkungan (IJE) setiap pola ruang dengan luas maksimum dan nilai IJE maksimum di setiap pola ruang. IJE yang digunakan dalam pemanfaatan efisiensi adalah penyedia pangan dan pengaturan tata air.

Luasan terbesar pada EF Penyedia Pangan di Kota Balikpapan berada di Kecamatan Balikpapan Barat total 95,02%.

Luasan total EF Penyedia Air di Kota Balikpapan sebesar 71,26%, nilai ini merata diseluruh wilayah Kota Balikpapan.

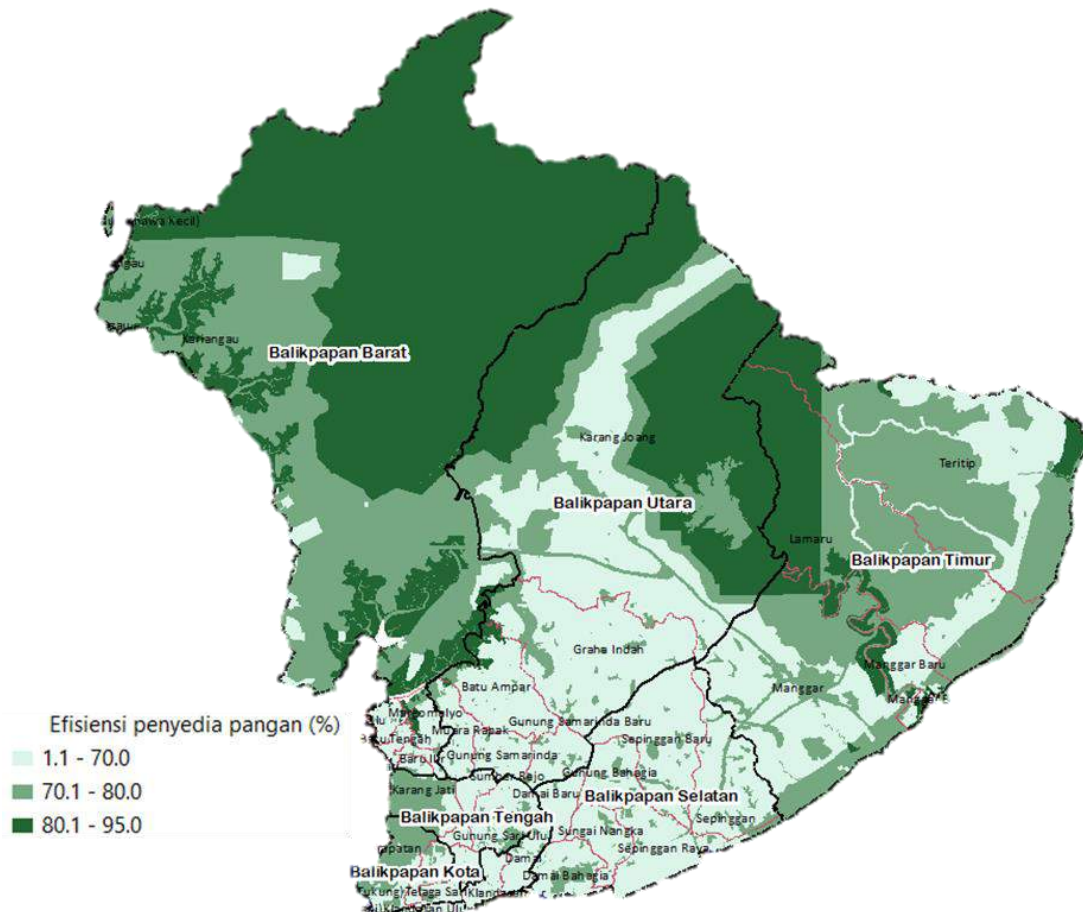


Luasan terbesar pada EF Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Balikpapan berada di Kecamatan Balikpapan Timur dengan total 89,21%.

**Tabel III.55 Luasan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Pangan, Air dan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Balikpapan**

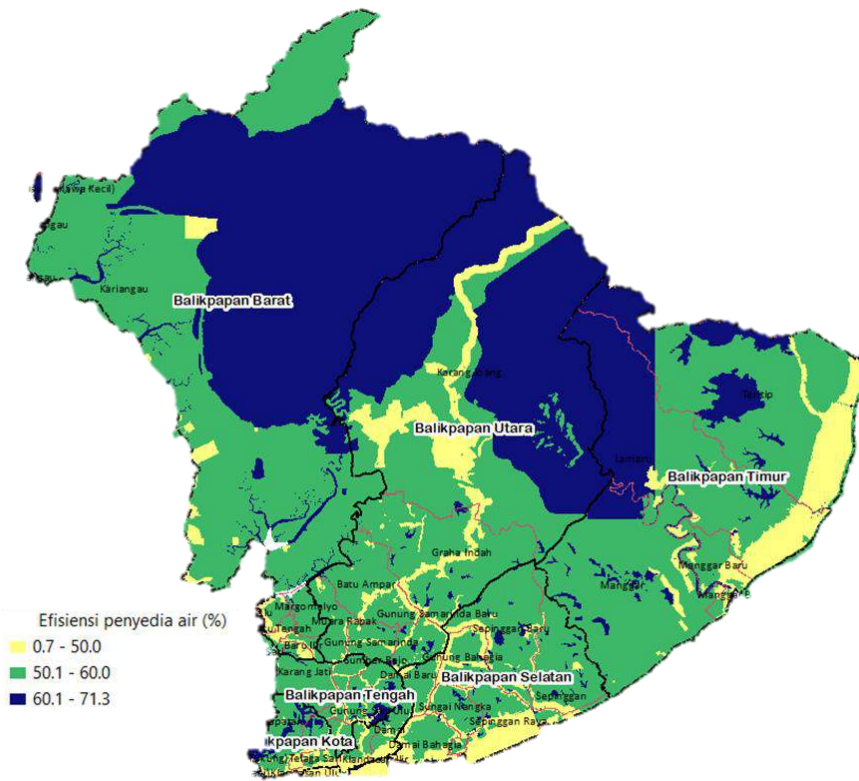
No	Kecamatan	Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam		
		EF Penyedia Pangan	EF Penyedia Air	EF Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir
1	Balikpapan Barat	95,02	71,26	81,93
2	Balikpapan Kota	94,26	71,26	76,26
3	Balikpapan Selatan	79,76	71,26	76,00
4	Balikpapan Tengah	79,76	71,26	76,00
5	Balikpapan Timur	94,26	71,26	89,21
6	Balikpapan Utara	94,26	71,26	81,93

Sumber : Hasil Analisis, 2023

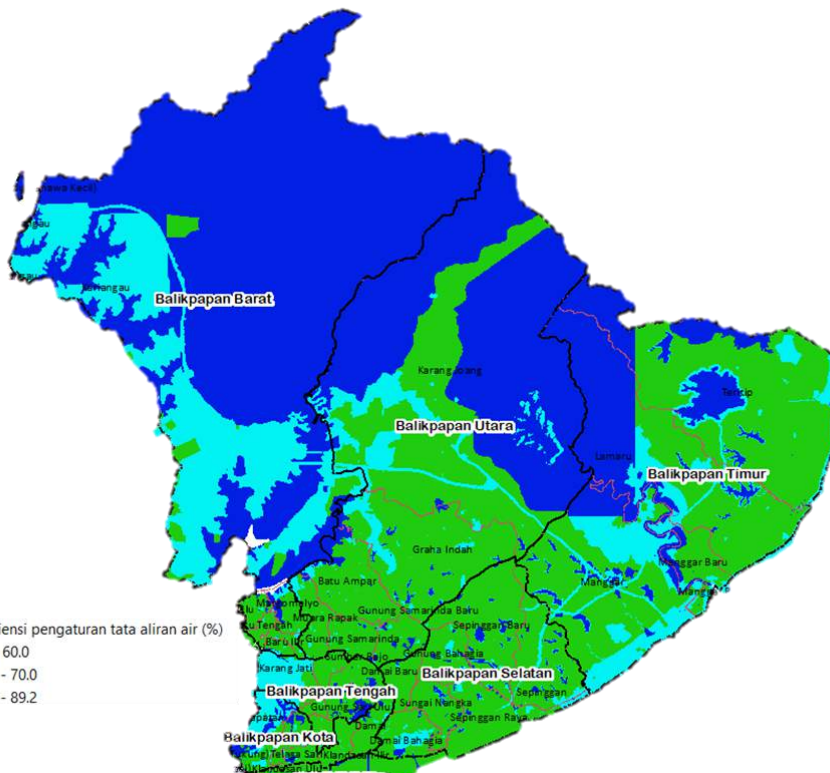


**Gambar 3.36 Peta EF Penyedia Pangan di Kota Balikpapan**





Gambar 3.37 Peta EF Penyedia Air di Kota Balikpapan



Gambar 3.38 Peta EF Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Balikpapan

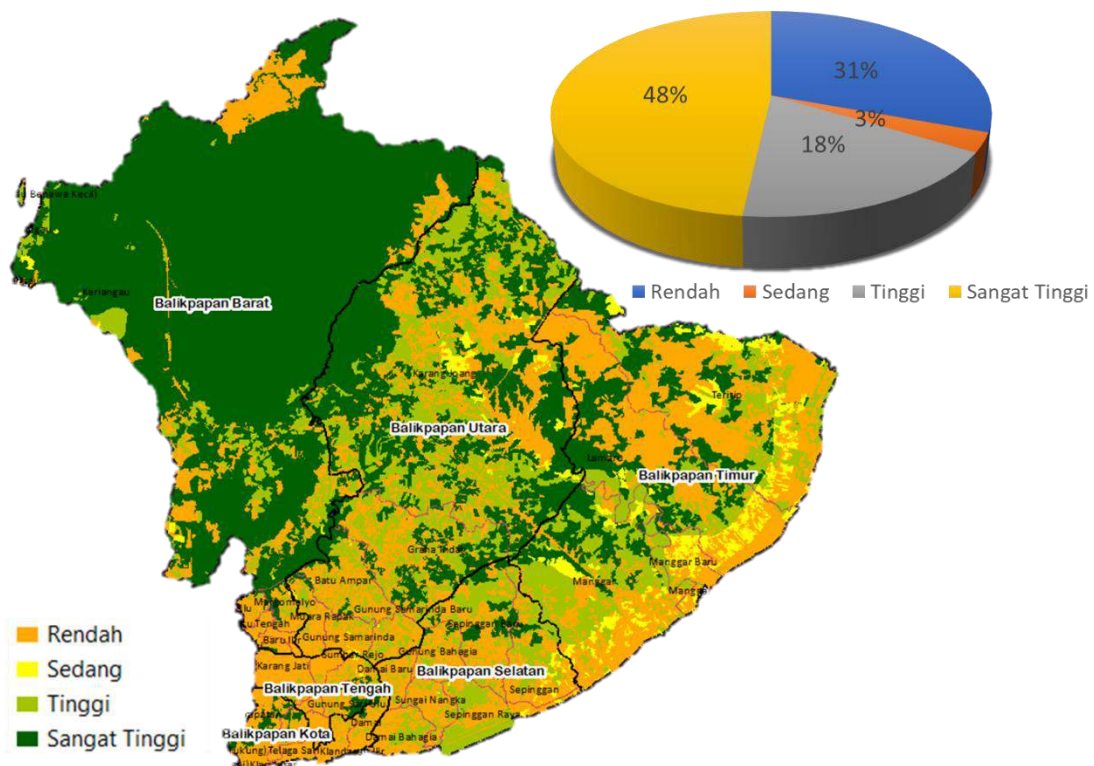
### 3.2.8 Keanekaragaman Hayati

Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Biodiversitas di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa lingkungan Sangat tinggi dengan total luas sebesar 24.582,56 Ha.

Tabel III.56 Luasan Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Kelas Jasa (Ha)				Grand Total (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Balikpapan Barat	2050,95	49,05	954,92	16198,56	19253,49
2	Balikpapan Kota	872,80		56,97	156,88	1086,65
3	Balikpapan Selatan	2157,70	85,08	1326,03	286,77	3855,58
4	Balikpapan Tengah	906,83	10,16	88,39	78,80	1084,18
5	Balikpapan Timur	5255,40	1154,12	2684,87	2648,20	11742,59
6	Balikpapan Utara	4374,57	256,57	4069,51	5213,35	13913,99
<b>Grand Total</b>		<b>15618,25</b>	<b>1554,97</b>	<b>9180,69</b>	<b>24582,56</b>	<b>50936,47</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 3.39 Peta Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas di Kota Balikpapan

## 3.3 GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

### 3.3.1 Kinerja Keuangan Kota Balikpapan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Pembagian urusan antara



pemerintah pusat dan daerah dalam UU No. 23 tahun 2014 mengubah pola pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tetap mengatur aspek perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari kinerja pencapaian pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah serta struktur dan akurasi belanja (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung). Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah, serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Untuk kinerja Pelaksanaan APBD Kota Balikpapan dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya yaitu :

### 1. Realisasi Pendapatan Daerah

Untuk realisasi pendapatan pemerintah Kota Balikpapan seperti pendapatan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba UMD, dan Penerimaan lain – lain dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 mengalami fluktuatif namun pada Tahun 2022 Pajak daerah yang diterima mengalami kenaikan dari Tahun 2021. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.57 dibawah ini.

**Tabel III.57 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2019-2022**

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Bagian Laba UMD	Penerimaan Lain-Lain	Jumlah
2019	565.627.071	55.709.878	16.870.675	126.325.777	764.533.401
2020	425.103.356	49.223.978	16.174.599	74.146.860	564.658.895
2021	537.513.232	43.032.708	17.906.485	83.252.098	681.704.525
2022	623.584.890	40.110.967	11.317.875	136.234.878	811.248.610

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka, 2023, BPS

Bila diprosentasikan masing – masing realisasi pendapatan di Kota Balikpapan masih bertumpu pada Pajak Daerah, atau pada tahun 2022 prosentasi pendapatan pemerintah Kota Balikpapan pajak daerah menyumbang sebesar 76,87 %, retribusi daerah 4,94%, bagian laba UMD 1,40% dan Penerimaan lain – lain sebesar 16,79 %. Jelasnya mengenai prosesntase realiasi pendapatan daerah Pemerintah Kota Balikpapan dapat dilihat pada Tabel III.58 dibawah ini.





**Tabel III.58 Prosentase Realiasi Pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2019 - 2022**

Tahun	Pajak Daerah	Persentase (%)	Retribusi Daerah	Persentase (%)	Bagian Laba UMD	Persentase (%)	Penerimaan Lain-Lain	Persentase (%)	Jumlah
2019	565.627.071	73,98 %	55.709.878	7,29 %	16.870.675	2,21 %	126.325.777	16,52 %	764.533.401
2020	425.103.356	75,28 %	49.223.978	8,72 %	16.174.599	2,86 %	74.146.860	13,13 %	564.658.895
2021	537.513.232	78,85 %	43.032.708	6,31 %	17.906.485	2,63 %	83.252.098	12,21 %	681.704.525
2022	623.584.890	76,87 %	40.110.967	4,94 %	11.317.875	1,40 %	136.234.878	16,79 %	811.248.610

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka, 2023, BPS

Bila dilihat mengenai realisasi pendapatan di Kota Balikpapan dibagi kedalam 3 bagian yaitu Pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan dan Lain - Lain pendapatan yang sah. Dapat dilihat pada **Tabel III.59** dibawah ini bahwa dana perimbangan yang terdiri dari Bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang pada Tahun 2022 berjumlah Rp. 1.504.953.615,- atau yang paling besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan dari Pendapatan Asli daerah dan Lain - Lain pendapatan yang sah.

**Tabel III.59 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan Menurut Jenis Jenisnya (ribu rupiah), 2019-2022**

No	Jenis Pendapatan	Tahun (Rupiah)			
		2019	2020	2021 (unaudited)	2022
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>764.553.400</b>	<b>764.087.241</b>	<b>716.389.341</b>	<b>811.248.611</b>
1.1	Pajak Daerah	565.627.071	565.236.192	537.513.233	623.584.890
1.2	Retribusi Daerah	55.709.878	55.653.797	43.867.680	40.110.967
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.870.674	16.870.674	17.906.485	11.317.876
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	126.325.776	126.326.576	117.101.943	163.234.878
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.061.676.408</b>	<b>1.136.041.501</b>	<b>980.884.290</b>	<b>1.504.953.615</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak	524.878.519	524.878.519	293.977.314	125.872.308
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	-	-	806.281.724
2.3	Dana Alokasi Umum	439.818.664	439.818.664	428.306.693	419.347.040
2.4	Dana Alokasi Khusus	96.979.225	-	57.754.108	153.452.543
<b>3</b>	<b>Lain - Lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>579.208.341</b>	<b>569.399.749</b>	<b>3.840.294</b>	<b>487.758.255</b>
3.1	Pendapatan Hibah	3.000.000	67.556.501	3.174.000	4.683.000
3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	298.759.062	298.759.062	666.294	381.760.182
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	120.899.279	46.534.186	-	44.427.677
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	156.550.000	156.550.000	148.314	56.666.000
3.6	Lainnya/Others	-	-	517.980	215.396
	<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>2.405.418.150</b>	<b>2.469.528.492</b>	<b>2.163.488.055</b>	<b>2.803.954.481</b>

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka, 2023, BPS



## 2. Belanja Daerah

Belanja dalam APBD dibagi menjadi dua jenis yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Jika dibandingkan dengan pendapatan, belanja di Kota Balikpapan selama 4 (empat) tahun terakhir cenderung tumbuh lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya. Jelasnya dapat dilihat pada **Tabel III.60** dibawah ini.

**Tabel III.60 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Balikpapan Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2019-2022**

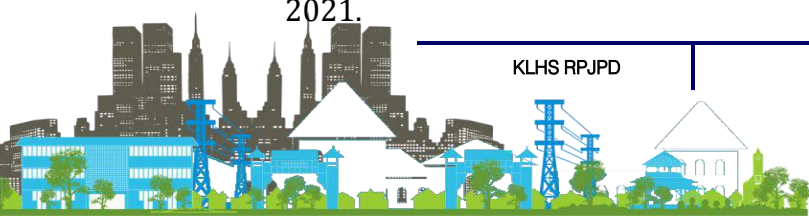
No	Jenis Pendapatan	Tahun (Ribu Rupiah)			
		2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>868.514.654</b>	<b>979.352.869</b>	<b>967.721.740</b>	<b>883.366.523</b>
1.1	Belanja Pegawai	745.557.517	698.670.023	726.884.839	729.192.890
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
1.3	Belanja Subsidi	1.000.000	-	1.000.000	-
1.4	Belanja Hibah	114.721.353	119.747.002	154.568.055	113.545.507
1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.228.826	39.228.690	-	7.102.120
1.6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	3.141.232	1.271.220	-	-
1.8	Belanja Tidak Terduga	1.865.726	120.435.934	85.268.846	33.526.006
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.539.947.317</b>	<b>1.165.854.862</b>	<b>1.407.300.076</b>	<b>1.792.932.260</b>
2.1	Belanja Pegawai	230.111.913	-	-	-
2.2	Belanja Barang dan Jasa	622.064.723	737.162.177	861.598.601	1.007.369.902
2.3	Belanja Modal	687.770.681	428.692.685	545.701.475	785.562.358
<b>Jumlah (Rp)</b>		<b>2.408.416.971</b>	<b>2.145.207.731</b>	<b>2.375.021.816</b>	<b>2.676.298.783</b>

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka, 2023, BPS

Bila dilihat dari proporsi prosentase antara belanja tidak langsung dan belanja langsung pada setiap tahun nya lebih besar belanja langsung dimulai pada Tahun 2019 dimana belanja tidak langsung sebesar 36,06 % dengan proporsi yang paling besar berdaa pada belanja pegawai sebesar 30,96 %, untuk belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 63,94 % dengan proporsi yang paling besar berada pada belanja barang dan jasa sebesar 25,83%, untuk Tahun 2020 belanja tidak langsung mengalami kenaikan sebesar 45,65 % sedangkan untuk belanja langsung sebesar 54,35%.

Pada Tahun 2021 untuk belanja tidak langsung mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 40,75% dan belanja tidak langsung sebesar 59,25% dimana proporsi yang terbesar untuk belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai sebesar 30,61 % sedangkan untuk belanja langsung proporsi terbesar berada pada belanja barang dan jasa sebesar 59,25%.

Untuk prosentase pada tahun 2022 mengalami kenaikan untuk belanja langsung sebesar 66,99% atau naik 7,74% dari tahun 2021 dan proporsi yang terbesar pada belanja langsung yaitu belanja barang dan jasa sebesar 37,64% atau naik 1,36% dari tahun 2021, sedangkan untuk belanja tidak langsung pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 33,01 % atau turun sebesar -7,74% dari tahun 2021.



### 3.3.2 Kinerja Keuangan Kota Balikpapan dalam Pencapaian Indikator TPB

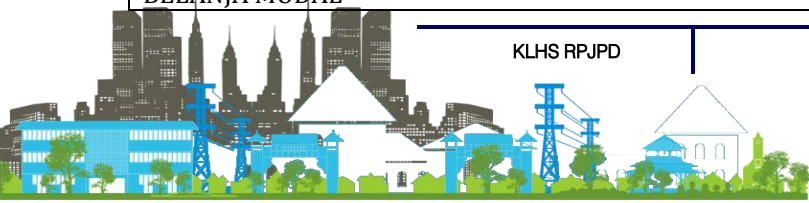
Pada bagian ini dijelaskan mengenai ketercapaian keuangan daerah Kota Balikpapan dalam melaksanakan indikator TPB. Dalam hal ini, anggaran yang dapat dilihat untuk mencapai indikator TPB adalah penggunaan anggaran pada belanja langsung. Belanja langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah yang merupakan tools untuk mencapai indikator TPB. Berikut ini merupakan tabel rekapitulasi anggaran belanja langsung Kota Balikpapan yang digunakan untuk melaksanakan indikator TPB. Di bawah ini merupakan kinerja keuangan daerah Kota Balikpapan dirinci per organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pencapaian indikator TPB dapat dilihat pada Tabel III.61 di bawah ini.

**Tabel III.61 Kinerja Keuangan Daerah Kota Balikpapan dalam Pencapaian Indikator TPB Dirinci Per OPD**

Uraian	Jumlah (Rp)	
	Anggaran	Realisasi
<b>BELANJA</b>	<b>3.273.129.855.262,00</b>	<b>2.745.398.221.161,00</b>
<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>868.946.157.669,00</b>	<b>706.028.187.019,62</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>707.794.609.683,00</b>	<b>572.017.768.517,93</b>
Belanja Pegawai	351.134.624.573,00	296.533.105.613,00
Belanja Barang dan Jasa	221.036.444.870,00	191.352.542.490,93
Belanja Hibah	135.623.540.240,00	84.132.120.414,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>161.151.547.986,00</b>	<b>134.010.418.501,69</b>
<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>308.047.174.783,00</b>	<b>273.968.564.034,61</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>281.079.557.343,00</b>	<b>254.563.705.567,32</b>
Belanja Pegawai	73.356.810.962,00	70.817.358.358,00
Belanja Barang dan Jasa	204.722.746.381,00	180.746.347.209,32
Belanja Hibah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>26.967.617.440,00</b>	<b>19.404.858.467,29</b>
<b>RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU</b>	<b>26.965.324.940,00</b>	<b>23.893.083.832,69</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>21.778.291.600,00</b>	<b>18.966.145.509,61</b>
Belanja Pegawai	8.958.629.600,00	7.430.056.192,00
Belanja Barang dan Jasa	12.819.662.000,00	11.536.089.317,61
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.187.033.340,00</b>	<b>4.926.938.323,08</b>
<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN</b>	<b>118.595.156.900,00</b>	<b>113.346.943.015,45</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>96.500.100.400,00</b>	<b>92.419.469.943,45</b>
Belanja Pegawai	16.917.561.000,00	15.886.909.984,00
Belanja Barang dan Jasa	79.582.539.400,00	76.532.559.959,45
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>22.095.056.500,00</b>	<b>20.927.473.072,00</b>
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM</b>	<b>642.654.970.529,00</b>	<b>553.786.604.039,68</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>70.417.582.628,00</b>	<b>62.865.085.952,17</b>
Belanja Pegawai	10.212.933.000,00	9.506.597.421,00
Belanja Barang dan Jasa	55.343.403.150,00	48.509.617.053,17
Belanja Hibah	4.861.246.478,00	4.848.871.478,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>572.237.387.901,00</b>	<b>490.921.518.087,51</b>
<b>DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>	<b>23.119.226.478,00</b>	<b>19.168.930.498,90</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>15.479.982.863,00</b>	<b>12.994.839.201,74</b>
Belanja Pegawai	6.430.811.045,00	5.533.735.532,00
Belanja Barang dan Jasa	7.729.171.818,00	6.144.183.269,74
Belanja Bantuan Sosial	1.320.000.000,00	1.316.920.400,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7.639.243.615,00</b>	<b>6.174.091.297,16</b>
<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>41.829.185.600,00</b>	<b>41.005.558.629,00</b>



Uraian	Jumlah (Rp)	
	Anggaran	Realisasi
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>35.668.350.100,00</b>	<b>34.862.546.649,00</b>
Belanja Pegawai	21.308.691.000,00	21.078.780.456,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>14.309.659.100,00</b>	<b>13.733.766.193,00</b>
Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6.160.835.500,00</b>	<b>6.143.011.980,00</b>
<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>31.351.056.432,00</b>	<b>30.499.739.736,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>31.234.077.432,00</b>	<b>30.383.272.236,00</b>
Belanja Pegawai	24.588.489.936,00	24.463.871.358,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.645.587.496,00</b>	<b>5.919.400.878,00</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>116.979.000,00</b>	<b>116.467.500,00</b>
<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>14.187.588.345,00</b>	<b>11.961.033.357,38</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>14.002.888.345,00</b>	<b>11.777.633.357,38</b>
Belanja Pegawai	6.007.044.000,00	4.687.077.438,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>7.526.844.345,00</b>	<b>6.671.555.919,38</b>
Belanja Hibah	469.000.000,00	419.000.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>184.700.000,00</b>	<b>183.400.000,00</b>
<b>DINAS KETENAGAKERJAAN</b>	<b>9.448.997.120,00</b>	<b>8.234.464.692,97</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9.187.205.120,00</b>	<b>8.010.541.695,97</b>
Belanja Pegawai	5.589.037.000,00	5.238.110.321,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.598.168.120,00</b>	<b>2.772.431.374,97</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>261.792.000,00</b>	<b>223.922.997,00</b>
<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>27.793.017.610,00</b>	<b>20.919.361.863,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>27.447.537.610,00</b>	<b>20.627.560.239,00</b>
Belanja Pegawai	6.729.661.000,00	6.235.815.559,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>20.187.876.610,00</b>	<b>13.921.744.680,00</b>
Belanja Hibah	530.000.000,00	470.000.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>345.480.000,00</b>	<b>291.801.624,00</b>
<b>DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>80.517.867.990,00</b>	<b>25.638.313.301,21</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>14.367.739.500,00</b>	<b>9.853.511.805,00</b>
Belanja Pegawai	6.520.409.000,00	5.673.846.250,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>7.847.330.500,00</b>	<b>4.179.665.555,00</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>66.150.128.490,00</b>	<b>15.784.801.496,21</b>
<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>136.098.824.212,00</b>	<b>127.115.870.133,86</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>112.586.021.982,00</b>	<b>103.855.957.575,54</b>
Belanja Pegawai	11.372.410.893,00	10.667.338.478,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>101.213.611.089,00</b>	<b>93.188.619.097,54</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>23.512.802.230,00</b>	<b>23.259.912.558,32</b>
<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>14.209.553.933,00</b>	<b>12.931.472.295,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>13.383.053.933,00</b>	<b>12.177.994.645,00</b>
Belanja Pegawai	6.854.723.000,00	6.352.160.286,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.528.330.933,00</b>	<b>5.825.834.359,00</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>826.500.000,00</b>	<b>753.477.650,00</b>
<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>86.800.949.620,00</b>	<b>80.759.382.647,09</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>71.987.219.620,00</b>	<b>67.101.590.344,86</b>
Belanja Pegawai	16.509.422.220,00	15.925.865.636,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>53.677.797.400,00</b>	<b>50.075.924.708,86</b>
Belanja Bantuan Sosial	1.800.000.000,00	1.099.800.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>14.813.730.000,00</b>	<b>13.657.792.302,23</b>
<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>17.075.297.100,00</b>	<b>15.580.760.229,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>15.479.227.100,00</b>	<b>13.994.791.629,00</b>
Belanja Pegawai	5.001.536.000,00	4.234.283.899,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.477.691.100,00</b>	<b>9.760.507.730,00</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.596.070.000,00</b>	<b>1.585.968.600,00</b>

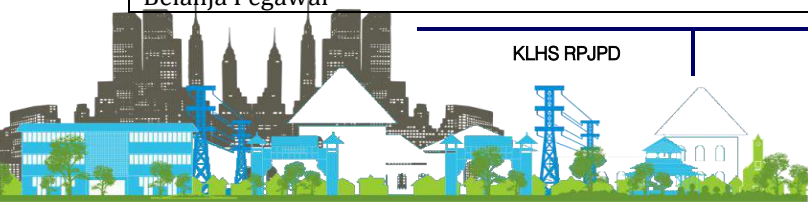




Uraian	Jumlah (Rp)	
	Anggaran	Realisasi
<b>DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN</b>	<b>36.368.074.875,00</b>	<b>30.704.433.351,07</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>21.473.888.837,00</b>	<b>17.482.712.179,00</b>
Belanja Pegawai	6.513.621.815,00	4.990.705.171,00
Belanja Barang dan Jasa	10.460.267.022,00	8.311.207.008,00
Belanja Bantuan Sosial	4.500.000.000,00	4.180.800.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>14.894.186.038,00</b>	<b>13.221.721.172,07</b>
<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU</b>	<b>15.069.915.547,00</b>	<b>13.078.339.214,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>14.310.586.047,00</b>	<b>12.326.802.614,00</b>
Belanja Pegawai	8.957.468.147,00	7.520.444.176,00
Belanja Barang dan Jasa	5.353.117.900,00	4.806.358.438,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>759.329.500,00</b>	<b>751.536.600,00</b>
<b>DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>	<b>69.156.315.885,00</b>	<b>52.267.677.752,70</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>63.008.200.885,00</b>	<b>46.903.051.737,17</b>
Belanja Pegawai	6.512.833.092,00	5.884.246.503,00
Belanja Barang dan Jasa	48.743.450.693,00	37.918.805.234,17
Belanja Hibah	7.751.917.100,00	3.100.000.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6.148.115.000,00</b>	<b>5.364.626.015,53</b>
<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP</b>	<b>10.361.787.902,00</b>	<b>9.610.153.859,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9.630.469.902,00</b>	<b>8.919.388.963,00</b>
Belanja Pegawai	4.574.041.300,00	4.333.973.447,00
Belanja Barang dan Jasa	5.056.428.602,00	4.585.415.516,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>731.318.000,00</b>	<b>690.764.896,00</b>
<b>DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>	<b>24.371.817.100,00</b>	<b>21.053.993.475,60</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>21.874.346.300,00</b>	<b>18.787.297.372,60</b>
Belanja Pegawai	13.597.296.000,00	11.679.444.059,00
Belanja Barang dan Jasa	7.470.050.300,00	6.528.253.313,60
Belanja Hibah	75.000.000,00	75.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	732.000.000,00	504.600.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.497.470.800,00</b>	<b>2.266.696.103,00</b>
<b>DINAS PERDAGANGAN</b>	<b>29.894.677.416,00</b>	<b>23.964.839.170,35</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>22.544.276.216,00</b>	<b>19.898.963.638,12</b>
Belanja Pegawai	11.090.826.984,00	9.763.922.138,00
Belanja Barang dan Jasa	11.453.449.232,00	10.135.041.500,12
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7.350.401.200,00</b>	<b>4.065.875.532,23</b>
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>159.128.028.678,00</b>	<b>137.932.609.683,24</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>150.507.030.678,00</b>	<b>130.253.764.148,64</b>
Belanja Pegawai	30.285.545.791,00	23.809.306.973,00
Belanja Barang dan Jasa	103.246.484.887,00	91.265.163.090,64
Belanja Hibah	16.975.000.000,00	15.179.294.085,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>8.620.998.000,00</b>	<b>7.678.845.534,60</b>
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>117.713.300.471,00</b>	<b>99.673.636.105,01</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>105.930.630.471,00</b>	<b>88.529.554.752,01</b>
Belanja Pegawai	38.895.937.100,00	34.570.259.859,00
Belanja Barang dan Jasa	67.034.693.371,00	53.959.294.893,01
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>11.782.670.000,00</b>	<b>11.144.081.353,00</b>
<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>17.920.481.000,00</b>	<b>14.908.296.901,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>14.805.206.000,00</b>	<b>11.839.637.281,00</b>
Belanja Pegawai	8.064.731.000,00	6.010.778.472,00
Belanja Barang dan Jasa	6.740.475.000,00	5.828.858.809,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.115.275.000,00</b>	<b>3.068.659.620,00</b>
<b>BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>50.888.909.390,00</b>	<b>37.837.495.545,00</b>



Uraian	Jumlah (Rp)	
	Anggaran	Realisasi
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>50.095.690.390,00</b>	<b>37.055.995.295,00</b>
Belanja Pegawai	42.253.227.290,00	30.126.091.490,00
Belanja Barang dan Jasa	7.842.463.100,00	6.929.903.805,00
BELANJA MODAL	793.219.000,00	781.500.250,00
<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>	<b>115.609.435.241,00</b>	<b>84.110.316.326,57</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>60.915.784.905,00</b>	<b>46.396.134.530,00</b>
Belanja Pegawai	16.735.714.427,00	8.047.923.095,00
Belanja Barang dan Jasa	44.180.070.478,00	38.348.211.435,00
BELANJA MODAL	4.582.254.272,00	4.188.175.687,20
BELANJA TIDAK TERDUGA	50.111.396.064,00	33.526.006.109,37
<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>23.169.152.050,00</b>	<b>18.241.432.487,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>22.898.185.800,00</b>	<b>18.031.322.537,00</b>
Belanja Pegawai	8.467.336.600,00	7.580.325.380,00
Belanja Barang dan Jasa	14.430.849.200,00	10.450.997.157,00
BELANJA MODAL	270.966.250,00	210.109.950,00
<b>INSPEKTORAT</b>	<b>15.298.367.800,00</b>	<b>13.376.482.603,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>15.025.367.800,00</b>	<b>13.103.702.403,00</b>
Belanja Pegawai	9.880.936.400,00	8.768.310.792,00
Belanja Barang dan Jasa	5.144.431.400,00	4.335.391.611,00
BELANJA MODAL	273.000.000,00	272.780.200,00
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT</b>	<b>20.935.205.078,00</b>	<b>18.449.456.848,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>19.429.247.078,00</b>	<b>16.960.711.478,00</b>
Belanja Pegawai	10.853.685.000,00	9.000.048.510,00
Belanja Barang dan Jasa	8.575.562.078,00	7.960.662.968,00
BELANJA MODAL	1.505.958.000,00	1.488.745.370,00
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH</b>	<b>21.203.645.086,00</b>	<b>18.919.860.361,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>20.981.365.086,00</b>	<b>18.699.310.516,00</b>
Belanja Pegawai	10.551.957.000,00	8.785.375.308,00
Belanja Barang dan Jasa	10.429.408.086,00	9.913.935.208,00
BELANJA MODAL	222.280.000,00	220.549.845,00
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA</b>	<b>20.969.630.950,00</b>	<b>16.515.828.044,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>20.556.350.950,00</b>	<b>16.114.972.694,00</b>
Belanja Pegawai	9.873.389.000,00	7.649.935.763,00
Belanja Barang dan Jasa	10.682.961.950,00	8.465.036.931,00
BELANJA MODAL	413.280.000,00	400.855.350,00
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA</b>	<b>22.261.312.100,00</b>	<b>19.565.027.534,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>21.887.005.100,00</b>	<b>19.192.422.559,00</b>
Belanja Pegawai	10.706.355.350,00	8.948.230.709,00
Belanja Barang dan Jasa	11.180.649.750,00	10.244.191.850,00
BELANJA MODAL	374.307.000,00	372.604.975,00
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN</b>	<b>24.899.638.050,00</b>	<b>22.801.458.480,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>24.368.638.050,00</b>	<b>22.280.813.020,00</b>
Belanja Pegawai	12.327.854.000,00	10.872.211.314,00
Belanja Barang dan Jasa	12.040.784.050,00	11.408.601.706,00
BELANJA MODAL	531.000.000,00	520.645.460,00
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR</b>	<b>17.537.227.650,00</b>	<b>15.789.527.582,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>17.064.273.650,00</b>	<b>15.322.421.757,00</b>
Belanja Pegawai	8.438.891.400,00	7.201.330.526,00
Belanja Barang dan Jasa	8.625.382.250,00	8.121.091.231,00
BELANJA MODAL	472.954.000,00	467.105.825,00
<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>12.732.583.732,00</b>	<b>11.759.086.513,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>12.311.453.732,00</b>	<b>11.354.194.273,00</b>
Belanja Pegawai	3.661.798.000,00	3.385.113.648,00



Uraian	Jumlah (Rp)	
	Anggaran	Realisasi
Belanja Barang dan Jasa	6.178.435.132,00	5.697.860.025,00
Belanja Hibah	2.471.220.600,00	2.271.220.600,00
BELANJA MODAL	421.130.000,00	404.892.240,00
<b>(SURPLUS/DEFISIT) Rp.</b>	<b>(445.730.975.673,00)</b>	<b>123.731.899.744,73</b>

Sumber : Perda APBD Kota Balikpapan Tahun 2022

Anggaran setiap OPD untuk mendukung Indikator TPB

### 3.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing sebuah bangsa dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas daya pembangunan sebuah bangsa diantaranya adalah kualitas pertumbuhan ekonomi dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dan wilayah. Indikator lain yang dapat digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari indeks kemampuan daya beli, indeks pendidikan dan indeks kesehatan.

Selain kedua indikator di atas, dalam era globalisasi ini dalam rangka reformasi daya saing, untuk mengukur capaian peningkatan daya saing, *The World Economic Forum* setiap tahunnya telah menerbitkan sebuah indeks yang disebut Indeks Daya Saing. Indeks ini memiliki 114 indikator yang kemudian dikelompokkan menjadi 12 pilar. Salah satu dari indikator tersebut adalah inovasi dan faktor-faktor kemajuan usaha (*business sophistication factors*).

#### 3.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 91.104,44 miliar, meningkat pula bila dibandingkan tahun sebelumnya. Dari angka PDRB harga konstan ini dapat diturunkan menjadi laju pertumbuhan Kota Balikpapan, yang pada periode 2021-2022 mengalami kontraksi sebesar 4,94 persen. Bila dirinci per kategori, kategori Transportasi dan Pergudangan menunjukkan laju pertumbuhan tertinggi sepanjang 2021-2022 dengan capaian 15,91 persen.



Tabel III.62 Laju Pertumbuhan PDR Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (%) di Kota Balikpapan Tahun 2017 - 2022

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1.13	7.63	4.98	-3.85	2.34	1.92
B.	Pertambangan dan Penggalian	0.60	0.76	6.06	-0.07	3.77	-4.84
C.	Industri Pengolahan	3.56	4.11	4.25	-1.06	4.56	4.69
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0.14	5.03	9.40	7.73	3.89	4.45
E.	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.09	1.99	5.92	6.32	1.88	6.43
F.	F. Konstruksi	3.21	6.34	10.38	5.59	5.07	-3.24
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.25	6.60	6.23	-3.07	7.08	8.42
H.	Transportasi dan Pergudangan	6.40	5.00	0.01	-13.89	2.24	15.91
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.87	11.85	8.17	-10.04	1.92	9.56
J.	Informasi dan Komunikasi	7.96	5.14	6.97	8.86	7.89	7.93
K.	Jasa Keuangan	-0.19	5.14	3.77	2.20	2.94	8.91
L.	Real Estate	4.79	4.62	2.55	-1.16	0.16	2.19
M,N.	Jasa Perusahaan	3.05	4.50	3.48	-3.53	3.92	5.33
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-10.16	5.11	5.72	-5.46	1.58	8.48
P.	Jasa Pendidikan	7.06	7.87	4.58	5.07	1.09	2.05
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.53	6.30	5.82	27.49	10.69	4.89
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	7.23	8.79	9.06	-3.44	1.28	6.47
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>3.84</b>	<b>4.97</b>	<b>4.99</b>	<b>-0.91</b>	<b>4.56</b>	<b>4.94</b>

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka, 2023 (BPS)

Tabel III.63 PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kota Balikpapan Tahun 2017 - 2022 Menurut Lapangan Usaha (Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	693.061,54	745.962,47	783.118,57	752.931,32	770.543,55	785.369,68
B.	Pertambangan dan Penggalian	35.262,92	35.529,86	37.684,21	37.656,73	39.076,39	37.185,60
C.	Industri Pengolahan	43.657.280,78	45.450.065,10	47.381.670,80	46.877.785,28	49.014.821,09	51.315.174,24
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	66.169,71	69.496,29	76.027,20	81.902,24	85.086,57	88.876,75
E.	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	54.639,53	55.725,57	59.026,26	62.757,80	63.934,81	68.045,58
F.	F. Konstruksi	8.943.483,43	9.510.131,46	10.497.732,05	11.084.167,31	11.646.022,83	11.268.748,09





Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.155.721,31	6.561.791,70	6.970.883,60	6.757.018,53	7.235.431,54	7.844.556,64
H.	Transportasi dan Pergudangan	5.978.044,83	6.277.041,97	6.277.655,96	5.405.994,30	5.527.050,52	6.406.269,54
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.108.885,61	1.240.280,35	1.341.582,59	1.206.931,44	1.230.154,74	1.347.790,15
J.	Informasi dan Komunikasi	2.644.528,85	2.780.444,93	2.974.248,84	3.237.909,36	3.493.220,02	3.770.314,31
K.	Jasa Keuangan	2.394.776,19	2.517.790,53	2.612.608,15	2.670.128,50	2.748.497,58	2.993.329,46
L.	Real Estate	1.321.553,37	1.382.661,68	1.417.880,50	1.401.437,25	1.403.667,74	1.434.419,68
M,N.	Jasa Perusahaan	198.591,38	207.531,05	214.752,26	207.173,56	215.291,98	226.766,54
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	894.679,33	940.397,44	994.195,72	939.939,35	954.811,42	1.035.751,99
P.	Jasa Pendidikan	1.008.511,95	1.087.881,84	1.137.683,76	1.195.361,44	1.208.434,40	1.233.191,98
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	385.003,42	409.277,58	433.098,06	552.151,62	611.164,30	641.041,18
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	491.884,98	535.098,89	583.565,49	563.464,84	570.681,06	607.610,01
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>76.032.079,12</b>	<b>79.807.108,74</b>	<b>83.793.414,03</b>	<b>83.034.710,87</b>	<b>86.817.890,55</b>	<b>91.104.441,42</b>

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka, 2023 (BPS)



### 3.4.2 Infrastruktur Wilayah

Dibawah ini merupakan infrastruktur wilayah di Kota Balikpapan yang terdiri dari sarana dan prasarana.

#### 1. Sarana Wilayah

##### A. Sarana Pendidikan

Jumlah dan sebaran sarana pendidikan di Kota Balikpapan berdasarkan data Tahun 2022 menurut BPS yaitu untuk TK dengan status negeri berjumlah 1 unit dan swasta 152 unit, SD dengan status negeri berjumlah 137 unit dan Swasta 55 Unit, MI dengan status negeri berjumlah 1 unit dan swasta berjumlah 25 unit, SMP dengan status negeri berjumlah 23 unit dan swasta 52 unit, MTS dengan status negeri 2 unit dan swasta 13 unit, SMA dengan status negeri 9 unit dan swasta 19 unit, SMK dengan status negeri 6 unit dan swasta 26 unit serta MA dengan status negeri 1 unit dan swasta 6 unit.

**Tabel III.64 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kota Balikpapan Tahun 2022**

No	Kecamatan/ Kelurahan	FASILITAS PENDIDIKAN (unit)															
		TK		SD		MI		SMP		MTS		SMA		SMK		MA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Balikpapan Barat		18	22	5	0	1	5	5	0	1	2	0	0	2	0	0
2	Balikpapan Kota		17	15	14	0	0	3	9	0	0	1	4	0	5	1	0
3	Balikpapan Selatan	1	42	15	17	0	6	4	16	0	1	2	3	3	5	0	0
4	Balikpapan Tengah		29	30	7	0	4	2	9	0	2	0	4	0	7	0	1
5	Balikpapan Timur		12	21	4	1	9	4	3	1	3	1	1	1	2	0	3
6	Balikpapan Utara		34	34	8	0	5	7	10	1	6	3	7	2	5	0	2
	<b>Grand Total</b>	<b>1</b>	<b>152</b>	<b>137</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>6</b>

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun Tahun 2023

Untuk perguruan tinggi yang ada di Kota Balikpapan berjumlah 15 unit adalah sebagai berikut :

1. STT Migas Balikpapan
2. Politeknik Negeri Balikpapan
3. Politeknik Ilmu Pelayaran Balikpapan
4. Universitas Mulia
5. Akademi Bahasa Asing Balikpapan
6. STIE Madani Balikpapan
7. Poltekkes Kemenkes Kaltim Kampus C
8. Universitas Balikpapan
9. STIE Balikpapan
10. Akademi Kebidanan Borneo Medistra
11. STMIK Borneo Internasional
12. Akademi Kebidanan Bakti Indonesia
13. Universitas Tri Dharma
14. Institut Kristen Borneo
15. Institut Teknologi Kalimantan



## B. Sarana Kesehatan

Tersedianya fasilitas kesehatan yang baik, murah, dan terjangkau oleh semua kalangan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Lebih jauh, hal ini menjadi prasyarat tercapainya masyarakat yang sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah kota terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Keberadaan rumah sakit di Kota Balikpapan terus ditopang dengan sarana kesehatan yang sudah lazim dikenal masyarakat, yaitu puskesmas dan puskesmas pembantu. Tercatat pada tahun 2022, di Kota Balikpapan terdapat 11 rumah sakit umum, 2 rumah sakit bersalin, 1 rumah sakit khusus mata dan 75 Klinik Pratama Kesehatan yang ditunjang dengan 34 posyandu dan 27 puskesmas yang terdiri dari 7 puskesmas rawat inap dan 20 puskesmas non rawat inap yang tersebar di tiap kecamatan.

**Tabel III.65 Jumlah dan Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kota Balikpapan Tahun 2022**

No	Kecamatan/ Kelurahan	FASILITAS KESEHATAN (unit)					
		RS	RS Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
1	Balikpapan Barat	0	1	2	6	2	5
2	Balikpapan Kota	2	0	4	4	0	5
3	Balikpapan Selatan	5	0	6	2	2	7
4	Balikpapan Tengah	2	1	4	6	0	6
5	Balikpapan Timur	1	0	1	4	2	4
6	Balikpapan Utara	1	0	4	5	2	6
<b>Grand Total</b>		<b>11</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>33</b>

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun Tahun 2023

## C. Sarana Peribadatan

Kegiatan keagamaan tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduk yang berdasarkan kelompok agama, tetapi juga harus ditunjang oleh ketersediaan sarana peribadatan. Demikian halnya dalam penyediaan fasilitas peribadatan dapat terukur berdasarkan kelompok pemeluk suatu agama. Penduduk di Kota Balikpapan didominasi oleh pemeluk agama Islam, oleh karenanya fasilitas peribadatan di wilayah Kota Balikpapan tahun 2022 menurut data BPS juga didominasi oleh jenis peribadatan mesjid sebanyak 479 unit, mushollah sebanyak 286 unit, gereja sebanyak 162 unit dan gereja katolik 5 unit, pura 3 unit, vihara 8 unit dan klenteng 1 unit (lihat tabel jumlah persebaran fasilitas). Fasilitas peribadatan untuk kelompok agama lainnya berupa vihara, pura dan kuil masih belum banyak, hal ini dipengaruhi oleh rendahnya populasi pemeluk agama tersebut, sehingga tidak mencapai standar fasilitas peribadatan yang dibutuhkan.

**Tabel III.66 Jumlah dan Sebaran Fasilitas Peribadatan di Kota Balikpapan Tahun 2022**

No	Kecamatan/ Kelurahan	FASILITAS PERIBADATAN (unit)						
		Mesjid	Mushollah	G. Kristen	G. Katolik	Pura	Vihara	Klenteng
1	Balikpapan Barat	52	34	6	1	0	0	0
2	Balikpapan Kota	56	7	24	0	1	4	1
3	Balikpapan Selatan	102	91	45	1	0	0	0
4	Balikpapan Tengah	61	62	28	1	0	3	0
5	Balikpapan Timur	71	42	23	1	0	0	0
6	Balikpapan Utara	137	50	36	1	2	1	0
<b>Grand Total</b>		<b>479</b>	<b>286</b>	<b>162</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1</b>

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun Tahun 2023

#### **D. Sarana Perdagangan dan Jasa**

Berdasarkan jenis perdagangan berupa pasar di Kota Balikpapan terdapat 2 jenis pasar yaitu modern dan tradisional. Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Kota mempunyai jumlah fasilitas pasar modern terbanyak, Sedangkan Balikpapan Barat mempunyai jenis pasar tradisional terbanyak berupa pasar Inpres Kebun Sayur, Pasar Kampung Baru Tengah, Pasar Loak Besi Baru Tengah, Pasar Penampungan A, dan Pasar Pandan Sari. Untuk pasar sejak tahun 2016 pengelolaannya berada di Dinas Perdagangan. Selain fasilitas perdagangan di Kota Balikpapan terdapat juga kawasan pusat perbelanjaan (data BPS tahun 2023) mencatat terdapat 8 (delapan) pusat perbelanjaan yang rata-rata berada pada koridor jalan utama Jl. Jenderal Sudirman, Jl. MT. Haryono, Komplek Balikpapan Baru, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Letjen Suprpto, Jl. Soekarno Hatta, Jl. MT. Haryono. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III.67 Daftar Pusat Perbelanjaan di Kota Balikpapan, 2022**

No	Nama Pusat Perbelanjaan	Alamat
1	Balikpapan Plaza	Jl. Jenderal Sudirman
2	Mall Fantasi Balikpapan Baru	Jl. MT. Haryono, Komplek Balikpapan Baru
3	Balikpapan Super Block	Jl. Jenderal Sudirman
4	Plaza Kebun Sayur	Jl. Letjen Suprpto
5	Plaza Rapak	Jl. Soekarno Hatta
6	Living Plaza	Jl. MT. Haryono
7	Balikpapan Ocean Square (BOS)	Jl. Jenderal Sudirman
8	Ramayana (Muara Rapak)	Jl. Soekarno Hatta

Sumber : BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2023

**Tabel III.68 Daftar Nama Pasar Modern dan Tradisional Menurut Kecamatan, Tahun 2022**

No	Kecamatan	NAMA PASAR	
		Modern	Tradisional
1	Balikpapan Selatan	Food Mart BSB	Pasar Sepinggan
		Hypermart Pentacity	
		Lottemart	
		Trans Mart	



No	Kecamatan	NAMA PASAR	
		Modern	Tradisional
		HeroMall Fantasy	
2	Balikpapan Timur		Pasar Teritip/ Gn Tembak Pasar Manggar
3	Balikpapan Utara	Robinson (Muara Rapak)	Pasar Buton KM 4,5 Pasar Rakyat KM 12 Pasar Batu Ampar Pasar Muara Rapak Pasar Segar
4	Balikpapan Tengah	-	-
5	Balikpapan Barat	Farmers Family	Pasar Inpres Kebun Sayur Pasar Kampung Baru Tengah Pasar Loak Besi Baru Tengah Pasar Penampungan A Pasar Pandansari
6	Balikpapan Kota	Hypermart BTC	Klandasan I
		PT. Jeffrindo Eka Putra (Yova)	Klandasan II
		PT. Kenongo Delapan Lembusuan (Gajah Mada)	Pasar Damai
		Farmers Market	Pasar Baru

Sumber : BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2023

## E. Sarana Perkantoran

Pendistribusian fasilitas pemerintahan dan Perkantoran terdiri dari: Perkantoran swasta dan Perkantoran Pemerintahan. Perkantoran pemerintahan di Kota Balikpapan sebagian besar mengumpul di pusat Kota Balikpapan yaitu di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Balikpapan Kota dan sebagian lainnya mengumpul di Jl. Ruhui Rahaya Kecamatan Balikpapan Selatan.

Fasilitas perkantoran swasta terdistribusi melalui jalan utama di Kota Balikpapan yaitu di sepanjang Jl. Yos Sudarso, Jl. Mulawarman, Jl. Sudirman, Jl. MT Haryono, Jl. Syarifuddin Yoes, Jl. Ahmad Yani, Jl. Soekarno Hatta.

## 2. Prasarana Wilayah

### A. Sistem Transportasi dan Sistem Pergerakan

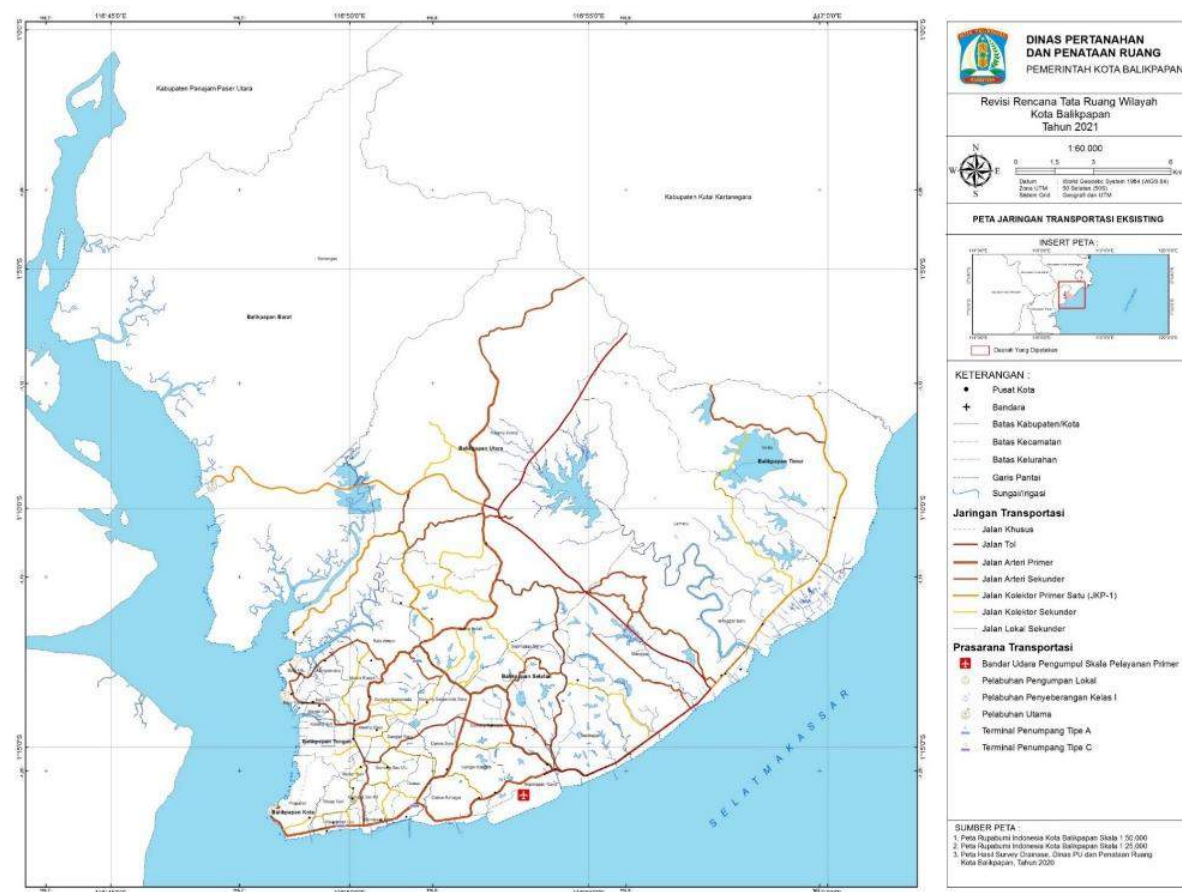
Secara umum sistem jaringan jalan di Kota Balikpapan berdasarkan kewenangan Tahun 2020 terdiri dari 45,66 Km jalan Negara, 31,61 Km berupa jalan provinsi dan 501,180 Km jalan kewenangan Kota. Untuk panjang jalan menurut jenis permukaan Tahun 2020, jenis permukaan aspal panjang 45,36 Km dan rigid 0,30 Km.



## B. Jalan Tol

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres Nomor 56 Tahun 2018. Signifikansi pembangunan jalan tol akan mendorong pengembangan kawasan-kawasan industri berbasis kelapa sawit, batubara, migas, dan pertanian di kedua kota dan disepanjang jalan tol. Proyek jalan tol ini juga akan meningkatkan konektivitas serta mengurangi biaya logistik dan waktu tempuh antara Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Berdasarkan Komite Percepatan Penyediaan infrastruktur Prioritas (KPPiP), Secara keseluruhan, jalan tol Balikpapan Samarinda memiliki total panjang 97,99 Km yang dibagi menjadi lima seksi, yaitu:

- Seksi 5 ruas Sepinggian (11,09 Km)-Balikpapan (Km 13) Bandara Sepinggian,;
- Seksi 1 ruas Balikpapan (Km 13)-Samboja (22,03 Km),
- Seksi 2 ruas Samboja-Muara Jawa (30,98 Km),
- Seksi 3 Muara Jawa-Palaran (17,30 Km), dan
- Seksi 4 Palaran-Samarinda (16,59 Km).



Gambar 3.40 Peta Jaringan Transportasi

### C. Terminal Penumpang, Dan Terminal Barang

Terminal berdasarkan Permen Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015, tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan didefinisikan Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menakar dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

#### Terminal Penumpang :

Sistem transportasi darat berupa terminal penumpang yang ada di Kota Balikpapan saat ini berupa Terminal Tipe A Batu Ampar, berada di JL. Kapten Pattimura Batu Ampar Balikpapan Utara (1013'11,1"S ; 116°51'24.8"E/-1.219744, 116.856878). Ditetapkan dalam dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 109 Tahun 2019 sebagai terminal tipe A. Saat ini melayani sistem transportasi angkutan umum antar kota antar provinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi (AKDP). Jalur pelayanan saat ini melayani :

- Balikpapan \_ Samarinda (Bus)
- Balikpapan – Bontang (Bus)
- Balikpapan – Banjarmasin (Bus)
- Balikpapan – Sepaku/Semoi (Mini Bus)

Terminal lainnya yaitu Terminal Damai tipe B yang melayani angkutan umum dalam kota. Rute pelayanan saat ini untuk angkutan umum dilayani oleh angkutan umum minibus dengan pelayanan 8 rute trayek.

Rencana pengembangan terminal penumpang disesuaikan dengan konsep pengembangan sistem angkutan umum yang direncanakan di Kota Balikpapan. Berdasarkan RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 prasarana lalulintas dan angkutan jalan berupa terminal angkutan direncanakan meliputi :

- a. pengembangan terminal tipe A di Kelurahan Karang Joang;
- b. peningkatan terminal tipe B di Kelurahan Batu Ampar;
- c. pengembangan terminal tipe C di Kelurahan Manggar;
- d. pengembangan terminal tipe C di Kelurahan Teritip;
- e. pengembangan terminal tipe C di Kelurahan Kariangau;
- f. pengembangan terminal tipe C di Kelurahan Prapatan;
- g. peningkatan terminal tipe C di Kelurahan Damai; dan
- h. pengembangan terminal tipe C di Kelurahan Sepinggian.

#### Terminal Barang :

Terminal barang di Kota Balikpapan saat ini terdiri dari :

1. Terminal Peti Kemas Kariangau, dengan penanggung jawab operasional Kaltim Kariangau Terminal. Lokasi berada di Desa Kariangau Kecamatan



Balikpapan Utara. Kegiatan utama bongkar muat barang dan penumpang.

2. Terminal Barang Teritip, di Kecamatan Balikpapan Timur

Dalam rencana pengembangan yang tertuang dalam RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 direncanakan pengembangan terminal barang yaitu :

- a. pengembangan terminal barang kawasan industri Kariangau di Kelurahan Kariangau; dan
- b. pengembangan terminal barang di Kelurahan Teritip.

#### D. Sistem Jaringan Kereta Api

Sistem jaringan kereta api di Kota Balikpapan, berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional yang terbit pada Desember 2018, termasuk dalam rencana jaringan jalur kereta api di Pulau Kalimantan. Sasaran pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Kalimantan adalah untuk memenuhi kebutuhan pergerakan barang dan memicu pertumbuhan wilayah dengan koridor selatan dan tengah, khususnya untuk angkutan batubara. Sampai dengan tahun 2030 direncanakan akan dibangun secara bertahap prasarana perkeretaapian meliputi jalur, stasiun dan fasilitas operasi kereta api, diantaranya meliputi:

1. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota pada lintas: Puruk Cahu - Bangkuang, Balikpapan-Tanah Grogot - Tanjung, Balikpapan - Samarinda, Tanjung - Paringin - Barabai - Rantau - Martapura Banjarmasin, Banjarmasin - Palangkaraya, Bandara Supadio - Pontianak - Mempawah - Singkawang-Batas Negara, Tabang - Maloy, Kutai Barat - Paser - Balikpapan, Gunung Mas - Katingan.
2. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan wilayah sumber daya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan diantaranya: Banjarmasin (Kalimantan Selatan) dan Balikpapan (Kalimantan Timur).
3. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan pusat kota dengan bandara, meliputi: Supadio (Kalimantan Barat), Syamsudin Noor (Kalimantan Selatan).
4. Pengembangan layanan kereta api perintis.
5. Pengembangan sistem persinyalan, telekomunikasi dan kelistrikan.
6. Pengembangan stasiun kereta api termasuk fasilitas park and ride pada pusat-pusat kegiatan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Spesifikasi teknis dasar untuk jaringan kereta api di koridor Kalimantan secara umum diarahkan menggunakan lebar jalan rel 1435 mm guna mengakomodir potensi angkutan barang di wilayah tersebut. Penggunaan lebar gauge yang berbeda tetap dimungkinkan berdasarkan kajian maupun kebijakan.





## E. Sistem transportasi laut dan penyebrangan

Berdasarkan Permen Nomor : PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Terminal Khusus (Tersus) adalah terminal yang terletak DILUAR Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp), yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Sedangkan Dermaga Untuk kepentingan Sendiri (DUKS) adalah dermaga dan fasilitas pendukungnya yang berada Didalam Daerah Lingkungan Kerja dan/atau Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan laut yang dibangun, dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu, berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Setelah berlakunya UU No. 17 tahun 2008, maka istilah DUKS berubah menjadi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Pengertian TUKS dan DUKS adalah sama.

Sedangkan istilah Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang dan/atau tempat bongkar muat barang.

Terminal Khusus (TERSUS) dan TUKS dibangun dan dioperasikan, hanya bersifat menunjang kegiatan pokok perusahaan. Pembangunan Pelabuhan hanya bertujuan untuk menunjang usaha pokok dari perusahaan tersebut. Kegiatan usaha pokok antara lain ; pertambangan, energi, kehutanan, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dan dok dan galangan kapal.

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan Pintu Gerbang Provinsi Kalimantan Timur sehingga memiliki sarana dan prasarana perhubungan dengan skala pelayanan Nasional bahkan Internasional. Sistem transportasi laut dan penyebrangan di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

- Pelabuhan Semayang, penanggung jawab PT. Pelindo IV, lokasi di Kelurahan Prapatan Kecamatan, status umum (pelabuhan utama) kegiatan bongkar muat barang dan penumpang.
- Pelabuhan Somber, penanggung jawab DishubKota Balikpapan, lokasi Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Kota, status umum dengan kegiatan bongkar muat barang dan penumpang.
- Pelabuhan Penyebrangan Kariangau, penanggung jawab BPTD Kaltim Tara, lokasi di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Utara, status umum, kegiatan penyebrangan.



- Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau, penanggung jawab Kaltim Kariangau Terminal, lokasi Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Utara, status umum, kegiatan bongkar muat barang dan penumpang.
- Pelabuhan Kampung Baru, di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Kota, penanggung jawab PT. Pelindo IV kegiatan bongkar muat barang dan penumpang.

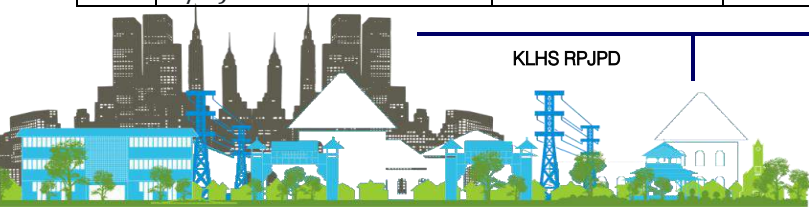
Selain pelabuhan laut, di wilayah Kota Balikpapan terdapat beberapa Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS)/ Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), yang Didalam Daerah Lingkungan Kerja (DDLK) dan/atau Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut (DLKPr). DUKS/TUKS di Kota Balikpapan berdasarkan data Dishub Provinsi Kaltim Tahun 2020 yaitu terlihat pada tabel berikut:

**Tabel III.69 Terminal Khusus di Kota Balikpapan**

<b>N0</b>	<b>Nama</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Kelurahan/ Kecamatan</b>	<b>Status</b>	<b>Kegiatan</b>
1	Terminal Peti Kemas Kariangau	Kaltim Kariangau Terminal	Kariangau, Balikpapan Utara	Umum	Bongkar Muat Barang dan Penumpang
2	Pelabuhan Semayang	PT. Pelindo IV	Prapatan, Balikpapan Kota	Umum	Bongkar Muat Barang dan Penumpang
3	Pelabuhan Sumber	Dishub Kota Balikpapan	Batu Ampar, Balikpapan Utara	Umum	Bongkar Muat Barang dan Penumpang
4	Pelabuhan Penyebrangan Kariangau	BPTD KaltimTara	Kariangau, Balikpapan Barat	Umum	Penyebrangan
5	PT. Dwimanunggal Reksa Wood	PT. Pelindo IV Cab. Balikpapan	Teluk Waru, Balikpapan Barat	DUKS/TUKS	Plywood
6	PT. H & H Utama Internasional	PT. Pelindo IV Cab. Balikpapan	Batakan, Balikpapan Selatan	DUKS/TUKS	Galangan Kapal
7	PT. Galangan Balikpapan Utama	PT. Pelindo IV Cab. Balikpapan	Kampung Baru, Balikpapan Tengah	DUKS/TUKS	Galangan Kapal
8	PT. Dermaga Perkasa Pratama	PT. Pelindo IV Cab. Balikpapan	Kariangau	DUKS/TUKS	Batubara
9	Pertamina Tanjung Batu	PT. Pelindo IV Cab. Balikpapan	Tanjung Batu	DUKS/TUKS	BBM
10	PT. Lestari Samudera Balikpapan	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN	Tanjung Batu	DUKS/TUKS	Gakangan Kapal
11	PT. Dwi Duta Rahmat Agung	PT. Pelindo IV Cab. Balikpapan	Kampung Baru, Balikpapan Tengah	DUKS/TUKS	Batu Gunung
12	PT. Thies Contractor Indonesia	PT. Pelindo IV Cab. Balikpapan	Manggar, Balikpapan Timur	DUKS/TUKS	Alat Berat
13	PT. DERMAGA KENCANA INDONESIA (DERMAGA B)	PT. Pelindo IV Cab. Balikpapan	Kariangau, Balikpapan Barat	DUKS/TUKS	CPO



<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Kelurahan/ Kecamatan</b>	<b>Status</b>	<b>Kegiatan</b>
14	PT. DERMAGA KENCANA INDONESIA (DERMAGA A)	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN	Kariangau, Balikpapan Barat	DUKS/TUKS	CPO
15	PT. MEKAR BUMI ANDALAS	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN	Kariangau, Balikpapan Barat	DUKS/TUKS	CPO
16	PT. SARANA TELUK SUMBER	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN		DUKS/TUKS	PENUMPUKAN BARANG/ALAT BERAT
17	CV. ALAM BARU Eks. PT. INHUTANI	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN	Kampung Baru Tengah, Balikpapan Tengah	DUKS/TUKS	PENUMPUKAN PASIR DAN BATU
18	PT. BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN		DUKS/TUKS	SAWMILL
19	PT. BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN		DUKS/TUKS	SAWMILL
20	CV. PANCUNG PUTRA	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN		DUKS/TUKS	SAWMILL
21	PERTAMINA UP-IV BALIKPAPAN (JETTY 1)	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN		DUKS/TUKS	MIGAS
22	PERTAMINA UP-IV BALIKPAPAN (JETTY 2)	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN		DUKS/TUKS	MIGAS
23	PERTAMINA UP-IV BALIKPAPAN (JETTY 4)	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN		DUKS/TUKS	MIGAS
24		PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN		DUKS/TUKS	
25	PERTAMINA UP-IV BALIKPAPAN (JETTY 5)			DUKS/TUKS	MIGAS
26	PERTAMINA UP-IV BALIKPAPAN (JETTY 5/A)	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN		DUKS/TUKS	MIGAS
27	PERTAMINA UP-IV BALIKPAPAN (JETTY 5/B)	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN		DUKS/TUKS	MIGAS
28	PERTAMINA UP-IV BALIKPAPAN (JETTY 5/C)	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN		DUKS/TUKS	MIGAS
29	PERTAMINA UP-IV BALIKPAPAN (JETTY 6)	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN			MIGAS
30	PERTAMINA UP-IV BALIKPAPAN (JETTY 7/A)	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN			MIGAS



N0	Nama	Penanggung Jawab	Kelurahan/ Kecamatan	Status	Kegiatan
31	PERTAMINA LAWE - LAWE	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN	LAWE - LAWE		BBM
32	KUA KARYA HARAPAN	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN	KARIANGAU		
33	PLTD BATAKAN	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN	MANGGAR		LISTRIK
34	PT. IQBAL BHAKTI NUSANTARA				BATUBARA
35	PT. KALAMARINDO SATYA TIMUR		TANJUNG BATU		PETI KEMAS
36	CV. EDY JAYA		KAMPUNG BARU UJUNG		JASA SUPPLIER
37	PERTAMINA V A,B,C BALIKPAPAN	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN			BBM
38	PERTAMINA UP V STS (SHIP TO SHIP)	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN			BBM
39	PT. KUTAI CHIP MILL (DERMAGA I)	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN			INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU SERPIH (CHIPWOOD MILL)
40	PT. KUTAI CHIP MILL (DERMAGA II)	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN			INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU SERPIH (CHIPWOOD MILL)
41	PT. SEMEN GRESIK	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN			SEMEN
42	PT. SEMEN TONASA	PT. PELINDO IV CAB. BALIKPAPAN			SEMEN

Sumber : RTRW Kota Balikpapan

## F. Sistem Transportasi Udara

Sistem transportasi udara di Kota Balikpapan adalah dengan adanya Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan dikelola oleh PT. Angkasa Pura I. Pelayanan melayani penerbangan domestik juga melayani penerbangan internasional. Setelah dilakukan pengembangan pada tahun 2013, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan memiliki luas terminal 110.000 m<sup>2</sup> yang dapat menampung hingga 10 juta penumpang dengan desain yang menerapkan konsep modern disisipi nuansa etnik Kalimantan. Bandar Udara Sepinggang Balikpapan merupakan bandara pengumpul, sehingga mempunyai peran sebagai Bandar Udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai Bandar Udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah





besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

## G. Energi Kelistrikan

Prasarana kelistrikan dibutuhkan untuk menunjang berbagai aktivitas dan kegiatan seperti penerangan, kegiatan industri dan lain-lain sebagainya. Energi kelistrikan di Kota Balikpapan saat ini dilayani oleh PLN Persero. Sedangkan wilayah lain yang belum terlayani jaringan listrik masih menggunakan energi listrik lain atau sumber penerangan lainnya.

Menurut data BPS tahun 2023 Jumlah pelanggan listrik di Kota Balikpapan mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2021. Berdasarkan data dari PT PLN Area Balikpapan, pada tahun 2022 pelanggan listrik PLN ada sebanyak 254.585 pelanggan, yang menunjukkan adanya kenaikan jumlah pelanggan dari tahun 2021 sebanyak 245.471 pelanggan. Dari jumlah tersebut, 136.177 berada pada rayon Balikpapan Selatan dan 118.408 berada pada rayon Balikpapan Utara.

## H. Sistem Penyediaan Air Minum

Air Minum merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk kelangsungan hidupnya. Prasarana air bersih dibutuhkan tidak hanya untuk konsumsi, akan tetapi juga untuk keperluan MCK, kebutuhan kegiatan industri dan kegiatan lainnya. Kota Balikpapan memiliki beberapa sumber air yang dapat digunakan untuk air baku, diantaranya mata air, air tanah, dan sungai. Untuk pemenuhan air bersih dibutuhkan beberapa persyaratan teknis, seperti standar sanitasi dan kesehatan untuk layak konsumsi. Peningkatan pembangunan sarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan pelayanan 80% penduduk perkotaan dan 60% penduduk pedesaan.

Menurut data BPS tahun 2023 jumlah pelanggan air PDAM di Kota Balikpapan juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Berdasarkan data dari PDAM Kota Balikpapan, pada tahun 2022 pelanggan air PDAM Kota Balikpapan mencapai 115.094 pelanggan. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan dari jumlah pelanggan pada tahun 2021 sebanyak 111.394 pelanggan.

## I. Drainase

Jaringan drainase, selain berfungsi sebagai saluran air hujan juga berfungsi sebagai saluran pembuangan limbah rumah tangga. Sistem jaringan drainase di Kota Balikpapan mengikuti kontur alami yakni mengikuti alur-alur sungai yang ada. Keadaan jaringan drainase di Kota Balikpapan, pada wilayah perkotaan sebagian besar berupa jaringan permanen sedangkan pada wilayah pedesaan jaringan drainase sebagian besar masih berupa saluran tanah. Sebagian besar jaringan drainase di Kota Balikpapan mengikuti pola jaringan jalan, dan bermuara pada alur sungai atau pantai.

Terdapat 86 (delapan puluh enam) saluran atau sungai yang langsung bermuara di teluk Balikpapan atau di Selat Makasar yang melayani pampatan Kota



Balikpapan. Tidak ada saluran primer drainase buatan yang dibuat khusus untuk mengalirkan air pematuan dan air buangan keluar daerah perkotaan. Semua saluran primer drainase yang ada sekarang merupakan saluran alam yang disesuaikan untuk kebutuhan saluran drainase.

Sistem drainase Kota Balikpapan dibagi menjadi 6 (enam) wilayah yaitu wilayah Balikpapan Barat dengan total panjang sungai 22.341 m, wilayah Sungai Wain dengan panjang sistem drainase 23.428 m, wilayah sumber yang mempunyai panjang 36.022 m, wilayah Balikpapan selatan yang dilayani dengan sungai-sungai kecil yang mempunyai outflow langsung ke Selat Makasar dengan total panjang drainase 110.869 m, wilayah manggar mempunyai panjang drainase 9.232 m dan wilayah Balikpapan Timur 23.981 m. Namun, kondisi drainase pada umumnya masih kotor oleh sampah dan sedimen sehingga seringkali terjadi penyumbatan pada daerah tertentu dan menyebabkan genangan jika hujan.

Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari kawasan perbukitan yang bergelombang +/-85% dan +/-15% merupakan daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai timur dan selatan wilayah Kota Balikpapan yang berpotensi terhadap banjir. Dengan kondisi yang berbukit-bukit maka diperlukan pengelolaan drainase yang cukup baik di Kota Balikpapan. Menurut dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2021 titik banjir di Kota Balikpapan adalah sebanyak 51 titik yang tersebar di kawasan Balikpapan Utara, Balikpapan Barat, Balikpapan Kota, Balikpapan Selatan, Balikpapan Tengah dan Balikpapan Timur dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.70 Titik Banjir Kota Balikpapan**

No.	Lokasi	No.	Lokasi
1	RT 2,3,6,7,13,14,28 Kel. Marga Sari (Jl. Sepaku)	26	Perum BDI
	RT 3,4,5 Kel. Baru Ilir (Jl. Rico)	27	Perum BDI RT27,28 Kel. Sungai Nangka
	RT 6,7,23 Kel. Baru Ilir	28	RT 51 Kel. Gn Bahagia dan RT 30 Kel. Sungai Nangka (Jalan M.T. Haryono)
	RT 14, 15 Kel. Marga Sari	29	RT 31,55 Kel. Graha Indah
2	RT 17, 19 Kel. Marga Sari	30	RT 8,9,54 Kel. Graha Indah
3	RT 26,28 Kel. Marga Sari	31	RT 2,56 Kel. Grah Indah
4	RT 27,39 Kel. Marga Sari	32	RT 6 Kel. Kariangau
5	RT 24 Kel. Marga Sari	33	RT 21 Kel. Karang Joang
6	RT 18 Kel. Marga Sari dan RT 43 Kel. Baru Ilir (Depan Blue Sky)	34	Jalan Poros KIK KM.13
7	RT 21 Kel. Marga Sari dan RT 51 Kel. Baru Ilir (Depan Diklat Pertamina)	35	Jalan Poros KIK KM.13
	RT 20 Margomulyo	36	Jalan Poros KIK KM.13
	Depan SDN 004 dan MTSN Kel. Muara Rapak	37	Jalan Poros KIK KM.13
	Simpang 4 Karang Rejo	38	Jalan Poros KIK KM.13
8	Simpang Jalan AMD	39	Jalan Poros KIK KM.13
	RT 23,28,29 Kel. Mekar Sari	40	RT 10 Kel. Karang Joang
9	Depan Puskib		RT 4 Kel. Karang Joang (Jl. Tepo)
10	RT 30 Kel. Batu Ampar		RT 5 Kel. Karang Joang (Jl. Tepo)
11	RT 48,60 Kel. Batu Ampar		RT 6 Kel. Karang Joang (Jl. Tepo)



No.	Lokasi	No.	Lokasi
12	RT 42,43 Kel. Graha Indah	41	RT 32 Kel. Sepinggan
13	Jalan Tumaritis	42	RT 5 Kel. Manggar
14	RT 8 Kel. Gn Samarinda Baru (Depsos)	43	RT 52 Kel. Manggar
15	RT 4 Kel. Gn. Samarinda Baru		RT 26 Kel. Manggar
16	RT 5 Kel. Gn. Samarinda Baru		RT 59 Kel. Manggar
	RT 6,9 Kel. Gn. Samarinda Baru	44	RT 32 Kel. Manggar
	RT 1,3 Kel. Gn. Samarinda Baru		RT 12 Kel. Lamaru
17	RT 26 Kel. Gn. Samarinda Baru	45	RT 9 Teritip Hilir
18	RT 16 Kel. Gn. Samarinda Baru	46	RT 9 Teritip Hulu
19	RT 14,15 Kel. Gn. Samarinda Baru		Titik Banjir Baru
20	RT 17,18 Kel. Gn. Samarinda Baru (perum Pemda)	47	Jalan depan kantor Sutindo
21	RT 15 Kel. Gn. Samarinda Baru (perum Pemda)	48	Jalan Soekarno-Hatta, Km 17, RT 37&39 Karang Joang
22	RT 48 Kel. Sumber Rejo dan RT 38 Kel. Gn Sari Ulu	49	Jalan Wonorejo Kelurahan Gunung Samarinda
23	RT 31 Kel. Gn. Sari Ulu dan RT 18 Kel. Damai Baru (Jalan Beler)	50	Kompleks Balikpapan Baru (BB) depan Pasar Segar
24	RT 32 Kel. Damai dan RT 11 Kel. Damai Baru (Jembatan PDAM)	51	Depan Asrama Haji s.d Kantor Camat Balikpapan Timur
25	RT 26 Kel. Sungai Nangka (Jl. M.T Haryono)		

Sumber: RPJMD Kota Balikpapan, 2016-2021

## J. Limbah Cair

Air limbah yang dimaksudkan yaitu air sisa buangan yang berasal dari rumah tangga yang terdiri dari kotoran-kotoran yang sebagian berbentuk kotoran dan sebagian lagi merupakan larutan tersuspensi. Jumlah air limbah tergantung jumlah pemakaian air bersih dalam rumah tangga. Apabila penggunaan air bersih yang cukup maka akan menghasilkan air limbah 100 ltr/hari/orang.

Layanan pengelolaan air limbah di Kota Balikpapan saat ini terdiri dari air limbah terpusat dengan jumlah sambungan rumah 1.308 SR yang dilayani oleh IPAL Margasari. Selebihnya dengan sistem setempat baik yang individu maupun komunal. Prasarana air limbah komunal terdapat di 29 lokasi yang tersebar di Kelurahan Klandasan Ulu (1 unit), Kelurahan Batu Ampar (2 unit), Kelurahan Gunung Bahagia (4 unit), Kelurahan Klandasan Ilir (1 unit), Kelurahan Margo Mulyo (6 unit), Kelurahan Damai (2 unit), Kelurahan Sepinggan (5 unit), Kelurahan Manggar (2 unit), Kelurahan Sungai Nangka (4 unit), Kelurahan Damai Baru (1 unit), Kelurahan Gunung Samarinda (1 unit).

## K. Persampahan

Sistem pengelolaan sampah yang dilakukan oleh penduduk Kota Balikpapan umumnya masih konvensional, dengan cara membuat lobang tempat sampah yang kemudian dilakukan pembakaran atau penimbunan. Di Kota Balikpapan, telah memiliki sistem pembuangan sampah yang relatif sudah teratur dan baik dengan dukungan sarana dan prasarana persampahan yang disiapkan pemerintah maupun masyarakat secara swadaya.



Masalah sampah di Kota Balikpapan saat ini menjadi masalah karena jumlah penduduk yang semakin bertambah, sehingga produksi sampah ikut meningkat. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya perencanaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Sistem pengelolaan sampah yang akan ditetapkan di wilayah Kota Balikpapan, yaitu masyarakat membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan selanjutnya oleh Pemerintah/Swasta sampah yang ada di TPS diangkut menuju ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Guna mendukung sistem ini diperlukan :

- Setiap bangunan rumah tangga disediakan pewadahan/bak sampah
- Pelayanan disediakan pewadahan yang disesuaikan dengan volume sampah.
- Penyediaan gerobak pengangkut sampah guna mengangkut sampah ke TPS yang dilakukan oleh masyarakat.
- Penyediaan Dump Truck untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA yang dikelola oleh Pemerintah atau Swasta.

Pengelolaan sampah secara garis besar saat ini dilayani TPA Manggar dengan sistem *sanitary landfill*. Jumlah sampah terangkut ke TPA klo dirata – ratakan dalam 1 tahun yaitu sebesar 374,77 ton/hari. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel III.71 Jumlah Sampah Yang Masuk ke TPA Manggar Per Bulan di Kota Balikpapan Tahun 2022**

Bulan	Jumlah Sampah (Ton/Hari)
Januari	383,94
Februari	372,39
Maret	385,91
April	404,74
Mei	386,90
Juni	361,38
Juli	372,70
Agustus	381,92
September	384,73
Oktober	358,97
November	354,53
Desember	349,62
<b>Rata - Rata</b>	<b>374,77</b>

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka, 2023 (BPS)







# BAB 4

## ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Dalam mencapai tujuan pembangunan, ketergantungan antara manusia dan alam harus diperhatikan. Manusia hidup dan sangat bergantung pada sumber daya yang disediakan oleh alam dalam biosfer. Demikian pula, proses ekologis juga tidak dapat dijelaskan tanpa mempertimbangkan pengaruh manusia (Folke dkk., 2016). Pada Gambar 4.1, diilustrasikan bahwa kondisi lingkungan dalam biosfer merupakan dasar dalam menopang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dalam pencapaian kesejahteraan manusia. Kondisi lingkungan yang sehat dan bersih, disertai dengan daya dukung lingkungan yang baik, akan mampu menciptakan masyarakat yang sehat dan bahagia. Kondisi masyarakat yang sehat dan bahagia akan mendukung aktivitas manusia sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mendukung terciptanya kesejahteraan hidup manusia yang berkelanjutan.



Sumber: Folke, dkk., 2016

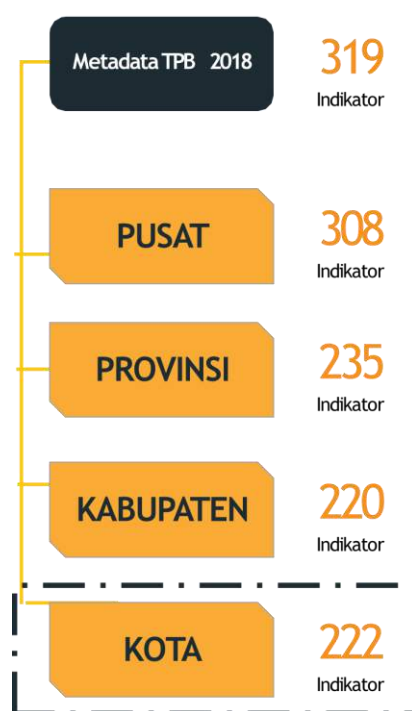
**Gambar 4.1 Kaitan Antara Aspek Ekonomi, Sosial, Lingkungan dengan Pencapaian TPB**

Kaitan antara aspek-aspek tersebut dijadikan sebagai pilar utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Keempat pilar tersebut diuraikan dalam 17 Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dicanangkan untuk menjadi target bagi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berperan sebagai tolok ukur perumusan kebijakan, rencana, dan program (KRP) yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Masing-masing tujuan pada TPB memiliki indikator yang berperan sebagai instrumen penilaian terhadap pencapaian target TPB.

#### 4.1 KONDISI UMUM CAPAIAN TARGET TPB

Di Indonesia, terdapat 319 indikator dan 169 target untuk pencapaian 17 TPB. Upaya pencapaian indikator TPB tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota.



Gambar 4.2 Target dan Indikator TPB sesuai Perpres 59/2017

Di Kota Balikpapan bila dilihat dari kewenangan sesuai dengan target dan indikator TPB sesuai Perpres 59/2017 yaitu 222 indikator. Berdasarkan pembagian kewenangan dan kekhususan indikator terkait kondisi geografis, terdapat 195 indikator TPB yang relevan bagi Kota Balikpapan. Dalam analisis ini, capaian setiap indikator TPB di Kota Balikpapan dibandingkan dengan target nasional tahun 2019 (dalam Lampiran Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB).

Dari 195 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan 70,59% yang diketahui capaiannya, sedangkan 24,10% masih belum dapat diketahui capaiannya karena tidak tersedianya data. Terdapat 4 (empat) kategori capaian TPB untuk setiap indikator, yaitu “telah mencapai target”, “belum mencapai target”, “belum dilaksanakan”, dan “tidak ada data”. Pengkategorian tersebut didasarkan pada target nasional pada Lampiran Perpres Nomor 59 Tahun 2017.

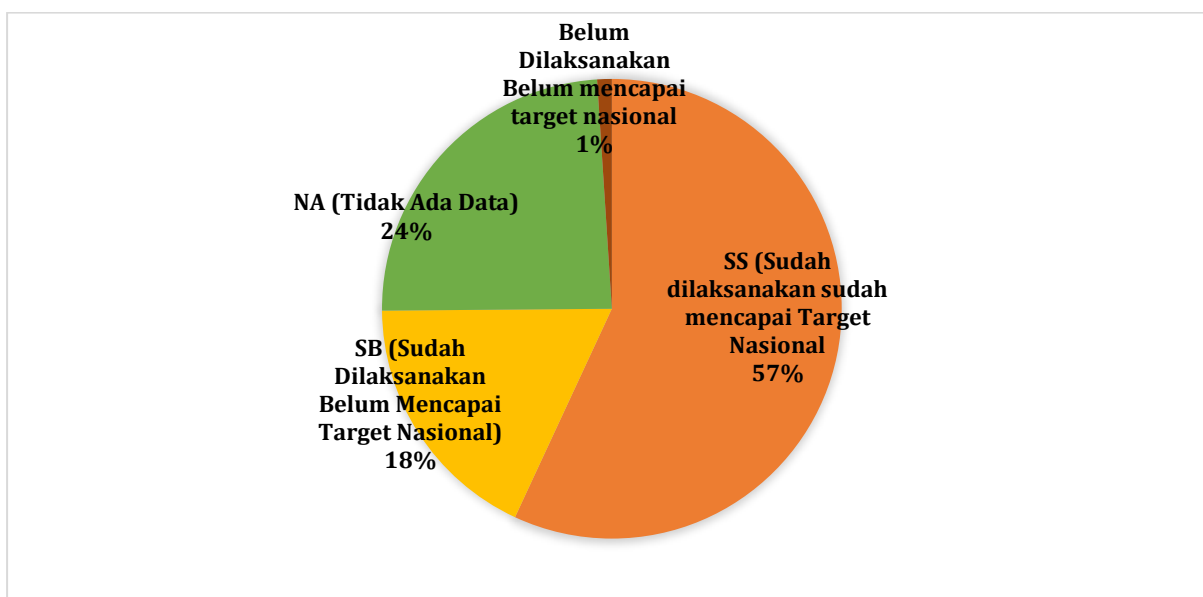
Kategori “telah mencapai target” dan “belum mencapai target” diberikan pada indikator yang telah dilaksanakan dengan capaian yang dibandingkan dengan target nasional sebagaimana tercantum pada Perpres 59 Tahun 2017. Sementara indikator “belum dilaksanakan” merupakan indikator yang tidak sampai saat ini belum dilaksanakan atau target capaiannya belum terakomodir dalam pelaksanaan program kegiatan di RPJMD Kota Balikpapan. Kategori “tidak ada data” diberikan pada indikator yang tidak tersedia data capaiannya.

**Tabel IV.1 Capaian TPB di Kota Balikpapan**

SS (Sudah dilaksanakan sudah mencapai Target Nasional)	SB (Sudah Dilaksanakan Belum Mencapai Target Nasional)	Belum Dilaksanakan Belum mencapai target nasional	NA (Tidak Ada Data)	Total
26	10		12	48
12	1	1	6	20
18	6		13	37
55	18	1	16	90
<b>111</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>47</b>	<b>195</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Terdapat 57% dari 195 indikator TPB di Kota Balikpapan yang telah mencapai target nasional pada tahun 2022. Untuk TPB yang sudah dilaksanakan belum mencapai target nasional di Kota Balikpapan sebesar 18% dan 1% untuk TPB yang belum dilaksanakan serta 24% TPB yang tidak ada data.



**Gambar 4.3 Grafik Pencapaian TPB di Kota Balikpapan Tahun 2022**





Untuk capaian TPB per masing – masing di Kota Balikpapan akan diuraikan dibawah ini :

TPB 1	Tanpa Kemiskinan	Jumlah indikator berjumlah 24 dengan indikator yang sudah tercapai di Kota Balikpapan sebesar 13 atau sekitar 54 %, indikator belum tercapai sebanyak 5 atau sekitar 20,83% dan 6 indikator yang tidak ada data atau sekitar 25%.
TPB 2	Tanpa Kelaparan	Jumlah indikator berjumlah 11, di Kota Balikpapan indikator yang sudah tercapai 5 atau sekitar 45,45%, indikator belum tercapai berjumlah 4 atau sekitar 36,36%.
TPB 3	Kehidupan sehat dan Sejahtera	Jumlah indikator berjumlah 29, di Kota Balikpapan indikator yang sudah tercapai 21 atau sekitar 72,41%, indikator belum tercapai berjumlah 6 atau sekitar 20,69% dan indikator yang tidak ada data 3 atau sekitar 10,34%.
TPB 4	Pendidikan Berkualitas	Jumlah indikator berjumlah 13, di Kota Balikpapan indikator yang sudah tercapai 10 atau sekitar 76,92%, indikator belum tercapai berjumlah 1 atau sekitar 7,69% dan indikator yang tidak ada data 2 atau sekitar 15,38%.
TPB 5	Kesetaraan Gender	Jumlah indikator berjumlah 14, di Kota Balikpapan indikator yang sudah tercapai 6 atau sekitar 42,86%, indikator belum tercapai berjumlah 3 atau sekitar 21,43% dan indikator tidak ada data 5 atau sekitar 35,71%.
TPB 6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Jumlah indikator berjumlah 14, di Kota Balikpapan indikator yang sudah tercapai 6 atau sekitar 42,86%, indikator belum tercapai berjumlah 4 atau sekitar 28,57% dan indikator tidak ada data 5 atau sekitar 35,71%.
TPB 7	Energi Bersih dan Terjangkau	Jumlah indikator 2, di Kota Balikpapan indikator yang sudah tercapai tidak ada, indikator yang belum tercapai berjumlah 1 atau sekitar 50% dan indikator tidak ada data berjumlah 1 atau sekitar 50%.
TPB 8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah indikator 17, di Kota Balikpapan indikator yang sudah tercapai 10 atau sekitar 58,82%, indikator belum tercapai berjumlah 6 atau sekitar 35,29% dan indikator tidak ada data berjumlah 2 atau sekitar 11,76%.
TPB 9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Jumlah indikator 11, di Kota Balikpapan indikator yang sudah tercapai 7 atau sekitar 63,64%, indikator yang belum tercapai berjumlah 1 atau sekitar 9,09% dan indikator tidak ada data berjumlah 3 atau sekitar 27,27%.

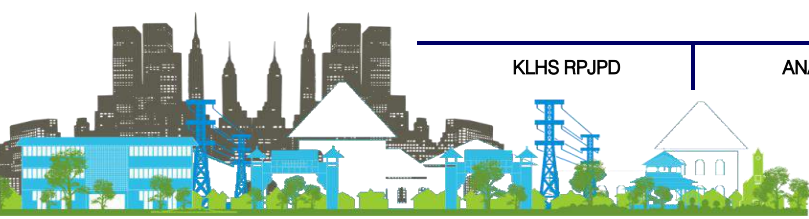


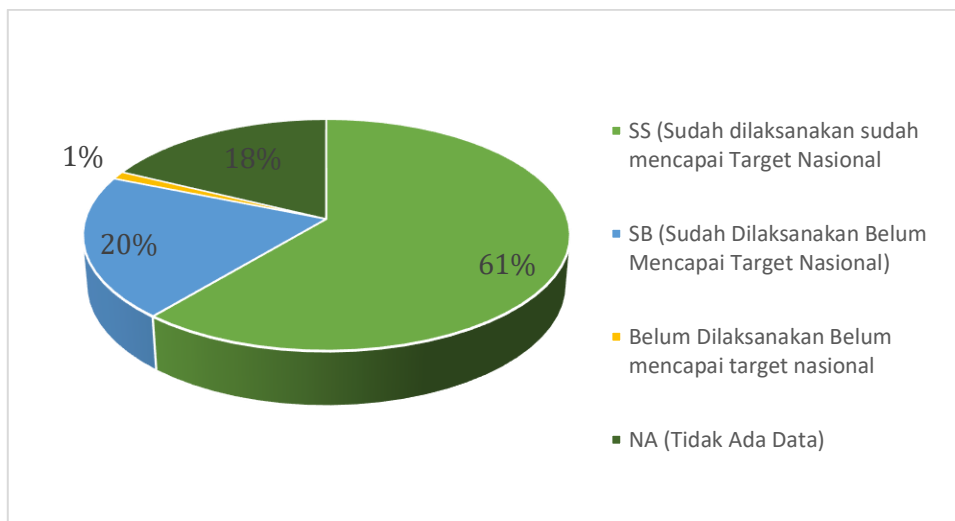
TPB 10	Berkurangnya Kesenjangan	Jumlah Indikator 7, di Kota Balikpapan indikator yang sudah tercapai berjumlah 2 atau sekitar 28,57%, indikator tidak ada data berjumlah 2 atau sekitar 28,57%.
TPB 11	Kota dan Permukiman yang berkelanjutan	Jumlah indikator 9, di Kota Balikpapan indikator yang sudah tercapai berjumlah 7 atau sekitar 58,33%, indikator yang belum tercapai 1 atau sekitar 8,33% dan indikator tidak ada data berjumlah 4 atau sekitar 33,33%.
TPB 12	Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab	Jumlah indikator 5, di Kota Balikpapan indikator yang sudah tercapai berjumlah 2 atau sekitar 40% dan indikator tidak ada data berjumlah 3 atau sekitar 60%.
TPB 13	Penanggulangan Perubahan Iklim	Jumlah indikator 2, di Kota Balikpapan indikator yang sudah tercapai 2 atau sekitar 100%.
TPB 14	Ekosistem Laut	Jumlah Indikator 2
TPB 15	Ekosistem Darat	Jumlah Indikator 4, di Kota Balikpapan indikator yang sudah tercapai 1 atau sekitar 25%, Indikator belum tercapai berjumlah 1 atau sekitar 25% dan indikator tidak ada data 1 atau sekitar 25%.
TPB 16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang tangguh	Jumlah indikator 16, di Kota Balikpapan yang sudah tercapai 12 atau sekitar 75%, indikator yang belum tercapai berjumlah atau sekitar 12,50%.
TPB 17	Kemitraan untuk mencapai target	Jumlah indikator 9, di Kota Balikpapan indikator yang sudah tercapai 7 atau sekitar 77,78%, indikator yang belum tercapai 3 atau sekitar 33,33% dan indikator tidak ada data 4 atau sekitar 44,44%.

## 4.2 CAPAIAN TARGET INDIKATOR TPB BERDASARKAN PILAR

### 4.2.1 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Sosial

Terdapat 5 TPB yang termasuk dalam pilar sosial, yaitu TPB 1 (Tanpa Kemiskinan), TPB 2 (Tanpa Kelaparan), TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), TPB 4 (Pendidikan Berkualitas), dan TPB 5 (Kesejahteraan Gender). Kelima TPB dalam pilar sosial tersebut terdiri dari 90 indikator yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan. Persentase capaian indikator TPB Pilar Sosial di Kota Balikpapan ditunjukkan pada **Gambar 4.4** sebagian besar indikator TPB Pilar Sosial di Kota Balikpapan telah mencapai target nasional, yaitu sebesar 61,11 % telah mencapai target nasional, 20% sudah dilaksanakan belum mencapai target nasional, 1,11% belum dilaksanakan dan 17,78% tidak ada data. Indikator TPB Pilar Sosial yang belum mencapai target nasional dan belum dilaksanakan dan tidak ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kota Balikpapan.

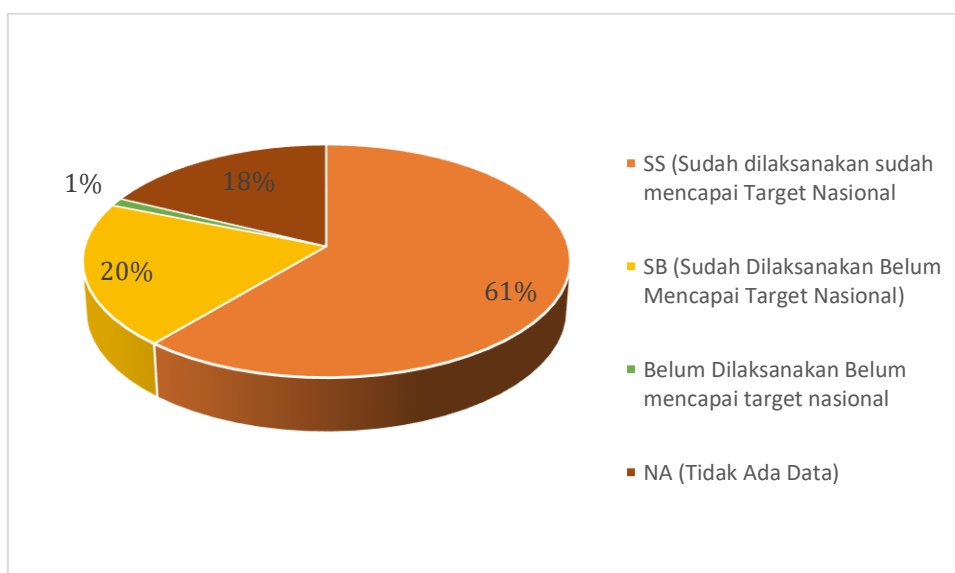




**Gambar 4.4 Grafik Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Sosial**

#### 4.2.2 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Ekonomi

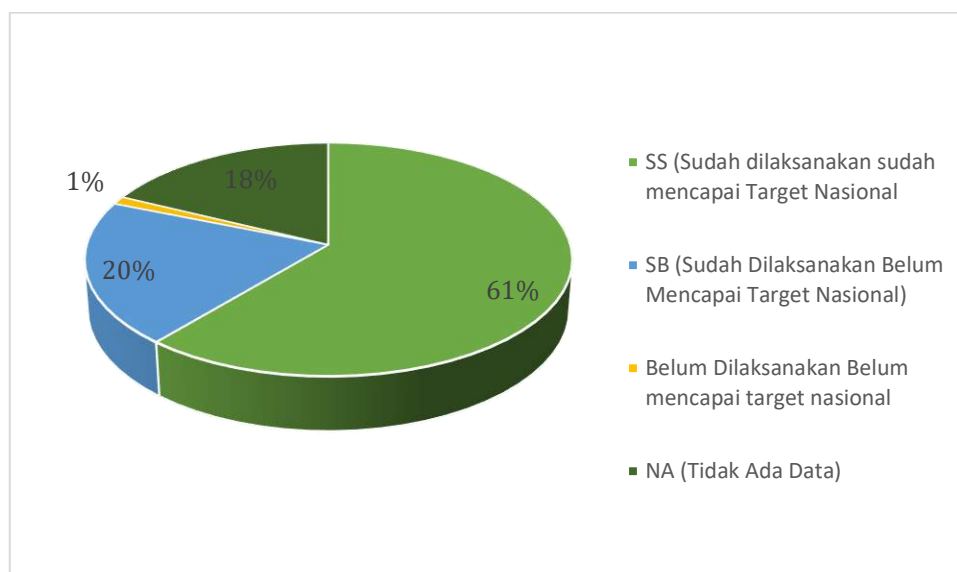
Terdapat 5 TPB yang termasuk dalam pilar ekonomi, yaitu TPB 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), TPB 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan), dan TPB 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Jumlah indikator TPB dalam Pilar Ekonomi yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan berjumlah 48 indikator. Persentase capaian indikator TPB Pilar Ekonomi di Kota Balikpapan ditunjukkan pada **Gambar 4.5** sebagian besar indikator TPB Pilar Ekonomi di Kota Balikpapan telah mencapai target nasional, yaitu sebesar 54,17% telah mencapai target nasional, 20,83% sudah dilaksanakan belum mencapai target nasional, dan 25% tidak ada data. Indikator TPB Pilar Ekonomi yang belum mencapai target nasional dan tidak ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kota Balikpapan.



**Gambar 4.5 Grafik Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Ekonomi**

### 4.2.3 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup

Terdapat 6 TPB yang termasuk dalam pilar lingkungan hidup, yaitu TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), TPB, 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), TPB 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim), TPB 14 (Ekosistem Lautan), dan TPB 15 (Ekosistem Daratan). Namun, TPB 14 tidak menjadi kewenangan Kota Balikpapan, melainkan merupakan kewenangan provinsi sehingga indikatornya tidak diperhitungkan dalam analisis ini. Kelima TPB dalam pilar lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan terdiri dari 37 indikator. Persentase capaian indikator TPB Pilar Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan ditunjukkan pada **Gambar 4.6** sebagian besar indikator TPB Pilar Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan telah mencapai target nasional, yaitu sebesar 48,65% telah mencapai target nasional, 16,22% sudah dilaksanakan belum mencapai target nasional, dan 35,14% tidak ada data. Indikator TPB Pilar Lingkungan Hidup yang belum mencapai target nasional dan tidak ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kota Balikpapan.



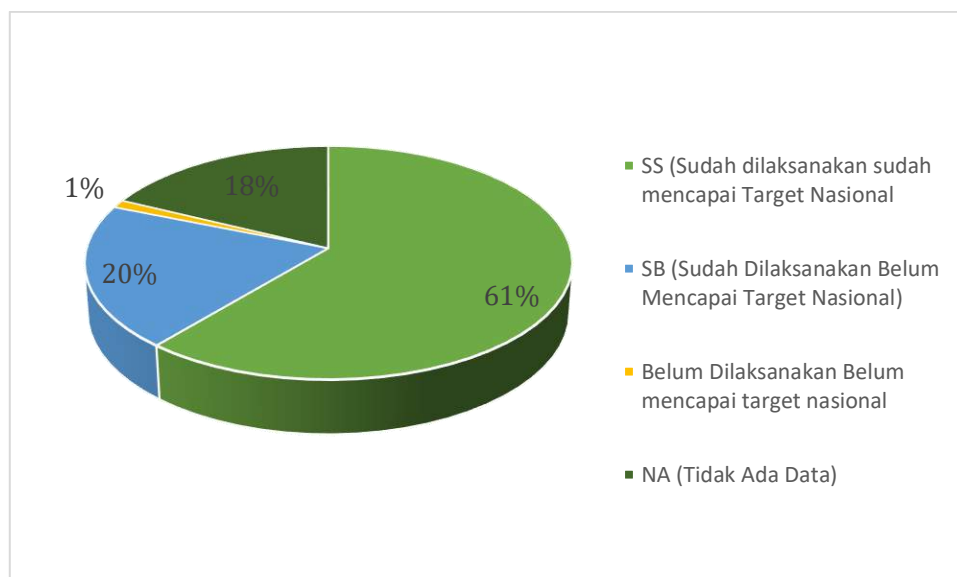
**Gambar 4.6** Grafik Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup

### 4.2.4 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola

TPB 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) merupakan satu-satunya TPB yang termasuk dalam pilar hukum dan tata kelola kelembagaan. TPB 16 ini terdiri dari 20 indikator. Persentase capaian indikator TPB pilar hukum dan tata kelola kelembagaan di Kota Balikpapan ditunjukkan pada **Gambar 4.7** sebagian besar indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola di Kota Balikpapan telah mencapai target nasional, yaitu sebesar 60% telah mencapai target nasional, 5% sudah dilaksanakan belum mencapai target nasional, 5% belum dilaksanakan dan 30% tidak ada data. Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola yang belum mencapai target nasional dan tidak ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kota Balikpapan.







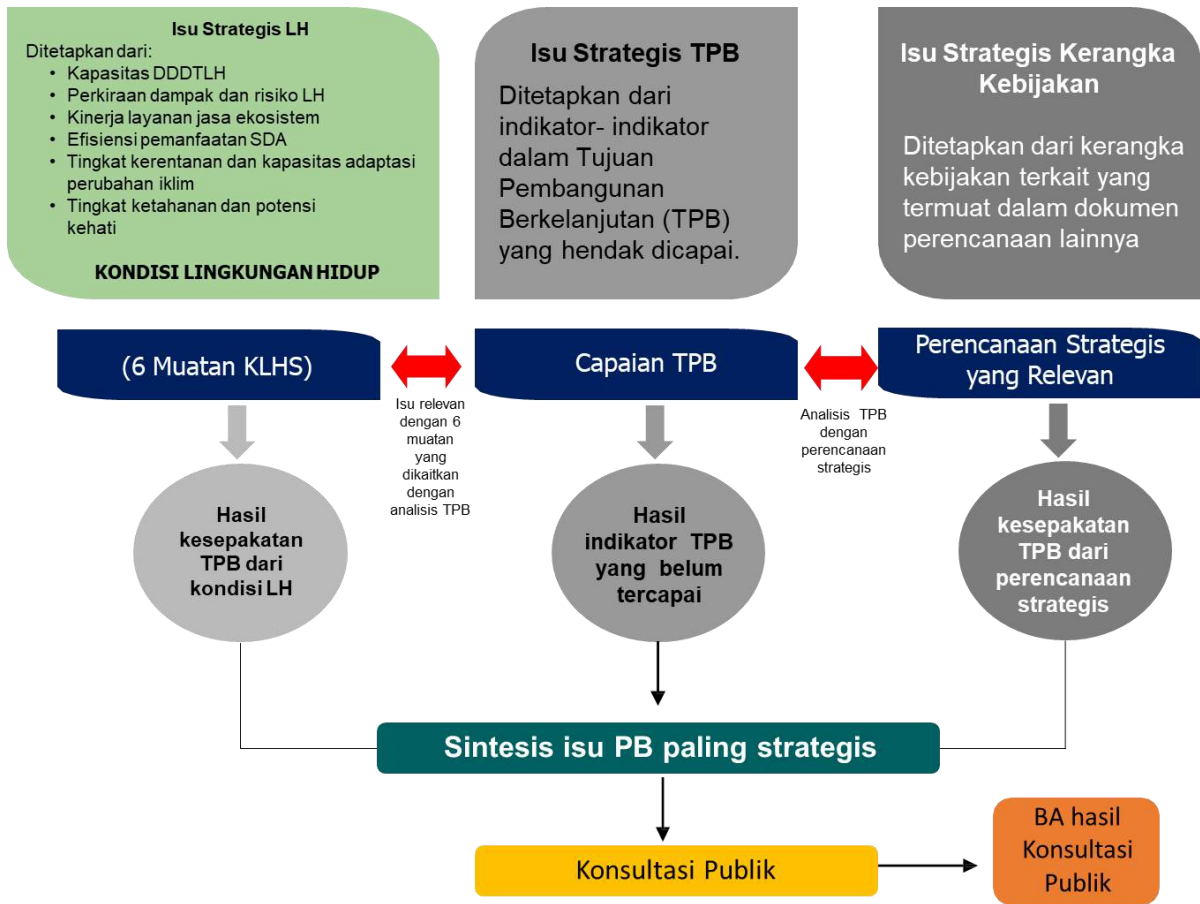
**Gambar 4.7 Grafik Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola**

### 4.3 RUMUSAN ISU PRIORITAS DI KOTA BALIKPAPAN

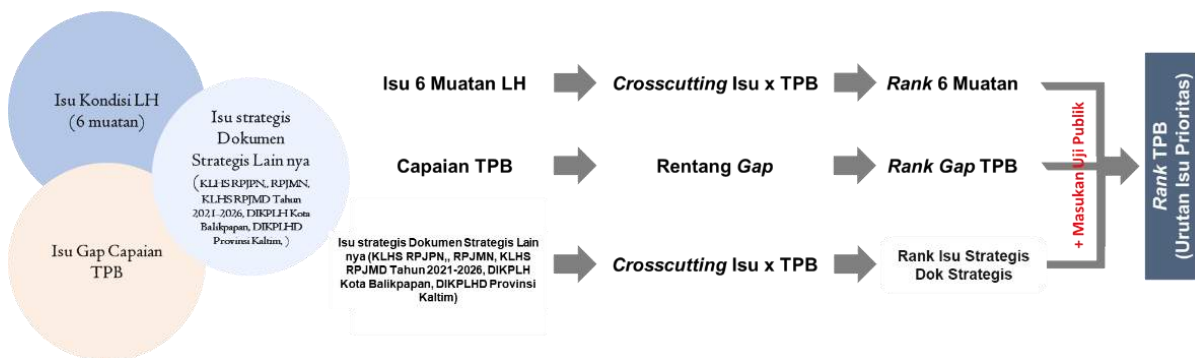
#### 4.3.1 Proses Identifikasi dan Perumusan Isu Prioritas

Pengkajian tujuan pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan kondisi sosial politik, ekonomi, lingkungan hidup, serta hukum dan tata kelola kelembagaan yang terjadi saat ini. Dalam kaitannya dengan pencapaian target TPB, keempat kondisi tersebut merupakan kondisi awal (*baseline*) dalam mencapai target dari setiap indikator TPB yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan. Berdasarkan kajian pada 4 Pilar, sebanyak 57% indikator TPB di Kota Balikpapan telah mencapai target nasional, sedangkan masih terdapat 18% indikator TPB yang belum mencapai target nasional, 1% belum dilaksanakan belum mencapai target nasional dan 24% tidak ada data.

Adanya kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dengan target TPB yang harus dicapai, menjadi salah satu dasar untuk perumusan isu prioritas. Selain memperhitungkan gap capaian TPB terhadap target nasional, perumusan isu prioritas juga mempertimbangkan isu dari kondisi muatan lingkungan hidup, isu strategis dari dokumen strategis lainnya, dan isu dari masukan uji publik. Kerangka analisis dan pemeringkatan isu TPB untuk menentukan isu prioritas di Kota Balikpapan ditunjukkan pada **Gambar 4.8** dan **Gambar 4.9** dibawah ini.



**Gambar 4.8 Kerangka Pikir Penentuan Isu PB Strategis Dalam KLHS RPJPD**



**Gambar 4.9 Kerangka Analisis dan Pemeringkatan Isu TPB di Kota Balikpapan**

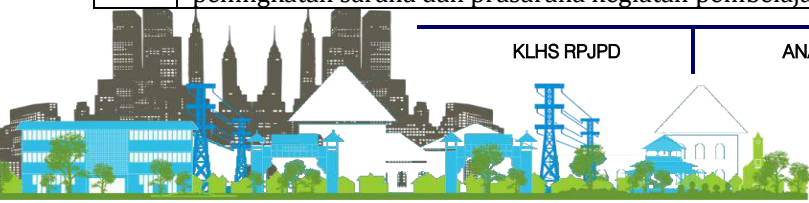
### 4.3.2 Longlist Isu dan Daftar Isu Pendek

Hasil identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan di Kota Balikpapan yang telah dilakukan Konsultasi Publik pada Tanggal 18 September 2023 menghasilkan 126 isu panjang. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel IV.2 dibawah ini.



**Tabel IV.2 Longlist Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Pemusatan Isu**

No	Longlist Isu KLHS RPJPD Kota Balikpapan	Pemusatan Isu
1	Stabilitas Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan	Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
2	Dengan kemajuan dan teknologi di Kota Balikpapan dan bertambahnya penduduk jangan sampai semakin banyaknya pengangguran di Kota Balikpapan	
3	TPT selalu berada di atas rata rata namun angka kemiskinan kita juga tinggi	
4	Pengembangan Industri, Inovasi dan Infrastruktur	
5	Untuk mencapai Visi Indonesia 2045, modal ekonomi busines-as-usual yang masih berbasis eksploitasi sumber daya alam tidak lagi sesuai untuk diterapkan	
6	Middle Income Trap	
7	Masih terdapat masyarakat Kota Balikpapan yang hidup di bawah garis kemiskinan	
8	Masih terdapatnya kesenjangan ekonomi jika dilihat dari Rasio Gini Kota Balikpapan	
9	Masih perlunya peningkatan kerjasama antar pihak dalam pemenuhan kelengkapan data untuk pengukuran capaian pembangunan daerah	
10	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	
11	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	
12	Salah satu strategi Transformasi Ekonomi adalah melalui Ekonomi Hijau, Indonesia penting untuk menerapkan Ekonomi Hijau jika ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan	
13	Ekonomi sirkular, sebagai arah kebijakan ekonomi hijau, diterapkan melalui efisiensi penggunaan sumber daya, perpanjangan masa pakai produk, dan pemanfaatan kembali sisa produk dan konsumsi	
14	Adanya aktivitas yang menjadi kegiatan wisata yang belum menjadi objek pembinaan pemerintah Kota Balikpapan.	
15	Pengembangan Industri, Inovasi dan Infrastruktur	
16	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	
17	Pembangunan Kota Nyaman Huni dan Kesiapan Sebagai Mitra IKN	
18	Dampak Lingkungan Balikpapan sebagai Kota Penyangga IKN (Ibu Kota Negara)	
19	Dampak Pindahan Ibukota Nusantara ke Pulau Kalimantan	
20	Demografi (Perpindahan Penduduk) - Pertumbuhan dan Migrasi Penduduk	
21	Kemacetan (jumlah jalan tidak signifikan dengan jumlah penambahan kendaran dan jumlah penduduk di Kota Balikpapan)	
22	Kemacetan	
23	Belum tersedianya Sektor pelayanan publik untuk angkutan umum transportasi publik di Kota Balikpapan agar kemacetan di Kota Balikpapan bisa di atasi	
24	Penerapan kota kompak dengan implementasi integrasi aktivitas dan transportasi antar moda atau Transit Oriented Development (TOD)	
25	Pengembangan transportasi massal yang handal dan efisien	
26	Ketersediaan perumahan untuk penyangga IKN	
27	Balikpapan sebagai Kawasan cepat tumbuh karena menjadi penyangga IKN	
28	Penataan Kawasan kumuh	
29	Akses, kualitas daya saing (Pelayanan pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Kesempatan Kerja dan Kompetensi SDM) dan Modal Sosial dan Kondusifitas Wilayah	Penguatan daya saing SDM dan perlindungan sosial
30	Pendidikan Karakter dan Budaya	
31	Pembangunan yang Responsif Gender (Sudah baik skala Kalimantan Timur namun masih rendah dari Skala Nasional)	
32	Pembangunan inklusif (Ramah anak dan ramah difabel)	
33	Tenaga Kerja yang terbatas	
34	Memaksimalkan penguasaan bekerja dari para pekerja	
35	Masih terdapat masyarakat penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
36	Masih terdapat anak putus sekolah, nilai IPM yang belum optimal dan perlunya peningkatan sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran	



No	Longlist Isu KLHS RPJPD Kota Balikpapan	Pemusatan Isu	
37	Masih terdapat penduduk yang belum memiliki pekerjaan dan mengalami pemutusan hubungan kerja terpuruknya bidang pekerjaan sektor informal selama pandemi Covid 19		
38	Masih diperlukannya peningkatan kapasitas pelaku usaha dan kualitas produk serta perlunya peningkatan akses pasar bagi pelaku usaha		
39	Ketahanan Sosial-Ekologi		
40	Meningatkan SDM Berkualitas dan Berdayasaing		
41	Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa		
42	Pembangunan" yang ada di Kota Balikpapan tidak mendukung terhadap ramah disabilitas dan dari segi Sarana Prasarana yang ada juga tidak mendukung ramah disabilitas		
43	Masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk penegakan hukum		
44	Terdapat Perbedaan kualitas dan kuantitas sekolah Negeri dan Swasta		
45	Belum adanya pemerataan bagi sekolah SLB dan hanya ada di Balikpapan Selatan, dan berharap di setiap Kecamatan ada untuk anak" yang memiliki kebutuhan Khusus (SLB)		Pelayanan Kesehatan, Kesejahteraan , Pendidikan Berkualitas , dan Kesetaraan Gender.
46	(Pelayanan pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Kesempatan Kerja dan Kompetensi SDM)		
47	Masih sedikitnya jumlah sekolah di Kota Balikpapan (khususnya SMP ke SMA sehingga terdapat permasalahan pada masyarakat yang anaknya tidak bisa sekolah)		
48	Belum optimalnya penyelesaian permasalahan dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak		
49	Masih tingginya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan energi dengan sumber bahan baku energi yang tidak terbarukan Belum maksimalnya pengelolaan sumberdaya energi terbarukan		
50	Belum meratanya pembangunan RS maka dari itu akan di bangun RS di balikpapan Timur dan Utara karena masih ada lahan yang dapat di kembangkan		
51	Wabah Difteri		
52	Permasalahan dalam penanganan ODGJ tidak memiliki tempat dan hanya ada di Samarinda, dan berharap dibangun RS ODGJ di Kota Balikpapan sehingga mempermudah dan memaksimalkan pelayanan, jika tidak bisa dibangun, mohon untuk RS yang ada dibuatkan ruang untuk penanganan khusus ODGJ		
53	Pelayanan Kesehatan, Kesejahteraan, Pendidikan Berkualitas dan Kesetaraan Gender		
54	Perlunya peningkatan SDM dan Fasilitas bidang Kesehatan, peningkatan jumlah peserta BPJS Mandiri dan Pekerja		
55	Kurangnya tenaga pengawas lingkungan hidup		
56	Pengentasan Kemiskinan dan Kelaparan		
57	Tata Kelola di Indonesia Masih Relative Lemah	Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan adaptif berbasis teknologi.	
58	Hukum Berkeadilan, Ketahanan Nasional dan Demokrasi Substansi		
59	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Adaptif Berbasis Teknologi		
60	Penguatan partisipasi dan Kolaborasi antara swasta dengan pemerintah maupun dari masyarakat dengan pemerintah	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan	
61	Masih terdapat warga kota yang belum memperoleh layanan air bersih Masih terbatasnya kapasitas sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan air baku		
62	Perwujudan Kota dan Permukiman Berkelanjutan dan Peningkatan Pelayanan Air bersih, Sanitasi, Energi Bersih dan Konsumsi dan Produksi yang bertanggung Jawab		
63	Ketersediaan air bersih dan pelayanan air bersih		
64	Desalinasi air		
65	Pemanfaatan air tanah dan penurunan level muka air tanah		
66	Keterbatasan Ketersediaan Air Baku		
67	Penurunan kualitas air;		
68	Tercemarnya Air Permukaan		
69	Penurunan Kualitas Air Sungai		
70	Eksplorasi Air Tanah Secara Berlebihan		





No	Longlist Isu KLHS RPJPD Kota Balikpapan	Pemusatan Isu
71	Pencemaran Laut Akibat Sampah dan Ceceran Batubara	
72	Pencemaran sungai oleh e-coli;	
73	Persoalan Sanitasi Limbah Domestik	
74	Pencemaran Lingkungan dan Persampahan;	
75	Pencemaran lingkungan oleh limbah rumah tangga;	
76	IPAL industri belum terpantau dengan baik;	
77	Pembuangan sampah sembarangan di pinggir jalan, di jembatan, tepi sungai, sawah dan lainnya;	
78	Produksi sampah rumah tangga yang tinggi;	
79	Kebijakan Reformasi pengelolaan Sampah, Limbah Cair, Limbah B3 dan Limbah Medis yang terintegrasi dari hulu ke hilir dengan penekanan pada perubahan perilaku masyarakat	
80	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai;	
81	Kurangnya tempat pengelolaan sampah yang memadai;	
82	Masih tingginya produksi timbulan sampah domestik warga	
83	Pengelolaan limbah yang kurang baik;	
84	Tidak Terkendalinya Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Domestik	
85	Persampahan	
86	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah	
87	Belum Berhasilnya Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber	
88	Belum Terkelolanya Limbah B3 Rumah Tangga	
89	Timbulan Sampah di Pesisir/Laut	
90	Ekosistem dan Perubahan Iklim	
91	Kebakaran area tambang Batubara	
92	Banjir	
93	Semburan Gas Liar Saat Pengeboran Air Tanah	
94	Meningkatnya bencana kebakaran lahan	
95	Tanah Longsor	
96	Tingginya Intensitas Bencana Kebakaran	
97	Perubahan Iklim di Kota Balikpapan	
98	Bencana Alam Kejadian bencana alam;	
99	Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap mitigasi bencana;	
100	Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;	
101	Dapat menanggulangi dari Bencana Banjir, Kebakaran, longsor, kejadian kecelakaan dengan serius agar Kota Balikpapan bisa menjadi kota yang layak aman dan nyaman	
102	Masih perlunya peningkatan koordinasi dan perencanaan penanganan bencana akibat perubahan iklim terutama di bidang kesehatan	
103	Banjir – air- kebutuhan pelayanan public- regulasi – kebakaran lahan	
104	Masih terdapat permukiman kumuh dan warga yang tidak memiliki rumah Masih terjadinya banjir diwilayah Kota Balikpapan adanya pembukaan/pengupasan lahan yang tidak terpantau	
105	Kebijakan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risikon bencana dan dampak perubahan iklim dalam upaya pengurangan dampak kerugian ekonomi	
106	Upaya Penurunan Emisi GRK Dilakukan Melalui Pembanguann Rendah Karbon yang difokuskan pada sektor Prioritas seperti lahan, energi dan limbah	
107	Pembangunan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi GRK	
108	Tingginya jumlah kendaraan bermotor penyumbang emisi;	
109	Penurunan kualitas udara;	
110	Tingginya risiko bencana akibat perubahan iklim	
111	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan	

peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim

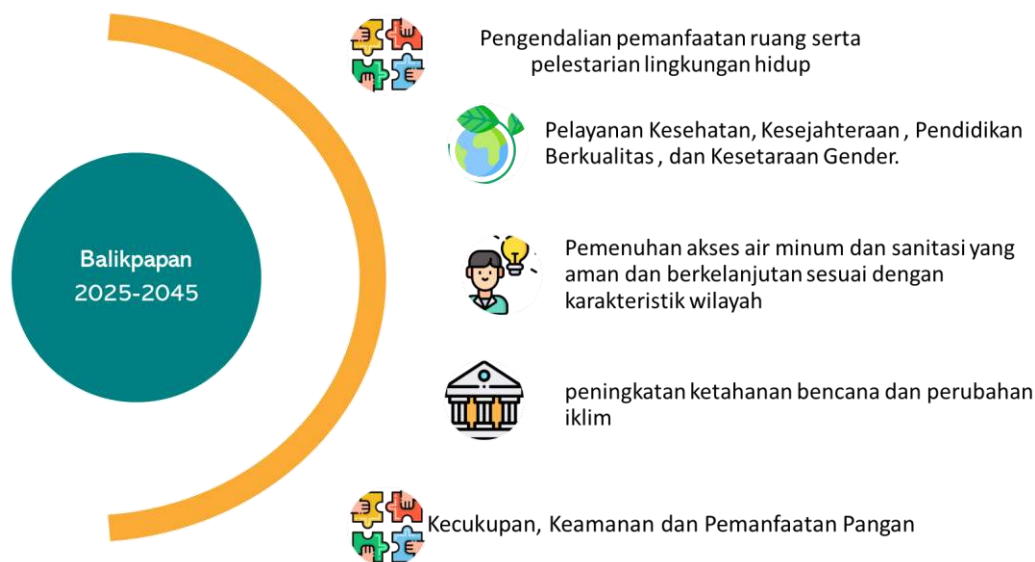


No	Longlist Isu KLHS RPJPD Kota Balikpapan	Pemusatan Isu
112	Pengukuran upaya pengurangan ancaman dan pemanfaatan kehati secara berkelanjutan dengan menggunakan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPK)	Pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup
113	Kerusakan Sumber Daya Alam Kerusakan Keanekaragaman Hayati	
114	Pencemaran atau Kerusakan Liingkungan Hidup yang terjadi berdampak signifikan	
115	Degradasi Kawasan Pesisir Timur Balikpapan	
116	Kerusakan mangrove	
117	Pengupasan Lahan yang tidak terkendali	
118	Masih adanya lahan kritis yang berada diluar kawasan hutan;	
119	Alih fungsi lahan perumahan	
120	Pelanggaran tata ruang atau pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya;	
121	Pengupasan Lahan yang Tidak Terkendali	
122	Masih adanya aktivitas pembangunan yang tidak memepertimbangkan DDTLH Kota Balikpapan	
123	Masih banyak perusahaan yang sudah memiliki izin lingkungan tetapi tidak melakukan kewajibannya sesuai izin;	
124	Tingginya degradasi dan kerentanan ekosistem darat, laut, dan pesisir	
125	Kurang optimalnya efisiensi pengaturan tata air dan banjir	
126	Rendahnya Jasa ekosistem penyedia air	

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Dari hasil 126 daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan kemudian dilakukan pemusatan isu berdasarkan kesamaan substansi dan menghasilkan 9 isu. Kemudian isu tersebut dilakukan crosscutting dan menghasilkan daftar pendek isu Pembangunan Berkelanjutan di Kota Balikpapan yaitu :





### 4.3.3 Gap Capaian TPB

Analisis capaian TPB dilakukan dengan menghitung selisih antara capaian indikator TPB di Kota Balikpapan terhadap target capaian RPJMN tahun 2024. Semakin besar selisih/gap capaian indikator (belum mencapai target nasional), maka semakin berpotensi menjadi isu prioritas.

**Tabel IV.3 Analisis Gap Capaian TPB di Kota Balikpapan**

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator (Total)	Indikator Tidak Ada Data (NA)		Indikator Belum Tercapai		Total Skor	Rank Prioritas Capaian TPB
			Jumlah	%	Jumlah	%		
1	Tanpa Kemiskinan	24	6	25,00	5	20,83	45,83	8
2	Tanpa Kelaparan	11		0,00	4	36,36	36,36	9
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	30	3	10,00	6	20,00	30,00	10
4	Pendidikan Berkualitas	13	2	15,38	1	7,69	23,08	12
5	Kesetaraan Gender	14	5	35,71	3	21,43	57,14	4
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	15	5	33,33	4	26,67	60,00	2
7	Energi Bersih dan Terjangkau	2	1	50,00		0,00	50,00	6
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	18	2	11,11	6	33,33	44,44	7
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	11	3	27,27	1	9,09	36,36	9
10	Berkurangnya Kesenjangan	7	2	28,57		0,00	28,57	11
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	12	4	33,33	1	8,33	41,67	5
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	5	3	60,00		0,00	60,00	3
13	Penanggulangan Perubahan Iklim	2						13
14	Ekosistem Laut	2						13
15	Ekosistem Darat	4	1	25,00	1	25,00	50,00	6
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	16	6	37,50	2	12,50	50,00	6

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator (Total)	Indikator Tidak Ada Data (NA)		Indikator Belum Tercapai		Total Skor	Rank Prioritas Capaian TPB
			Jumlah	%	Jumlah	%		
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	9	4	44,44	3	33,33	77,78	1

Sumber : Hasil Analisis, 2023

#### 4.3.4 Telaahan Dokumen Strategis

Untuk merumuskan isu prioritas didalam KLHS RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2045 tentu dokumen – dokumen strategis baik dokumen nasional dan provinsi harus menjadi pertimbangan, adapun dokumen strategis yang ditelaah terkait dengan isu yaitu:

- 1) Isu di dalam Dokumen RPJPN
- 2) Isu di dalam Dokumen KLHS RPJPN
- 3) Isu di dalam Dokumen RPJMN Tahun 2020-2040
- 4) Isu didalam Dokumen KLHS RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026
- 5) Isu didalam Dokumen DIKPLHD Kota Balikpapan Tahun 2016 sampai tahun 2020
- 6) Isu didalam Dokumen DIKPLHD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
- 7) Isu didalam Dokumen KLHS RTRW Kota Balikpapan Tahun 2022
- 8) Identifikasi Isu PB hasil FGD dan Konsultasi Publik RPJMD Tahun 2025 – 2030

Kedelepan isu didalam dokumen strategis tersebut kemudian dicrosscutting dengan 17 TPB yang menghasilkan rank prioritas. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel IV.4 dibawah ini.

**Tabel IV.4 Analisis Crosscutting TPB dengan Isu Menurut Dokumen Strategis di Kota Balikpapan**

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1	2	3	4	5	6	7	8	Skor	Rank Prioritas
1	Tanpa Kemiskinan	*		*			*			3,00	3
2	Tanpa Kelaparan			*			*			2,00	4
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	*	*	*			*			4,00	2
4	Pendidikan Berkualitas			*			*			2,00	4
5	Kesetaraan Gender			*			*			2,00	4
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak		*			*			*	3,00	2
7	Energi Bersih dan Terjangkau								*	1,00	5
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	*	*	*						3,00	3
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	*	*	*						3,00	3
10	Berkurangnya Kesenjangan	*								1,00	5
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	*	*		*	*		*	*	6,00	1
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab					*		*	*	3,00	3
13	Penanggulangan Perubahan Iklim		*			*		*	*	4,00	2
14	Ekosistem Laut					*				1,00	5
15	Ekosistem Darat					*				1,00	5
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh				*					1,00	5
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	*								1,00	5

Sumber : Hasil Analisis, 2023





#### 4.3.5 Isu Muatan Kondisi Lingkungan Hidup

Penelaahan kondisi lingkungan hidup di Kota Balikpapan telah diuraikan pada Bab 3. Berdasarkan hasil kajian 6 muatan lingkungan hidup tersebut, berikut merupakan kondisi yang menjadi isu di Kota Balikpapan:

- 1) Tingginya degradasi dan kerentanan ekosistem darat, laut, dan pesisir
- 2) Tingginya risiko bencana akibat perubahan iklim
- 3) Kurang optimalnya efisiensi pengaturan tata air dan banjir
- 4) Rendahnya Jasa ekosistem penyedia air

Setiap isu berdasarkan muatan kondisi lingkungan hidup tersebut selanjutnya disilangkan (*crosscutting*) dengan 17 TPB. TPB yang memiliki hubungan paling banyak dengan isu kondisi lingkungan hidup lebih menjadi prioritas. Hasil *crosscutting* TPB dengan isu kondisi lingkungan hidup di Kota Balikpapan ditunjukkan pada **Tabel IV.5** dibawah ini.

**Tabel IV.5 Analisis Crosscutting TPB dengan Isu Kondisi Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan**

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Tingginya degradasi dan kerentanan ekosistem darat, laut, dan pesisir	Kurang optimalnya efisiensi pengaturan tata air dan banjir	Rendahnya Jasa ekosistem penyedia air	Jumlah	Rank Prioritas
1	Tanpa Kemiskinan	*			2,00	3
2	Tanpa Kelaparan	*	*	*	4,00	1
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	*		*	3,00	2
4	Pendidikan Berkualitas				0,00	4
5	Kesetaraan Gender				0,00	4
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	*	*	*	4,00	1
7	Energi Bersih dan Terjangkau				0,00	4
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi				0,00	4
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	*	*	*	4,00	1
10	Berkurangnya Kesenjangan				0,00	4
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	*	*	*	4,00	1
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	*			2,00	3
13	Penanggulangan Perubahan Iklim	*	*	*	4,00	1
14	Ekosistem Laut	*			2,00	3
15	Ekosistem Darat	*	*	*	4,00	1
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh				0,00	4
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan				0,00	4

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Dari keseluruhan penelaahan diatas kemudian dilakukan penilaian yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel IV.6 dibawah ini.



**Tabel IV.6 Pemeringkatan ISU TPB di Kota Balikpapan**

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Rank A	Rank B	Rank C	Total Skor	Rank Prioritas
1	Tanpa Kemiskinan	8	3	3	14,00	6
2	Tanpa Kelaparan	9	4	1	14,00	6
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	10	2	2	14,00	6
4	Pendidikan Berkualitas	12	4	4	20,00	
5	Kesetaraan Gender	4	4	4	12,00	4
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	2	2	1	5,00	1
7	Energi Bersih dan Terjangkau	6	5	4	15,00	
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	7	3	4	14,00	
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	9	3	1	13,00	5
10	Berkurangnya Kesenjangan	11	5	4	20,00	
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	5	1	1	7,00	2
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	3	3	3	9,00	3
13	Penanggulangan Perubahan Iklim	13	2	1	16,00	8
14	Ekosistem Laut	13	5	3	21,00	
15	Ekosistem Darat	6	5	1	12,00	4
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	6	5	4	15,00	7
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	1	5	4	10,00	


Sumber : Hasil Analisis, 2023

#### 4.3.6 Analisis Gap Terhadap Pencapaian TPB



Analisis selanjutnya dilakukan dengan mengidentifikasi gap atau kesenjangan, berupa target TPB yang menjadi isu didalam RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2045. **Tabel IV.7** dibawah ini merupakan hasil analisis kebijakan dan strategi terhadap TPB di Kota Balikpapan.



**Tabel IV.7 Analisis Gap Kebijakan dan Strategi Pada RPJPD Terhadap TPB di Kota Balikpapan**


No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Yang Menjadi Isu	Gap Masalah	
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun	 <p><b>TPB 1</b> Menghapus Kemiskinan</p>		
			<p><b>1.3</b> Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.</p>	<p><b>1.3.1 (a)</b> Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.</p> <p><b>1.3.1 (b)</b> Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.</p> <p><b>1.3.1 (c)</b> Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.</p> <p><b>1.3.1 (d)</b> Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.</p>
			<p><b>1.4.</b> Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.</p>	<p><b>1.4.1 (d)</b> Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.</p> <p><b>1.4.1 (e)</b> Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.</p> <p><b>1.4.1 (k)</b> Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.</p>
			<p><b>1.5</b> Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.</p>	<p><b>1.5.1 (c)</b> Pendampingan psikososial korban bencana sosial.</p> <p><b>1.5.2 (a)</b> Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.</p>
			<p><b>1.a</b> Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan</p>	<p><b>1.a.1'</b> Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.</p> <p><b>1.a.2'</b> Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.</p>





No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Yang Menjadi Isu	Gap Masalah
		program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	 <b>TPB 2</b> Tanpa Kelaparan	
		2.1 Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2 (a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
		2.2 Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. 2.2.1 (a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. 2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	 <b>TPB 3</b> Kehidupan Sehat & Sejahtera	
		3.4 Mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi. 3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri. 3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.
		3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.
		3.7 Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana,	3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.







No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Yang Menjadi Isu	Gap Masalah
		informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
		3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan.
		3.9 Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3.(a) Proporsi kematian akibat keracunan.
		3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	<div style="text-align: center;">  <p><b>4</b> PENDIDIKAN BERKUALITAS</p> <p><b>TPB 4</b> Pendidikan Berkualitas</p> </div> <p>4.1 Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.</p> <p>4.2 Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.</p> <p>4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.</p>	<p>4.1.1 Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.</p> <p>4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).</p> <p>4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g)</p>




No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Yang Menjadi Isu	Gap Masalah
			fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	 <b>TPB 5</b> Kesetaraan Gender	
		5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.
		5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
		5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. 5.3.1 (a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. 5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
		5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1* Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). 5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	 <b>TPB 6</b> Air Bersih & Sanitasi Layak	



No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Yang Menjadi Isu	Gap Masalah
		6.1 Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
		6.2 Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1 (a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. 6.2.1 (b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. 6.2.1 (c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 6.2.1 (f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.
		6.4 Secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.
		6.5 Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1 (f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. 6.5.1 (g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.	 <b>TPB 7</b> Energi Bersih dan Terjangkau	
		7.2 Meningkatkan secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1* Bauran energi terbarukan.
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	 <b>TPB 8</b> Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi	
		8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1 (a) PDB per kapita.





No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Yang Menjadi Isu	Gap Masalah
		8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.
		8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1 (b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.
		8.6 Secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
		8.9 Menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. 8.9.1 (a) Jumlah wisatawan mancanegara.
		8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa 8.10.1(a) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	 <p>9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.</p> <p>9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.</p>	<p>9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.</p> <p>9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.</p> <p>9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.</p> <p>9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet</p>







No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Yang Menjadi Isu	Gap Masalah
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara	 <b>TPB 10</b> Berkurangnya Kesenjangan	
		<b>10.2</b> Memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	<b>10.2.1*</b> Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.
		<b>10.4</b> Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	<b>10.4.1.(b)</b> Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	 <b>TPB 11</b> Kota & Permukiman yang Berkelanjutan	
		<b>11.2</b> Menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	<b>11.2.1 (a)</b> Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.
		<b>11.3</b> Memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	<b>11.3.2 (a)</b> Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.  <b>11.3.2 (b)</b> Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.
		<b>11.5</b> Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	<b>11.5.1 (b)</b> Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.  <b>11.5.2 (a)</b> Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.



No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Yang Menjadi Isu	Gap Masalah
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	 <b>TPB 12</b> Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	
		<b>12.6</b> Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	<b>12.6.1 (a)</b> Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
		<b>12.7</b> Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	<b>12.7.1.(a)</b> Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.
		<b>12.8</b> Menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	<b>12.8.1 (a)</b> Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
15	Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.	 <b>TPB 15</b> Ekosistem Daratan	
		<b>15.1</b> Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	<b>15.1.1 (a)</b> Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.
		<b>15.3</b> Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	<b>15.3.1 (a)</b> Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.



No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Yang Menjadi Isu	Gap Masalah	
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	 <p><b>TPB 16</b> Perdamaian Keadilan &amp; Kelembagaan Tangguh</p>		
			16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	<p><b>16.1.2 (a)</b> Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.</p> <p><b>16.1.3 (a)</b> Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.</p> <p><b>16.1.4*</b> Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.</p>
			16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	<p><b>16.2.1.(a)</b> Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.</p> <p><b>16.2.3.(a)</b> Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.</p>
			16.5 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	<p><b>16.5.1 (a)</b> Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).</p>
			16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	<p><b>16.6.1*</b> Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.</p> <p><b>16.6.1.(c)</b> Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.</p>
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	 <p><b>TPB 17</b> Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan</p>		
			<p><b>17.1</b> Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.</p>	<p><b>17.1.1.(a)</b> Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.</p> <p><b>17.1.2*</b> Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.</p>



No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Yang Menjadi Isu	Gap Masalah
		<b>17.6</b> Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	<b>17.6.2.(b)</b> Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.
		<b>17.8</b> Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	<b>17.6.2.(c)</b> Proporsi penduduk terlayani mobile broadband
		<b>17.17</b> Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	<b>17.8.1*</b> Proporsi individu yang menggunakan internet
			<b>17.17.1.(a)</b> Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
			<b>17.17.1.(b)</b> Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sumber : Hasil Analisis, 2023







# BAB 5

## ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Untuk kondisi capaian indikator TPB yang ditangani oleh setiap OPD, berfokus kepada analisis capaian masing-masing indikator TPB yang sudah dilakukan setiap OPD. Capaian ini dilihat dari urusan yang ditangani oleh OPD, dimana hasil dari kondisi capaian dan analisis menjadi salah satu bahan dalam mengidentifikasi isu strategis Kota Balikpapan yang berkaitan dengan urusan yang ditangani oleh masing-masing OPD dan menjadi fokus utama yang harus dilaksanakan oleh setiap OPD. Berikut ini merupakan ringkasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Balikpapan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel V.1. Sedangkan capaian indikator TPB oleh OPD di Kota Balikpapan yang dibagi berdasarkan kategori dapat dilihat pada Gambar 5.1 dibawah ini.

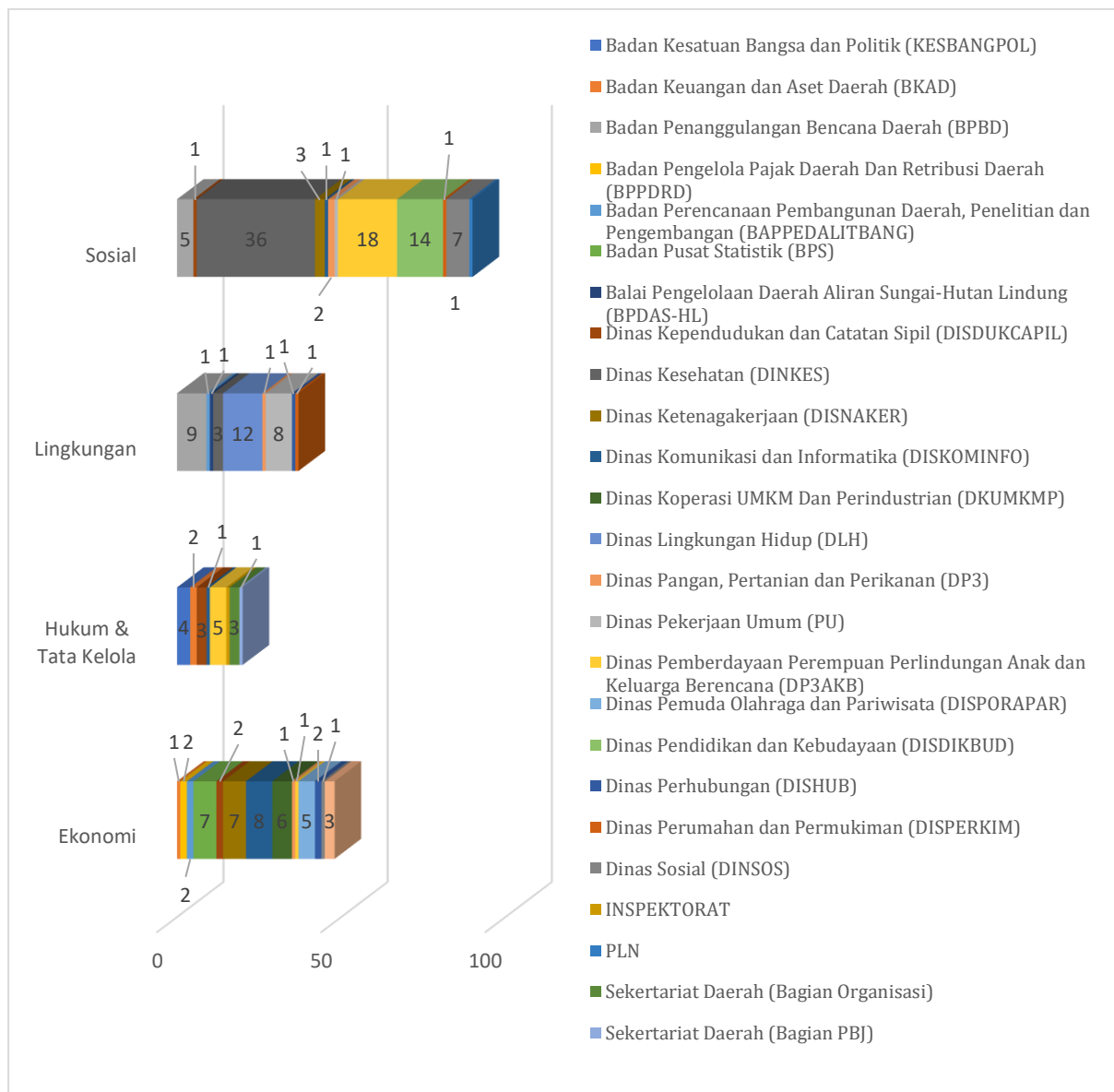
**Tabel V.1 Pelaksanaan Indikator TPB pada Setiap OPD dirinci Per Pilar**

OPD Pelaksana	Ekonomi	Hukum & Tata Kelola	Lingkungan	Sosial	Grand Total
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)		4			4
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	1	2			3
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)			9	5	14
Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (BPPDRD)	2				2
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)	2		1		3
Badan Pusat Statistik (BPS)	7				7
Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Hutan Lindung (BPDAS-HL)			1		1
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL)	2	3		1	6
Dinas Kesehatan (DINKES)			3	36	39
Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER)	7			3	10
Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)	8	1		1	10
Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian (DKUMKMP)	6				6
Dinas Lingkungan Hidup (DLH)			12		12
Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3)	1		1	2	4
Dinas Pekerjaan Umum (PU)			8	1	9
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	1	5		18	24
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR)	5				5
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD)				14	14
Dinas Perhubungan (DISHUB)	2		1		3
Dinas Perumahan dan Permukiman (DISPERKIM)			1	1	2
Dinas Sosial (DINSOS)	1			7	8
INSPEKTORAT		1			1
PLN				1	1
Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)		3			3
Sekretariat Daerah (Bagian PBJ)		1			1
Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)	3				3
<b>Grand Total</b>	<b>48</b>	<b>20</b>	<b>37</b>	<b>90</b>	<b>195</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2023







Sumber : Hasil Analisis, 2023

**Gambar 5.1 Grafik Pelaksanaan Indikator TPB Pada Setiap OPD dirinci Per Pilar**

Untuk melihat kinerja pelaksanaan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kota Balikpapan terkait dengan Indikator TPB dapat dilihat pada Tabel V.2 dibawah ini.

**Tabel V.2 Pelaksanaan Indikator TPB pada Setiap OPD**

No	OPD	TPB																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KESBANGPOL																4	
2	BKAD																2	1
3	BPBD	5										7		2				
4	BPPDRD																	2
5	BAPPEDALITBANG									1	1	1						
6	BPS								3									4

No	OPD	TPB																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	BPDAS-HL															1		
8	DISDUKCAPIL	1															3	2
9	DINKES	4	7	25			3											
10	DISNAKER	2			1				5	1	1							
11	DISKOMINFO					1				3							1	5
12	DKUMKMP								2	4								
13	DLH						4					1	5			2		
14	DP3		2				1	1										
15	PU	1						7			1							
16	DP3AKB			5		13					1						5	
17	DISPORAPAR					5												
18	DISDIKBUD	2			12													
19	DISHUB									2		1						
20	DISPERKIM	1										1						
21	DINSOS	7								1								
22	INSPEKTORAT																1	
23	PLN	1																
24	SEKDA (Bagian Organisasi)																3	
25	SEKDA (Bagian PBJ)																1	
26	SEKDA (Bagian Perekonomian)							1	2									

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Sedangkan untuk melihat capaian indikator per masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintahan Kota Balikpapan dapat dilihat pada Tabel V.3 dibawah ini.

**Tabel V.3 Capaian Indikator TPB pada Setiap OPD**

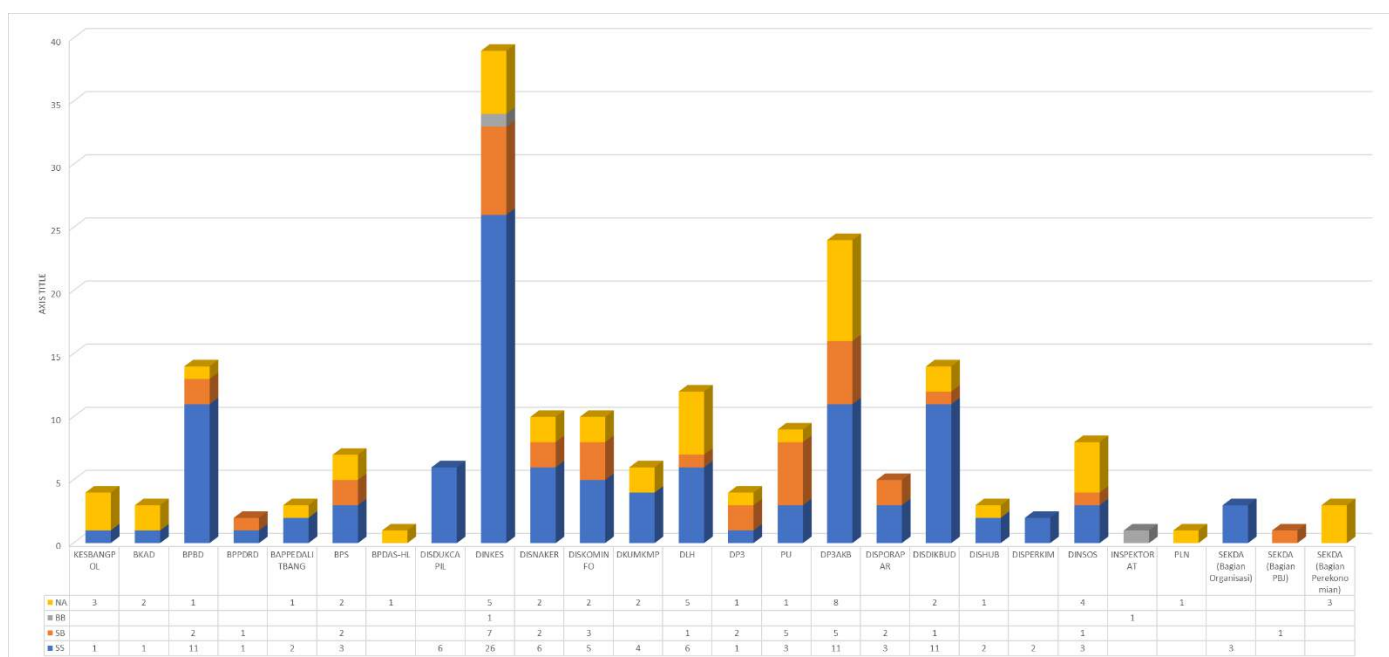
No	OPD	Capaian Indikator			
		SS	SB	BB	NA
1	KESBANGPOL	1			3
2	BKAD	1			2
3	BPBD	11	2		1
4	BPPDRD	1	1		
5	BAPPEDALITBANG	2			1
6	BPS	3	2		2
7	BPDAS-HL				1
8	DISDUKCAPIL	6			
9	DINKES	26	7	1	5
10	DISNAKER	6	2		2
11	DISKOMINFO	5	3		2
12	DKUMKMP	4			2
13	DLH	6	1		5
14	DP3	1	2		1





No	OPD	Capaian Indikator			
		SS	SB	BB	NA
15	PU	3	5		1
16	DP3AKB	11	5		8
17	DISPORAPAR	3	2		
18	DISDIKBUD	11	1		2
19	DISHUB	2			1
20	DISPERKIM	2			
21	DINSOS	3	1		4
22	INSPEKTORAT			1	
23	PLN				1
24	SEKDA (Bagian Organisasi)	3			
25	SEKDA (Bagian PBJ)		1		
26	SEKDA (Bagian Perekonomian)				3

Sumber : Hasil Analisis, 2023



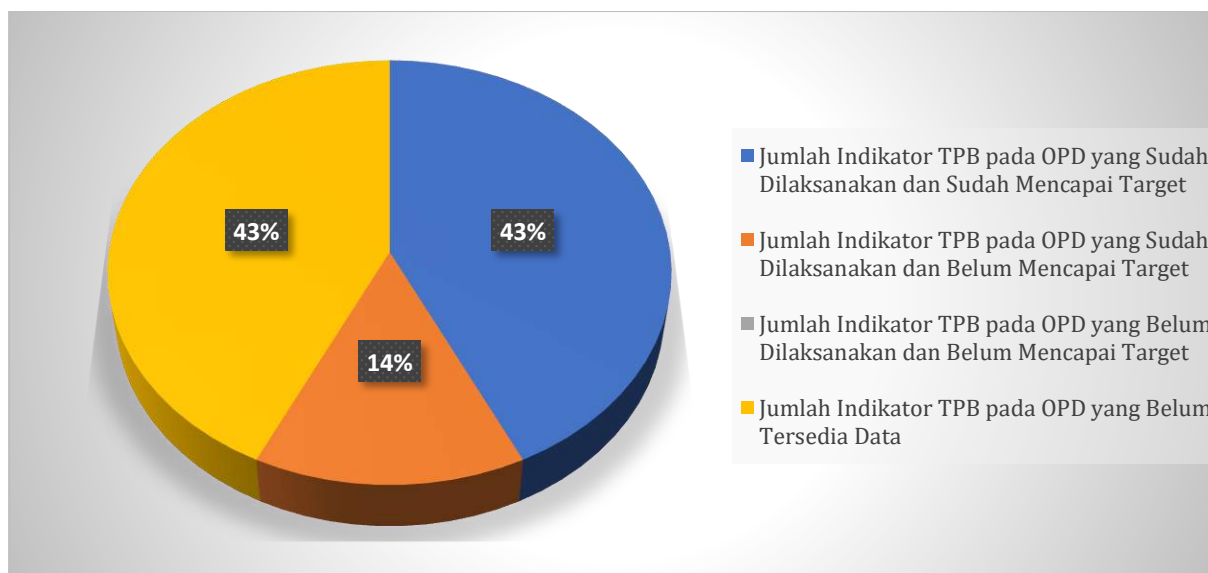
Sumber : Hasil Analisis, 2023

**Gambar 5.2 Grafik Capaian Indikator TPB Pada Setiap OPD**



## 5.1 SEKRETARIAT DAERAH

Adapun tugas pokok Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yaitu membantu Walikota dalam merumus dan menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah, pelaksanaan kegiatan tugas Sekretariat Daerah dan seluruh perangkat daerah. Sekretariat Daerah Kota Balikpapan memiliki 7 indikator yang tersebar pada TPB 7, TPB 8 dan TPB 16 serta terbagi kedalam beberapa bagian antara lain, Bagian Pengadaan Barang dan jasa dengan Jumlah 1 indikator, Bagian organisasi dengan jumlah 3 indikator dan Bagian Perekonomian dengan jumlah 3 indikator. Dari 7 indikator tersebut terdapat 3 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, 1 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, dan 3 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.3 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

**Gambar 5.3 Persentase Capaian Indikator TPB pada Sekretariat Daerah Kota Balikpapan**

Adapun capaian indikator TPB pada Sekretariat Daerah Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.4 dibawah ini.

**Tabel V.4 Capaian Indikator TPB pada Sekretariat Daerah Kota Balikpapan**

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Tidak Tersedia Data	Bauran energi terbarukan mencapai 10-16% pada tahun 2019.	Tidak Tersedia Data
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Tidak Tersedia Data	Menurun (mendekat)	Tidak Tersedia Data

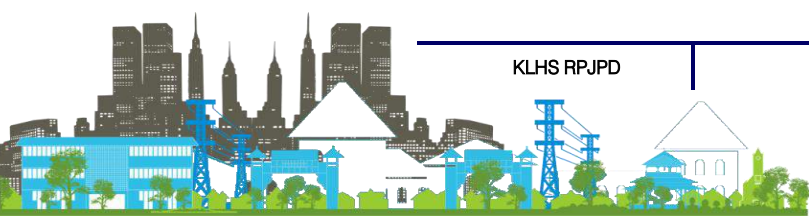
INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	69.5/ 0.32%	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	24,25	Menjadi menjadi 80%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	68,91	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	87,12	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

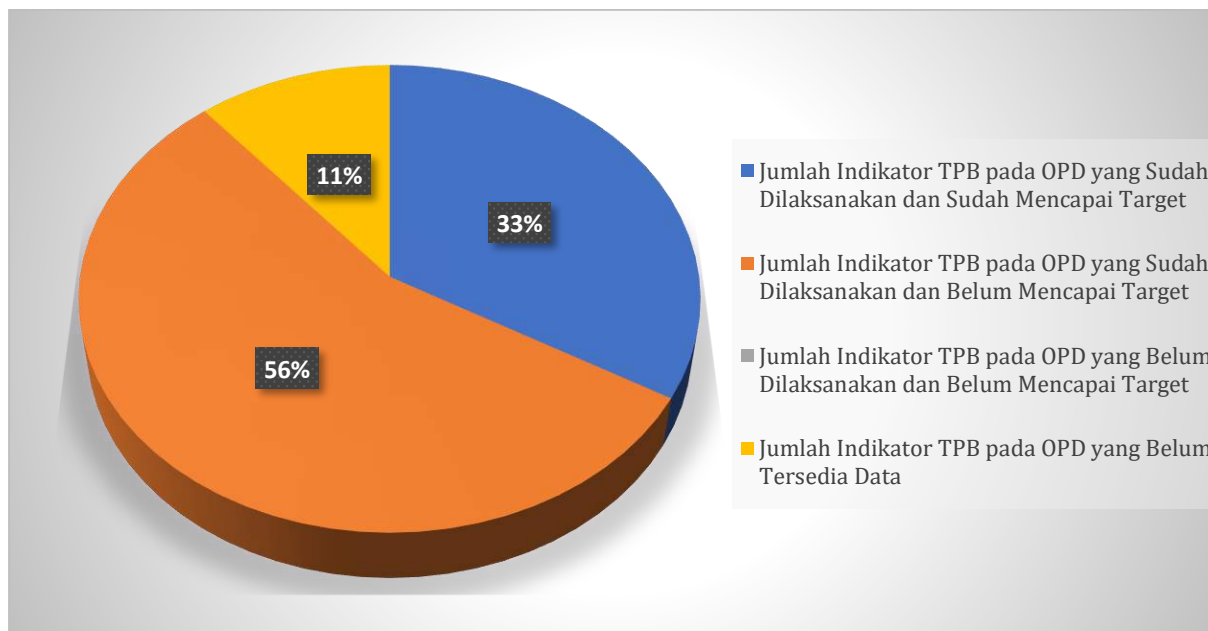
Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar (Rp.137.932.609.683) atau sekitar (5,02%) dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikpapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar (Rp.91.265.163.090,64) atau sekitar (66,17%) dari total anggaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 7 indikator TPB sesuai kewenangannya.

## 5.2 DINAS PEKERJAAN UMUM

Adapun tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, yaitu membantu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas Pekerjaan umum memiliki 9 indikator yang tersebar pada TPB 1, TPB 6 dan TPB 11. Dari 9 indikator tersebut terdapat 3 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, 5 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, dan 1 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.4 dibawah ini.





(Sumber : Hasil analisis, 2023)

**Gambar 5.4 Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan**

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.5 dibawah ini.

**Tabel V.5 Capaian Indikator TPB pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan**

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	82,05	Meningkat menjadi 100%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	98,54	Meningkat menjadi 100%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	1598	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	99,1	Meningkat menjadi 100%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	97,1	Meningkat menjadi 100%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional



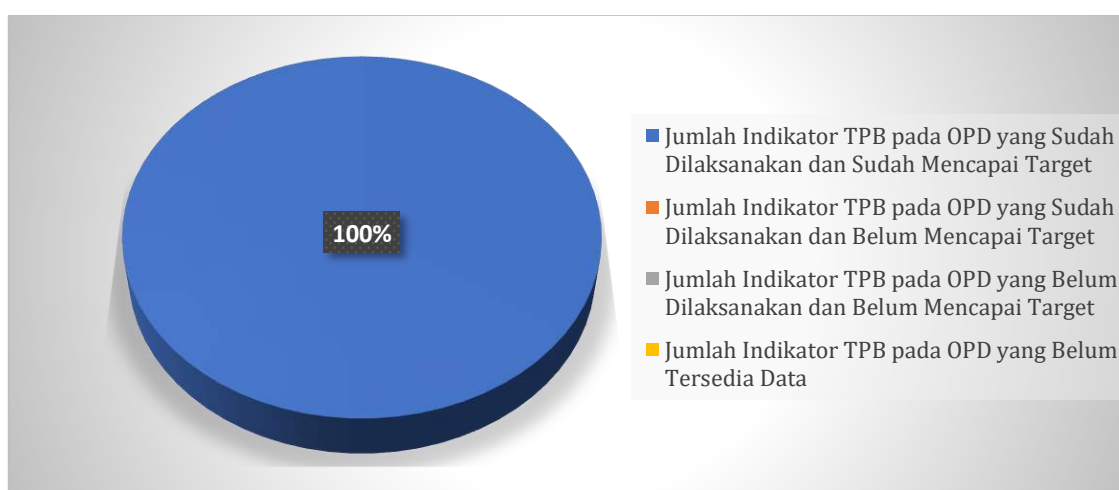
INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	34	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	4 (SPALD-T) (DPU)	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	11980	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Tidak Tersedia Data	Ada	Tidak Tersedia Data

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar (Rp. 553.786.604.039,68) atau sekitar (20,17%) dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikpapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar (Rp.48.509.617.053,17) atau sekitar (8,76%) dari total anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 9 indikator TPB sesuai kewenangannya.

### 5.3 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Adapun tugas pokok Dinas Perumahan dan Permukiman, yaitu menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan perumahan, dan permukiman. Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki 2 indikator yang berada pada TPB 1 dan TPB 11. Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, capaian TPB untuk 2 indikator tersebut sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.5 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

**Gambar 5.5 Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan**

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.6 dibawah ini.

**Tabel V.6 Capaian Indikator TPB pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan**

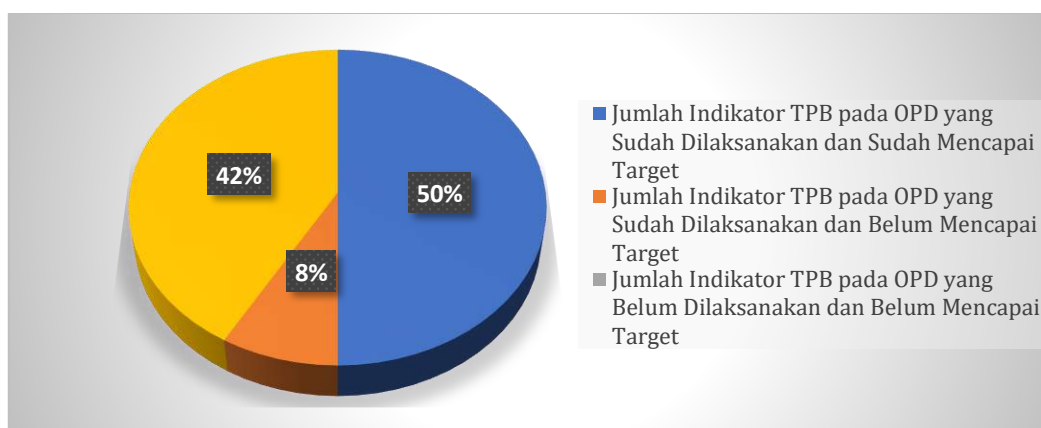
INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	0,21%	Meningkat menjadi 18,6 juta	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	99,79%	3,7 juta rumah tangga	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar (Rp. 19.168.930.498,9) atau sekitar (0,70%) dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikpapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar (Rp. 6.144.183.269,74) atau sekitar (32,05%) dari total anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 2 indikator TPB sesuai kewenangannya.

#### 5.4 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Adapun tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup, yaitu memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan memiliki 12 indikator TPB yang tersebar pada TPB 6, TPB 11, TPB 12 dan TPB 15. Dari 12 indikator yang telah dilaksanakan terdapat 6 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, 1 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, dan 5 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.6 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

**Gambar 5.6 Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan**



Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.7 dibawah ini.

**Tabel V.7 Capaian Indikator TPB pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan**

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	50	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	50	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Tidak Tersedia Data	10 WS (skala nasional)	Tidak Tersedia Data
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Tidak Tersedia Data	ada	Tidak Tersedia Data
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	99,1% (186.188,69 Ton)	Meningkat menjadi 80%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	LB3 yang dihasilkan : 80150,43 (Ton) LB3 yang dikelola : 78928,98 (Ton)	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	35706,089 (ton/Tahun)	20 ton per hari (skala nasional)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	50,32	Meningkat	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	1 (Masterplan RTH Kota Balikpapan)	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

Sumber : Hasil Analisis, 2023

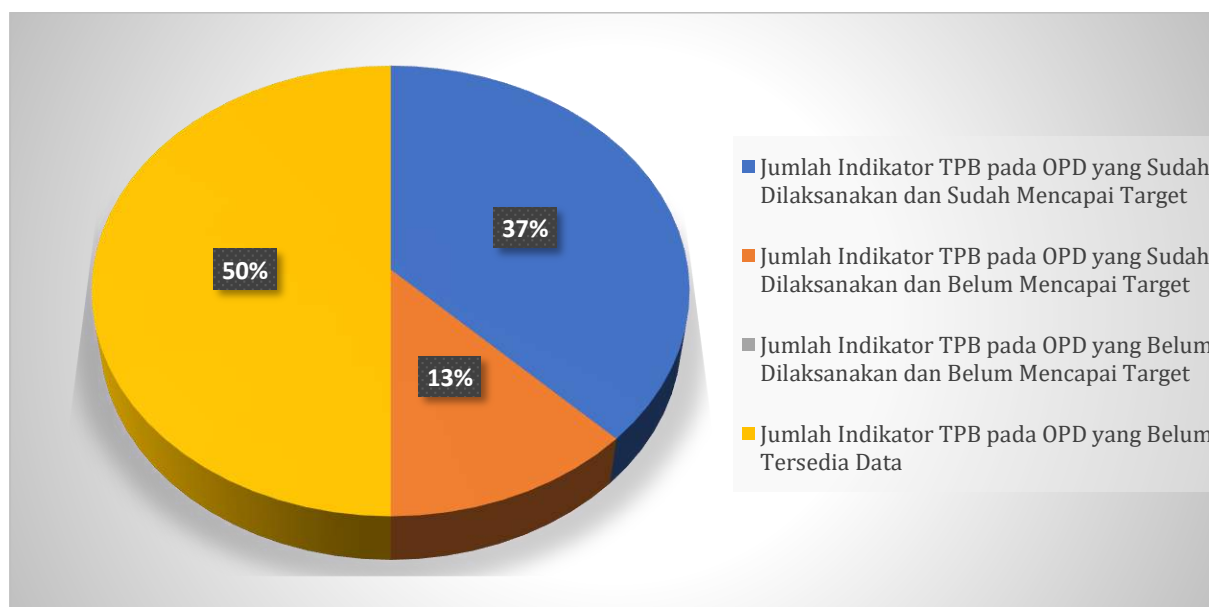
Pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar (Rp. 127.115.870.133,86) atau sekitar (4,63%) dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikpapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar



(Rp.93.188.619.097,54) atau sekitar (73,31%) dari total anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 12 indikator TPB sesuai kewenangannya.

## 5.5 DINAS SOSIAL

Adapun tugas pokok Dinas Sosial, yaitu memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Sosial. Dinas Sosial Kota Balikpapan memiliki 8 indikator TPB yang berada pada TPB 1 dan TPB 10. Dari 10 indikator yang telah dilaksanakan terdapat 3 indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional, 1 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, dan 4 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.7 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

**Gambar 5.7 Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Sosial Kota Balikpapan**

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Sosial Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.8 dibawah ini.

**Tabel V.8 Capaian Indikator TPB pada Dinas Sosial Kota Balikpapan**

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	2,45	Menurun menjadi 7-8%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Tidak Tersedia Data	Meningkat menjadi 17,12%	Tidak Tersedia Data



INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	4857	Menurun menjadi 2,8 juta	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	100%	Menurun menjadi 7-8%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Tidak Tersedia Data	Meningkat menjadi 17,12%	Tidak Tersedia Data
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Tidak Tersedia Data	Menurun menjadi 2,8 juta	Tidak Tersedia Data
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Tidak Tersedia Data	Meningkat menjadi 151 ribu	Tidak Tersedia Data
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	2,45	Meningkat menjadi 81,5 ribu	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

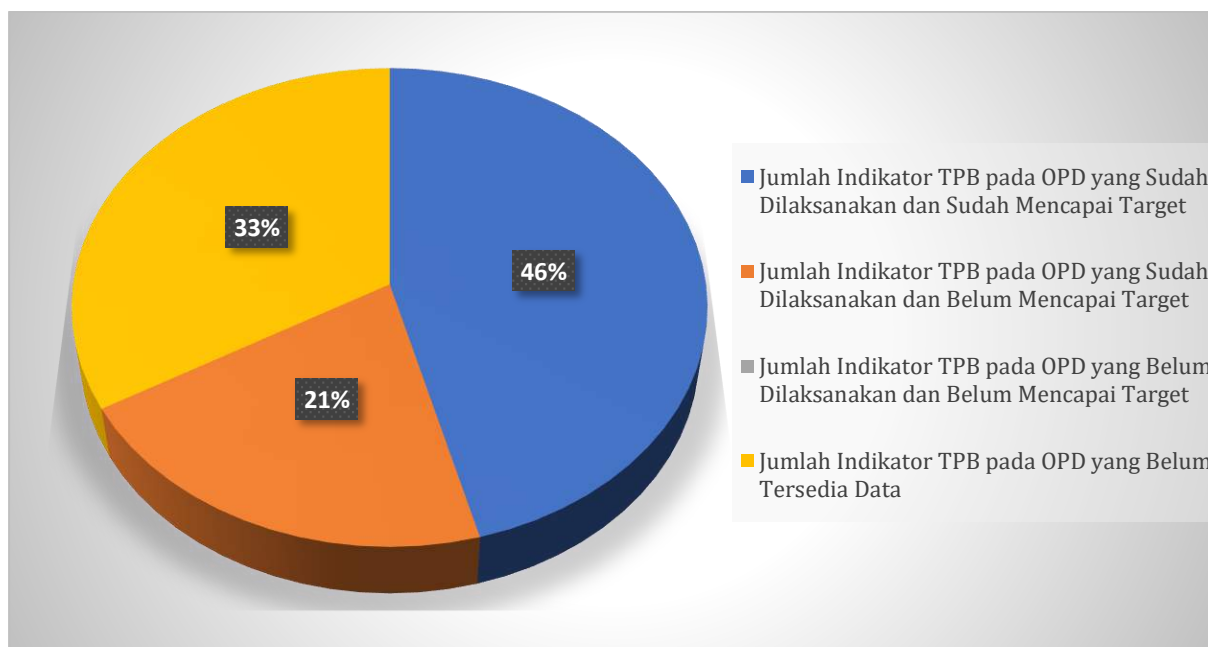
Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Dinas Sosial Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar (Rp.11.961.033.357,38) atau sekitar (0,44%) dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikpapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar (Rp.6.671.555.919,38) atau sekitar (55,78%) dari total anggaran Dinas Sosial Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 8 indikator TPB sesuai kewenangannya.

## 5.6 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Adapun tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yaitu memiliki tugas pokok dalam menangani segala permasalahan dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki 24 indikator TPB yang berada pada TPB 3, TPB 5, TPB 10 dan TPB 16. Dari 24 indikator yang telah dilaksanakan terdapat 11 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, 5 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, dan 8 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.8 dibawah ini.





(Sumber : Hasil analisis, 2023)

**Gambar 5.8 Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan**

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.9 dibawah ini.

**Tabel V.9 Capaian Indikator TPB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan**

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	93,5	Meningkat menjadi 66%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	56,66	Meningkat menjadi 65%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	31,13	Meningkat menjadi 23,5%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	19,2	Menurun menjadi 38	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	2,06	Menurun menjadi 2,28	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Tidak Tersedia Data	bertambah sebanyak 16	Tidak Tersedia Data
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	74 orang (0.02%)	Menurun	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	0,045	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	45 orang	Menurun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	74 orang (0.02%)	Meningkat menjadi 70%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Tidak Tersedia Data	Menurun	Tidak Tersedia Data
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Tidak Tersedia Data	Meningkat menjadi 21 tahun	Tidak Tersedia Data
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Tidak Tersedia Data	Menurun menjadi 38 tahun	Tidak Tersedia Data
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	21,56	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	40	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data



INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	30,57	Menurun menjadi 9,9%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	39,4	Meningkat menjadi 85%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Tidak Tersedia Data	Menurun	Tidak Tersedia Data
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Tidak Tersedia Data	Menurun	Tidak Tersedia Data
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	0,025	Menurun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Tidak Tersedia Data	Menurun	Tidak Tersedia Data
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	20,74	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	0,4	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar (Rp. 20.919.361.863,00) atau sekitar (0,76%) dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikpapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar (Rp. 13.921.744.680,00) atau sekitar (66,55%) dari total anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 24 indikator TPB sesuai kewenangannya.

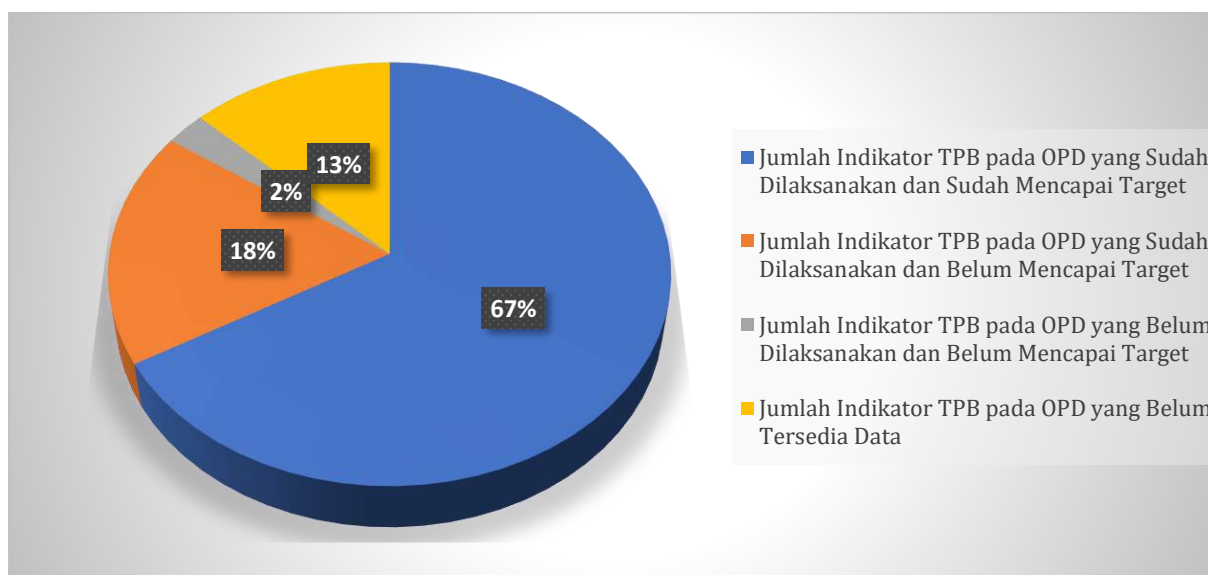
## 5.7 DINAS KESEHATAN

Adapun tugas pokok Dinas Kesehatan, yaitu tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan memiliki 39 indikator TPB yang berada pada TPB 1, TPB 2, TPB 3 dan TPB 6. Dari 39 indikator yang





telah dilaksanakan terdapat 26 indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional, 7 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, 5 indikator yang tidak tersedia data, dan 1 indikator yang belum dilaksanakan. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.9 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

**Gambar 5.9 Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan**

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.10 dibawah ini.

**Tabel V.10 Capaian Indikator TPB pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan**

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	96.19	Meningkat menjadi 70%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	99.2	Meningkat menjadi 63%.	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	78.91	Meningkat menjadi 65%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	89.67%	Meningkat menjadi 100%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	10.46%	Menurun menjadi 17%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Belum dilaksanakan	Menurun menjadi 8,5 %	Belum dilaksanakan
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	6,93%	Menurun	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	7,02%	Menurun menjadi 28%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	8,18%	Menurun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	14.84	Menurun menjadi 28%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	67.90	Meningkat menjadi 50%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	39.67/100000	Menurun menjadi 306	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	96.25	Meningkat menjadi 95%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	96.19	Meningkat menjadi 85 %	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	7.83/1000	Menurun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	5.95/1000	Menurun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	7.14/1000	Menurun menjadi 24	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	100%	Meningkat menjadi 95%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,05	Menurun menjadi <0,5%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	262,8/100000	Menurun menjadi 245	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional



INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	0,15	Menurun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	22	Menurun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	0.0013	Menurun menjadi 5,4%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	39.27%	Menurun menjadi 24,3%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	2.23	Menurun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Tidak Tersedia Data	Menurun	Tidak Tersedia Data
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	27	Meningkat menjadi 280	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	0.012	Menurun menjadi angka 0,02%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Tidak Tersedia Data	Menurun	Tidak Tersedia Data
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	14.04%	Menurun menjadi 9,91%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	991/1000 Penduduk	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	109,33	Meningkat menjadi minimal 95%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Tidak Tersedia Data	Menurun	Tidak Tersedia Data
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	1.84	Menurun	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100%	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional



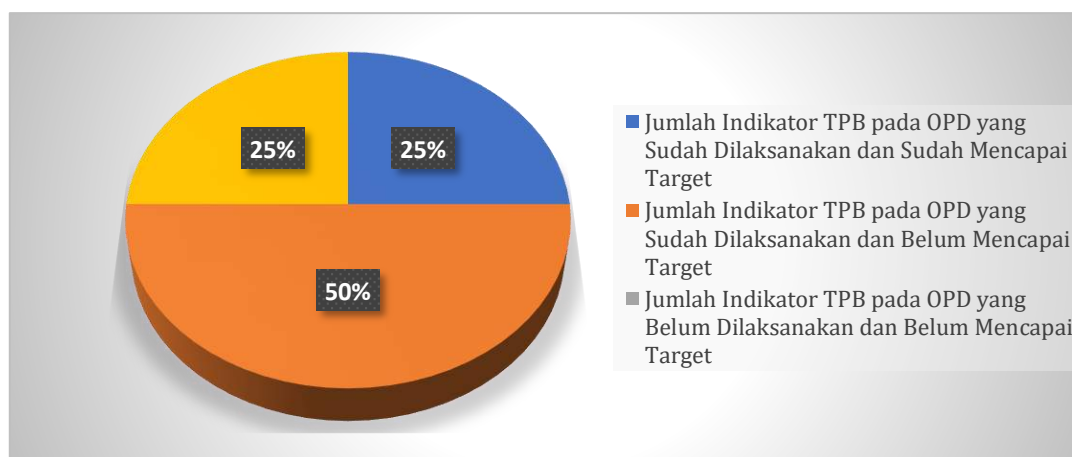
INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	8,1	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	29/85.29%	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar (Rp.273.968.564.034,61) atau sekitar (9,98%) dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikpapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar (Rp.180.746.347.209,32) atau sekitar (65,97%) dari total anggaran Dinas Kesehatan Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 39 indikator TPB sesuai kewenangannya.

## 5.8 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Adapun tugas pokok Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, yaitu mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan, pertanian dan perikanan. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan memiliki 4 indikator yang berada pada TPB 2, TPB 6, dan TPB 8. Dari 4 indikator yang telah dilaksanakan terdapat 1 indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional, 2 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, dan 1 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.10 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

**Gambar 5.10 Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan**



Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.11 dibawah ini.

**Tabel V.11 Capaian Indikator TPB pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan**

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	86,1	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	117,47	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Tidak Tersedia Data	ada	Tidak Tersedia Data
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	75,67	Meningkat	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional

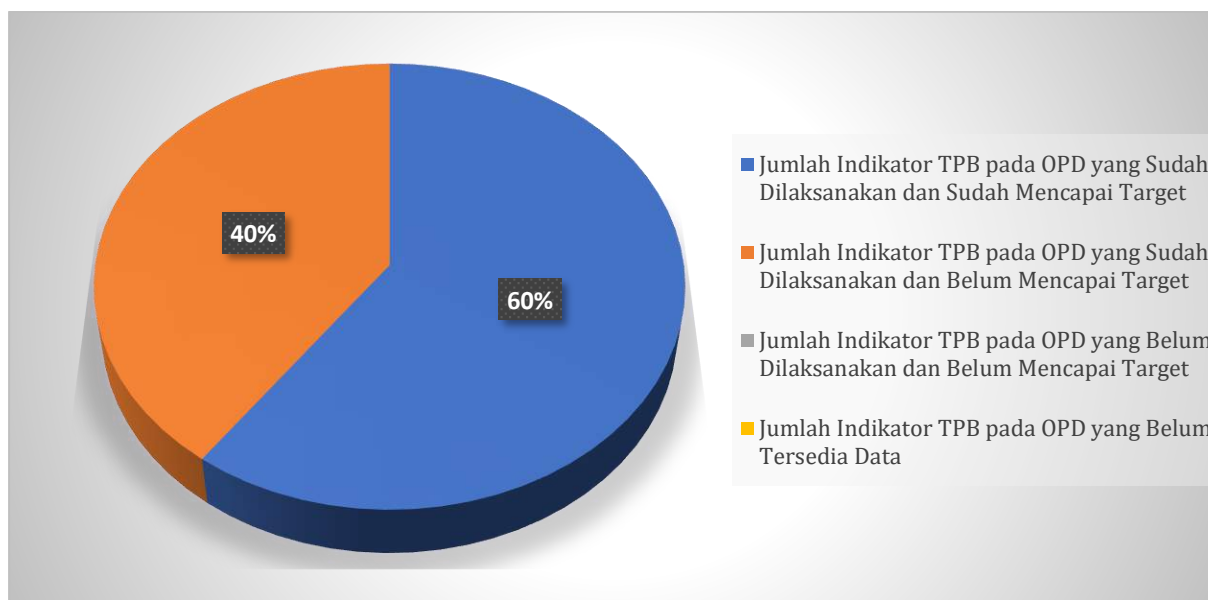
Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar (Rp. 21.053.993.475,60) atau sekitar (0,77%) dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikpapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar (Rp. 6.528.253.313,60) atau sekitar (31,01%) dari total anggaran Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 4 indikator TPB sesuai kewenangannya.

## 5.9 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Adapun tugas pokok Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, yaitu mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, bidang olahraga, dan bidang pariwisata. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata memiliki 5 indikator yang berada pada TPB 8. Pada Dari 5 indikator yang telah dilaksanakan terdapat 3 indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional, 2 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.11 dibawah ini.





(Sumber : Hasil analisis, 2023)

**Gambar 5.11 Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan**

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.11 dibawah ini.

**Tabel V.12 Capaian Indikator TPB pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan**

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	1,48%	Meningkat menjadi 8%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	11704	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	1748085	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Rp 3.947.435.000	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	9.920	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

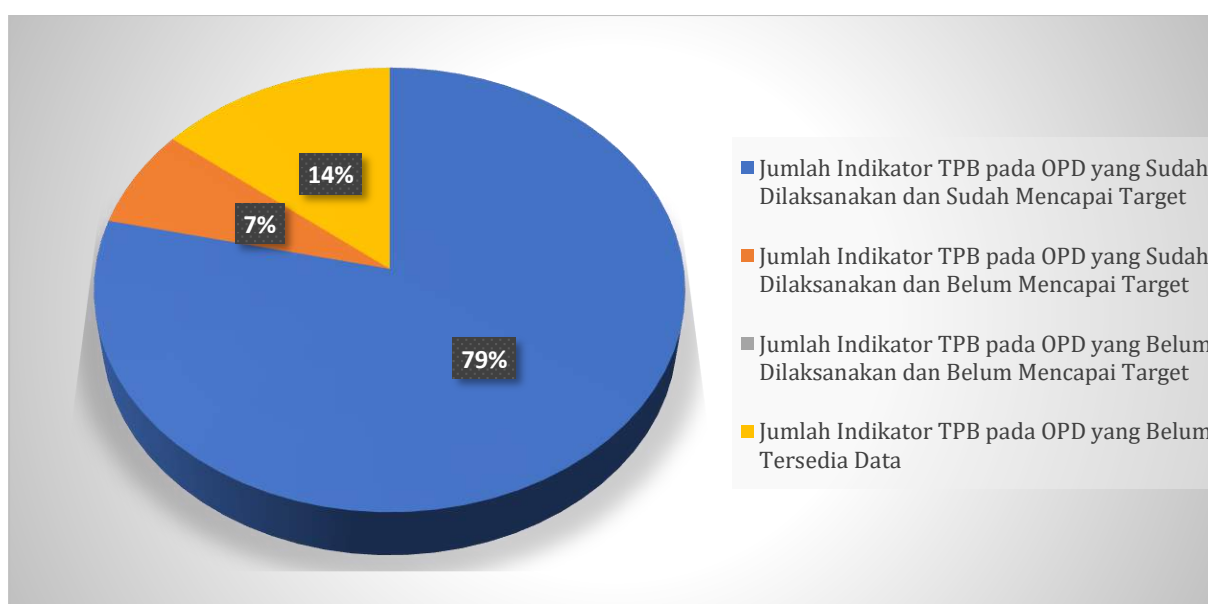
Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar (Rp. 52.267.677.752,70) atau sekitar (1,90%) dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikpapan, dan untuk pengeluaran anggaran

belanja barang dan jasa sebesar (Rp. 37.918.805.234,17) atau sekitar (72,55%) dari total anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 5 indikator TPB sesuai kewenangannya.

### 5.10 DINAS PENDIDIKAN

Adapun tugas pokok Dinas Pendidikan, yaitu mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Balikpapan memiliki 14 indikator yang tersebar pada TPB 1 dan TPB 4. Dari 14 indikator yang telah dilaksanakan terdapat 11 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, 1 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, dan 2 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.12 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

**Gambar 5.12 Persentase Capaian Indikator TPB Dinas Pendidikan Kota Balikpapan**

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Pendidikan Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.13 dibawah ini.

**Tabel V.13 Capaian Indikator TPB pada Dinas Pendidikan Kota Balikpapan**

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	98,84	Meningkat menjadi 94,78%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	85,77	Meningkat menjadi 82,2%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	94,63	Meningkat menjadi 84,2%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	83,13	Meningkat menjadi 81%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	105,17	Meningkat menjadi 114,09%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	110,56	Meningkat menjadi 106,94%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur $\geq 15$ tahun.	10,92	Meningkat menjadi 8,8 tahun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	49,37	Meningkat menjadi 77,2%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	SD 98,84/ SMP 85,77	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur $\geq 15$ tahun.	99,98	Meningkat menjadi 96,1%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	99,98	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data





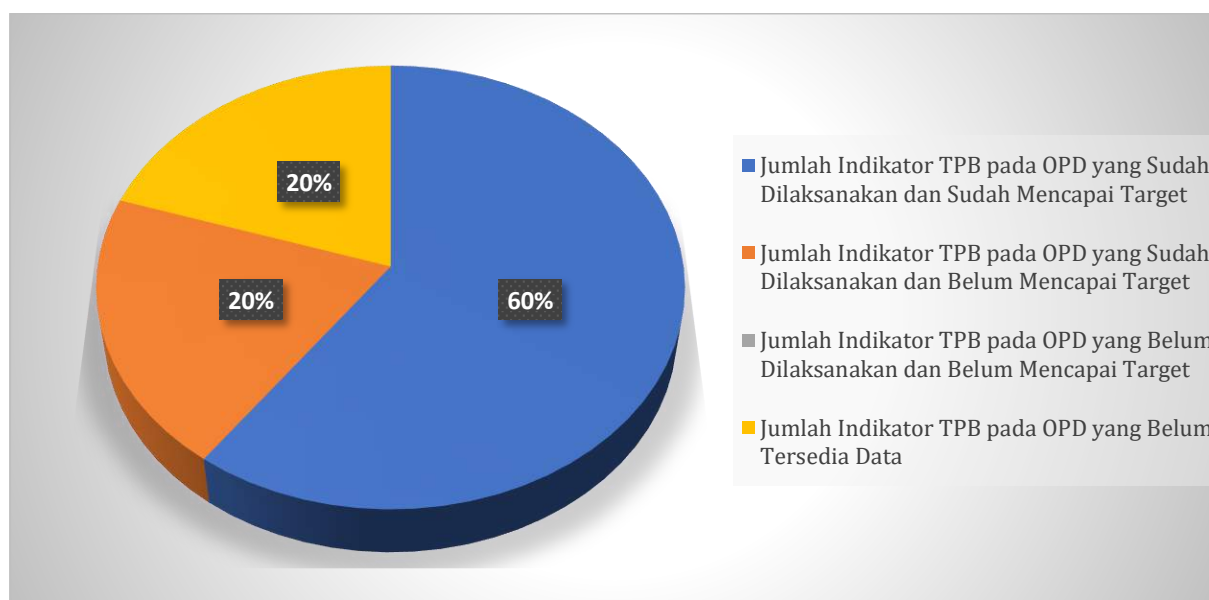
INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	40,76	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Dinas Pendidikan Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar (Rp.706.028.187.019,62) atau sekitar (25,72%) dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikpapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar (Rp.191.352.542.490,93) atau sekitar (27,10%) dari total anggaran Dinas Pendidikan Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 14 indikator TPB sesuai kewenangannya.

### 5.11 DINAS KETENAGAKERJAAN

Adapun tugas pokok Dinas Ketenagakerjaan, yaitu mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja. Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan memiliki 10 indikator yang tersebar pada TPB 1, TPB 4, TPB 8, TPB 9 dan TPB 10. Dari 10 indikator yang telah dilaksanakan terdapat 6 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, 2 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, dan 2 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.13 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

**Gambar 5.13 Persentase Capaian Indikator TPB Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan**

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.14 dibawah ini.



**Tabel V.14 Capaian Indikator TPB pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan**

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	89%	Meningkat menjadi 95%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Tidak Tersedia Data	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	Tidak Tersedia Data
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	PR-TIK remaja : 99.32 PD-TIK dewasa : 91.99	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	64,87	51%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	18.025,42	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	6,9	Menurun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	4,17	Menurun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	23,97	Meningkat	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	20,05	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Tidak Tersedia Data	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	Tidak Tersedia Data

Sumber : Hasil Analisis, 2023

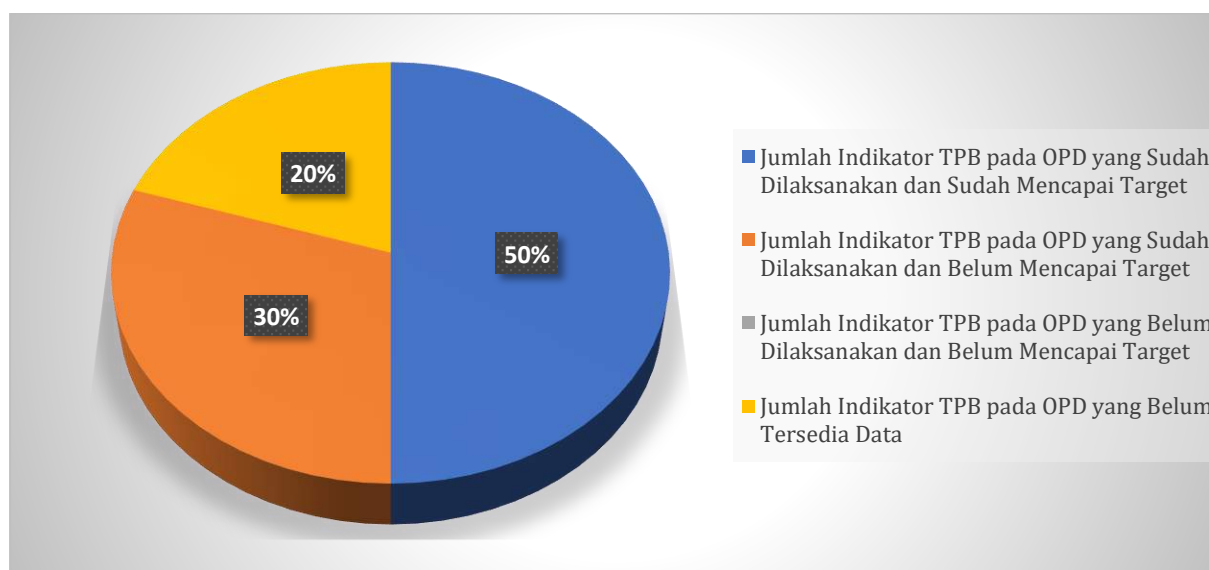
Pada tahun 2022 Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar (Rp. 8.234.464.692,97) atau sekitar (0,30%) dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikpapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar (Rp.2.772.431.374,97) atau sekitar (33,67%) dari total anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 10 indikator TPB sesuai kewenangannya.

## 5.12 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Adapun tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan, yaitu mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan memiliki 10 indikator yang tersebar pada TPB 5, TPB 9, TPB 16 dan TPB 17. Dari 10 indikator yang telah dilaksanakan, terdapat 5 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, 3 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target



nasional, dan 2 indikator yang tidak tersedia data . Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.14 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

**Gambar 5.14** Persentase Capaian Indikator TPB Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.15 dibawah ini.

**Tabel V.15** Capaian Indikator TPB pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	82,23	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	88,46	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	85,60	Meningkat	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur	3	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
	dalam peraturan perundang-undangan.			
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	47.021	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	100	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Tidak Tersedia Data	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	Tidak Tersedia Data
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	69,68	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet	85,60	Meningkat	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional

Sumber : Hasil Analisis, 2023

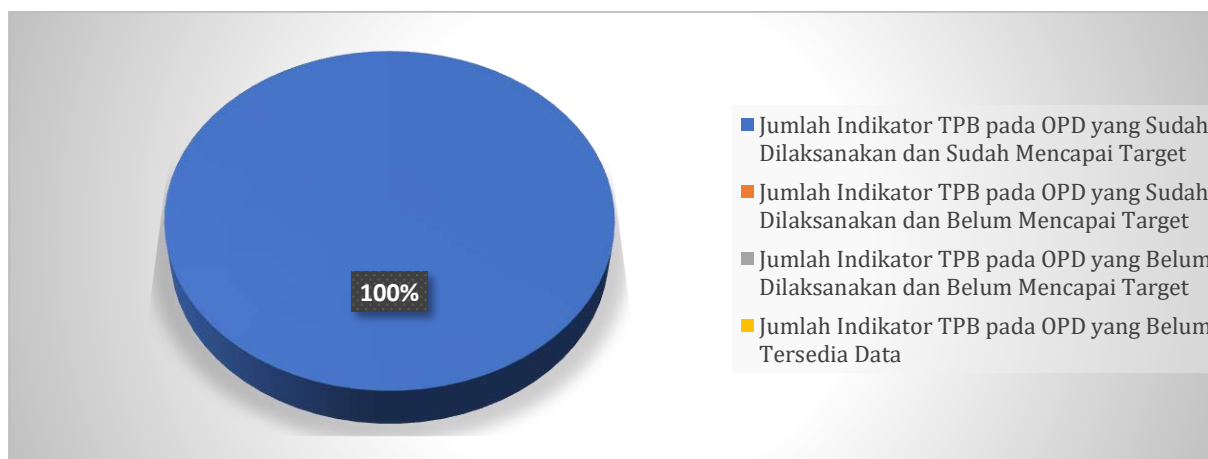
Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan telah mengalokasikan sebesar (Rp. 15.580.760.229,00) atau sekitar (0,57%) dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikpapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar (Rp. 9.760.507.730,00) atau sekitar (62,64%) dari total anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 10 indikator TPB sesuai kewenangannya.

### 5.13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Adapun tugas pokok Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yaitu mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan memiliki 6 indikator yang tersebar pada TPB 1, TPB 16 dan TPB 17. Dari 6 indikator tersebut sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.15 dibawah ini.







(Sumber : Hasil analisis, 2023)

**Gambar 5.15 Persentase Capaian Indikator TPB Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan**

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.16 dibawah ini.

**Tabel V.16 Capaian Indikator TPB pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	99,58	Meningkat menjadi 77,4%.	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	99,91	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	99,58	Meningkat menjadi 77,4%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	99,58	Meningkat menjadi 85%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	87,10%	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada	ada	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

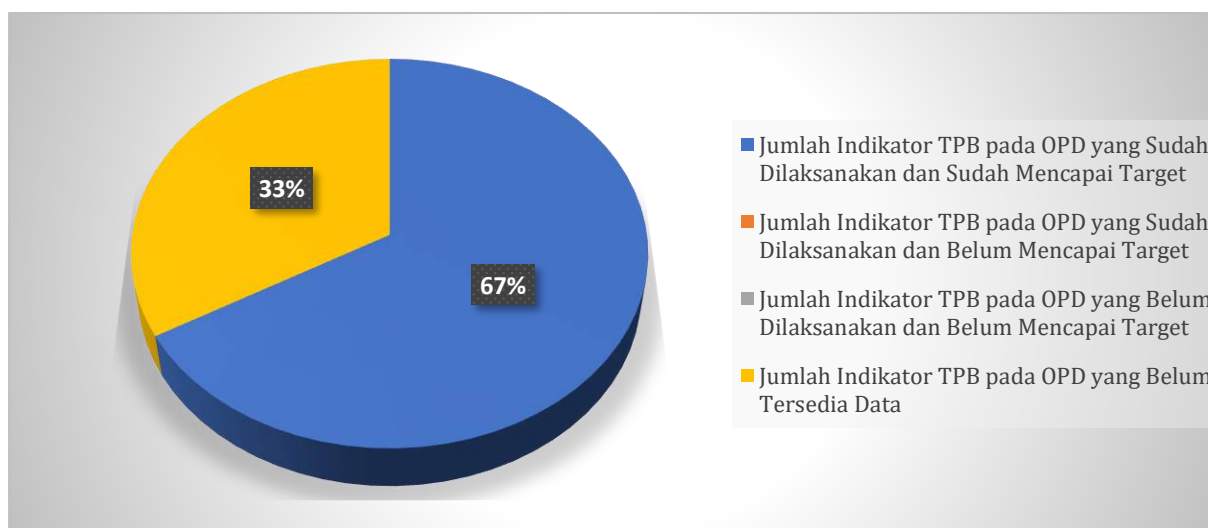
Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar (Rp. 12.931.472.295,00) atau sekitar (0,47%) dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikpapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar (Rp. 5.825.834.359,00) atau sekitar (45,05%) dari total

anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 6 indikator TPB sesuai kewenangannya.

#### 5.14 DINAS PERHUBUNGAN

Adapun tugas pokok Dinas Perhubungan, yaitu mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan memiliki 3 indikator yang ada pada TPB 9 dan TPB 11. Dari 3 indikator tersebut terdapat 2 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, dan 1 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.16 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

**Gambar 5.16 Persentase Capaian Indikator TPB Dinas Perhubungan Kota Balikpapan**

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Perhubungan Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.17 dibawah ini.

**Tabel V.17 Capaian Indikator TPB pada Dinas Perhubungan Kota Balikpapan**

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	3	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	2	24 pelabuhan (skala nasional)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Tidak Tersedia Data	Meningkat menjadi 32%	Tidak Tersedia Data

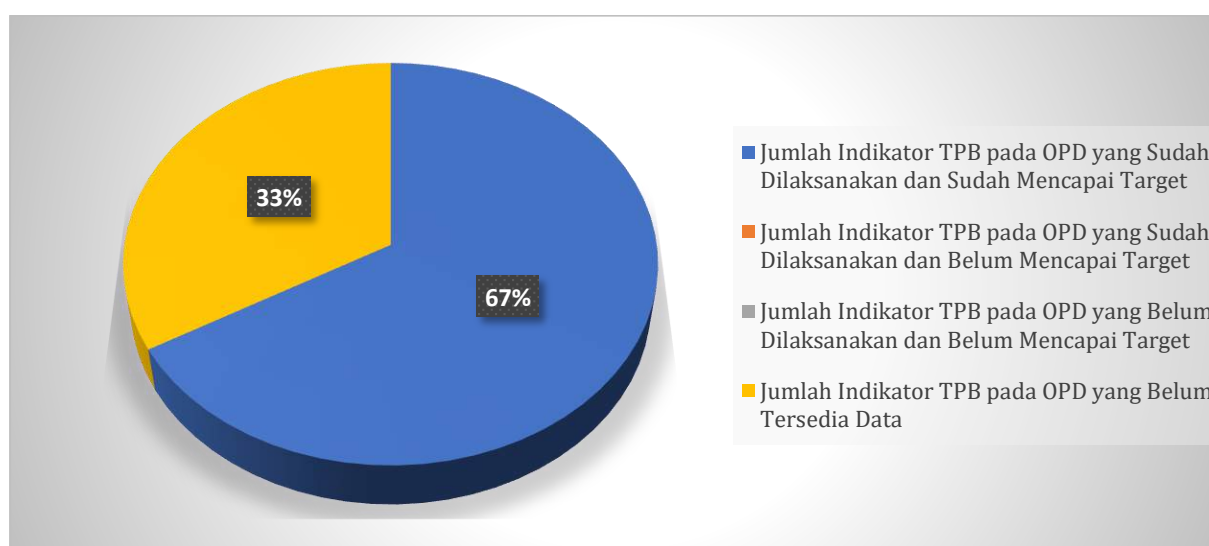
Sumber : Hasil Analisis, 2023



Pada tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar (Rp.80.759.382.647,09) atau sekitar (2,94%) dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikpapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar (Rp. 50.075.924.708,86) atau sekitar (62,01%) dari total anggaran Dinas Perhubungan Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 3 indikator TPB sesuai kewenangannya.

### 5.15 DINAS KOPERASI UMKM DAN PERINDUSTRIAN

Adapun tugas pokok Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian, yaitu mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta bidang perindustrian. Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian memiliki 6 indikator yang ada pada TPB 8 dan TPB 9. Dari 6 indikator yang telah dilaksanakan, terdapat 4 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, dan 2 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.17 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

**Gambar 5.17 Persentase Capaian Indikator TPB Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian Kota Balikpapan**

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.18 dibawah ini.

**Tabel V.18 Capaian Indikator TPB pada Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian Kota Balikpapan**

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	26,59	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

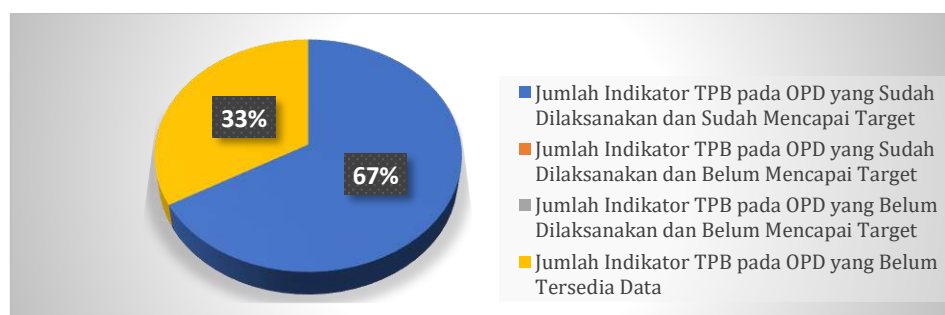
INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	36,5	25%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	47.20	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	4,69	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar (Rp. 30.704.433.351,07) atau sekitar (1,12%) dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikpapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar (Rp. 8.311.207.008,00) atau sekitar (27,07%) dari total anggaran Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 6 indikator TPB sesuai kewenangannya.

## 5.16 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Adapun tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, yaitu mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan memiliki 3 indikator yang ada pada TPB 9, TPB 10, dan TPB 11. Dari 3 indikator terdapat 2 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional dan 1 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.18 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

**Gambar 5.18 Persentase Capaian Indikator TPB Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan**



Adapun capaian indikator TPB pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.19 dibawah ini.

**Tabel V.19 Capaian Indikator TPB pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	0,00152	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
10.1.1*	Koefisien Gini.	0,334	Menurun menjadi 0,36	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data

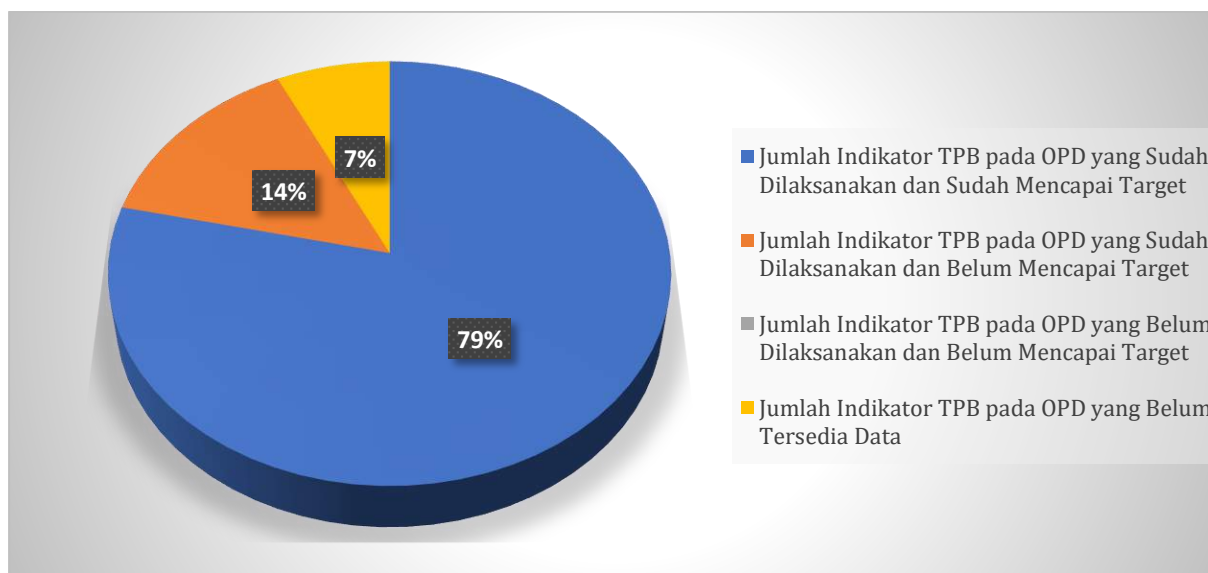
Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar (Rp. 14.908.296.901,00) atau sekitar (0,54%) dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikpapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar (Rp. 5.828.858.809,00) atau sekitar (39,10%) dari total anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 3 indikator TPB sesuai kewenangannya.

### 5.17 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Adapun tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan, yaitu mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan memiliki 14 indikator yang tersebar pada TPB 1, TPB 11, dan TPB 13. Dari 14 indikator yang telah dilaksanakan, terdapat 11 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, 2 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, dan 1 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.19 dibawah ini.





(Sumber : Hasil analisis, 2023)

**Gambar 5.19 Persentase Capaian Indikator TPB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan**

Adapun capaian indikator TPB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.20 dibawah ini.

**Tabel V.20 Capaian Indikator TPB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan**

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	Menurun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	2	Meningkat menjadi 39 daerah	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/Madrasah Aman Bencana)	41	Meningkat menjadi 450	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	2.773.383.000,00	Menurun	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1	ada	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	Menurun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	110,79	Menurun menjadi 30%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	1	ada	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	2.773.383.000,00	Menurun	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	1	Meningkat/ada	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	1	ada	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1	ada	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	Menurun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

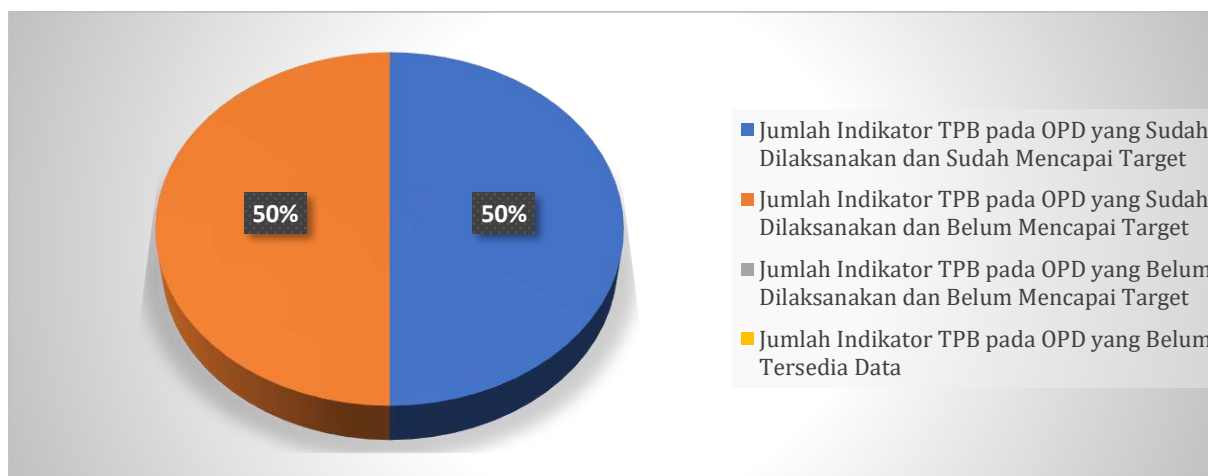
Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan telah mengalokasikan sebesar (Rp. 41.005.558.629,00) atau sekitar (1,49%) dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikpapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar (Rp. 13.733.766.193,00) atau sekitar (33,49%) dari total anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 14 indikator TPB sesuai kewenangannya.

## 5.18 BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Adapun tugas pokok Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yaitu mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelola pajak daerah dan retribusi daerah. Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan memiliki 2 indikator yang berada pada TPB 17. Dari 2 indikator tersebut terdapat 1 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, dan 1 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.20 dibawah ini.





(Sumber : Hasil analisis, 2023)

**Gambar 5.20 Persentase Capaian Indikator TPB Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan**

Adapun capaian indikator TPB pada Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.21 dibawah ini.

**Tabel V.21 Capaian Indikator TPB pada Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan**

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	91 T	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0,89%	Di atas 12%	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional

Sumber : Hasil Analisis, 2023

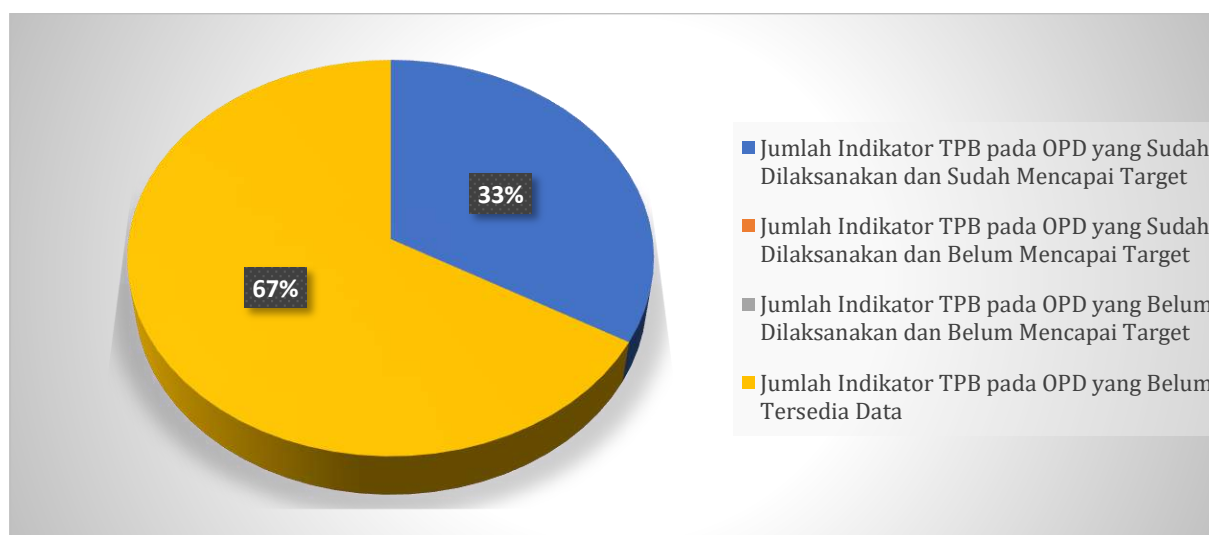
Pada tahun 2022 Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar (Rp. 37.837.495.545,00) atau sekitar (1,38%) dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikpapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar (Rp. 6.929.903.805,00) atau sekitar (18,31%) dari total anggaran Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 2 indikator TPB sesuai kewenangannya.

## 5.19 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Adapun tugas pokok Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan, yaitu mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai bendahara daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan, memiliki 3 indikator yang berada pada TPB 16 dan TPB 17. Dari 3 indikator yang telah dilaksanakan, terdapat 1 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target



nasional, dan 2 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.21 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

**Gambar 5.21 Persentase Capaian Indikator TPB Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan**

Adapun capaian indikator TPB pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.22 dibawah ini.

**Tabel V.22 Capaian Indikator TPB pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan**

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data

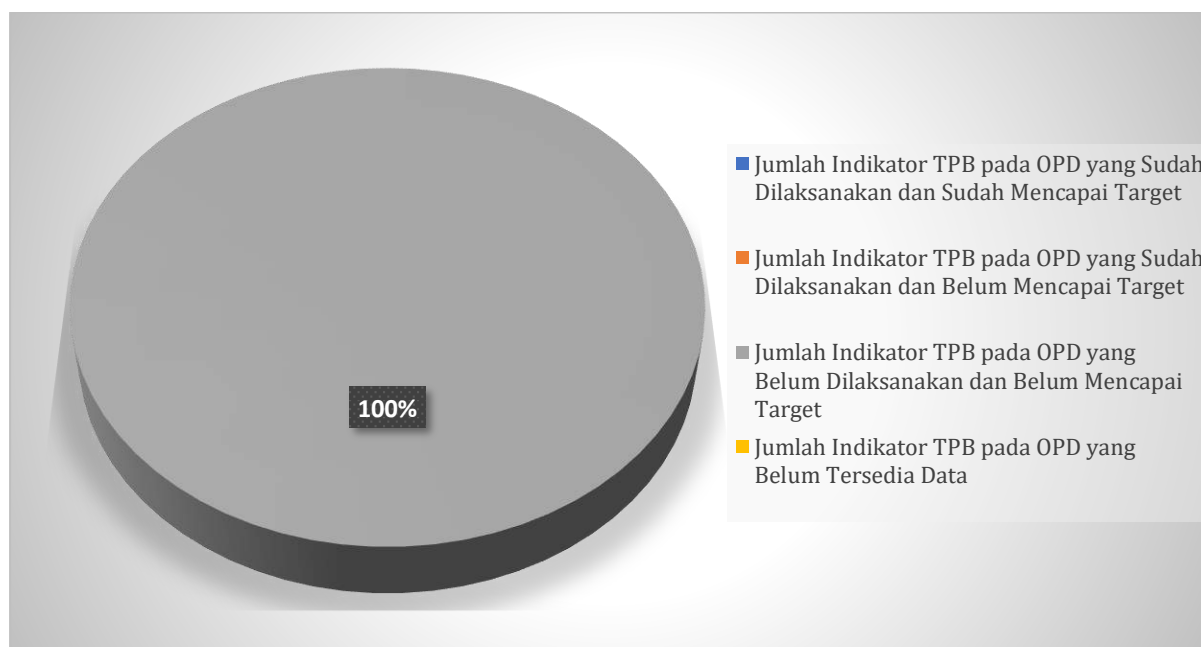
Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar (Rp. 84.110.316.326,57) atau sekitar (3,06%) dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikpapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar (Rp. 38.348.211.435,00) atau sekitar (45,59%) dari total

anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 3 indikator TPB sesuai kewenangannya.

## 5.20 INSPEKTORAT

Inspektorat memiliki 1 indikator yang berada pada TPB 16 dan dari 1 indikator tersebut belum dilaksanakan. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.22 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

**Gambar 5.22 Persentase Capaian Indikator TPB Inspektorat Kota Balikpapan**

Adapun capaian indikator TPB pada Inspektorat Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.23 dibawah ini.

**Tabel V.23 Capaian Indikator TPB pada Inspektorat Kota Balikpapan**

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Tidak Tersedia Data	Meningkat menjadi 4,0	Tidak Tersedia Data

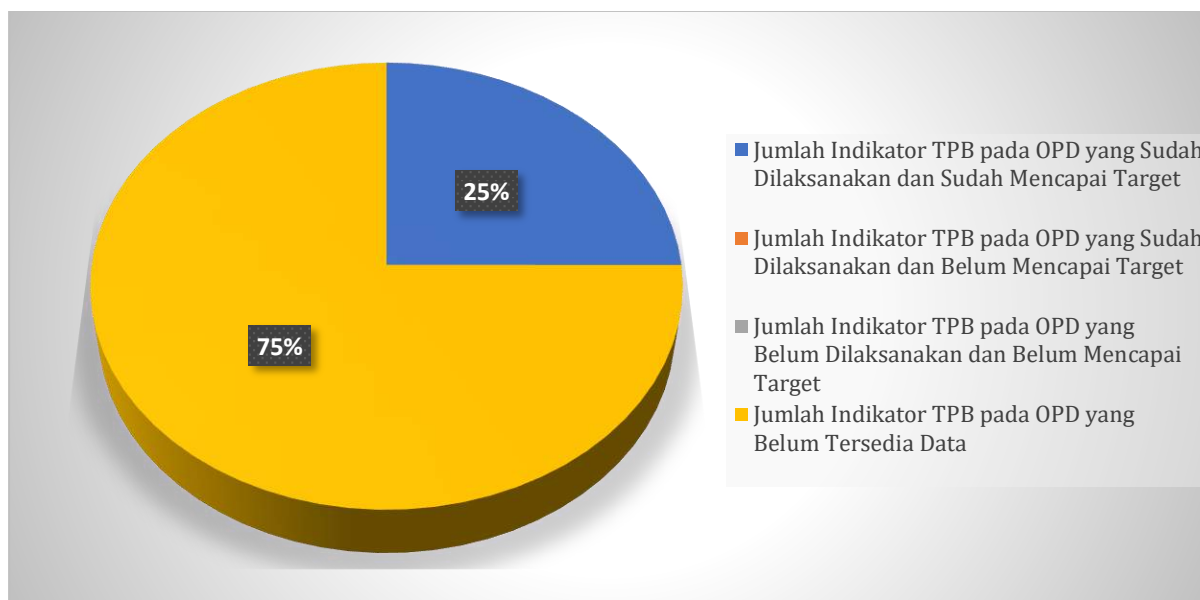
Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pada tahun 2022 Inspektorat Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar (Rp.13.376.482.603,00) atau sekitar (0,49%) dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikpapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar (Rp.4.335.391.611,00) atau sekitar (32,41%) dari total anggaran Inspektorat Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 1 indikator TPB sesuai kewenangannya.



## 5.21 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 4 indikator yang berada pada TPB 16. Dari 4 indikator tersebut terdapat 1 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, dan 3 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.23 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

**Gambar 5.23 Persentase Capaian Indikator TPB Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan**

Adapun capaian indikator TPB pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.24 dibawah ini.

**Tabel V.24 Capaian Indikator TPB pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan**

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	1	Menurun	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Tidak Tersedia Data	Menurun	Tidak Tersedia Data
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Tidak Tersedia Data	Menurun	Tidak Tersedia Data
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Tidak Tersedia Data	Meningkat	Tidak Tersedia Data

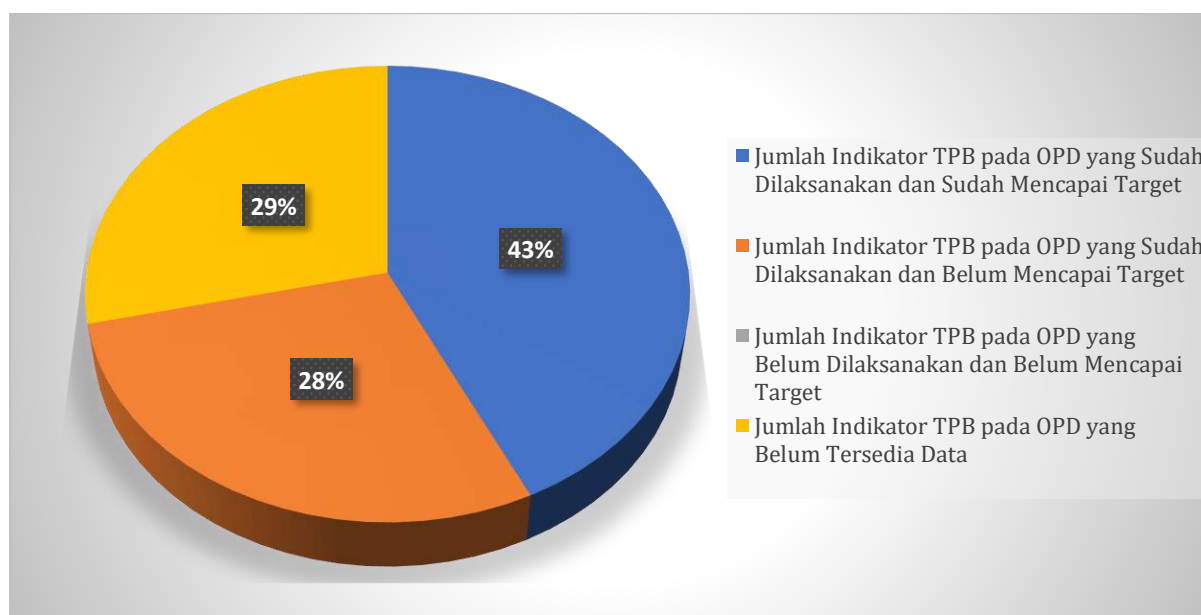
Sumber : Hasil Analisis, 2023



Pada tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan telah menganggarkan sebesar (Rp.11.759.086.513,00) atau sekitar (0,43%) dari total keseluruhan anggaran realisasi Kota Balikpapan, dan untuk pengeluaran anggaran belanja barang dan jasa sebesar (Rp. 5.697.860.025,00) atau sekitar (48,45%) dari total anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan untuk pelaksanaan 4 indikator TPB sesuai kewenangannya.

## 5.22 BADAN PUSAT STATISTIK

Adapun tugas pokok Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, yaitu mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang data statistik. Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan memiliki 7 indikator yang berada pada TPB 8 dan TPB 17. Dari 7 indikator tersebut terdapat 3 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, 2 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, dan 2 indikator yang tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.24 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

**Gambar 5.24 Persentase Capaian Indikator TPB Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan**

Adapun capaian indikator TPB pada Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.25 dibawah ini.



**Tabel V.25 Capaian Indikator TPB pada Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan**

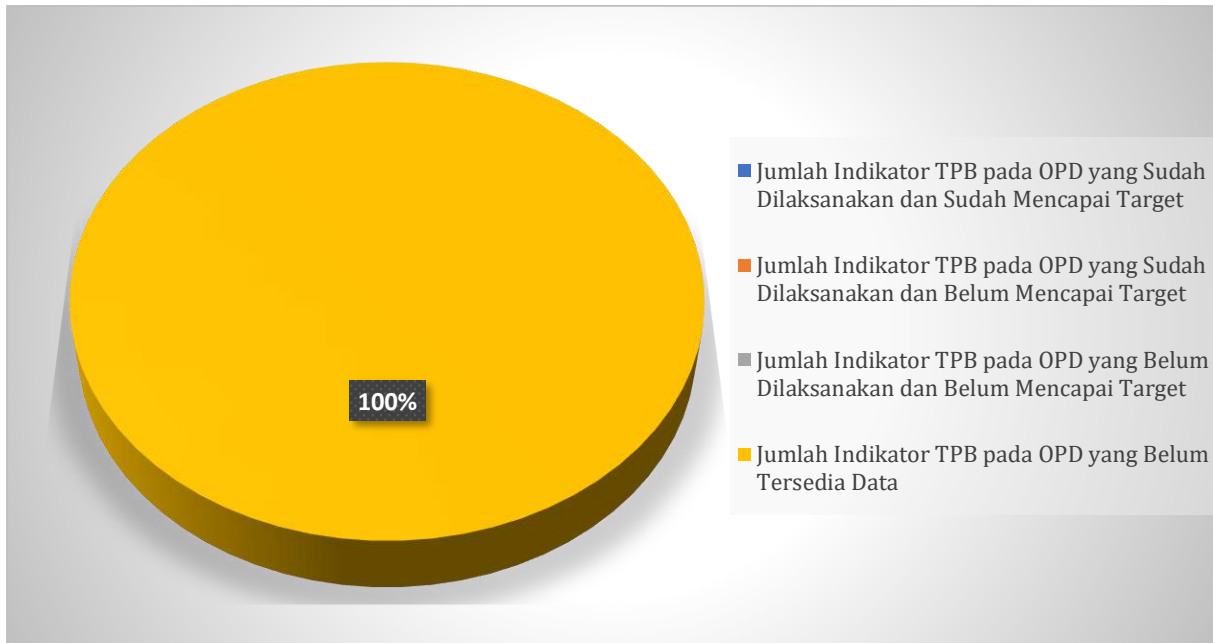
INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	3.7**	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	129481.26**	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	-0,29%	Meningkat	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tidak Tersedia Data	ada	Tidak Tersedia Data
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tidak Tersedia Data	ada	Tidak Tersedia Data
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	100	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	57	Meningkat	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

Sumber : Hasil Analisis, 2023

### 5.23 BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI-HUTAN LINDUNG

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Hutan Lindung memiliki 1 indikator yang berada pada TPB 15 dan dari 1 indikator tersebut tidak tersedia data. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.25 dibawah ini.





(Sumber : Hasil analisis, 2023)

**Gambar 5.25 Persentase Capaian Indikator TPB Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Hutan Lindung**

Adapun capaian indikator TPB pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Hutan Lindung secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.26 dibawah ini.

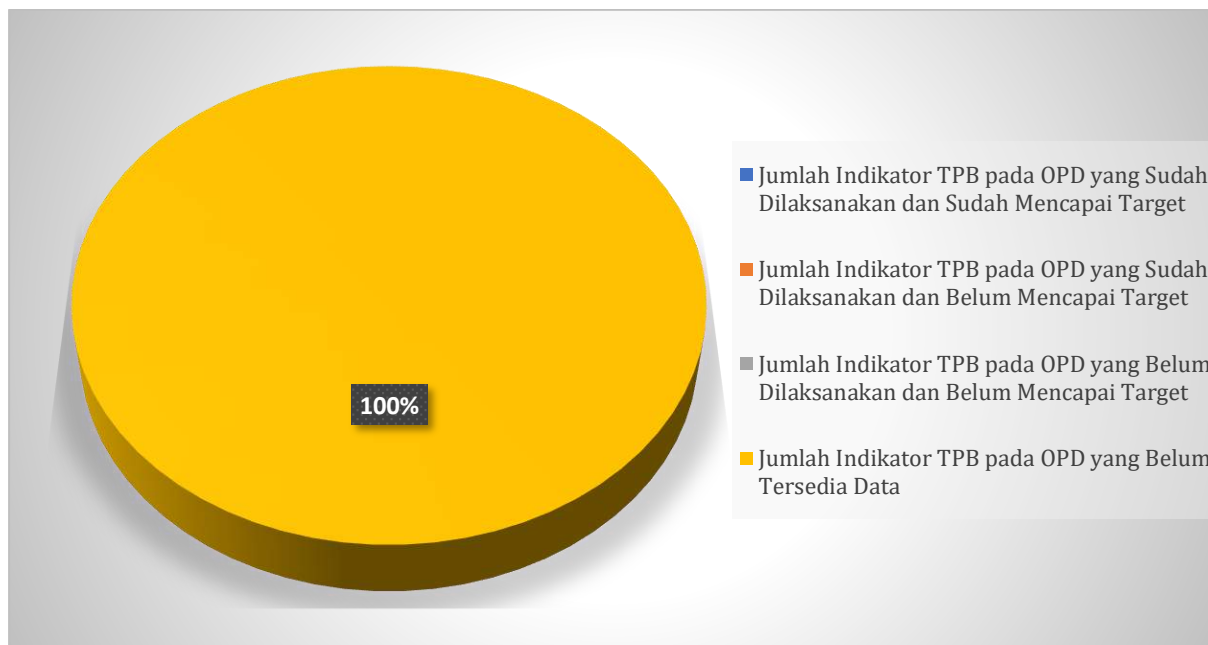
**Tabel V.26 Capaian Indikator TPB pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Hutan Lindung**

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Tidak Tersedia Data	5,5 juta ha (skala nasional)	Tidak Tersedia Data

Sumber : Hasil Analisis, 2023

## 5.24 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Balikpapan memiliki 1 indikator yang berada pada TPB 1. Dari 1 tersebut indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional. Jelasnya dapat dilihat Gambar 5.26 dibawah ini.



(Sumber : Hasil analisis, 2023)

**Gambar 5.26 Persentase Capaian Indikator TPB Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Balikpapan**

Adapun capaian indikator TPB pada Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Balikpapan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel V.27 dibawah ini.

**Tabel V.27 Capaian Indikator TPB pada Perusahaan Listrik Negara (PLN)**

INDIKATOR TPB		Capaian Eksisting	Perpres 59/2017	Gap Capaian dengan Perpres 59/2017
NO	INDIKATOR			
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Tidak Tersedia Data	Meningkat menjadi 100%	Tidak Tersedia Data

Sumber : Hasil Analisis, 2023







# BAB 6

## ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI



Skenario pembangunan berkelanjutan dirumuskan dari kondisi pencapaian TPB yang diproyeksikan dari analisis data, untuk menghasilkan kondisi dan alternatif target pencapaian TPB selama masa pencapaian TPB yang disesuaikan dalam jangka waktu masa berlakunya RPJPD. Pencapaian target TPB selama periode tersebut dilaksanakan dengan menyusun serangkaian alternatif skenario sebagai berikut:

- a) Alternatif skenario tanpa upaya tambahan, yaitu skenario yang disusun dengan mempertahankan TPB yang telah menyamai atau melampaui target nasional;
- b) Alternatif skenario dengan upaya tambahan, yaitu percepatan pencapaian target TPB dengan memperhatikan:
  - Pencapaian target tanpa upaya tambahan;  
Melihat kesenjangan (Gap) antara proyeksi capaian TPB tanpa upaya tambahan dengan target TPB tahun 2030. Target skenario tanpa upaya tambahan menjadi baseline untuk menentukan besaran intervensi yang harus dilakukan.
  - Pencapaian target yang ditetapkan secara nasional;  
Sasaran strategis yang disusun beserta targetnya harus dapat berkontribusi pada pencapaian target TPB yang ditetapkan secara nasional. Upaya tambahan merupakan bentuk intervensi untuk mencapai target dalam rangka mengurangi gap antara capaian TPB daerah dengan target TPB nasional.
  - Potensi, daya saing, dan inovasi daerah;  
Upaya tambahan memperhatikan rekomendasi terkait sasaran strategis pembangunan berkelanjutan. Rumusan sasaran strategis mempertimbangkan potensi, daya saing, dan inovasi daerah yang dapat dikembangkan sebagai sumber sumber pendanaan.

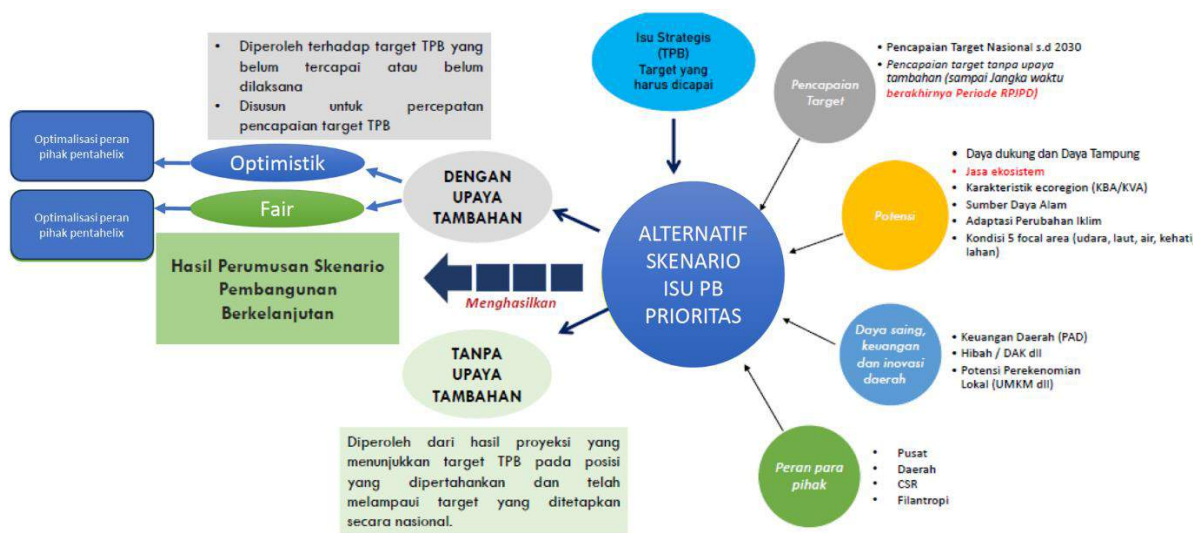
Alternatif proyeksi tanpa atau dengan upaya tambahan pada perumusan skenario pembangunan di atas, menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi yang berisi permasalahan, isu strategis, dan sasaran strategis daerah, dengan ketentuan :

- Rumusan permasalahan menggambarkan kendala dan tantangan dalam pencapaian TPB, serta menjelaskan penyebab terjadinya kesenjangan/gap antara proyeksi pencapaian TPB dan target capaian TPB secara nasional.
- Rumusan isu strategis menjelaskan isu utama pencapaian TPB sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian TPB.
- Sasaran strategis daerah merupakan kondisi pencapaian TPB yang disusun berdasarkan isu strategis dan permasalahan. Sasaran strategis dilengkapi dengan target capaian selama periode RPJMD. Dalam merumuskan sasaran strategis daerah, DDDT-LH menjadi salah satu pertimbangan.

Guna memudahkan proses penelaahan KLHS RPJPD, pemerintah daerah dapat melengkapi rekomendasi pencapaian TPB dengan menyusun strategi dan program strategis. Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran strategis. Sedangkan program strategis berisikan rumusan program sebagai bentuk implementasi dari strategi. Program strategis disusun dalam dua periode, program strategis jangka menengah (5 tahunan), dan program strategis jangka panjang (sampai dengan 2045).



Dibawah ini merupakan Gambar rumusan alternatif skenario yang digunakan di Kota Balikpapan.



Gambar 6.1 Rumusan Alternatif Skenario

## 6.1 SKENARIO PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN PRIORITAS DI KOTA BALIKPAPAN

### 6.1.1 Skenario Pencapaian Target TPB 1 Menghapus Kemiskinan

Di Kota Balikpapan TPB 1 Menghapus Kemiskinan target yang menjadi isu yaitu antara lain Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan, Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro, Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana, dan Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.

Bila dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2022 persentas kemiskinan di Kota Balikpapan yaitu sebesar 2,45% atau turun 0,44% dari Tahun 2021 yaitu sebesar 2,89%.

**Tabel VI.1 Gap/Masalah TPB 1 Menghapus Kemiskinan di Kota Balikpapan**

TARGET YANG MENJADI ISU	GAP/ MASALAH	KETERANGAN CAPAIAN
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1 (a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
	1.3.1 (b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Tidak Tersedia Data (NA)
	1.3.1 (c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Tidak Tersedia Data (NA)
	1.3.1 (d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
1.4. Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1 (d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
	1.4.1 (e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
	1.4.1 (k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Tidak Tersedia Data (NA)
1.5 Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1 (c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Tidak Tersedia Data (NA)
	1.5.2 (a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1' Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Tidak Tersedia Data (NA)
	1.a.2' Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Tidak Tersedia Data (NA)

Sumber : Hasil Analisis, 2023



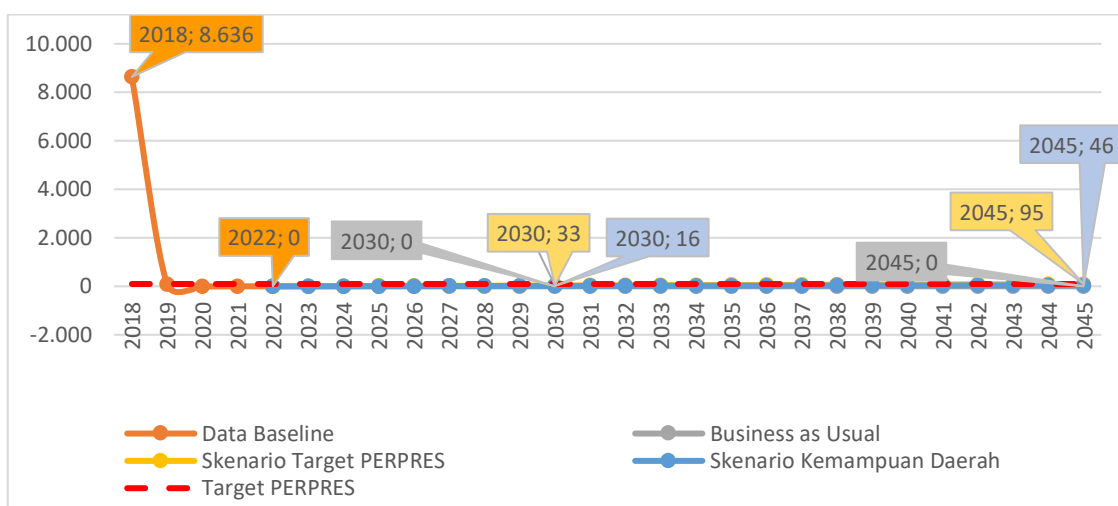
Dibawah ini akan dijabarkan mengenai alternatif skenario TPB 1 di Kota Balikpapan.

1) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan

JENIS URUSAN	SOSIAL
NO. INDIKATOR	1.3.1.(a)
INDIKATOR TPB	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
Sumber Data	Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Meningkat menjadi 95%
Nilai Target	95
Gap (Realisasi-Target)	95
Gap Kemampuan Daerah	38

Proporsi peserta program jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan di Kota Balikpapan meningkat menjadi 95% sesuai dengan Target Perpres 59/2017.

Untuk meningkatkan maka diperlukan upaya tambahan dibawah ini Proyeksi BAU.



Proyeksi BAU (1.3.1.a)

Gambar 6.1 Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan

2) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan

JENIS URUSAN	SOSIAL
NO. INDIKATOR	1.3.1.(d)
INDIKATOR TPB	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.
Sumber Data	Dinas Sosial (DINSOS)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Menurun menjadi 2,8 juta
Nilai Target	0
Gap (Realisasi-Target)	-4857
Gap Kemampuan Daerah	-1951

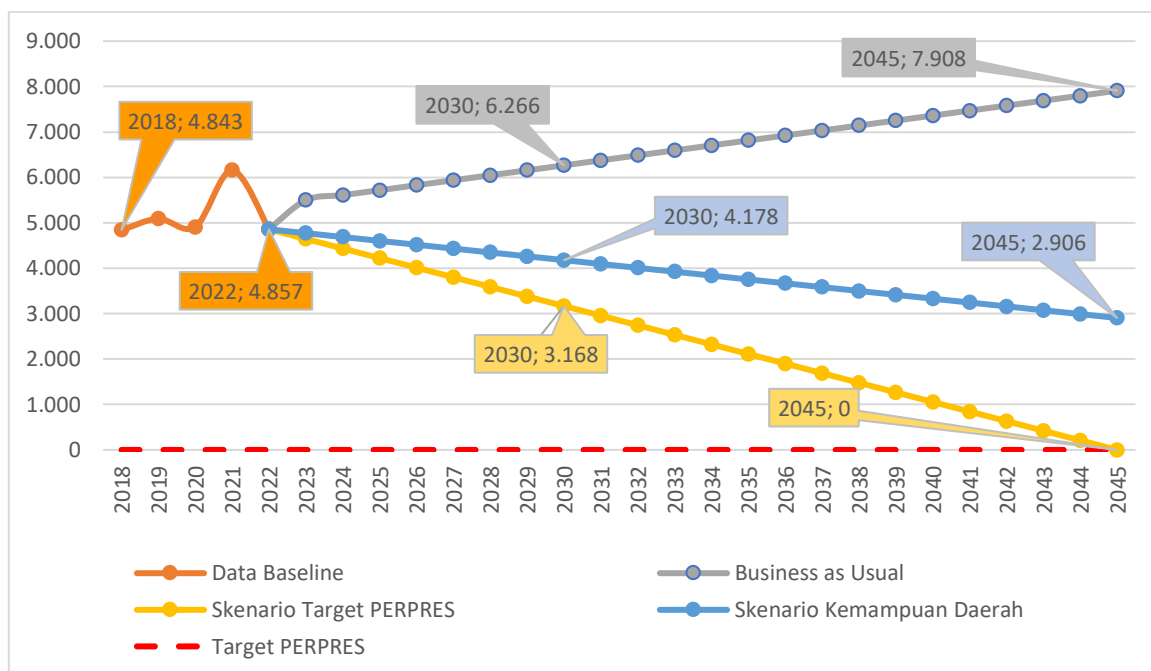
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/program keluarga harapan di Kota Balikpapan dengan capaian eksisting sebesar 4.857 Diharapkan menurun menjadi 2,8 juta sesuai dengan target dari Perpres 59/2017.

Untuk itu diperlukan upaya tambahan melalui BAU yang diharapkan pada Tahun 2030 turun menjadi 3.168 dan pada

Tahun 2045 menjadi 0.







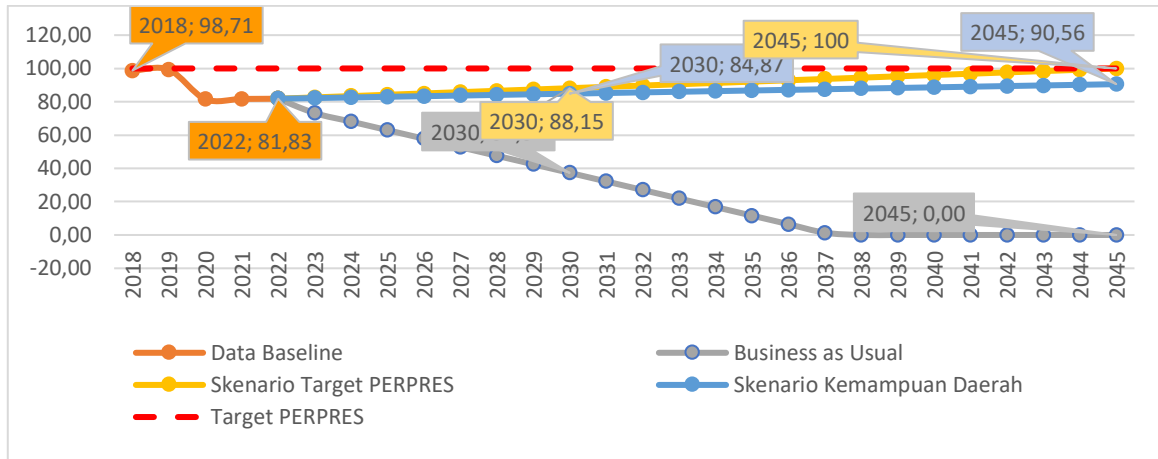
Proyeksi BAU (1.3.1.d)

**Gambar 6.2 Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan**

3) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan

JENIS URUSAN	SOSIAL
NO. INDIKATOR	1.4.1.(d)
INDIKATOR TPB	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum (PU)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Meningkat menjadi 100%
Nilai Target	100
Gap (Realisasi-Target)	18
Gap Kemampuan Daerah	9

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan di Kota Balikpapan dengan capaian eksisting sebesar 81,83%, untuk itu diproyeksikan meningkat menjadi 100% sesuai dengan target Perpres 59/2017. Adapun proyeksi BAU diproyeksikan pada Tahun 2030 sebesar 88,15% dan pada Tahun 2045 menjadi 100%.



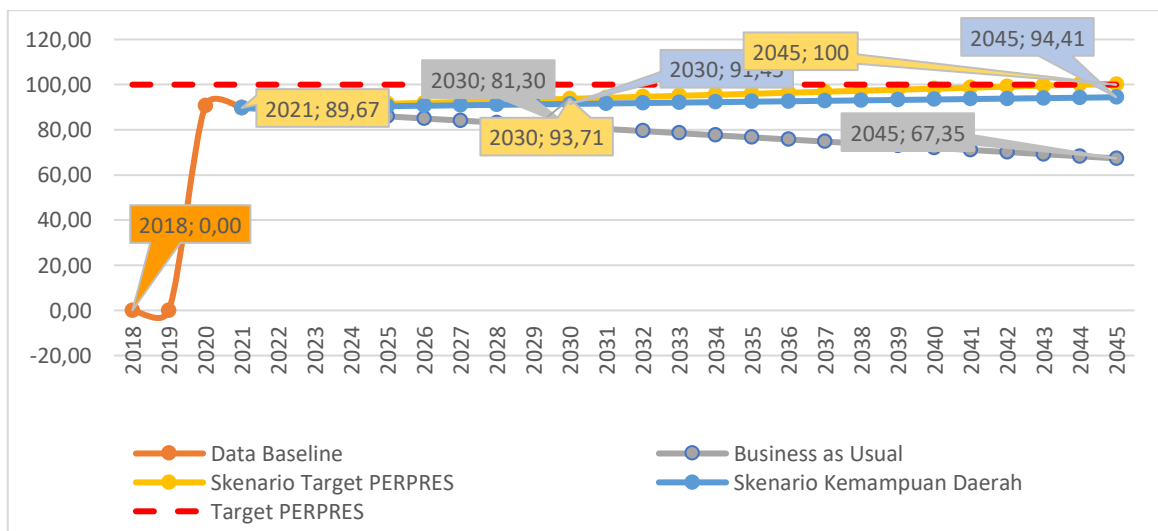
Proyeksi BAU (1.4.1.d)

**Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan**

4) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan

JENIS URUSAN	SOSIAL
NO. INDIKATOR	1.4.1.(e)
INDIKATOR TPB	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
Sumber Data	Dinas Kesehatan (DINKES)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Meningkat menjadi 100%
Nilai Target	100
Gap (Realisasi-Target)	10
Gap Kemampuan Daerah	5

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di Kota Balikpapan dengan capaian eksisting sebesar 89,67% dan ditargetkan meningkat menjadi 100% menurut Perpres 59/2017, untuk itu proyeksi BAU pada Tahun 2030 sebesar 81,30% dan pada Tahun 2045 sebesar 67,35%, masih ada Gap realisasi dan target sebesar 10% serta gap kemampuan daerah sebesar 5%.



Proyeksi BAU (1.4.1.e)

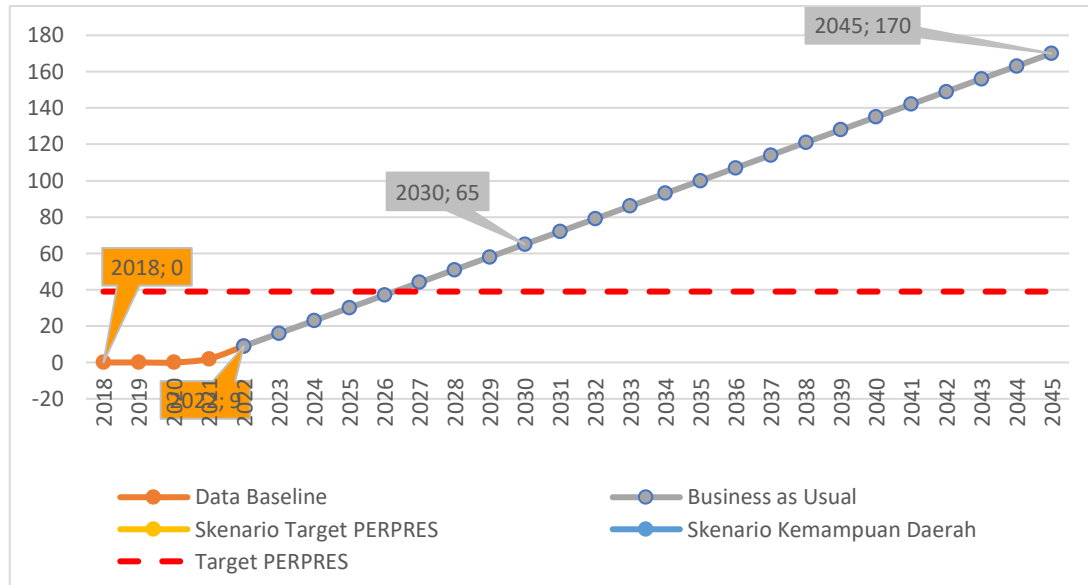
**Gambar 6.4 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Dan Berkelanjutan**



5) Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan risiko bencana alam

JENIS URUSAN	SOSIAL
NO. INDIKATOR	1.5.1.(a)
INDIKATOR TPB	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Meningkat menjadi 39 daerah
Nilai Target	39
Gap (Realisasi-Target)	30
Gap Kemampuan Daerah	12

Capaian eksisting jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana alam di Kota Balikpapan yaitu sebesar 9% atau dapat dikatakan masih jauh dari target Perpres 59/2017 yaitu sebesar 39%.



Proyeksi BAU (1.5.1.a)

Gambar 6.5 Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan risiko bencana alam

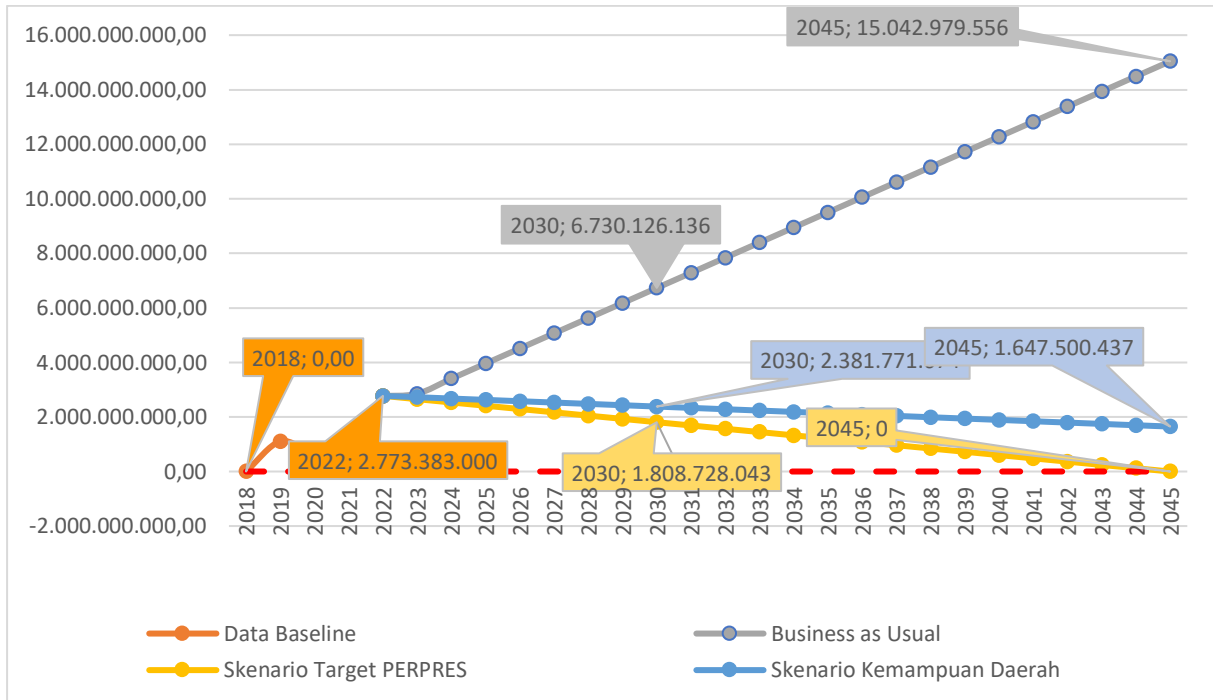
6) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana

JENIS URUSAN	SOSIAL
NO. INDIKATOR	1.5.2.(a)
INDIKATOR TPB	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Menurun
Nilai Target	0
Gap (Realisasi-Target)	-2773383000
Gap Kemampuan Daerah	-1125882563

Di Kota Balikpapan masuk kedalam daerah rawan bencana banjir, bencana longsor, bencana kebakaran, bencana angin topan, dan bencana sosial, dan bencana perubahan iklim, sehingga bila dilihat rawan bencana ini rentang mengakibatkan kerugian ekonomi.

Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana di Kota Balikpapan diharapkan menurun sesuai dengan target Perpres 59/2017, untuk itu dibutuhkan upaya tambahan untuk mencapai target tersebut, saat ini masih ada gap (realisasi-target) dan gap kemampuan daerah.





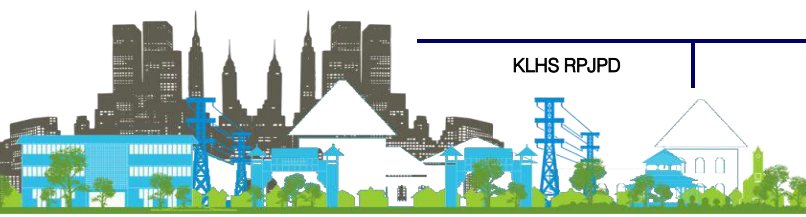
Proyeksi BAU (1.5.2.a)

**Gambar 6.6** Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana

Dibawah ini merupakan rekomendasi arah kebijakan TPB 1 di Kota Balikpapan.

**Tabel VI.2** Rekomendasi Arah Kebijakan TPB 1

NO. TPB	NO. TARGET	TARGET	ARAH KEBIJAKAN
1	1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Menerapkan sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua
	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Menjamin masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
	1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.





NO. TPB	NO. TARGET	TARGET	ARAH KEBIJAKAN
	1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	Menjamin mobilisasi untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik

Sumber : Hasil Analisis, 2023

### 6.1.2 Skenario Pencapaian Target TPB 2 Tanpa Kelaparan

Target yang menjadi isu pencapaian target TPB 2 Tanpa Kelaparan di Kota Balikpapan yaitu Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun dan Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

Dapat dilihat untuk daya dukung pangan di Kota Balikpapan 81% belum melampaui dan 19 sudah melampaui, Kecamatan yang mempunyai status daya dukung pangan yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Selatan dengan luas 2.558,18 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 17.941,54 Ha.

Untuk ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kota Balikpapan yaitu Luasan Ketersediaan Pangan di Kota Balikpapan yaitu 916.178.290.606,89 Kkal / Tahun, untuk kebutuhan pangan 432.242.654.250,00 Kkal/Tahun.

Sedangkan untuk jasa lingkungan penyedia pangan di Kota Balikpapan 62 % masuk kedalam kategori tinggi, 26 % kategori sedang dengan Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Penyedia Pangan di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa tinggi dengan total luas sebesar 31.739,67 Ha.

**Tabel VI.3 Gap/Masalah TPB 2 Tanpa Kelaparan di Kota Balikpapan**

TARGET YANG MENJADI ISU	GAP/ MASALAH	KETERANGAN CAPAIAN
2.1 Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2 (a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Belum Dilaksanakan (BB)
2.2 Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)



TARGET YANG MENJADI ISU	GAP/ MASALAH	KETERANGAN CAPAIAN
pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	<b>2.2.1 (a)</b> Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
	<b>2.2.2 (c)</b> Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)

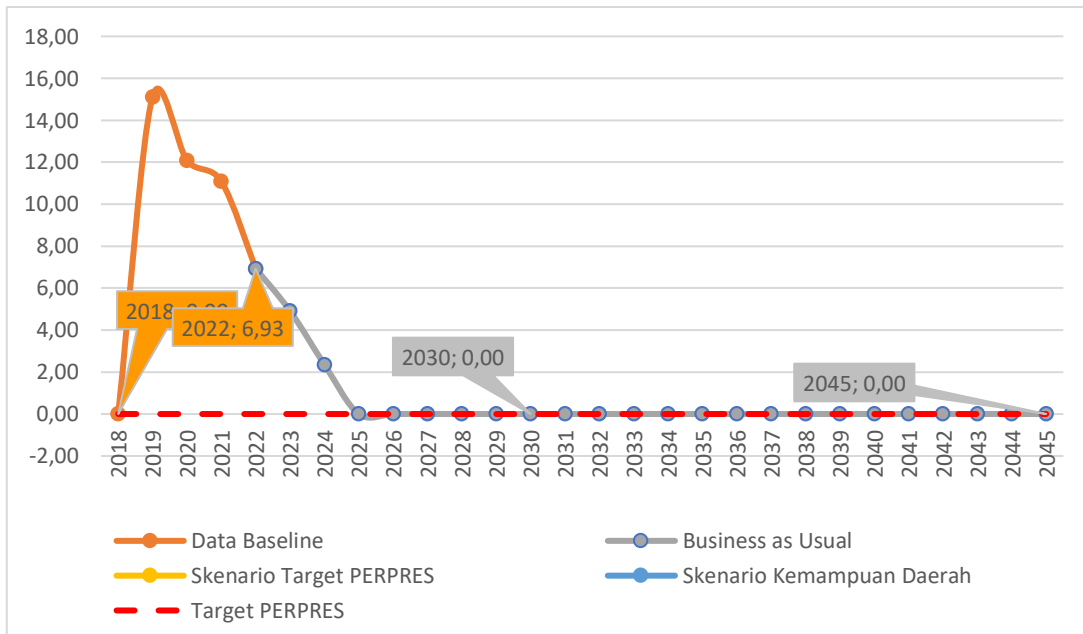
Sumber : Hasil Analisis, 2023

Dibawah ini akan dijabarkan mengenai alternatif skenario TPB 2 di Kota Balikpapan.

1) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita

JENIS URUSAN	SOSIAL
NO. INDIKATOR	2.2.1*
INDIKATOR TPB	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.
Sumber Data	Dinas Kesehatan (DINKES)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Menurun
Nilai Target	0
Gap (Realisasi-Target)	-7
Gap Kemampuan Daerah	-3

untuk prevalensi stunting pada anak di bawah lima tahun / balita di Kota Balikpapan dengan capaian eksisting saat ini yaitu sebesar 6,93% dapat dikatakan sudah sangat baik sehingga proyeksi BAU tanpa upaya tambahan yang diharapkan pada Tahun 2030 menurun menjadi 0%.



Proyeksi BAU (2.2.1)

Gambar 6.7 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita

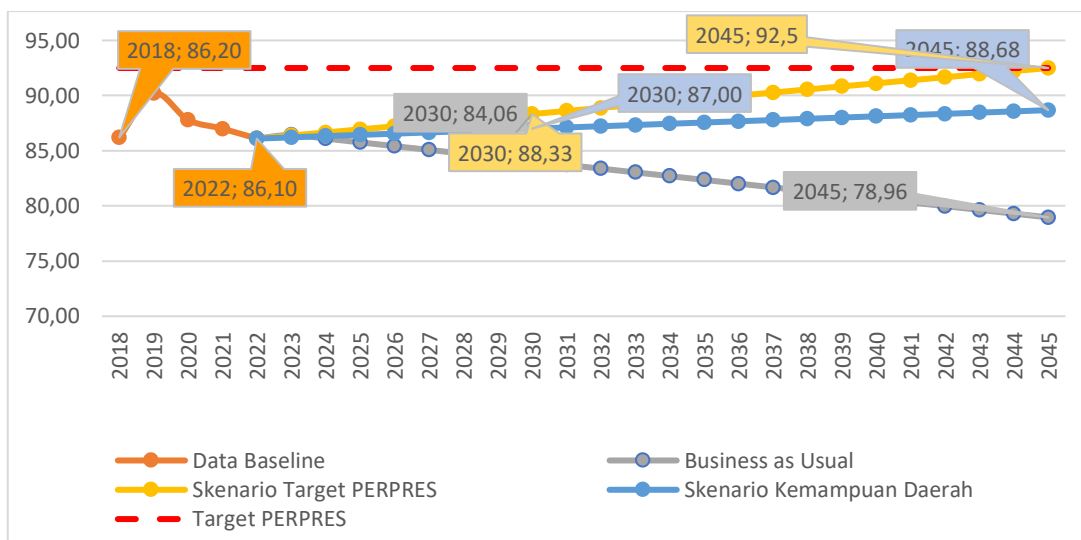


2) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan

JENIS URUSAN	SOSIAL
NO. INDIKATOR	2.2.2.(c)
INDIKATOR TPB	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.
Sumber Data	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan
Nilai Target	92,5
Gap (Realisasi-Target)	6
Gap Kemampuan Daerah	3

Capaian eksisting terkait dengan Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan di Kota Balikpapan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 86,10% bila dikatakan sudah sangat baik namun harus ditingkatkan sesuai dengan target perpres 59/2017 sebesar 92,5% untuk proyeksi BAU diperlukan upaya tambahan untuk mencapai target tersebut, karena dapat dilihat masih ada Gap (Realisasi-Target)

sebesar 6% dan Gap kemampuan daerah 3%.



Proyeksi BAU (2.2.2.c)

**Gambar 6.8** Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan

Dibawah ini merupakan rekomendasi arah kebijakan TPB 2 di Kota Balikpapan.

**Tabel VI.4** Rekomendasi Arah Kebijakan TPB 2

NO. TPB	NO. TARGET	TARGET	ARAH KEBIJAKAN
2	2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.



NO. TPB	NO. TARGET	TARGET	ARAH KEBIJAKAN
	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

Sumber : Hasil Analisis, 2023

### 6.1.3 Skenario Pencapaian Target TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Untuk skenario pencapaian target TPB 3 kehidupan sehat dan sejahtera di Kota Balikpapan target yang menjadi isu antara lain Mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan, Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan, Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional, Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang, Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah, serta Memperkuat pelaksanaan *the Framework Convention on Tobacco Control* WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.

**Tabel VI.5 Gap/Masalah TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera di Kota Balikpapan**

TARGET YANG MENJADI ISU	GAP/ MASALAH	KETERANGAN CAPAIAN
3.4 Mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
	3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Tidak Tersedia Data (NA)
	3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur $\geq$ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Tidak Tersedia Data (NA)
3.7 Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga	3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)





TARGET YANG MENJADI ISU	GAP/ MASALAH	KETERANGAN CAPAIAN
berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	
	<b>3.7.2*</b> Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
<b>3.8</b> Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	<b>3.8.1.(a)</b> Unmet need pelayanan kesehatan.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
<b>3.9</b> Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	<b>3.9.3.(a)</b> Proporsi kematian akibat keracunan.	Tidak Tersedia Data (NA)
<b>3.a</b> Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	<b>3.a.1*</b> Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)

Sumber : Hasil Analisis, 2023

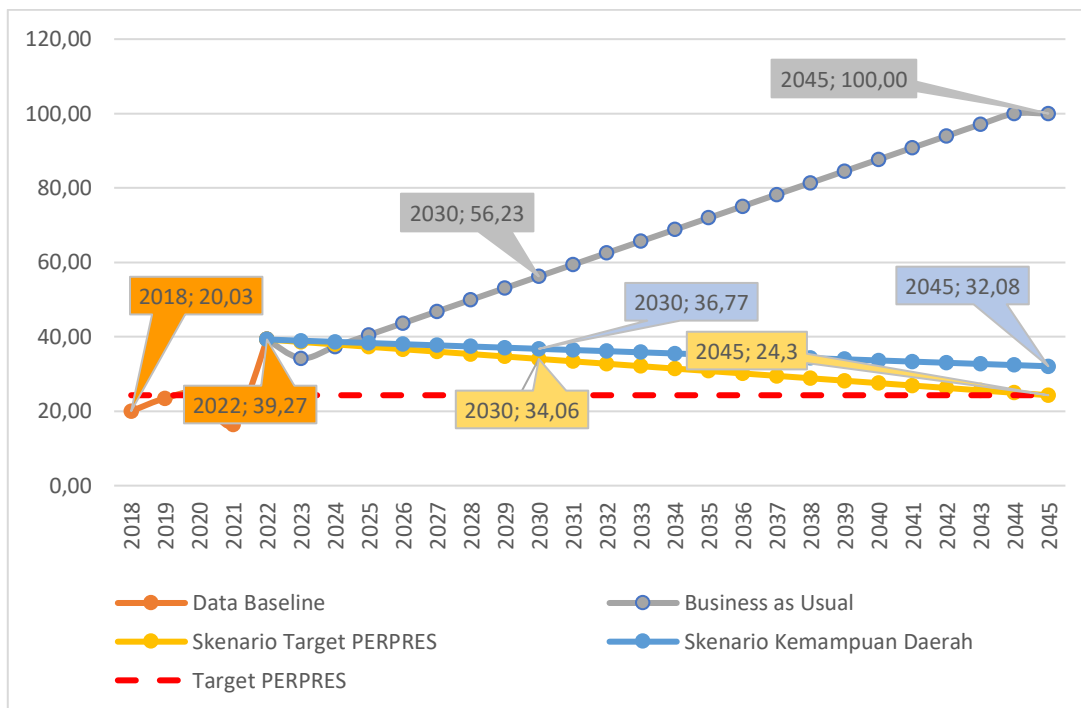
Dibawah ini akan dijabarkan mengenai alternatif skenario TPB 3 di Kota Balikpapan.

### 1) Prevalensi tekanan darah tinggi

JENIS URUSAN	SOSIAL
NO. INDIKATOR	3.4.1.(b)
INDIKATOR TPB	Prevalensi tekanan darah tinggi.
Sumber Data	Dinas Kesehatan (DINKES)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Menurun menjadi 24,3%
Nilai Target	24,3
Gap (Realisasi-Target)	-15
Gap Kemampuan Daerah	-7

Capaian eksisting prevalensi tekanan darah tinggi di Kota Balikpapan 39,27% pada tahun 2022 untuk itu perlu upaya tambahan untuk menurunkan menjadi 24,3% sesuai dengan target dari Perpres 59/2017. Proyeksi BAU diharapkan pada Tahun 2030 turun menjadi 34,06% dan pada Tahun 2045 menjadi 24,3%.





Proyeksi BAU (3.4.1.b)

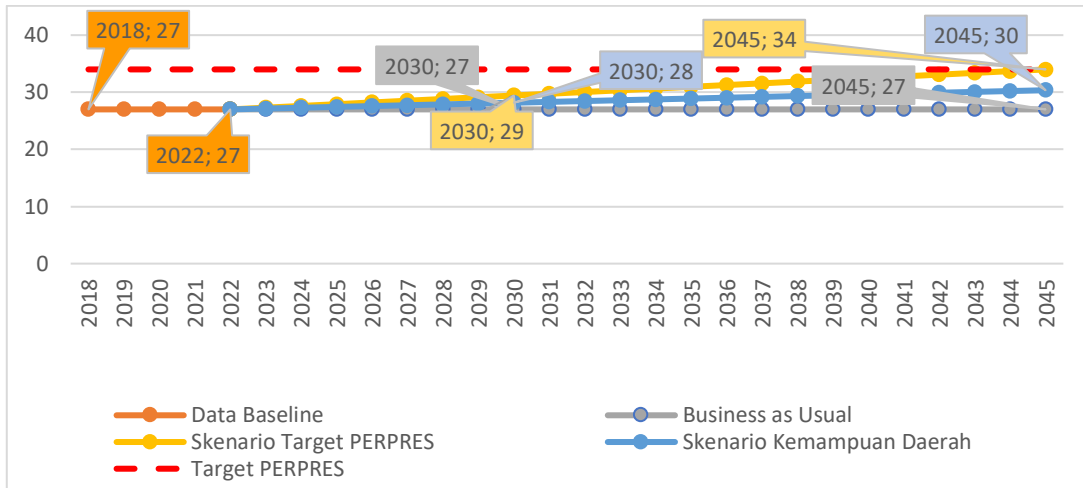
**Gambar 6.9 Prevalensi Tekanan Darah Tinggi**

2) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa

JENIS URUSAN	SOSIAL
NO. INDIKATOR	3.4.2.(a)
INDIKATOR TPB	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.
Sumber Data	Dinas Kesehatan (DINKES)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Meningkat menjadi 280
Nilai Target	34
Gap (Realisasi-Target)	7
Gap Kemampuan Daerah	3

Capaian eksisting untuk jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa di Kota Balikpapan pada Tahun 2022 berjumlah 27 unit yang kemudian ditargetkan menjadi 34 unit namun ada Gap (Realisasi-target) sebesar 7% dan Gap Kemampuan daerah 3%, untuk itu dibutuhkan upaya tambahan, proyeksi BAU diharapkan pada Tahun 2030 meningkat menjadi

29 unit dan pada Tahun 2045 naik menjadi 34 unit.



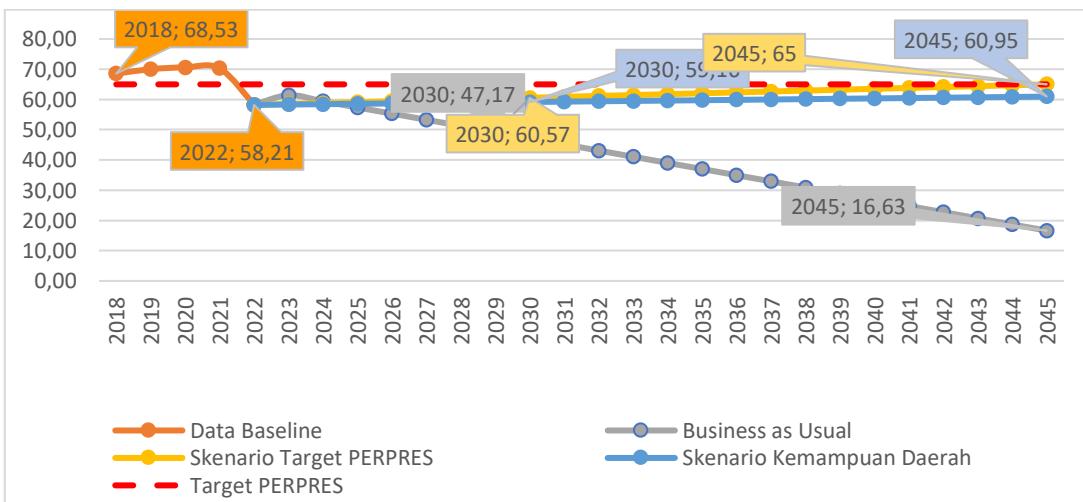
Proyeksi BAU (3.4.2.a)

**Gambar 6.10 Jumlah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Puskesmas Yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa**

3) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin

JENIS URUSAN	SOSIAL
NO. INDIKATOR	3.7.1.(a)
INDIKATOR TPB	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Meningkat menjadi 65%
Nilai Target	65
Gap (Realisasi-Target)	7
Gap Kemampuan Daerah	3

Capaian eksisting untuk angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin di Kota Balikpapan yaitu sebesar 58,21 % yang kemudian harus ditingkatkan menjadi 65% sesuai dengan Target Perpres 59/2017. Bila dilihat masih ada Gap (Realisasi – target) sebesar 7% dan Gap Kemampuan daerah sebesar 3%, untuk itu dibutuhkan upaya tambahan.



Proyeksi BAU (3.7.1.a)

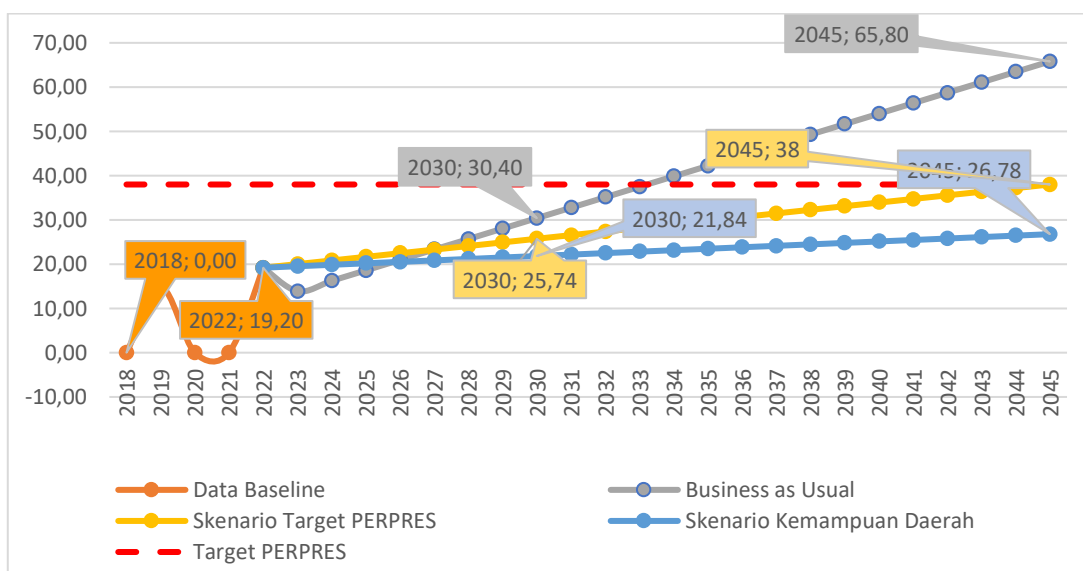
**Gambar 6.11 Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin**



4) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)

JENIS URUSAN	SOSIAL
NO. INDIKATOR	3.7.2*
INDIKATOR TPB	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Menurun menjadi 38
Nilai Target	38
Gap (Realisasi-Target)	19
Gap Kemampuan Daerah	8

Capaian eksisting saat ini yaitu sebesar 19,20 % bila dilihat Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) di Kota Balikpapan masih ada Gap (Realiasi-target) sebesar 19% dan Gap kemampuan daerah 8%, untuk itu dibutuhkan upaya tambahan sehingga dapat sesuai dengan target dari Perpres 59/2017.



Proyeksi BAU (3.7.2\*)

**Gambar 6.12** Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)

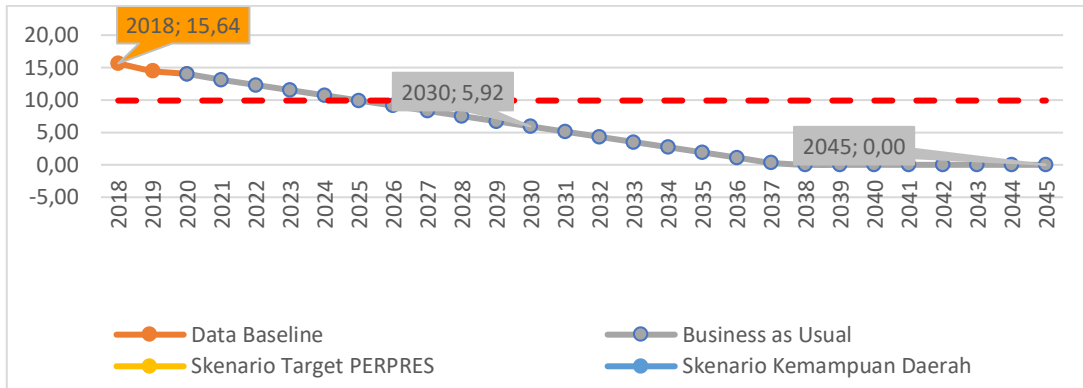
5) *Unmet Need* Pelayanan Kesehatan

JENIS URUSAN	SOSIAL
NO. INDIKATOR	3.8.1.(a)
INDIKATOR TPB	Unmet need pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Dinas Kesehatan (DINKES)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Menurun menjadi 9,91%
Nilai Target	9,91
Gap (Realisasi-Target)	-4
Gap Kemampuan Daerah	-2

Capaian eksisting *Unmet Need* Pelayanan Kesehatan di Kota Balikpapan sebesar 14,04% atau dapat dikatakan sudah melebihi target dari perpres 59/2017, untuk itu proyeksi BAU dilakukan tanpa upaya tambahan.







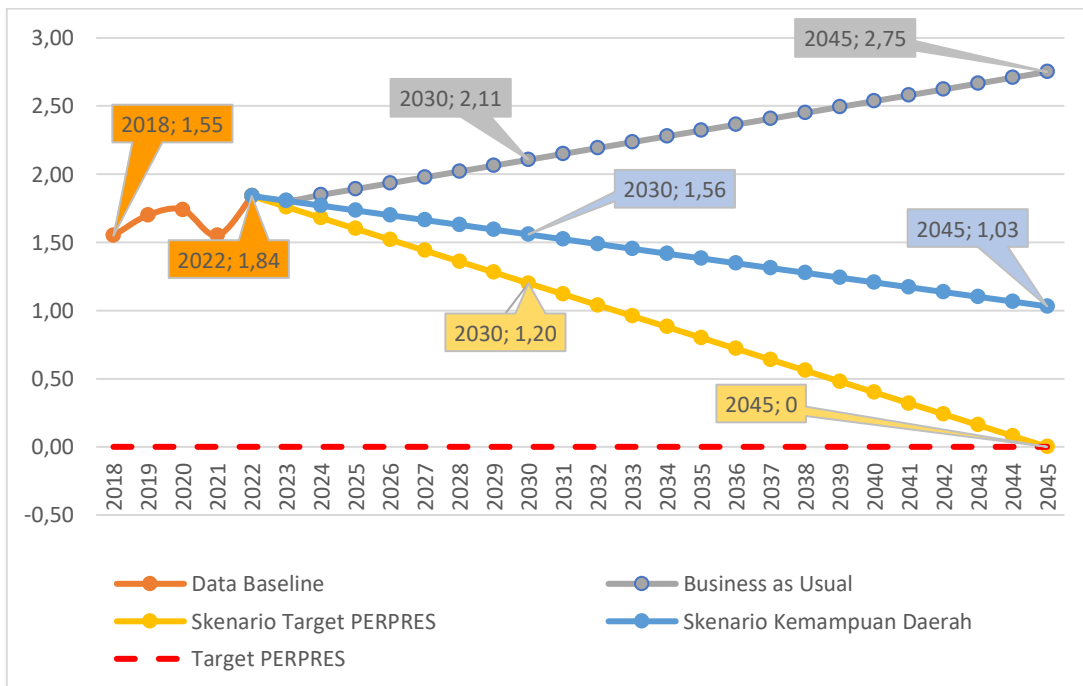
Proyeksi BAU (3.8.1.a)

**Gambar 6.13 Unmet Need Pelayanan Kesehatan**

6) Persentase merokok pada penduduk umur  $\geq 15$  tahun

JENIS URUSAN	SOSIAL
NO. INDIKATOR	3.a.1*
INDIKATOR TPB	Persentase merokok pada penduduk umur $\geq 15$ tahun.
Sumber Data	Dinas Kesehatan (DINKES)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Menurun
Nilai Target	0
Gap (Realisasi-Target)	-2
Gap Kemampuan Daerah	-1

Persentase merokok pada penduduk umur  $\geq 15$  tahun di Kota Balikpapan capaian eksisting sebesar 1,84%, masih tergolong cukup tinggi, dapat dilihat dari Gap (Realisasi-Target) -2% dan Gap kemampuan daerah -1%, untuk itu dibutuhkan upaya tambahan untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga target yang ditetapkan Perpres 59/2017 menjadi turun.



Proyeksi BAU (3.a.1\*)

**Gambar 6.14 Persentase merokok pada penduduk umur  $\geq 15$  tahun**



**Tabel VI.6 Rekomendasi Arah Kebijakan TPB 3**

NO. TPB	NO. TARGET	TARGET	ARAH KEBIJAKAN
3	3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Mengurangi angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
	3,5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat yang membahayakan
	3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi.
	3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Mencapai cakupan kesehatan termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan serta vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau
	3,9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	Mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.
	3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control

Sumber : Hasil Analisis, 2023

#### 6.1.4 Skenario Pencapaian Target TPB 4 Pendidikan Berkualitas

Target yang menjadi isu pada TPB 4 di Kota Balikpapan yaitu Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif, Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar dan Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.



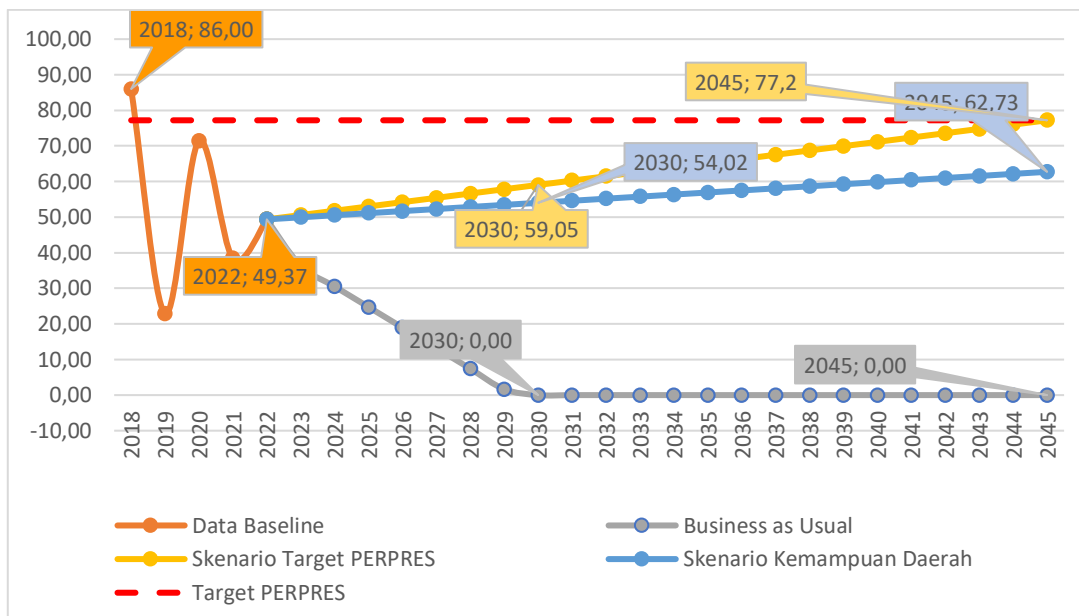
**Tabel VI.7 Gap/Masalah TPB 4 Pendidikan Berkualitas di Kota Balikpapan**

TARGET YANG MENJADI ISU	GAP/ MASALAH	KETERANGAN CAPAIAN
4.1 Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1 Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Tidak Tersedia Data (NA)
4.2 Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Tidak Tersedia Data (NA)

Sumber : Hasil Analisis, 2023

JENIS URUSAN	SOSIAL
NO. INDIKATOR	4.2.2.(a)
INDIKATOR TPB	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Meningkat menjadi 77,2%
Nilai Target	77,2
Gap (Realisasi-Target)	28
Gap Kemampuan Daerah	13

Dapat dilihat pada TPB 4 di Kota Balikpapan khususnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) capaian eksistingnya pada Tahun 2022 sebesar 49,37% atau masih dibawah target yang diharapkan dari Perpres 59/2017 yaitu sebesar 77,2% atau masih ada Gap (Realisasi - Target) sebesar 28% dan Gap Kemampuan daerah sebesar 13%, untuk itu diperlukan upaya tambahan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Balikpapan dengan cara Proyeksi BAU yang diharapkan pada Tahun 2030 meningkat menjadi 59,05 % dan pada tahun 2045 menjadi 77,2%.



Proyeksi BAU (4.2.2.(a))

**Gambar 6.15 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Dibawah ini merupakan rekomendasi arah kebijakan TPB 4 di Kota Balikpapan.

**Tabel VI.8 Rekomendasi Arah Kebijakan TPB 4**

NO. TPB	NO. TARGET	TARGET	ARAH KEBIJAKAN
4	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Menjamin bahwa semua anak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas
	4,2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	Menjamin semua anak untuk mendapatkan akses terhadap perkembangan dan pengasuhan serta pendidikan pra sekolah, sehingga siap menembuh pendidikan dasar
	4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	Membangun dan meningkatkan fasilitas yang ramah, aman, inklusif dan efektif bagi semua

Sumber : Hasil Analisis, 2023

### 6.1.5 Skenario Pencapaian Target TPB 5 Kesetaraan Gender

Untuk target pencapaian TPB 5 di Kota Balikpapan target yang menjadi isu yaitu Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun,





Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya, Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan, dan Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.

**Tabel VI.9 Gap/Masalah TPB 5 Kesetaraan Gender di Kota Balikpapan**

TARGET YANG MENJADI ISU	GAP/ MASALAH	KETERANGAN CAPAIAN
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Tidak Tersedia Data (NA)
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Tidak Tersedia Data (NA)
	5.3.1 (a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Tidak Tersedia Data (NA)
	5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Tidak Tersedia Data (NA)
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1* Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Tidak Tersedia Data (NA)
	5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
	5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Dibawah ini akan dijabarkan mengenai alternatif skenario TPB 5 di Kota Balikpapan.

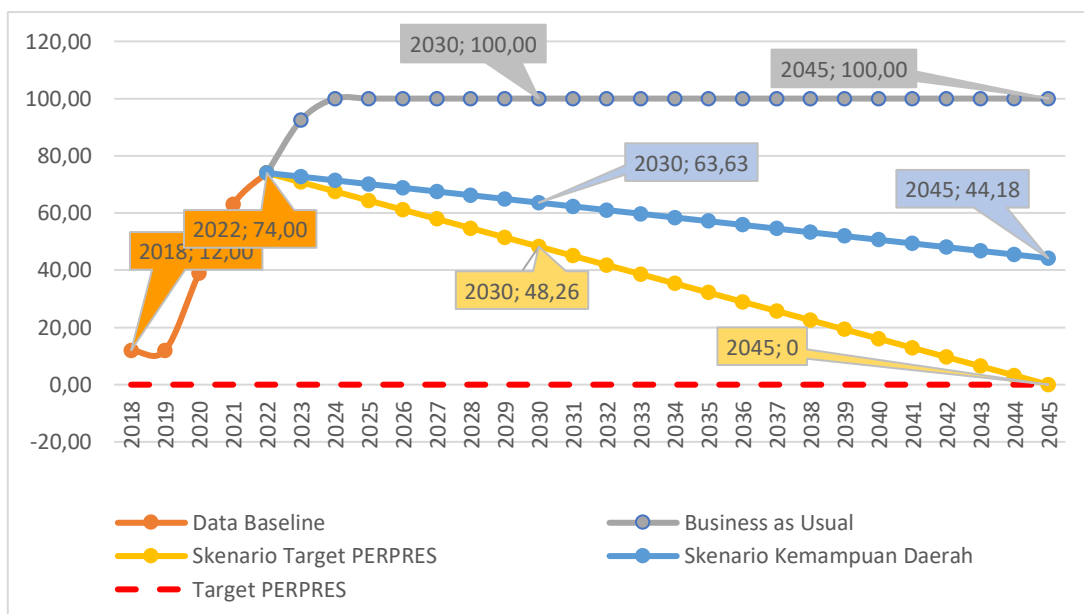
- 1) Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir



JENIS URUSAN	SOSIAL
NO. INDIKATOR	5.2.1*
INDIKATOR TPB	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Menurun
Nilai Target	0
Gap (Realisasi-Target)	-74
Gap Kemampuan Daerah	-30

Capaian eksisting Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir di Kota Balikpapan yaitu sebesar 74% itu menandakan sangat tinggi, untuk itu diperlukan upaya tambahan didalam Proyeksi BAU untuk menurunkan sesuai dengan Target Perpres 59/2017. Didalam Proyeksi BAU pada Tahun 2030 diproyeksikan turun menjadi 48,26% dan pada tahun 2045 diproyeksikan

menjadi 0%



Proyeksi BAU (5.2.1\*)

**Gambar 6.16** Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir

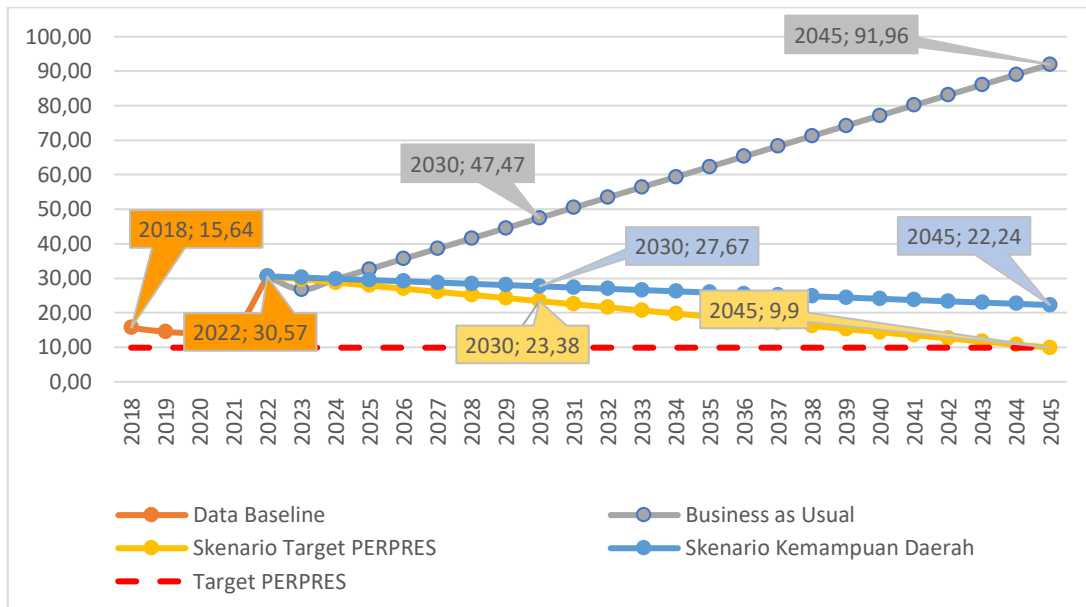
2) *Unmet need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).

JENIS URUSAN	SOSIAL
NO. INDIKATOR	5.6.1.(a)
INDIKATOR TPB	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Menurun menjadi 9,9%
Nilai Target	9,9
Gap (Realisasi-Target)	-21
Gap Kemampuan Daerah	-8

Dapat dilihat capaian eksisting *unmet need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) di Kota Balikpapan sebesar 30,57% atau dapat dikatakan sangat tinggi dari target Perpres 59/2017 sebesar 9,9%, sehingga dibutuhkan upaya tambahan untuk menurunkan sehingga sesuai dengan target dari Perpres 59/2017, Proyeksi BAU dapat dilihat pada Tahun 2030 diproyeksikan turun menjadi 23,38% dan pada tahun 2045

diproyeksikan turun menjadi 9,9%.





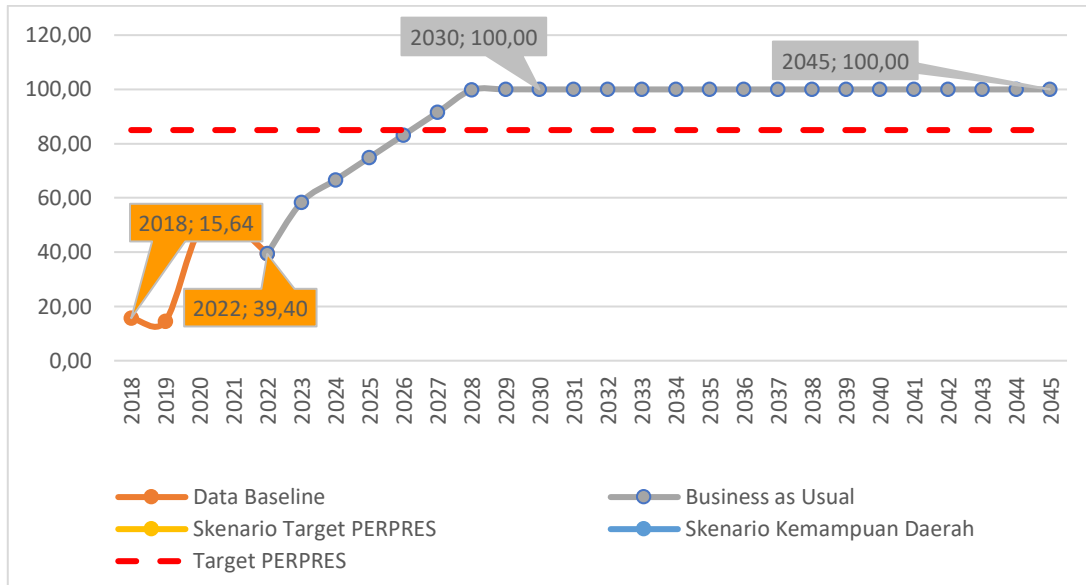
Proyeksi BAU (5.6.1.(a))

**Gambar 6.17 Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)**

3) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern

JENIS URUSAN	SOSIAL
NO. INDIKATOR	5.6.1.(b)
INDIKATOR TPB	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Meningkat menjadi 85%
Nilai Target	85
Gap (Realisasi-Target)	46
Gap Kemampuan Daerah	18

untuk pengetahuan dan pemahaman pasangan usia subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern di Kota Balikpapan masih harus ditingkatkan karena capaian eksisting saat ini yaitu sebesar 39,40% dari target Perpres 59/2017 sebesar 85%, namun bila dilihat untuk mencapai atau menaikan hal tersebut Proyeksi BAU diperlukan tanpa upaya tambahan karena di proyeksikan pada Tahun 2030 sudah melebihi target Perpres 59/2017.



Proyeksi BAU (5.6.1.(b))

**Gambar 6.18 Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern**

Dibawah ini merupakan rekomendasi arah kebijakan TPB 5 di Kota Balikpapan.

**Tabel VI.10 Rekomendasi Arah Kebijakan TPB 5**

NO. TPB	NO. TARGET	TARGET	ARAH KEBIJAKAN
5	5,1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Mengakhiri diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.
	5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Menghapuskan segala bentuk kekerasan, perdagangan maunusia, eksploitasi terhadap perempuan.
	5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa.
	5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi

Sumber : Hasil Analisis, 2023





### 6.1.6 Skenario Pencapaian Target TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Target yang menjadi isu pada TPB 8 di Kota Balikpapan yaitu Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang, Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya, Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan, Secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan, Menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal dan Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.

**Tabel VI.11 Gap/Masalah TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Balikpapan**

TARGET YANG MENJADI ISU	GAP/ MASALAH	KETERANGAN CAPAIAN
<b>8.1</b> Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	<b>8.1.1 (a)</b> PDB per kapita.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
<b>8.2</b> Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	<b>8.2.1*</b> Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
<b>8.3</b> Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	<b>8.3.1 (b)</b> Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
<b>8.6</b> Secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	<b>8.6.1*</b> Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
<b>8.9</b> Menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	<b>8.9.1*</b> Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
	<b>8.9.1 (a)</b> Jumlah wisatawan mancanegara.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)



TARGET YANG MENJADI ISU	GAP/ MASALAH	KETERANGAN CAPAIAN
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Tidak Tersedia Data (NA)
	8.10.1(a) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Tidak Tersedia Data (NA)

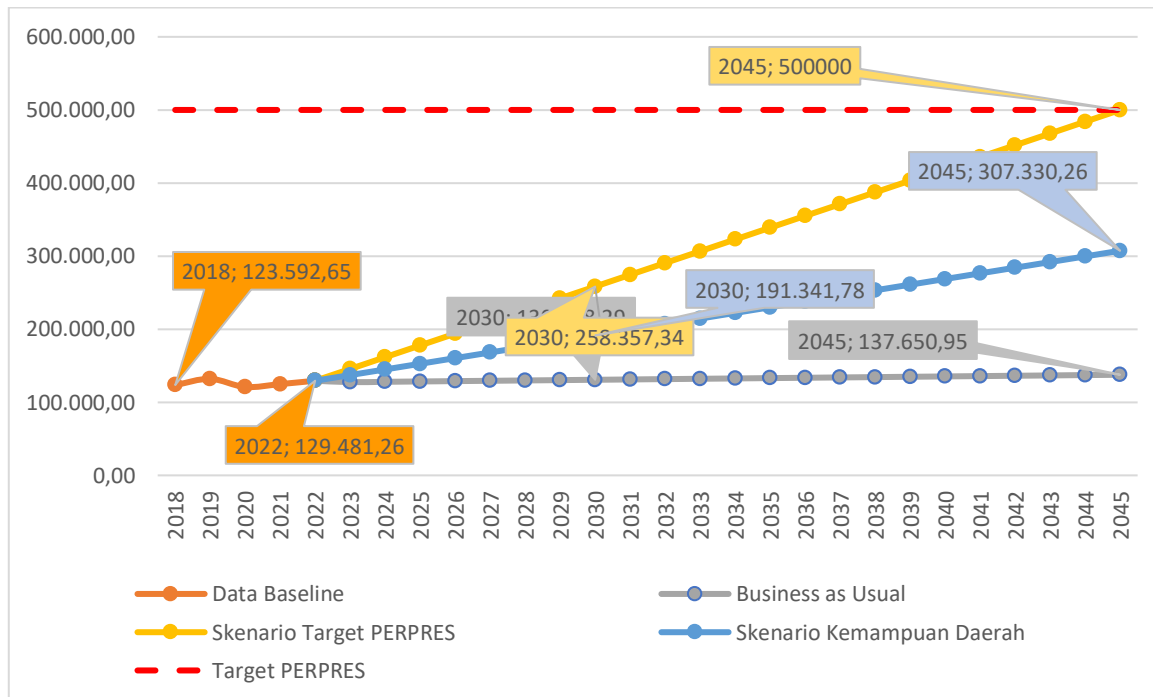
Sumber : Hasil Analisis, 2023

Dibawah ini akan dijabarkan mengenai alternatif skenario TPB 8 di Kota Balikpapan.

### 1) PDB Per Kapita

JENIS URUSAN	EKONOMI
NO. INDIKATOR	8.1.1.(a)
INDIKATOR TPB	PDB per kapita.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta
Nilai Target	500000
Gap (Realisasi-Target)	370519
Gap Kemampuan Daerah	177849

Capaian saat ini terkait dengan PDB per kapita di Kota Balikpapan sebesar Rp. 129.481,26,- bila dilihat dari target Perpres 59/2017 yaitu meingkat menjadi lebih dari Rp. 50 juta, untuk itu di Kota Balikpapan PDB per Kapita dibutuhkan upaya tambahan, bila dilihat pada Proyeksi BAU pada Tahun 2030 diproyeksikan meningkat menjadi Rp. 258.357,34,- dan pada Tahun 2045 naik sesuai dengan target dari Pepres 59/2017.



Proyeksi BAU (8.1.1.(a))

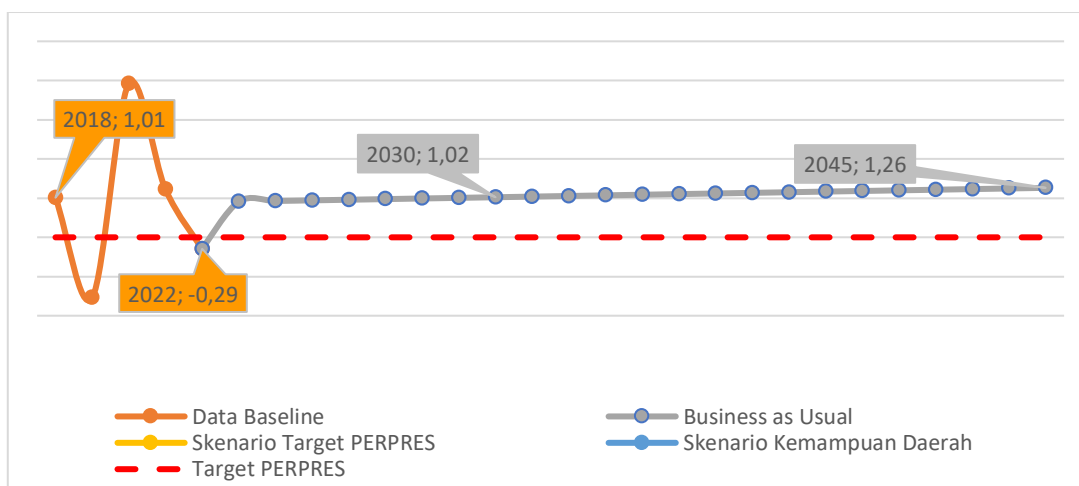
Gambar 6.19 PDB Per Kapita



2) Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun

JENIS URUSAN	EKONOMI
NO. INDIKATOR	8.2.1*
INDIKATOR TPB	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Meningkat
Nilai Target	
Gap (Realisasi-Target)	0
Gap Kemampuan Daerah	0

Untuk Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja / tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun di Kota Balikpapan sudah melebihi target nasional sehingga Proyeksi BAU dilakukan tanpa upaya tambahan.



Proyeksi BAU (8.2.1\*)

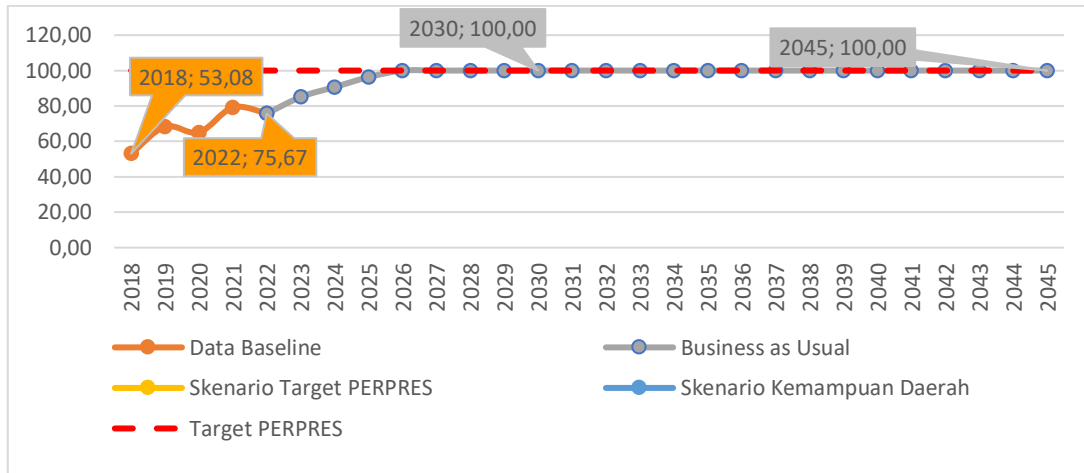
**Gambar 6.20 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun**

3) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian

JENIS URUSAN	EKONOMI
NO. INDIKATOR	8.3.1.(b)
INDIKATOR TPB	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.
Sumber Data	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Meningkat
Nilai Target	100
Gap (Realisasi-Target)	24
Gap Kemampuan Daerah	10

Capaian eksisting untuk persentase tenaga kerja informal sektor pertanian di Kota Balikpapan sebesar 75,67% atau dapat dikatakan sudah sangat baik, sehingga proyeksi BAU dilakukan tanpa upaya tambahan.





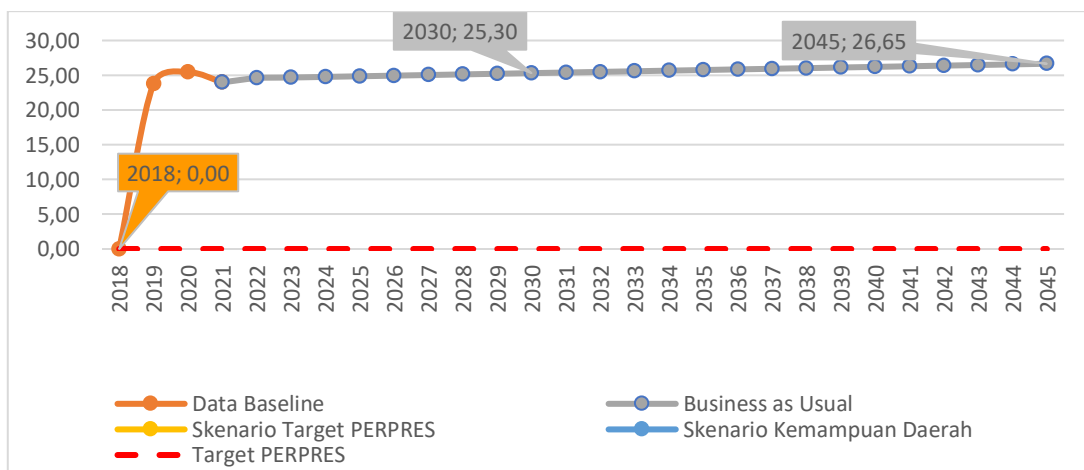
Proyeksi BAU (8.3.1(b))

**Gambar 6.21 Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian**

- 4) Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)

JENIS URUSAN	EKONOMI
NO. INDIKATOR	8.6.1*
INDIKATOR TPB	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
Sumber Data	Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Meningkat
Nilai Target	
Gap (Realisasi-Target)	0
Gap Kemampuan Daerah	0

untuk capaian eksisting terkait dengan Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) di Kota Balikpapan sebesar 23,97% atau dapat dikatakan sudah sangat baik, namun tetap sesuai dengan Target Perpres 59/2017 harus ditingkatkan, namun didalam Proyeksi BAU dilakukan tanpa upaya tambahan.



Proyeksi BAU (8.6.1\*)

**Gambar 6.22 Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)**

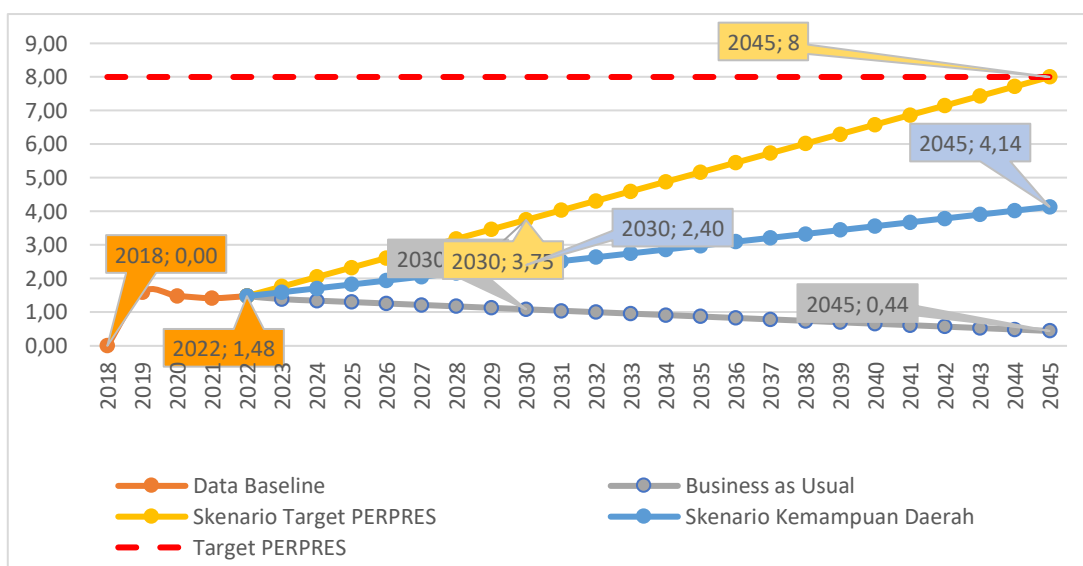




### 5) Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB

JENIS URUSAN	EKONOMI
NO. INDIKATOR	8.9.1*
INDIKATOR TPB	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.
Sumber Data	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Meningkat menjadi 8%
Nilai Target	8
Gap (Realisasi-Target)	7
Gap Kemampuan Daerah	3

Capaian eksisting terkait dengan proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB di Kota Balikpapan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 1,48% atau dapat dikatakan masih jauh dari target Perpres 59/2017 yaitu sebesar 8%, untuk itu didalam Proyeksi BAU dibutuhkan upaya tambahan untuk meningkatkan menjadi 8% sesuai dengan Target dari Perpres 59/2017.



Proyeksi BAU (8.9.1\*)

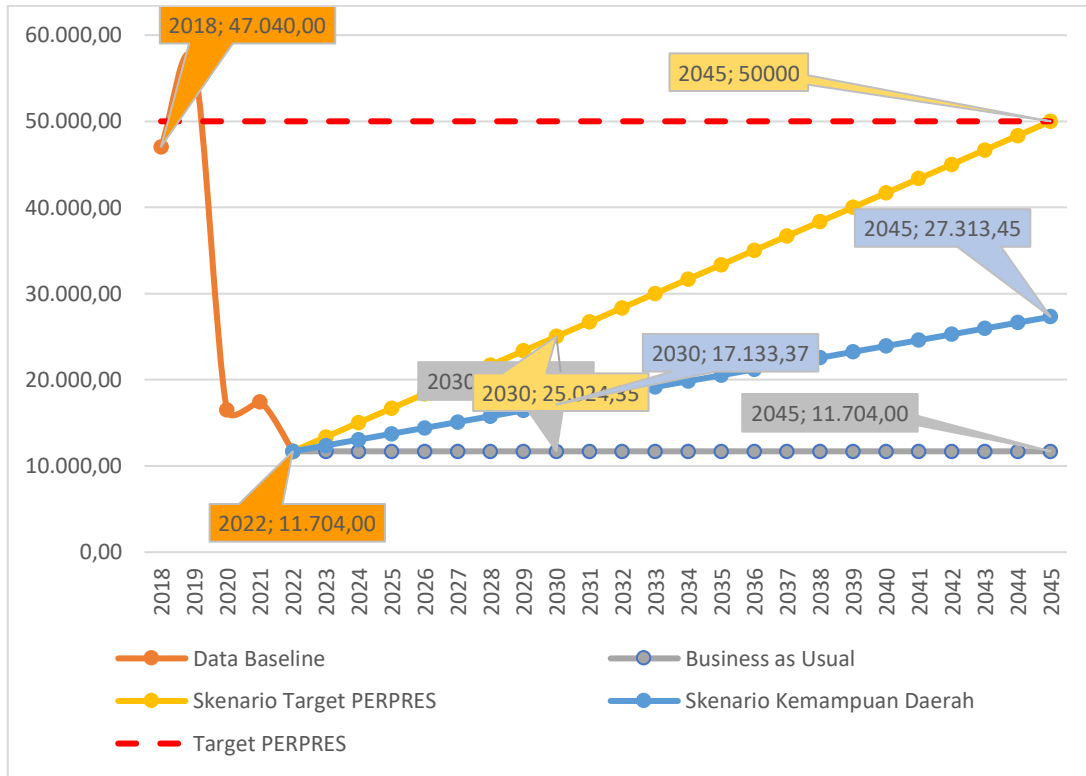
**Gambar 6.23 Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB**

### 6) Jumlah Wisatawan Mancanegara

JENIS URUSAN	EKONOMI
NO. INDIKATOR	8.9.1.(a)
INDIKATOR TPB	Jumlah wisatawan mancanegara.
Sumber Data	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)
Nilai Target	50000
Gap (Realisasi-Target)	38296
Gap Kemampuan Daerah	15609

untuk jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Balikpapan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 11.704 Jiwa, namun bila dilihat dari Target Perpres 59/2017 meningkat menjadi 20 Juta untuk skala nasional, untuk itu untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara di Kota Balikpapan dibutuhkan upaya tambahan sehingga Proyeksi BAU pada tahun 2030 naik menjadi 17.133 jiwa dan pada Tahun 2045 naik menjadi 27.313 jiwa.





Proyeksi BAU (8.9.1(a))

**Gambar 6.24 Jumlah Wisatawan Mancanegara**

Dibawah ini merupakan rekomendasi arah kebijakan TPB 8 di Kota Balikpapan.

**Tabel VI.12 Rekomendasi Arah Kebijakan TPB 8**

NO. TPB	NO. TARGET	TARGET	ARAH KEBIJAKAN
8	8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik
	8,2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi
	8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah
	8,6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	Mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.

NO. TPB	NO. TARGET	TARGET	ARAH KEBIJAKAN
	8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Melaksanakan kebijakan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal
	8,10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik

Sumber : Hasil Analisis, 2023

### 6.1.7 Skenario Pencapaian Target TPB 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Target yang menjadi isu pada TPB 9 di Kota Balikpapan yaitu Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar dan Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.

**Tabel VI.13 Gap/Masalah TPB 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur di Kota Balikpapan**

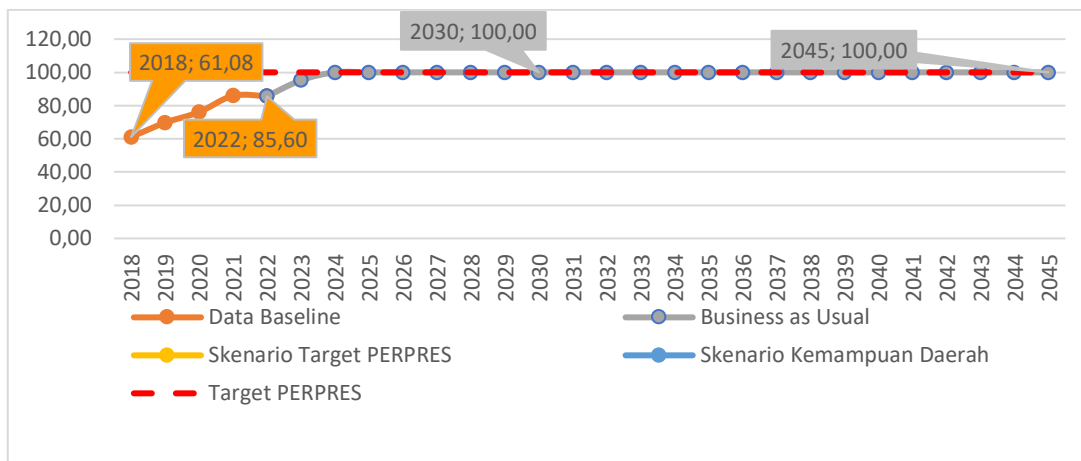
TARGET YANG MENJADI ISU	GAP/ MASALAH	KETERANGAN CAPAIAN
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Tidak Tersedia Data (NA)
	9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Tidak Tersedia Data (NA)
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Tidak Tersedia Data (NA)
	9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)

Sumber : Hasil Analisis, 2023

JENIS URUSAN	EKONOMI
NO. INDIKATOR	9.c.1.(b)
INDIKATOR TPB	Proporsi individu yang menggunakan internet
Sumber Data	Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Meningkat
Nilai Target	100
Gap (Realisasi-Target)	14
Gap Kemampuan Daerah	6

Untuk capaian terkait dengan Proporsi individu yang menggunakan internet di Kota Balikpapan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 85,60% atau dapat dikatakan cukup tinggi namun harus tetap ditingkatkan sesuai dengan Target dari Perpres 59/2017, namun untuk peningkatan tersebut Proyeksi BAU dilakukan dengan tanpa upaya tambahan





Proyeksi BAU (9.c.1(b))

**Gambar 6.25** Proporsi individu yang menggunakan internet

Dibawah ini merupakan rekomendasi arah kebijakan TPB 9 di Kota Balikpapan.

**Tabel VI.14** Rekomendasi Arah Kebijakan TPB 9

NO. TPB	NO. TARGET	TARGET	ARAH KEBIJAKAN
9	9,3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.
	9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	Meningkatkan akses teknologi informasi dan komunikasi

Sumber : Hasil Analisis, 2023

### 6.1.8 Skenario Pencapaian Target TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan

Target yang menjadi isu pada TPB 10 di Kota Balikpapan yaitu Memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya dan Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.





**Tabel VI.15 Gap/Masalah TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan di Kota Balikpapan**

TARGET YANG MENJADI ISU	GAP/ MASALAH	KETERANGAN CAPAIAN
<b>10.2</b> Memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	<b>10.2.1*</b> Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Tidak Tersedia Data (NA)
<b>10.4</b> Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	<b>10.4.1.(b)</b> Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Tidak Tersedia Data (NA)

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Dibawah ini merupakan rekomendasi arah kebijakan TPB 10 di Kota Balikpapan.

**Tabel VI.16 Rekomendasi Arah Kebijakan TPB 10**

NO. TPB	NO. TARGET	TARGET	ARAH KEBIJAKAN
10	10,2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	Memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, tanpa melihat status apapun
	10,4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	Mengadopsi kebijakan dan perlindungan sosial untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar

Sumber : Hasil Analisis, 2023

### 6.1.9 Skenario Pencapaian Target TPB 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Target yang menjadi isu pada TPB 17 di Kota Balikpapan yaitu Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya, Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global, Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, dan Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.



**Tabel VI.17 Gap/Masalah TPB 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan di Kota Balikpapan**

TARGET YANG MENJADI ISU	GAP/ MASALAH	KETERANGAN CAPAIAN
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
	17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Tidak Tersedia Data (NA)
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(b) Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Tidak Tersedia Data (NA)
	17.6.2.(c) Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tidak Tersedia Data (NA)
	17.17.1.(b) Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tidak Tersedia Data (NA)

Sumber : Hasil Analisis, 2023

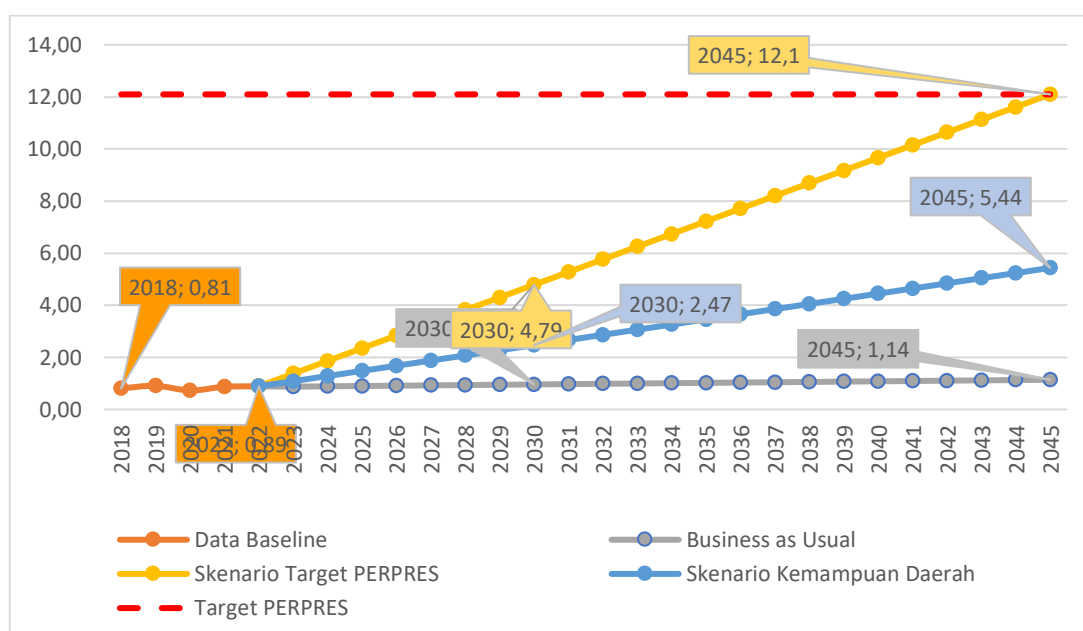


Dibawah ini akan dijabarkan mengenai alternatif skenario TPB 17 di Kota Balikpapan.

### 1) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB

JENIS URUSAN	EKONOMI
NO. INDIKATOR	17.1.1.(a)
INDIKATOR TPB	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.
Sumber Data	Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (BPPDRD)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Di atas 12%
Nilai Target	12,1
Gap (Realisasi-Target)	11
Gap Kemampuan Daerah	5

Rasio penerimaan pajak terhadap PDB di Kota Balikpapan capaian eksisting sebesar 0,89%, masih ada Gap (Realisasi – Target) sebesar 11% sehingga untuk meningkatkan hal tersebut dibutuhkan Proyeksi BAU perlu upaya tambahan sehingga dapat sesuai dengan target Perpres 59/2017 yaitu diatas 12%.



Proyeksi BAU (17.1.1(a))

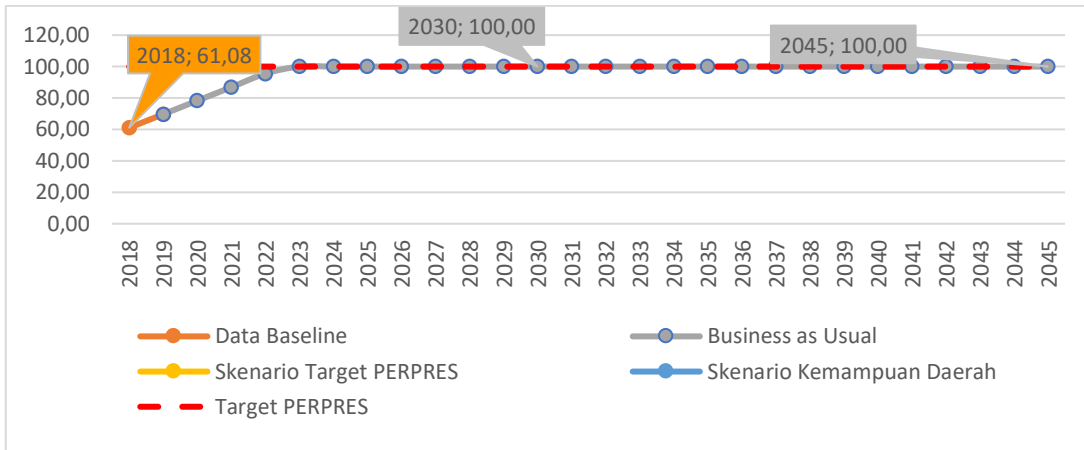
Gambar 6.26 Rasio penerimaan pajak terhadap PDB

### 2) Proporsi penduduk terlayani mobile broadband

JENIS URUSAN	EKONOMI
NO. INDIKATOR	17.6.2.(c)
INDIKATOR TPB	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband
Sumber Data	Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.
Nilai Target	100
Gap (Realisasi-Target)	100
Gap Kemampuan Daerah	40

Capaian eksisting terkait dengan proporsi penduduk terlayani mobile broadband di Kota Balikpapan pada Tahun 2019 yaitu sebesar 69,68% atau dapat dikatakan sudah sangat baik, karena target Perpres 59/2017 yaitu meningkat menjadi untuk perkotaan 100% dan Perdesaan 52% populasi, sehingga proyeksi BAU dilakukan tanpa upaya tambahan.





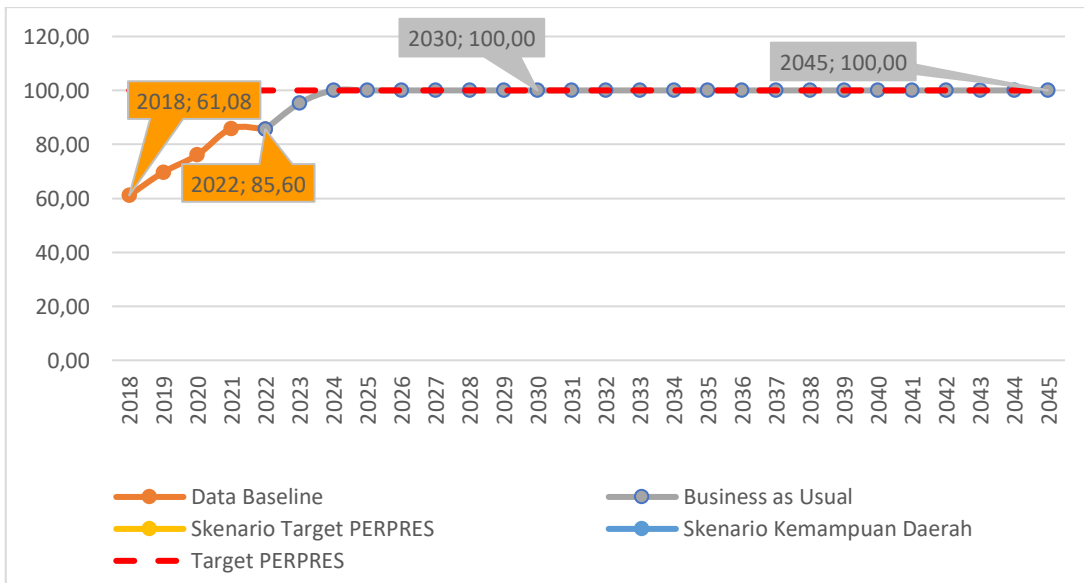
Proyeksi BAU (17.6.2(c))

**Gambar 6.27 Proporsi penduduk terlayani mobile broadband**

3) Proporsi individu yang menggunakan internet

JENIS URUSAN	EKONOMI
NO. INDIKATOR	17.8.1*
INDIKATOR TPB	Proporsi individu yang menggunakan internet
Sumber Data	Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Meningkat
Nilai Target	100
Gap (Realisasi-Target)	14
Gap Kemampuan Daerah	6

Capaian eksisting terkait dengan proporsi individu yang menggunakan internet di Kota Balikpapan pada tahun 2022 yaitu sebesar 85,60% atau dapat dikatakan sudah sangat baik, sehingga Proyeksi BAU dapat dilakukan tanpa upaya tambahan dengan optimis mampu sesuai dengan Target Perpres 59/2017 yaitu meningkat.



Proyeksi BAU (17.8.1\*)

**Gambar 6.28 Proporsi individu yang menggunakan internet**





Dibawah ini merupakan rekomendasi arah kebijakan TPB 17 di Kota Balikpapan.

**Tabel VI.18 Rekomendasi Arah Kebijakan TPB 17**

NO. TPB	NO. TARGET	TARGET	ARAH KEBIJAKAN
17	17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.
	17,6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	Meningkatkan kerjasama dalam sains, teknologi, inovasi, serta berbagi pengetahuan dengan meningkatkan koordinasi yang lebih baik.
	17,8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	Mengopersionalisasikan penggunaan teknologi dan sains, mekanisme pembangunan teknologi dan inovasi, dan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi
	17,17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif

Sumber : Hasil Analisis, 2023

### 6.1.10 Skenario Pencapaian Target TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Target yang menjadi isu pada TPB 6 di Kota Balikpapan yaitu Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua, Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan, ecara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air, dan Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.



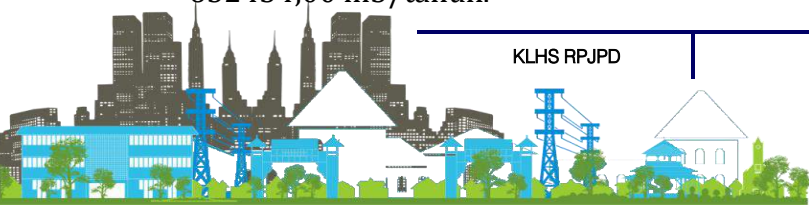
**Tabel VI.19 Gap/Masalah TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak di Kota Balikpapan**

TARGET YANG MENJADI ISU	GAP/ MASALAH	KETERANGAN CAPAIAN
6.1 Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
	6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
6.2 Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1 (a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Tidak Tersedia Data (NA)
	6.2.1 (b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
	6.2.1 (c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
	6.2.1 (f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Tidak Tersedia Data (NA)
6.4 Secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor; dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air; dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Tidak Tersedia Data (NA)
6.5 Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1 (f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Tidak Tersedia Data (NA)
	6.5.1 (g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Tidak Tersedia Data (NA)

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Untuk kondisi Kota Balikpapan sendiri dapat dilihat bahwa daya dukung air yang sudah melampaui sebesar 37% dan 63% belum melampaui dengan Kecamatan yang mempunyai status daya dukung Air yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas 5.945,92 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung air belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 16.728,04 Ha.

Untuk ketersediaan dan kebutuhan air di Kota Balikpapan dapat dilihat 524147443,9 m<sup>3</sup> / tahun merupakan ketersediaan air dan 525625678,16 m<sup>3</sup>/tahun merupakan kebutuhan air sehingga ada selisih sebesar -1478234,17 m<sup>3</sup>/tahun dengan ambang batas sebesar 652434,00 m<sup>3</sup>/tahun.



Sedangkan dilihat dari jasa lingkungan penyediaan air di Kota Balikpapan 60% masuk kedalam kategori sedang, 34% masuk kedalam kategori rendah sedangkan 5% masuk kedalam kategori rendah dan sangat rendah.

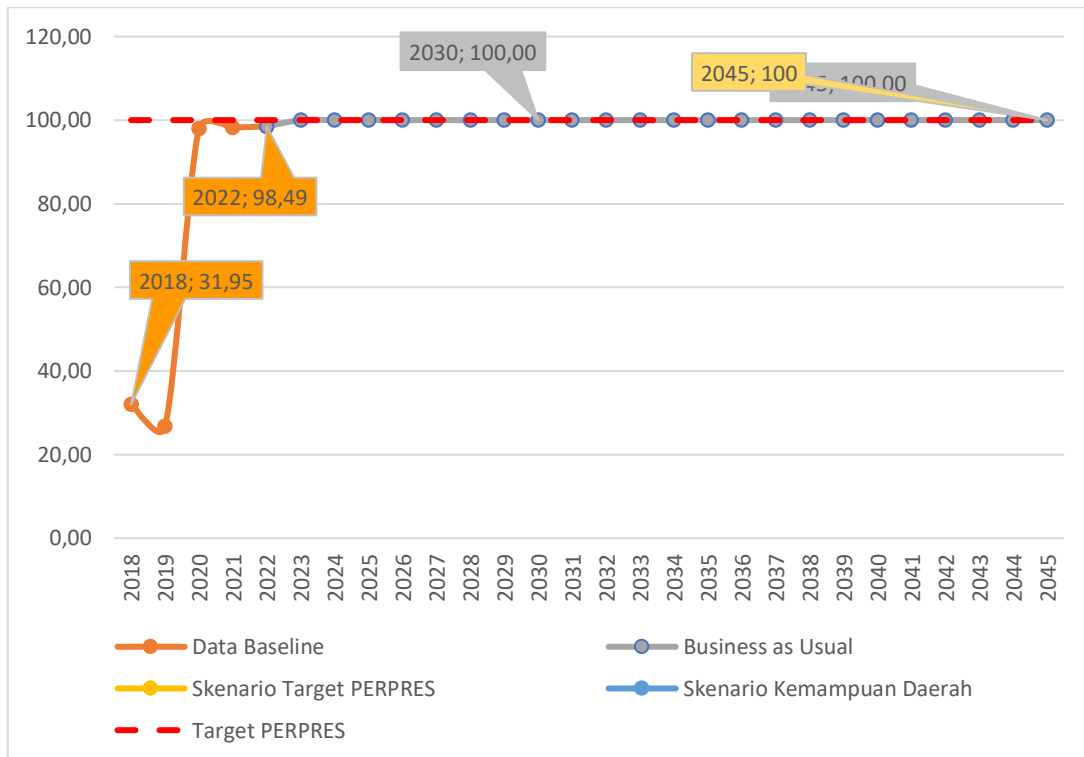
Untuk jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir di Kota Balikpapan dapat dilihat 47% masuk kedalam kategori rendah, dan 45% masuk kedalam kategori sedang dan 8% masuk kedalam kategori tinggi dan sangat tinggi. Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air Dan Banjir di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa lingkungan Rendah dengan total luas sebesar 23.790,89 Ha.

Dibawah ini akan dijabarkan mengenai alternatif skenario TPB 6 di Kota Balikpapan.

1) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak

JENIS URUSAN	LINGKUNGAN
NO. INDIKATOR	6.1.1.(a)
INDIKATOR TPB	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum (PU)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Meningkat menjadi 100%
Nilai Target	100
Gap (Realisasi-Target)	2
Gap Kemampuan Daerah	1

capaian eksisting untuk persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak di Kota Balikpapan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 98,49% atau dapat dikatakan sudah sangat baik, untuk meningkatkan menjadi 100% sesuai dengan target dari Perpres 59/2017 Proyeksi BAU dilakukan tanpa upaya tambahan.



Proyeksi BAU (6.1.1(a))

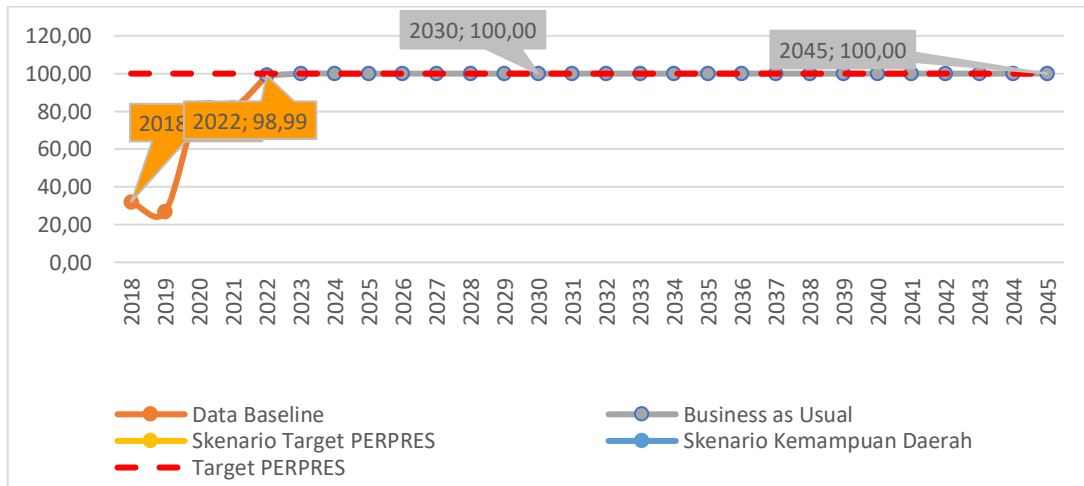
**Gambar 6.29** Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak



2) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan

JENIS URUSAN	LINGKUNGAN
NO. INDIKATOR	6.1.1.(c)
INDIKATOR TPB	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum (PU)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Meningkat menjadi 100%
Nilai Target	100
Gap (Realisasi-Target)	1
Gap Kemampuan Daerah	0

Capaian eksisting proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan di Kota Balikpapan yaitu sebesar 98,99% atau masih ada Gap (Realisasi-target) 1% dari target yang ditetapkan oleh Perpres 59/2017, untuk itu Proyeksi BAU dilakukan tanpa upaya tambahan.



Proyeksi BAU (6.1.1(c))

**Gambar 6.30 Proporsi Populasi Yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman Dan Berkelanjutan**

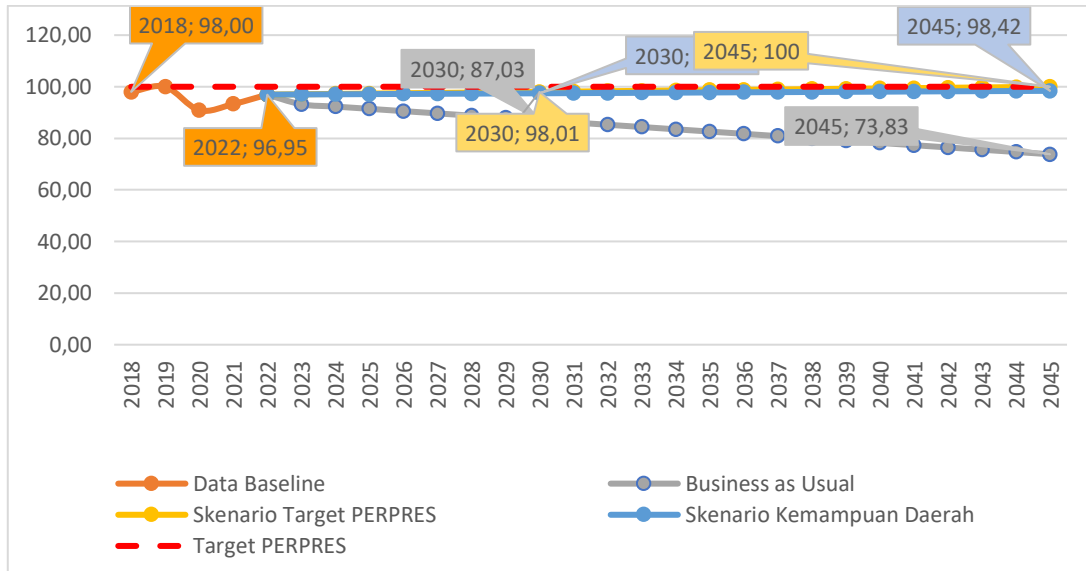
3) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak

JENIS URUSAN	LINGKUNGAN
NO. INDIKATOR	6.2.1.(b)
INDIKATOR TPB	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum (PU)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Meningkat menjadi 100%
Nilai Target	100
Gap (Realisasi-Target)	3
Gap Kemampuan Daerah	1

Capaian eksisting Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di Kota Balikpapan yaitu sebesar 96,95 % atau masih ada gap (Realisasi-target) sebesar 3% sehingga harus ditingkatkan menjadi 100% sesuai dengan Target dari Perpres 59/2017. Untuk Proyeksi BAU dilakukan perlu upaya tambahan untuk meningkat menjadi 100% sesuai dengan Target dari Perpres 59/2017.







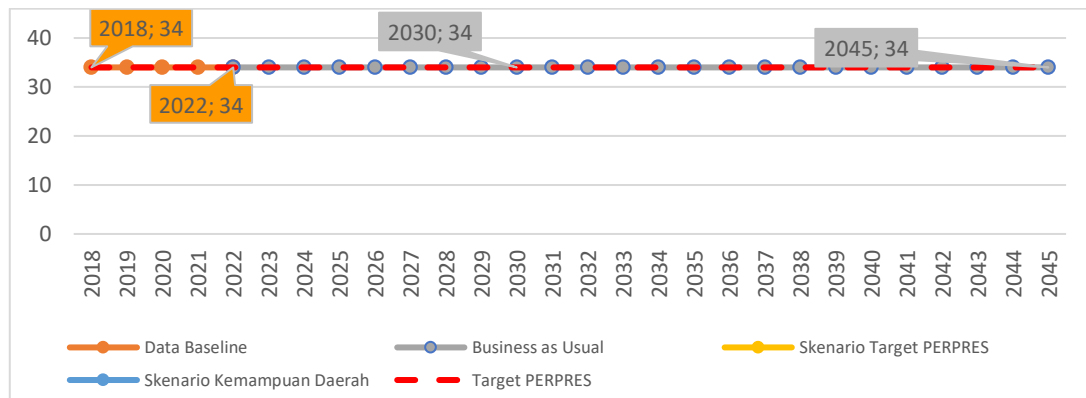
Proyeksi BAU (6.2.1(b))

**Gambar 6.31 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak**

4) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

JENIS URUSAN	LINGKUNGAN
NO. INDIKATOR	6.2.1.(c)
INDIKATOR TPB	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum (PU)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)
Nilai Target	34
Gap (Realisasi-Target)	0
Gap Kemampuan Daerah	0

Untuk jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) bila dilihat dari target Perpres 59/2017 yaitu meningkat menjadi 45.000 skala nasional. Untuk di Kota Balikpapan jumlah kelurahan yang ada yaitu 34 kelurahan. Untuk Proyeksi BAU dilakukan tanpa upaya tambahan.



Proyeksi BAU (6.2.1(c))

**Gambar 6.32 Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)**



Dibawah ini merupakan rekomendasi arah kebijakan TPB 6 di Kota Balikpapan.

**Tabel VI.20 Rekomendasi Arah Kebijakan TPB 6**

NO. TPB	NO. TARGET	TARGET	ARAH KEBIJAKAN
6	6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Mencapai akses terhadap air minum yang aman dan terjangkau
	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata
	6,4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	Meningkatkan efisiensi penggunaan air dan menjamin penggunaan dan pasokan air yang berkelanjutan
	6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu

Sumber : Hasil Analisis, 2023

### 6.1.11 Skenario Pencapaian Target TPB 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan

Target yang menjadi isu dari TPB 11 di Kota Balikpapan yaitu Menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua, Memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara dan Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.



**Tabel VI.21 Gap/Masalah TPB 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan di Kota Balikpapan**

TARGET YANG MENJADI ISU	GAP/ MASALAH	KETERANGAN CAPAIAN
11.2 Menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1 (a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Tidak Tersedia Data (NA)
11.3 Memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.2 (a) Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Tidak Tersedia Data (NA)
	11.3.2 (b) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Tidak Tersedia Data (NA)
11.5 Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1 (b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Tidak Tersedia Data (NA)
	11.5.2 (a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Kondisi Kota Balikpapan dilihat dari Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim dapat dilihat 49% masuk kedalam kategori sangat tinggi, 30% kategori tinggi, 30% kategori sedang dan 20% rendah. Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa sangat tinggi dengan total luas sebesar 24.977,03 Ha.

Untuk jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam dapat dilihat 51% sangat tinggi, 19% tinggi, 11% sedang, dan 19% rendah. Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Pencegahan Dan Perlindungan Dari Bencana Alam di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa lingkungan Sangat tinggi dengan total luas sebesar 26.110,44 Ha.

Untuk dampak lingkungan yang ada di Kota Balikpapan yaitu Timbulan Sampah dan Timbulan tinja, untuk timbulan sampah yaitu sebesar 502607,74 m<sup>3</sup> / tahun dan untuk timbulan tinja sebesar 100521,55 m<sup>3</sup>/Tahun.

Untuk beban pencemar BOD di Kota Balikpapan yaitu sebesar 26758,59 Kg/hari, COD sebesar 30364,12 Kg/hari dan TSS sebesar 21026,16 Kg/hari.

TPB 11 di Kota Balikpapan harus ada beberapa hal diperhatikan seperti rawan bencana, di Kota Balikpapan rawan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan masuk kedalam kategori sedang sebesar 39847,87 Ha, Bahaya Cuaca Ekstrim masuk kedalam kategori sedang seluas 50849,25 Ha, Bahaya Gempa Bumi masuk kedalam kategori rendah, bahaya



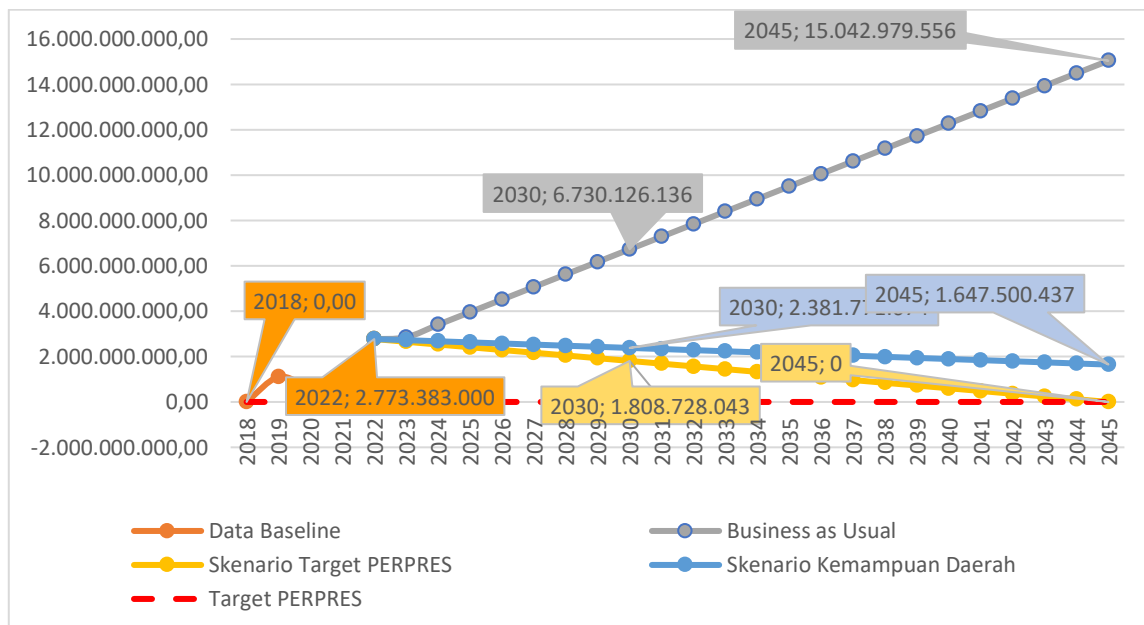
tsunami rendah dengan luas 46,25 ha yang tersebar di Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Kota, Balikpapan Tengah dan Balikpapan Timur sedangkan untuk bahaya tsunami sedang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan dengan luas 6,67 Ha. Bahaya longsor di Kota Balikpapan masuk kedalam kategori rendah dan sedang yang tersebar diseluruh kecamatan, bahaya banjir di Kota Balikpapan berada pada kategori rendah, sedang dan tinggi dengan luas total sebesar 12243,26 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan, bahaya gelombang ekstrim dan abrasi masuk kedalam kategori sedang dengan luas total 1313,60 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan dan bahaya

JENIS URUSAN	LINGKUNGAN
NO. INDIKATOR	11.5.2.(a)
INDIKATOR TPB	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Menurun
Nilai Target	0
Gap (Realisasi-Target)	-2773383000
Gap Kemampuan Daerah	-1125882563

kekeringan masuk kedalam kategori sedang dengan luas total 50664,14 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan.

Untuk capaian eksisting terkait dengan Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana di Kota Balikpapan pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.773.383.000,- untuk itu sesuai dengan Target dari Perpres 59/2017 yaitu menurun, maka Proyeksi BAU dilakukan dengan upaya

tambahan.



Proyeksi BAU (11.5.2(a))

**Gambar 6.33 Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana**

Dibawah ini merupakan rekomendasi arah kebijakan TPB 11 di Kota Balikpapan.





**Tabel VI.22 Rekomendasi Arah Kebijakan TPB 11**

NO. TPB	NO. TARGET	TARGET	ARAH KEBIJAKAN
11	11,2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	Menyediakan akses sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan serta meningkatkan keselamatan lalu lintas dan aksesibilitas terhadap semua pengguna
	11,3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	Memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan
	11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi yang disebabkan oleh bencana

Sumber : Hasil Analisis, 2023

### 6.1.12 Skenario Pencapaian Target TPB 15 Ekosistem Darat

Target yang menjadi isu pada TPB 15 di Kota Balikpapan yaitu Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional dan Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.

**Tabel VI.23 Gap/Masalah TPB 15 Ekosistem Darat di Kota Balikpapan**

TARGET YANG MENJADI ISU	GAP/ MASALAH	KETERANGAN CAPAIAN
<b>15.1</b> Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	<b>15.1.1 (a)</b> Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)
<b>15.3</b> Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	<b>15.3.1 (a)</b> Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Tidak Tersedia Data (NA)

Sumber : Hasil Analisis, 2023



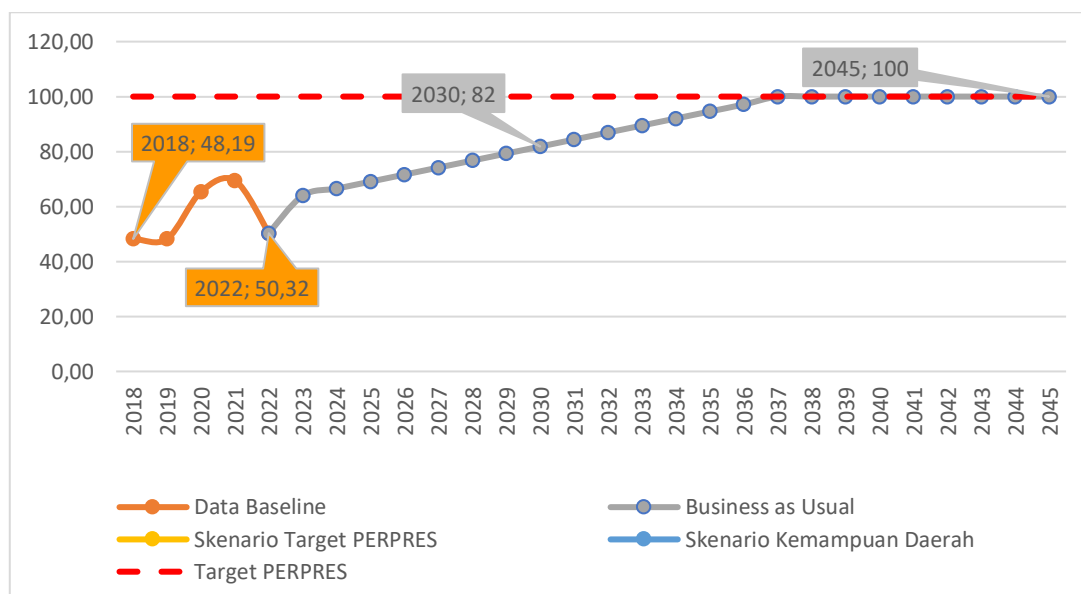
Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam di Kota Balikpapan untuk Luasan terbesar pada EF Penyedia Pangan di Kota Balikpapan berada di Kecamatan Balikpapan Barat total 95,02%, Luasan total EF Penyedia Air di Kota Balikpapan sebesar 71,26%, nilai ini merata diseluruh wilayah Kota Balikpapan dan Luasan terbesar pada EF Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Balikpapan berada di Kecamatan Balikpapan Timut dengan total 89,21%.

Jasa lingkungan keanekaragaman hayati di Kota Balikpapan 48% berada pada kategori sangat tinggi, 18% tinggi, 3 % sedang dan 31 % rendah. Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Biodiversitas di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa lingkungan Sangat tinggi dengan total luas sebesar 24.582,56 Ha. Di Kota Balikpapan ada keanekaragaman hayati baik flora dan fauna seperti orang utan, burung sumatera-kalimantan dan biota laut seperti penyu lelang.

Kerentanan adaptasi perubahan iklim atau biasa disebut dengan kerentanan SIDIK di Kota Balikpapan berada pada kategori Sangat rendah dengan sebaran Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Selatan, Balikpapan Tengah, Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara sedangkan kategori rendah berada di Kecamatan Balikpapan Kota.

JENIS URUSAN	LINGKUNGAN
NO. INDIKATOR	15.1.1.(a)
INDIKATOR TPB	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Meningkat
Nilai Target	100
Gap (Realisasi-Target)	50
Gap Kemampuan Daerah	21

Untuk gap/masalah Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan di Kota Balikpapan dilihat dari capaian eksisting yaitu sebesar 50,32% atau ada Gap (Realisasi - Target) sebesar 50% dari Target Perpres 59/2017, namun untuk meningkatkan sesuai dengan target dari Perpres 59/2017, proyeksi BAU dilakukan tanpa upaya tambahan.



Proyeksi BAU (15.1.1(a))

**Gambar 6.34 Proporsi Tutupan Hutan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan**

Dibawah ini merupakan rekomendasi arah kebijakan TPB 15 di Kota Balikpapan.



**Tabel VI.24 Rekomendasi Arah Kebijakan TPB 15**

NO. TPB	NO. TARGET	TARGET	ARAH KEBIJAKAN
15	15,1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya
	15,3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	Memulihkan lahan kritis dan lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir

Sumber : Hasil Analisis, 2023

### 6.1.13 Skenario Pencapaian Target TPB 16 Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan Tangguh

Target yang menjadi isu TPB 16 di Kota Balikpapan yaitu Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun, Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak, Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak, dan Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

**Tabel VI.25 Gap/Masalah TPB 16 Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan Tangguh di Kota Balikpapan**

TARGET YANG MENJADI ISU	GAP/ MASALAH	KETERANGAN CAPAIAN
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.2 (a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Tidak Tersedia Data (NA)
	16.1.3 (a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Tidak Tersedia Data (NA)
	16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Tidak Tersedia Data (NA)
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Tidak Tersedia Data (NA)
	16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Tidak Tersedia Data (NA)
16.5 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi,	16.5.1 (a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Tidak Tersedia Data (NA)

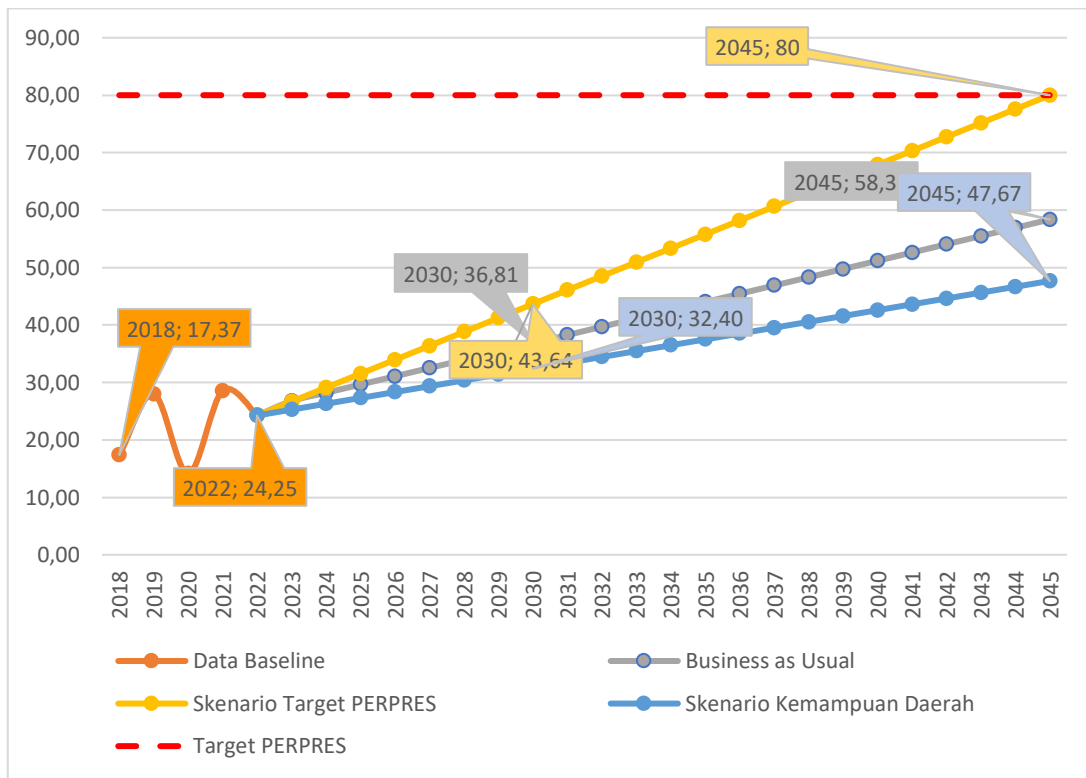


TARGET YANG MENJADI ISU	GAP/ MASALAH	KETERANGAN CAPAIAN
perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.		
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Tidak Tersedia Data (NA)
	16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional (SB)

Sumber : Hasil Analisis, 2023

JENIS URUSAN	HUKUM & TATA KELOLA
NO. INDIKATOR	16.6.1.(c)
INDIKATOR TPB	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.
Sumber Data	Sekretariat Daerah (Bagian PBJ)
TARGET (PERPRES 59/2017)	Menjadi menjadi 80%
Nilai Target	80
Gap (Realisasi-Target)	56
Gap Kemampuan Daerah	23

Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan di Kota Balikpapan capaian eksistingnya yaitu sebesar 24,25 % atau dapat dikatakan masih jauh dari target Perpres 59/2017 yaitu sebesar 80%, untuk itu harus ditingkatkan maka Proyeksi BAU dilakukan perlu upaya tambahan.



Proyeksi BAU (16.6.1(c))

Gambar 6.35 Persentase Penggunaan E-Procurement Terhadap Belanja Pengadaan

Dibawah ini merupakan rekomendasi arah kebijakan TPB 16 di Kota Balikpapan.



**Tabel VI.26 Rekomendasi Arah Kebijakan TPB 16**

NO. TPB	NO. TARGET	TARGET	ARAH KEBIJAKAN
16	16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan
	16,2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	Menghentikan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.
	16,5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	Mengurangi segala bentuk korupsi dan penyuapan
	16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan

Sumber : Hasil Analisis, 2023



## 6.2 REKOMENDASI TUJUAN PEMBANGUNAN PRIORITAS DI KOTA BALIKPAPAN

Dengan melihat skenario pencapaian TPB di Kota Balikpapan maka rekomendasi sasaran Pokok dan Arah Kebijakan pada RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2045 yang disesuaikan dengan isu strategis dapat dilihat pada Tabel IV.12 dibawah ini.

**Tabel VI.27 Rekomendasi Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2045**

ISU STRATEGIS	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE IMPLEMENTASI			
			PERIODE 1	PERIODE 2	PERIODE 3	PERIODE 4
<b>Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan</b>	Mewujudkan Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik				
		Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi				
		Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah				
		Mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.				
		Mendorong transisi perekonomian berbasis pertumbuhan ekonomi hijau				
		Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.				
		Meningkatkan akses teknologi informasi dan komunikasi				



ISU STRATEGIS	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE IMPLEMENTASI			
			PERIODE 1	PERIODE 2	PERIODE 3	PERIODE 4
	Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah dan perekonomian berbasis potensi daerah disertai pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang.	Melaksanakan kebijakan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal				
		Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah terutama logistic dan infrastruktur pendukung untuk pengentasan kemiskinan melalui budidaya komoditas unggulan				
		Mendorong investasi pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang				
		Mendorong Kerjasama pendanaan pembangunan alternatif berbasis lingkungan				
		Pengelolaan potensi wilayah pesisir yang adaptif terhadap kerentanan perubahan iklim				
		Mendorong inovasi dan riset untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing				
		Memastikan aksesibilitas peningkatan perekonomian melalui usaha ekonomi kelas kecil dan menengah				
		Pengembangan Industri Hijau dan berkelanjutan				
<b>Pembangunan Kota Nyaman Huni Dan Kesiapan Sebagai Mitra IKN</b>	Pengembangan Pembangunan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan	Menyediakan akses sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan serta meningkatkan keselamatan lalu lintas dan aksesibilitas terhadap semua pengguna				



ISU STRATEGIS	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE IMPLEMENTASI			
			PERIODE 1	PERIODE 2	PERIODE 3	PERIODE 4
		Memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan				
		Mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi yang disebabkan oleh bencana				
		Menjamin mobilisasi untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik				
		Meningkatkan Pengelolaan Sampah yang berkelanjutan dan sirkular				
<b>Penguatan Daya Saing SDM Dan Perlindungan Social</b>	Mewujudkan SDM yang Unggul sebagai salah satu kunci transformasi social dan ekonomi	Menjamin masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.				
		membangun ketahanan masyarakat miskin dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.				
		Meningkatkan Kualitas SDM di bidang social dan ekonomi				
		Perlindungan dan jaminan sosial yang berkeadilan				





ISU STRATEGIS	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE IMPLEMENTASI			
			PERIODE 1	PERIODE 2	PERIODE 3	PERIODE 4
	Meningkatkan perlindungan, pemberdayaan dan perlindungan anak Upaya social, Perempuan dan perlindungan anak	Menerapkan sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua				
		Memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, tanpa melihat status apapun				
		Mengadopsi kebijakan dan perlindungan sosial untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar				
		Menghentikan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.				
		Mengakhiri diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.				
		Menghapuskan segala bentuk kekerasan, perdagangan maunusia, eksploitasi terhadap perempuan				
		Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa.				
<b>Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan adaptif berbasis teknologi.</b>	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan				
		Mengurangi segala bentuk korupsi dan penyuapan				
		Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan				
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
		Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia				



ISU STRATEGIS	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE IMPLEMENTASI			
			PERIODE 1	PERIODE 2	PERIODE 3	PERIODE 4
		Mendorong keuangan daerah yang mandiri melalui optimalisasi kerjasama dengan stakeholder dalam pembangunan berkelanjutan dan pendanaan pembangunan				
		Tata kelola pemerintahan yang dinamis, responsif, transparan, akuntabel dan adaptif berbasis teknologi				
		Meningkatkan kerjasama antara wilayah/ daerah				
		Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.				
		Meningkatkan kerjasama dalam sains, teknologi, inovasi, serta berbagi pengetahuan dengan meningkatkan koordinasi yang lebih baik.				
		Mengopersionalisasikan penggunaan teknologi dan sains, mekanisme pembangunan teknologi dan inovasi, dan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi				
		Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif				
<b>Pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup</b>	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup				
		Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya				



ISU STRATEGIS	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE IMPLEMENTASI			
			PERIODE 1	PERIODE 2	PERIODE 3	PERIODE 4
	Mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berketahanan iklim dan rendah karbon berbasis bentang lahan yang inklusif, adaptif, dan menyejahterakan masyarakat	Memulihkan lahan kritis dan lahan yang terkena pengurangan, kekeringan dan banjir				
		Peningkatan pelibatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat local dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan				
		Perlindungan terhadap pemanfaatan ruang pada Kawasan lindung dan budidaya				
		Peningkatan kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta berketahanan bencana.				
		Menjadikan daya dukung dan daya tampung sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah				
		Mengendalikan alih fungsi lahan dan mempertahankan ekosistem alami.				
		Meningkatkan perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil dari bencana pesisir.				
		Pengembangan solusi berbasis alam dalam mitigasi dan adaptasi bencana serta pengelolaan lingkungan hidup.				
		Pengembangan pertanian berbasis teknologi yang ramah lingkungan.				
		Perlindungan lingkungan di ekosistem darat dan laut.				



ISU STRATEGIS	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE IMPLEMENTASI			
			PERIODE 1	PERIODE 2	PERIODE 3	PERIODE 4
<b>Pelayanan Kesehatan, Kesejahteraan, Pendidikan Berkualitas dan Kesetaraan Gender.</b>	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Mengurangi angka kematian dini akibat penyakit tidak menular; meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.				
		Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat yang membahayakan				
		Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control				
		Mencapai cakupan kesehatan termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan serta vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau				
		Mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.				
	Mewujudkan pelayanan kesehatan, Kesejahteraan, Pendidikan Berkualitas yang bermutu, merata, terjangkau dan berkeadilan	Terjaminnya akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi Dengan Optimalisasi peran stakeholder dalam upaya promosi Kespro (Kesehatan Reproduksi),				
		Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan masyarakat yang inklusif				
		Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM kesehatan				





ISU STRATEGIS	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE IMPLEMENTASI			
			PERIODE 1	PERIODE 2	PERIODE 3	PERIODE 4
		Peningkatan aksesibilitas keterjangkauan sektor pembangunan				
		Penguatan Upaya promotif dan preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat				
		Meningkatkan kolaborasi atau sinergitas antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan				
		Penuntasan Stunting dengan Pemenuhan kebutuhan gizi dan kualitas konsumsi pangan untuk masyarakat				
		Peningkatan kualitas pendidikan sekolah dasar dan menengah melalui pengelolaan pendidikan agar sesuai standar nasional dan pengembangan kurikulum				
		Penganggaran dan prosedur pemberian bantuan biaya Pendidikan (Pengelolaan dan koordinasi dalam pemberian bantuan biaya pendidikan khususnya bagi siswa yang kurang mampu dan berpotensi putus sekolah akibat kesulitan biaya sekolah)				
		Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha melalui upaya terkoordinasi yang tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu agar dapat menyelesaikan tingkat pendidikan dasar dan menengah secara tuntas				



ISU STRATEGIS	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE IMPLEMENTASI			
			PERIODE 1	PERIODE 2	PERIODE 3	PERIODE 4
		Menjamin bahwa semua anak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas				
		Menjamin semua anak untuk mendapatkan akses terhadap perkembangan dan pengasuhan serta pendidikan pra sekolah, sehingga siap menembuh pendidikan dasar				
		Membangun dan meningkatkan fasilitas yang ramah, aman, inklusif dan efektif bagi semua				
	Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Keluarga Berencana menuju Masyarakat Sejahtera	Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi				
		Penguatan kebijakan dan Pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial				
		Penguatan kualitas keluarga berencana				
<b>Pemenuhan Akses Air Minum Dan Sanitasi Yang Aman Dan Berkelanjutan Sesuai Dengan Karakteristik Wilayah</b>	Terwujudnya Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah	Mencapai akses terhadap air minum yang aman dan terjangkau				
		Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata				
		Meningkatkan efisiensi penggunaan air dan menjamin penggunaan dan pasokan air yang berkelanjutan				
		Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu				
		Peningkatan kualitas lingkungan hidup				



ISU STRATEGIS	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE IMPLEMENTASI			
			PERIODE 1	PERIODE 2	PERIODE 3	PERIODE 4
		Peningkatan akses terhadap sanitasi yang layak, aman, merata dan berkelanjutan.				
		Mengendalikan sumber pencemar di sekitar sumber air baku permukaan kota (Waduk Manggar, Waduk Teritip, Rencana Embung Aji Raden, dll)				
		Pengelolaan persampahan yang terpadu dan berwawasan lingkungan dengan memenuhi asas tanggung jawab manfaat keadilan kesadaran kebencanaan keselamatan keamanan dan nilai ekonomi				
<b>Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim</b>	Mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berketahanan iklim dan rendah karbon berbasis bentang lahan yang inklusif, adaptif, dan menyejahterakan masyarakat	Peningkatan kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta berketahanan bencana.				
		Menjadikan daya dukung dan daya tampung sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah				
		Mengendalikan alih fungsi lahan dan mempertahankan ekosistem alami.				
		Meningkatkan perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil dari bencana pesisir.				
		Pengembangan solusi berbasis alam dalam mitigasi dan adaptasi bencana serta pengelolaan lingkungan hidup.				



ISU STRATEGIS	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE IMPLEMENTASI			
			PERIODE 1	PERIODE 2	PERIODE 3	PERIODE 4
		Pengembangan pertanian berbasis teknologi yang ramah lingkungan.				
		Perlindungan lingkungan di ekosistem darat dan laut.				
		Mewujudkan transformasi energi				
	Mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berketahanan iklim dan rendah karbon berbasis bentang lahan yang inklusif, adaptif, dan menyejahterakan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan resiliensi sektor ekonomi unggulan terhadap dampak perubahan iklim</li> <li>▪ Mengembangkan opsi insentif terhadap sektor perekonomian unggulan yang rendah karbon</li> <li>▪ Meningkatkan perlindungan terhadap alih fungsi lahan pada daerah lindung dan lahan kritis</li> <li>▪ Meningkatkan kapasitas adaptasi dan keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</li> <li>▪ Meningkatkan ketahanan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui solusi berbasis alam</li> </ul>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melindungi flora dan fauna endemik melalui rehabilitasi dan perlindungan habitat</li> <li>▪ Transisi sektor ekonomi ekstraktif dan polutif menuju ekonomi hijau</li> <li>▪ Menahan laju deforestasi, terutama pada wilayah pesisir dan lahan kritis</li> <li>▪ Reforestasi dan rehabilitasi kawasan hutan dan lindung</li> </ul>				





ISU STRATEGIS	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE IMPLEMENTASI			
			PERIODE 1	PERIODE 2	PERIODE 3	PERIODE 4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan resiliensi sektor ekonomi unggulan berbasis alam terhadap perubahan iklim</li> <li>▪ Mendorong intensifikasi guna meningkatkan produktivitas dan daya saing komoditas unggulan</li> <li>▪ Mendorong hilirisasi dan diversifikasi komoditas unggulan</li> <li>▪ Meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan bentang lahan secara inklusif</li> <li>▪ Mendorong pengelolaan persampahan secara berkelanjutan dan sirkuler</li> <li>▪ Memperbaiki kualitas dan kuantitas sumber daya air</li> </ul>				
<b>Kecukupan, keamanan, dan pemanfaatan pangan</b>	Mewujudkan Ketahanan Pangan berbasis keamanan dan kemandirian pangan yang tangguh dan berkelanjutan	Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.				
		Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.				
		Meningkatkan ketersediaan, distribusi dan akses pangan Masyarakat				
		Meningkatkan kualitas keamanan pangan dan diversifikasi pangan Masyarakat				



ISU STRATEGIS	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN	PERIODE IMPLEMENTASI			
			PERIODE 1	PERIODE 2	PERIODE 3	PERIODE 4
		Pemenuhan kebutuhan gizi dan kualitas konsumsi pangan untuk masyarakat				
		Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas jasa ekosistem air				
		Meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan bergizi, pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih				
		Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian				
		Optimalisasi Gerakan edukasi dan pemberian pangan bergizi				
		Mengoptimalkan Gerakan Makan Ikan (GEMARIN) untuk peningkatan asupan gizi dengan sasaran baduta dan balita serta ibu hamil,				
		Mendorong pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga,				
		Optimalisasi sektor pertanian dan perikanan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan				
		Meningkatkan diversifikasi produk pertanian dan perikanan,				
		Meningkatkan Sinergitas dan Kolaborasi antar pemangku kepentingan				

Sumber : Hasil Analisis, 2023



### 6.3 ARAH KEBIJAKAN RPJPD KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 - 2045

Dengan mempertimbangkan skenario pencapaian TPB dan arahan rekomendasi maka rekomendasi kata kunci visi Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2045 adalah sebagai berikut :

- ✚ Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif dan Berkelanjutan
- ✚ Infrastruktur Tangguh, Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
- ✚ Kolaborasi untuk mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan
- ✚ Ketahanan bencana, pangan, air, energi

Rekomendasi untuk penyusunan Misi RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2045:

#### 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas

Sementara itu *The United Nations Development Program* (UNDP, 1997) mendefinisikan tata kelola pemerintahan sebagai: Pelaksanaan kewenangan ekonomi, politik, dan administratif untuk menangani persoalan suatu negara dalam setiap tingkatan.

Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Untuk itu Tata Kelola Pemerintah Kota Balikpapan harus bersih, transparan dan Akuntabel.

#### 2) Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing

SDM unggul merujuk pada sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang luar biasa. Ini dapat dilihat dari sejumlah faktor, termasuk pendidikan, pengalaman, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan bekerja dalam tim, Untuk menuju Indonesia Emas 2045 diharapkan SDM di Kota Balikpapan unggul dan berdaya saing.

#### 3) Mewujudkan masyarakat sehat, sejahtera, berkualitas, dan berkehidupan yang layak

#### 4) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Pertumbuhan penduduk yang terus-terus meningkat dikarenakan semakin tinggi data tarik kota tersebut, terutama apabila dilihat dari sektor ekonomi. Hal ini tentu saja meningkatkan akan tata ruang dan perencanaan kota, untuk fasilitas perumahan, ruang terbuka hijau, aktifitas perdagangan, jasa, dan lain sebagainya. Hal ini yang menyebabkan persaingan pemanfaatan ruang, apalagi di kawasan yang memang sudah berkembang, persaingan akan lebih semakin ketat.

#### 5) Mewujudkan berketahanan pangan, air, energi, dan bencana

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi



manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah “kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.

UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (food sovereignty) dengan kemandirian pangan (food resilience) serta keamanan pangan (food safety). “Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”.

“Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat”. “Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”.

Untuk itu Kota Balikpapan diharapkan sampai dengan Tahun 2045 untuk menjadi salah satu kabupaten yang memiliki ketahanan pangan.

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat kerawanan Bencana paling tinggi di Dunia, nyaris semua bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim dan alam terjadi di belahan wilayah Indonesia. Semua peristiwa bencana yang menimpa tersebut telah mengubah pola pikir untuk upaya antisipasi awal, dengan mitigasi bencana, kesiapsiagaannya, dari pemerintah pusat sampai daerah sigap menghadapi setiap bencana, sehingga menjadikan Indonesia sebagai tempat laboratorium bagi dunia untuk belajar menghadapi dan menangani bencana.

Indonesia saat ini, menjadi urutan ke 14 di dunia yang memiliki resiko akibat perubahan iklim, permukaan air laut saat ini meningkat dibanding 20 tahun yang lalu, hal yang sama terjadi pada terumbu karang, kebanyakan terumbu mengalami penurunan tumbuh dan memutih, menyebabkan kehidupan air laut terganggu terutama ikan, berkurang drastis.

Untuk itu rawan bencana dan perubahan iklim di Kota Balikpapan harus menjadi perhatian serius pemerintah, untuk mengantisipasi atau mitigasi penanganan



harus disiapkan di masyarakat diberikan pemahaman terkait dengan rawan bencana dan perubahan iklim di Kota Balikpapan.

#### **6) Meningkatkan kemandirian ekonomi dan daya saing daerah**

Transformasi struktural didefinisikan sebagai perubahan struktur ekonomi dari sektor tradisional yang memiliki produktivitas rendah menuju sektor ekonomi dengan produktivitas tinggi.

Rencana pembangunan di Kota Balikpapan sampai dengan Tahun 2045 berfokus pada:

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing
- 2) Mewujudkan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas
- 3) Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas
- 4) Mewujudkan ruang investasi menuju pertumbuhan ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas
- 6) Mewujudkan pemerataan Pembangunan yang berkualitas;
- 7) Mewujudkan Ketahanan energi, air, bencana dan pangan
- 8) Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
- 9) Mewujudkan Kerukunan, Ketentraman, ketertiban dan Kenyamanan







# BAB 7

## KESIMPULAN



## 7.1 KESIMPULAN

Kesimpulan dari KLHS RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

### 1. Hasil Analisis Daya Dukung Daya Tampung Kota Balikpapan

#### a) Daya Dukung Daya Tampung Pangan

Daya dukung pangan di Kota Balikpapan 81% belum melampaui dan 19 sudah melampaui Kecamatan yang mempunyai status daya dukung pangan yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Selatan dengan luas 2.558,18 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 17.941,54 Ha.

Untuk ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kota Balikpapan yaitu Luasan Ketersediaan Pangan di Kota Balikpapan yaitu 916.178.290.606,89 Kkal / Tahun, untuk kebutuhan pangan 432.242.654.250,00 Kkal/Tahun.

Sedangkan untuk jasa lingkungan penyedia pangan di Kota Balikpapan 62 % masuk kedalam kategori tinggi, 26 % kategori sedang dengan Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Penyedia Pangan di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa tinggi dengan total luas sebesar 31.739,67 Ha.

Daya dukung daya tampung pangan di Kota Balikpapan akan sangat berpengaruh bagi TPB 2 Tanpa Kelaparan, TPB 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan

#### b) Daya Dukung Daya Tampung Air

Daya dukung air yang sudah melampaui sebesar 37% dan 63% belum melampaui dengan Kecamatan yang mempunyai status daya dukung Air yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas 5.945,92 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung air belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 16.728,04 Ha.

Untuk ketersediaan dan kebutuhan air di Kota Balikpapan dapat dilihat 524147443,9 m<sup>3</sup> / tahun merupakan ketersediaan air dan 525625678,16 m<sup>3</sup>/tahun merupakan kebutuhan air sehingga ada selisih sebesar -1478234,17 m<sup>3</sup>/tahun dengan ambang batas sebesar 652434,00 m<sup>3</sup>/tahun.

Sedangkan dilihat dari jasa lingkungan penyediaan air di Kota Balikpapan 60% masuk kedalam kategori sedang, 34% masuk kedalam kategori rendah sedangkan 5% masuk kedalam kategori rendah dan sangat rendah.

Untuk jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir di Kota Balikpapan dapat dilihat 47% masuk kedalam kategori rendah, dan 45% masuk kedalam kategori sedang dan 8% masuk kedalam kategori tinggi dan sangat tinggi. Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air Dan Banjir di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa lingkungan Rendah dengan total luas sebesar 23.790,89 Ha.

Daya Dukung daya tampung air di Kota Balikpapan akan sangat berpengaruh bagi TPB 1 Menghapus Kemiskinan, TPB 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan



**c) JE Pengaturan Iklim, JE Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam, Timbulan Sampah, Timbulan Tinja, Rawan Bencana serta Beban Pencemar di Kota Balikpapan**

Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim dapat dilihat 49% masuk kedalam kategori sangat tinggi, 30% kategori tinggi, 30% kategori sedang dan 20% rendah. Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa sangat tinggi dengan total luas sebesar 24.977,03 Ha.

jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam dapat dilihat 51% sangat tinggi, 19% tinggi, 11% sedang, dan 19% rendah. Luasan terbesar pada Jasa Lingkungan Pencegahan Dan Perlindungan Dari Bencana Alam di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa lingkungan Sangat tinggi dengan total luas sebesar 26.110,44 Ha.

Timbulan Sampah dan Timbulan tinja, untuk timbulan sampah yaitu sebesar 502607,74 m<sup>3</sup> / tahun dan untuk timbulan tinja sebesar 100521,55 m<sup>3</sup>/Tahun.

Beban pencemar BOD di Kota Balikpapan yaitu sebesar 26758,59 Kg/hari, COD sebesar 30364,12 Kg/hari dan TSS sebesar 21026,16 Kg/hari.

Rawan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan masuk kedalam kategori sedang sebesar 39847,87 Ha, Bahaya Cuaca Ekstrim masuk kedalam kategori sedang seluas 50849,25 Ha, Bahaya Gempa Bumi masuk kedalam kategori rendah, bahaya tsunami rendah dengan luas 46,25 ha yang tersebar di Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Kota, Balikpapan Tengah dan Balikpapan Timur sedangkan untuk bahaya tsunami sedang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan dengan luas 6,67 Ha. Bahaya longsor di Kota Balikpapan masuk kedalam kategori rendah dan sedang yang tersebar diseluruh kecamatan, bahaya banjir di Kota Balikpapan berada pada kategori rendah, sedang dan tinggi dengan luas total sebesar 12243,26 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan, bahaya gelombang ekstrim dan abrasi masuk kedalam kategori sedang dengan luas total 1313,60 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan dan bahaya kekeringan masuk kedalam kategori sedang dengan luas total 50664,14 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Balikpapan.

TPB yang sangat berkaitan dengan hal ini yaitu TPB 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan

**d) Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam, JE Keanekaragaman Hayati, dan Kerentanan Adaptasi Perubahan Iklim**

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam di Kota Balikpapan untuk Luasan terbesar pada EF Penyedia Pangan di Kota Balikpapan berada di Kecamatan Balikpapan Barat total 95,02%, Luasan total EF Penyedia Air di Kota Balikpapan sebesar 71,26%, nilai ini merata diseluruh wilayah Kota Balikpapan dan Luasan terbesar pada EF Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Balikpapan berada di Kecamatan Balikpapan Timut dengan total 89,21%.

Jasa lingkungan keanekaragaman hayati di Kota Balikpapan 48% berada pada kategori sangat tinggi, 18% tinggi, 3 % sedang dan 31 % rendah. Luasan



terbesar pada Jasa Lingkungan Biodiversitas di Kota Balikpapan berada pada kelas jasa lingkungan Sangat tinggi dengan total luas sebesar 24.582,56 Ha. Di Kota Balikpapan ada keanekaragaman hayati baik flora dan fauna seperti orang utan, burung sumatera-kalimantan dan biota laut seperti penyu lekang.

Kerentanan adaptasi perubahan iklim atau biasa disebut dengan kerentanan SIDIK di Kota Balikpapan berada pada kategori Sangat rendah dengan sebaran Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Selatan, Balikpapan Tengah, Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara sedangkan kategori rendah berada di Kecamatan Balikpapan Kota.

TPB yang sangat berkaitan dengan hal ini yaitu TPB 15 Ekosistem Darat.

## 2. Hasil Analisis Capaian Indikator

Dari hasil analisis terdapat 57% dari 195 indikator TPB di Kota Balikpapan yang telah mencapai target nasional pada tahun 2022. Untuk TPB yang sudah dilaksanakan belum mencapai target nasional di Kota Balikpapan sebesar 18% dan 1% untuk TPB yang belum dilaksanakan serta 24% TPB yang tidak ada data.

### a) Capaian Target Indikator Pilar Sosial

Terdapat 5 TPB yang termasuk dalam pilar sosial, yaitu TPB 1 (Tanpa Kemiskinan), TPB 2 (Tanpa Kelaparan), TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), TPB 4 (Pendidikan Berkualitas), dan TPB 5 (Kesetaraan Gender). Kelima TPB dalam pilar sosial tersebut terdiri dari 90 indikator yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan, sebagian besar indikator TPB Pilar Sosial di Kota Balikpapan telah mencapai target nasional, yaitu sebesar 61,11 % telah mencapai target nasional, 20% sudah dilaksanakan belum mencapai target nasional, 1,11% belum dilaksanakan dan 17,78% tidak ada data. Indikator TPB Pilar Sosial **yang belum mencapai target nasional dan belum dilaksanakan dan tidak ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kota Balikpapan.**

### b) Capaian Target Indikator Pilar Ekonomi

Terdapat 5 TPB yang termasuk dalam pilar ekonomi, yaitu TPB 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), TPB 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan), dan TPB 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Jumlah indikator TPB dalam Pilar Ekonomi yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan berjumlah 48 indikator, sebagian besar indikator TPB Pilar Ekonomi di Kota Balikpapan telah mencapai target nasional, yaitu sebesar 54,17% telah mencapai target nasional, 20,83% sudah dilaksanakan belum mencapai target nasional, dan 25% tidak ada data. Indikator TPB Pilar Ekonomi **yang belum mencapai target nasional dan tidak ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kota Balikpapan.**

### c) Capaian Target Indikator Pilar Lingkungan Hidup

Terdapat 6 TPB yang termasuk dalam pilar lingkungan hidup, yaitu TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), TPB, 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), TPB 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim), TPB 14 (Ekosistem Lautan), dan TPB 15



(Ekosistem Daratan). Namun, TPB 14 tidak menjadi kewenangan Kota Balikpapan, melainkan merupakan kewenangan provinsi sehingga indikatornya tidak diperhitungkan dalam analisis ini. Kelima TPB dalam pilar lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan terdiri dari 37 indikator, sebagian besar indikator TPB Pilar Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan telah mencapai target nasional, yaitu sebesar 48,65% telah mencapai target nasional, 16,22% sudah dilaksanakan belum mencapai target nasional, dan 35,14% tidak ada data. Indikator TPB Pilar Lingkungan Hidup **yang belum mencapai target nasional dan tidak ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kota Balikpapan.**

#### d) Capaian Target Indikator Pilar Hukum dan Tata Kelola

TPB 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) merupakan satu-satunya TPB yang termasuk dalam pilar hukum dan tata kelola kelembagaan. TPB 16 ini terdiri dari 20 indikator, sebagian besar indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola di Kota Balikpapan telah mencapai target nasional, yaitu sebesar 60% telah mencapai target nasional, 5% sudah dilaksanakan belum mencapai target nasional, 5% belum dilaksanakan dan 30% tidak ada data. Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola **yang belum mencapai target nasional dan tidak ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kota Balikpapan.**

### 3. Hasil Analisis Capaian OPD Terhadap Indikator TPB

Untuk capaian OPD terhadap indikator TPB dimana ada 24 OPD dilingkungan Kota Balikpapan yang berkaitan erat dengan TPB. Dari 24 OPD tersebut bila bagi kedalam Indikator TPB per Pilar adalah sebagai berikut :

- a) Pilar Ekonomi dengan jumlah indikator 48 serta OPD yang terlibat yaitu 14 OPD;
- b) Pilar Sosial dengan jumlah indikator 90 serta OPD yang terlibat yaitu 11 OPD;
- c) Pilar Lingkungan Hidup dengan jumlah indikator 37 serta OPD yang terlibat yaitu 9 OPD;
- d) Pilar Hukum dan Tata Kelola dengan jumlah indikator 20 serta OPD yang terlibat yaitu 8 OPD.

Bila dilihat dari capaian indikator TPB pada setiap OPD yaitu 111 indikator sudah dilaksanakan dan telah mencapai target, 35 indikator sudah dilaksanakan belum mencapai target, 2 belum dilaksanakan dan belum mencapai target, serta 47 tidak ada data.

### 4. Hasil Penilaian TPB Prioritas

Berdasarkan data yang diperoleh, pengolahan, dan analisis, kondisi capaian indikator TPB di Kota Balikpapan menunjukkan bahwa 57% indikator yang sudah dilakukan dan telah mencapai target nasional; 18% indikator sudah dilakukan namun belum mencapai target nasional; 1% indikator yang belum dilaksanakan; dan 24% indikator yang tidak tersedia datanya. Kondisi capaian indikator tersebut kemudian dianalisis bersama dengan isu dari muatan lingkungan hidup dan isu dari rancangan RPJPD, dan didiskusikan bersama hingga diperoleh kesepakatan dalam penentuan isu prioritas di Kota Balikpapan, yaitu:





- TPB 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun.
- TPB 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan;
- TPB 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia;
- TPB 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua;
- TPB 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan;
- TPB 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan;
- TPB 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua;
- TPB 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi;
- TPB 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
- TPB 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
- TPB 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

## 7.2 REKOMENDASI

Dibawah ini merupakan rekomendasi kepada pemerintah Kota Balikpapan.

### 1. Rekomendasi Berdasarkan Capaian TPB

- Untuk indikator TPB yang memiliki data dan sudah tercapai, maka diharapkan dapat mempertahankan capaian dan mengembangkannya (business as usual) sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Artinya, indikator ini tidak perlu upaya tambahan untuk mencapai Target.
- Untuk indikator TPB yang memiliki data dan belum tercapai, maka perlu dilakukan upaya melalui rekomendasi arah kebijakan dan sasaran pokok yang nantinya di turunkan kepada program-program, program dari rencana program OPD yang sesuai. Artinya, indikator ini perlu upaya tambahan untuk mencapai Target.
- Untuk indikator TPB yang belum/tidak memiliki data, maka direkomendasikan untuk dilakukan kegiatan pengumpulan data yang sesuai dengan indikator TPB (termasuk disagregasinya). Artinya, indikator ini perlu upaya intervensi untuk mencapai Target.



- Untuk indikator TPB yang belum/tidak memiliki data, maka direkomendasikan untuk dilakukan kegiatan pengumpulan data yang sesuai dengan indikator TPB (termasuk disagregasinya). Artinya, indikator ini perlu upaya intervensi untuk mencapai Target.

## 2. Rekomendasi Secara Keseluruhan

- Perlunya inventarisasi (pengarsipan) data yang rapi, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan khususnya untuk diintegrasikan indikator TPB. Pengarsipan dengan sistem satu data ini diharapkan dapat mempermudah pengguna untuk mendapatkan data yang kredibel.
- Perlunya pendataan berupa identifikasi lokasi, jumlah, maupun satuan lainnya sesuai dengan indikator TPB untuk indikator TPB yang belum ada data dan TPB yang belum tercapai untuk mendapatkan pembaruan data.
- Perlunya memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh bantuan mitra pemerintah melalui program-program yang mendukung percepatan tercapainya indikator TPB.
- Pemerintah daerah diharapkan dapat menginventaris program/kegiatan non pemerintah (mitra pemerintah) seperti NGO, organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya khususnya yang terkait dengan TPB agar kegiatan tersebut dapat terukur dan terhimpun dalam capaian TPB daerah. Hal ini juga dapat bermanfaat sebagai gambaran proporsi bantuan yang diterima pemerintah daerah apabila masih memerlukan kerja sama dengan pihak tersebut.
- Perlunya Penyusunan RAD SDGs sebagai bahan monitoring dan rencana aksi setiap target.

